



LAPORAN PENELITIAN SMERU No. 1

KELUAR DARI KEMISKINAN DI TIMOR BARAT: MEMAHAMI MOBILITAS SOSIAL DAN DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH YANG TERKENA KONFLIK

Ruly Marianti dan Rizki Fillaili

LAPORAN PENELITIAN SMERU No. 1

KELUAR DARI KEMISKINAN DI TIMOR BARAT:
MEMAHAMI MOBILITAS SOSIAL DAN DINAMIKA
KEMISKINAN DI WILAYAH YANG TERKENA KONFLIK

Ruly Marianti

Rizki Fillaili

Editor

Justin Sodo

The SMERU Research Institute

September 2022

Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik

Penulis: Ruly Marianti, Rizki Fillaili

Editor: Justin Sodo

Foto Sampul: SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Marianti, Ruly

Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik/Ruly Marianti dan Rizki Fillaili. -- Jakarta: The SMERU Research Institute. 2022

142 p. ; 30 cm. -- (Laporan Penelitian SMERU, September 2022)

ISBN 978-979-3872-61-2

1. Kemiskinan

I. SMERU

II. Fillaili, Rizki

362.5/DDC 21

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia

Saran sitasi:

Marianti, Ruly dan Rizki Fillaili (2022) 'Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik.' Laporan Penelitian SMERU No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute. <URL> [tanggal akses].



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Tim Peneliti

Peneliti SMERU

Ruly Marianti (Ketua Tim Studi)

Rizki Fillaili

Akhmadi

Sulton Mawardi

Wawan Munawar

Peneliti Lapangan

Ari Ratna Kurniastuti

Didit Wicaksono

Khoirul Rosyadi

Heri Rubianto

Agustinus Mahur

Bernadinus Mere

Djifta A. Mooy

Esther H. Tode Natty

Harry D.J. Foenay

Herman Umbu Reda Zogara

Matheus Antonius Krivo

Nikolaus Serman

Nur Aini

Rowi Kaka Mone

Silas Saubaki

Thersia Ratu Nubi

Timoriyani Samauna

Tony Umbu Sunga

Yakomina W. Nguru

Yans A. Koliham

Ucapan Terima Kasih

Dalam acara perpisahan dengan warga desa di Kabupaten Belu, kepala dusun berkata kepada tim peneliti,

Sudah tiga minggu ini kami menceritakan naik turunnya kehidupan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Banyak yang sudah kami ceritakan. Kami belum pernah bercerita sebanyak itu sebelumnya. Kami ingin menitipkan cerita itu kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk dibawa ke Jakarta atau ke tempat lain yang lebih jauh. Beginilah kami. Semoga cerita itu bisa bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi kami sendiri.

Laporan ini adalah rangkaian dan analisis cerita perjalanan hidup masyarakat di lima komunitas di Timor Barat. Untuk itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di lima desa yang telah mengizinkan kami untuk belajar tentang berbagai aspek dari perjalanan hidup mereka.

Penghargaan dan rasa terima kasih juga ingin disampaikan kepada Mr. Patrick Barron dari Bank Dunia–Jakarta yang telah memberi kepercayaan kepada The SMERU Research Institute untuk melaksanakan penelitian yang sangat menantang ini. Selama pelaksanaan proyek, Mr. Patrick Barron selalu memberi keleluasaan bagi kami untuk mengembangkan ide-ide penelitian dan di sela-sela jadwalnya yang ketat tetap menyediakan waktu untuk menjadi mitra diskusi.

Sejak awal hingga akhir, kerja sama dalam tim peneliti MOP Timor Barat berjalan dengan baik dan sangat menyenangkan. Kami bangga dan bersyukur bisa melakukan semua tugas dalam suka duka bersama. Sulton Mawardi, Akhmadi, dan Wawan Munawar adalah rekan kerja antusias dan penuh humor sekalipun dalam situasi di mana terjadi perbedaan pendapat. Dalam studi lapangan, kami dibantu sepenuhnya oleh 20 peneliti dari Kupang, TTS, Belu, Sumba Barat, dan Jawa Timur. Sebagai peneliti mereka melakukan pengumpulan data dengan tangguh dan profesional, sekaligus menjadi teman-teman yang sangat menyenangkan.

Proyek MOP Timor Barat atau MOP II ini tidak bisa dilepaskan dari “kakaknya”, yaitu proyek MOP I yang dikoordinasi oleh Ibu Sri Kusumastuti Rahayu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kus untuk seluruh dukungan dan ide yang disampaikan secara formal maupun informal sehari-hari. Kami juga sangat menghargai dukungan dan supervisi dari pimpinan The SMERU Research Institute, Bapak Asep Suryahadi dan Bapak Sudarno Sumarto.

Pelaksanaan studi dan hasil pelaporannya juga sangat dibantu oleh rekan-rekan dari bagian publikasi, Justin Sodo, Liza Hadiz, dan Mona Sintia. Sekalipun kami bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan ini, kami tidak pernah sendiri dalam pekerjaan proyek ini. Pelaksanaan tugas dan penulisan laporan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan berbagai pihak tersebut.

Abstrak

Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik

Ruly Marianti dan Rizki Fillaili

Studi ini bertujuan untuk melihat dinamika kemiskinan di masyarakat Timor Barat dalam kurun waktu 1996–2006 melalui mobilitas kesejahteraan yang terjadi pada kelompok-kelompok di masyarakat. Dengan menggunakan kerangka interaksi antara struktur peluang (*opportunity structure*) dan kapasitas individu dan kolektif (*agency of the poor*), studi ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kesejahteraan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas, dan melihat mengapa dan bagaimana sekelompok masyarakat bisa keluar dari kemiskinan sementara kelompok lainnya justru jatuh atau terjatuh dalam kemiskinan.

Studi ini mengkaji dinamika kemiskinan dan mobilitas kesejahteraan di Timor Barat dengan meletakkannya dalam konteks keberadaan eks pengungsi Timor Leste di wilayah tersebut yang dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat lima desa yang menjadi lokasi penelitian yang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan kesejahteraan di setiap desa/komunitas. Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut ternyata tidak selalu diikuti dengan keberhasilan komunitas dan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan karena keberhasilan ini perlu ditunjang oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai, struktur peluang yang ada (seperti ketersediaan kesempatan kerja, keterbukaan, dan akses kepada informasi), dan kapasitas organisasi lokal.

Kata kunci: dinamika kemiskinan, mobilitas kesejahteraan, struktur dan agensi, daerah konflik, Timor Barat

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih | i

Abstrak | ii

Daftar Isi | iii

Daftar Tabel | v

Daftar Kotak | vi

Daftar Lampiran | vi

Daftar Singkatan dan Akronim | vii

Rangkuman Eksekutif | ix

- I. Studi tentang Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat | 1
 - 1.1 Latar Belakang dan Masalah Penelitian: Mobilitas Sosial, Dinamika Kemiskinan, dan Konflik | 1
 - 1.2 Fokus, Pertanyaan Penelitian, dan Proposisi | 3
 - 1.3 Metodologi Penelitian | 5
 - 1.4 Analisis | 8
 - 1.5 Struktur Laporan | 8
- II. Pendekatan Struktur–Agensi serta Hubungan antara Dinamika Kemiskinan dan Konflik: Sebuah Kerangka Analitis | 10
 - 2.1 Pendekatan Struktur–Agensi | 10
 - 2.2 Berbagai Perspektif tentang Hubungan Kausal antara Kemiskinan dan Konflik | 13
- III. Konteks Regional: Wilayah Timor Barat | 18
 - 3.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sampel | 18
 - 3.2 Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat | 21
 - 3.3 Potensi Konflik | 22
- IV. Konteks Lokal: Desa dan Komunitas | 26
 - 4.1 Kabupaten Kupang | 26
 - 4.2 Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32
 - 4.3 Kabupaten Belu | 45
- V. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Struktural | 61
 - 5.1 Pengantar | 61
 - 5.2 Stratifikasi Sosial dan Pola Hubungan di Antara Berbagai Golongan Masyarakat | 62
 - 5.3 Kesenjangan | 71
 - 5.4 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Lokal | 77
 - 5.5 Keberadaan Program Pembangunan dan Infrastruktur | 80
- VI. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Agensi | 87
 - 6.1 Pengantar | 87
 - 6.2 Pola dan Karakteristik Agensi: Perbandingan di Lima Komunitas | 89
 - 6.3 Agensi Individual dan Upaya Keluar dari Kemiskinan | 99

VII.	Memahami Aspek Gender dan Mobilitas Sosial Melalui Analisis Kepala Rumah Tangga	100
7.1	Aspek Gender, Analisis Kepala Rumah Tangga, dan Kemiskinan	100
7.2	Profil Demografis Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) dan Laki-Laki Kepala Rumah Tangga (LKRT)	103
7.3	Kondisi Ekonomi	104
7.4	Hubungan Sosial	105
7.5	Analisis Kepala Rumah Tangga dan Mobilitas Sosial	107
VIII.	Interaksi Antarfaktor: Apa Saja Jalan Keluar dari Kemiskinan?	109
8.1	Mobilitas Sosial-Ekonomi: Pengalaman Keluar dari Kemiskinan dan Penyebab Jatuh Miskin	109
8.2	Jebakan Kemiskinan dan Upaya Mempertahankan Kesejahteraan	113
IX.	Dinamika Kemiskinan dan Konflik: Bagaimana Keduanya Saling Terkait?	118
9.1	Memahami Potensi Konflik Lokal: Keberadaan Eks Pengungsi Timor Leste dan Kesejahteraan Komunitas Penerima	118
9.2	Kriminalitas dan Upaya Menjaga Keamanan Umum di Komunitas	119
9.3	Interaksi dan Konflik Antara Eks Pengungsi dan Warga Lokal	123
9.4	Akibat Konflik terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dan Komunitas	129
X.	Kesimpulan dan Rekomendasi	133
10.1	Kesimpulan	133
10.2	Rekomendasi	141
	Daftar Acuan	144
	Lampiran	147

Daftar Tabel

- Tabel 1. Karakteristik Lokasi Penelitian | 7
- Tabel 2. Metode Pengumpulan Data | 7
- Tabel 3. Gambaran Provinsi NTT dan Kabupaten Sampel | 19
- Tabel 4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan Kabupaten Sampel, 2004 | 20
- Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Nasional, Provinsi NTT, dan Kabupaten Sampel | 21
- Tabel 6. Jumlah Pengungsi di NTT, 2005 | 24
- Tabel 7a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Eki (FGD Perempuan) | 27
- Tabel 7b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Eki (FGD Laki-laki) | 28
- Tabel 8a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Malo (FGD Perempuan) | 35
- Tabel 8b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Malo (FGD Laki-laki) | 35
- Tabel 9a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Korinus (FGD Perempuan) | 42
- Tabel 9b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Korinus (FGD Laki-laki) | 42
- Tabel 10a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Lay (FGD Perempuan) | 47
- Tabel 10b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Lay (FGD Laki-laki) | 47
- Tabel 11a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Beluta (FGD Perempuan) | 57
- Tabel 11b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Beluta (FGD Laki-laki) | 57
- Tabel 12. Penghasilan Berbagai Lapisan Masyarakat Desa pada 2005–2006 menurut FGD Tangga Kesejahteraan | 64
- Tabel 13. Jumlah Anak Tangga Hasil Identifikasi dalam FGD | 66
- Tabel 14. Ringkasan Berbagai Bentuk dan Karakteristik Stratifikasi Sosial di Kelima Desa | 69
- Tabel 15. Ringkasan Jumlah Rumah Tangga Berbagai Lapisan Kesejahteraan di Masyarakat (%) | 73
- Tabel 16. Indeks Mobilitas di Kelima Desa | 74
- Tabel 17. Program Pembangunan yang Dianggap Paling Bermanfaat | 83
- Tabel 18. Partisipasi Masyarakat dalam Berbagai Tipe Organisasi menurut Kelompok Transisi–2006 (%) | 98
- Tabel 19. Kondisi Kesejahteraan Rumah Tangga Perempuan dan Rumah Tangga Laki-laki (2006) | 103
- Tabel 20. Faktor Utama Penyebab Naiknya Kesejahteraan | 107
- Tabel 21. Faktor Utama Penyebab Turunnya Kesejahteraan | 107

- Tabel 22. Faktor Utama Penyebab Stagnasi Kesejahteraan | 108
Tabel 23. Repatriasi Eks Pengungsi yang Berada di Timor Barat | 125
Tabel 24. Relokasi Eks Pengungsi di Provinsi NTT | 125

Daftar Kotak

- Kotak 1. Ketika Kemampuan Sosial, Psikologis, dan Politis Menjadi Satu: Kasus Marcus dan Robertus di Desa Beluta | 96
Kotak 2. Berbagai Jenis Denda dan Hukum Adat | 121
Kotak 3. Ketika Kepala Desa Mengeluhkan Gelombang Pengungsian | 124

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Tangga Kesejahteraan | 148
Lampiran 2. Matriks Mobilitas | 158
Lampiran 3. Pengertian Indeks-Indeks Kesejahteraan | 160

Daftar Singkatan dan Akronim

Askes Gakin	Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin
balita	(anak di) bawah lima tahun
Bappeda	Badan Perencanaan Daerah
BBM	bahan bakar minyak
BLT	bantuan langsung tunai
BOS	bantuan operasional sekolah
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
Depsos	Departemen Sosial
Dinsos	Dinas Sosial
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>focus group discussion</i>
HPD	hakim perdamaian desa
IKM	indeks kemiskinan manusia
IPM	indeks pembangunan manusia
JPS Gakin	Jaring Pengaman Sosial Keluarga Miskin
Kimpraswil	Pemukiman dan Prasarana Wilayah
LKRT	laki-laki kepala rumah tangga
LSM	lembaga swadaya masyarakat
Depnakertrans	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NTT	Nusa Tenggara Timur
OPK	operasi pasar khusus
PBB	pajak bumi dan bangunan
PKRT	perempuan kepala rumah tangga
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
PPL	petugas penyuluh lapangan
Raskin	(Program) Beras untuk Keluarga Miskin
RCP	Rural Credit Program
RTL	rumah tangga laki-laki
RTP	rumah tangga perempuan

TKI	tenaga kerja Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TTS	Timor Tengah Selatan
TTU	Timor Tengah Utara
WFP	World Food Program

Rangkuman Eksekutif

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, terkait dengan banyak faktor dan konteks yang spesifik. Selain itu, kemiskinan juga merupakan proses yang dinamis dan oleh karenanya sulit dipahami hanya berdasar gambaran yang diambil di satu waktu tertentu saja (*snapshots*). Dalam studi ini dinamika kemiskinan tersebut dilihat sebagai bagian dari mobilitas sosial yang terjadi di suatu masyarakat. Dengan mengkaji mobilitas sosial tersebut dapat diperoleh pemahaman mengapa dan bagaimana sekelompok orang di masyarakat dapat keluar dari kemiskinan, sementara kelompok yang lain justru jatuh atau terjatuh dalam kemiskinan dalam kurun waktu sekitar lima hingga sepuluh tahun. Untuk itu, studi ini mengidentifikasi berbagai faktor struktural dan faktor agensi yang memengaruhi mobilitas sosial, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Identifikasi tersebut terutama dilakukan melalui perspektif dari bawah (*bottom up perspectives*), yaitu perspektif dari mereka—laki-laki dan perempuan—yang mengalami sendiri peningkatan, penurunan, atau kemandekan kesejahteraan. Yang menjadi konteks geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan politis adalah lima desa yang terletak di tiga kabupaten di wilayah Timor Barat (Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan/TTS, dan Kabupaten Belu). Konteks ini dipilih karena mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan akan dikaji secara khusus dalam kaitannya dengan masalah keberadaan eks pengungsi Timor Leste di berbagai tempat di wilayah Timor Barat. Lokasi penelitian di Kabupaten Kupang adalah Desa Eki, RW 4. Di Kabupaten TTS, terpilih dua desa penelitian, yaitu Desa Malo (komunitas Dusun Neves) dan Desa Korinus (komunitas Dusun Punu).ⁱ Untuk Kabupaten Belu, Desa Lay, dan Desa Beluta terpilih sebagai lokasi penelitian dengan komunitas masing-masing, yaitu Dusun Amaral dan Dusun Soeares.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Penerapan metode kualitatif dilakukan melalui FGD (*focus group discussion*) dan wawancara mendalam. FGD dilakukan dengan menggunakan alat bantu (*tools*) terhadap perwakilan anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, dan juga dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni antara 1996–2006. Wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan tokoh masyarakat tentang profil komunitas, dan wawancara sejarah hidup dilakukan dengan informan (individu) yang mewakili kelompok transisi (*movers, fallers, chronic poor, dan chronic rich*). Metode kuantitatif dilakukan melalui kegiatan survei rumah tangga terhadap 35 orang responden (rumah tangga) di tiap komunitas. Secara total, di lima desa/komunitas tersebut telah dilaksanakan 40 FGD, 5 wawancara profil komunitas, 175 survei rumah tangga, dan 75 wawancara sejarah hidup. Untuk analisis, dilakukan triangulasi terhadap berbagai jenis data yang diperoleh, mengelompokkannya ke dalam tema-tema serta tingkatan, yaitu tingkat komunitas dan rumah tangga/individu. Studi ini dilaksanakan selama delapan bulan, mulai dari Februari hingga September 2006.

ⁱⁱNama-nama kecamatan, desa, dan dusun, serta nama orang adalah nama samaran.

Persiapan dan pengumpulan data di lapangan dilakukan sepanjang Maret 2006, dilanjutkan dengan penulisan laporan.

Berikut adalah ringkasan hasil studi menurut tema dan tingkatan.

1. Pengaruh Faktor-Faktor Struktural terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Dalam studi ini, faktor-faktor struktural dilihat dari stratifikasi sosial, pola-pola hubungan antara berbagai lapisan masyarakat, kesenjangan sosial, kualitas tata kelola pemerintahan lokal, dan keberadaan program pembangunan, termasuk infrastruktur.

Berbagai bentuk stratifikasi sosial yang terdapat di lima komunitas studi dapat menjadi lingkungan pendukung (*enabling environment*) sekaligus lingkungan penghambat (*constraining environment*) bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stratifikasi ekonomi, dengan indikator kepemilikan aset, tingkat penghasilan, dan kapasitas anggota rumah tangga yang terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan/keterampilan dan kesehatan, secara umum bersifat terbuka dan inklusif. Setiap orang atau rumah tangga bisa mengalami peningkatan kesejahteraan (mobilitas naik) maupun penurunan kesejahteraan (mobilitas turun). Stratifikasi di bidang politik, yang pada sebagian desa terkait erat dengan faktor budaya, bersifat lebih tertutup dan eksklusif. Sistem kebangsawanan yang masih kuat berlaku di desa-desa tersebut telah menciptakan kelompok elite yang mendapatkan hak-hak istimewa secara turun-temurun untuk menduduki kepemimpinan lokal, dan menghambat akses kelompok masyarakat lainnya untuk posisi tersebut. Sejarah migrasi juga telah menyebabkan pelapisan sosial di masyarakat, yaitu adanya kelompok/warga pendatang (eks pengungsi Timor Leste) dan warga lokal. Pelapisan sosial ini berpotensi menimbulkan konflik karena terjadi persaingan dan perebutan sumber daya dan peluang ekonomi.

Di Desa Beluta, bentuk stratifikasi yang lebih terbuka dan inklusif membuat desa ini memiliki keuntungan yang bersifat potensial, yang masih harus ditransformasikan menjadi keuntungan aktual seperti perbaikan sistem pertanian dan pemasaran hasil tani, penyediaan jaminan sosial, penciptaan peluang ekonomi yang bisa dinikmati dan diakses oleh semua lapisan dan kelompok di masyarakat. Sementara itu, di desa-desa yang masih memiliki tradisi kebangsawanan yang cukup kuat, bentuk stratifikasi yang ada cenderung tertutup dan eksklusif. Dalam beberapa hal, bentuk stratifikasi seperti ini dapat menghambat terjadinya mobilitas ke atas (*upward mobility*) karena tertutupnya peluang lapisan masyarakat biasa (bukan dari golongan bangsawan/keturunan raja) untuk mengakses sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber daya ekonomi maupun politik.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang diteliti. Pada saat yang bersamaan, kesenjangan, terutama kesenjangan ekonomi, juga makin berkurang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah lapisan sosial dan proporsinya, terutama pada lapisan menengah dan atas. Penambahan jumlah lapisan sosial ini menunjukkan bahwa

masyarakat makin terstratifikasi. Sementara itu, penambahan proporsi di kelompok menengah terutama disebabkan oleh masuknya sebagian masyarakat yang sebelumnya berada di lapisan bawah (miskin) ke lapisan di atasnya (menengah) dan berkurangnya proporsi masyarakat yang berada di lapisan atas (kaya) karena masuk ke kelompok menengah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang sama, ada sebagian masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi ada sebagian masyarakat lainnya yang justru jatuh miskin atau jatuh ke lapisan di bawahnya (menengah).

Di antara kelima desa studi, Desa Korinus adalah desa yang masyarakatnya paling banyak mengalami peningkatan kesejahteraan. Proporsi kelompok menengah bertambah cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu dari 41% menjadi 64%, demikian pula dengan kelompok kaya yang sebelumnya hanya 7%, pada 2006 menjadi 28%. Peningkatan kesejahteraan ini distimulasi oleh status Desa Korinus sebagai desa lab (desa percobaan). Berbagai program pembangunan, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah masuk ke desa ini, yang kemudian ternyata dimanfaatkan dan dinikmati secara merata oleh semua penduduk desa.

Sementara itu, kesenjangan sosial-politik, terkait dengan struktur budaya masyarakat yang masih menerapkan sistem tradisional di antaranya dalam bentuk kebangsawanan lokal, ditemukan di tiga desa, yaitu Malo, Korinus, dan Lay. Dalam struktur masyarakat seperti ini, kesenjangan sosial dan politik masih tampak terutama pada pola hubungan kekuasaan antargolongan, khususnya antara kelompok bangsawan dan rakyat biasa. Kesenjangan ini tercermin dari hak absolut yang dimiliki oleh kelompok bangsawan secara turun-temurun untuk menjadi pemimpin dan menguasai serta menentukan distribusi tanah di desa. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok elite di desa juga dapat menghambat upaya kelompok lain untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Tingkat partisipasi politik masyarakat berbeda-beda di kelima desa. Walaupun di setiap desa dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung, tetapi di desa-desa yang masih dipengaruhi feodalisme lokal, tingkat partisipasi politiknya cenderung rendah. Pemilihan langsung hanya merupakan formalitas sebab para calon pemimpin tersebut haruslah berasal dari kelompok (suku, marga) bangsawan yang berkuasa dan ditetapkan oleh rumah adat. Di desa-desa yang tidak ada pengaruh feodalisme lokal, setiap anggota kelompok masyarakat punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Begitu pula dengan proses pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi politik. Di desa-desa di mana kepemimpinan diperoleh secara turun-temurun, masyarakat sulit menyuarakan aspirasi sekaligus melindungi kepentingannya. Posisi tawar warga dan kemampuan untuk mengontrol tata kelola pemerintahan menjadi lemah yang pada akhirnya bisa berpengaruh negatif pada upaya peningkatan kesejahteraan.

Keberadaan program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dirasakan sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Di tiap desa ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah telah membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti paronisasi sapi, bantuan kambing/sapi, dan pengenalan bibit tanaman baru. Begitu pula

dengan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pengadaan sarana transportasi, pembuatan penampungan air, sangat membantu masyarakat dalam kehidupan mereka. Umumnya semua program pembangunan ini dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat di desa.

2. Pengaruh Faktor-faktor Agensi terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Agensi merupakan kapasitas untuk bertindak yang dimiliki individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai dan melindungi kelompoknya. Faktor agensi terdiri atas beberapa komponen, yaitu aset, modal manusia, kemampuan sosial, kemampuan psikologis, dan kemampuan politik. Studi ini menunjukkan bahwa komponen agensi tersebut saling terkait dan menunjang satu sama lain. Hasil perbandingan agensi di setiap kelompok transisi memperlihatkan bahwa secara umum kelompok yang berhasil keluar dari kemiskinan (*mover*) dan kelompok yang berhasil mempertahankan kesejahterannya (*always rich*), memiliki agensi yang lebih baik daripada kelompok yang jatuh miskin (*faller*) dan kelompok yang tetap miskin (*chronic poor*). Kedua kelompok ini memiliki pendidikan yang lebih baik, pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak terutama berkaitan dengan pola kehidupan mereka. Mereka umumnya juga memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan memiliki jaringan sosial yang lebih luas daripada kedua kelompok lainnya. Pada beberapa kasus, ada anggota kelompok ini yang menduduki posisi kepemimpinan atau jabatan penting di masyarakat.

Sebaliknya, pada kelompok *faller* dan *chronic poor* ditemukan bahwa modal manusia mereka makin berkurang, terutama dalam hal kesehatan dan kemampuan untuk bekerja karena faktor penuaan. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk mengembangkan usaha yang berakibat pada rendahnya kepercayaan diri mereka.

3. Pengaruh Aspek Gender terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Secara umum, perempuan kepala rumah tangga dan laki-laki kepala rumah tangga memiliki karakteristik yang hampir sama terutama yang berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka, yaitu mata pencaharian yang umumnya adalah petani dan aset. Perbedaan yang paling mencolok adalah perempuan kepala rumah tangga lebih rentan terhadap faktor-faktor yang bisa menurunkan kesejahterannya, terutama karena faktor usia. Mayoritas perempuan kepala rumah tangga usianya lebih tua daripada laki-laki kepala rumah tangga. Faktor ini yang menyebabkan kelompok tersebut mengalami penurunan kesejahteran dan sulit untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahterannya karena sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi. Selain usia, partisipasi politik perempuan kepala rumah tangga, misalnya dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas, lebih rendah daripada laki-laki kepala rumah tangga. Walaupun demikian, hal ini tampaknya tidak menjadi faktor yang memengaruhi kondisi kesejahteran rumah tangga. Sementara itu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan

kesejahteraan di kedua kelompok ini relatif sama, yaitu peningkatan pendapatan, bekerja keras, dan berkurangnya beban dalam keluarga.

4. Pengaruh Konflik terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Konflik dan ketegangan sosial di desa-desa penelitian sebagian besar terjadi antara warga eks pengungsi dengan penduduk lokal, walaupun potensi konflik di tiap desa tidak selalu terkait dengan jumlah pengungsi di desa tersebut. Konflik dan ketegangan sosial muncul dalam beberapa bentuk, mulai dari yang bersifat tertutup/laten dan hanya melibatkan sebagian kecil orang saja, sengketa tanah antara warga eks pengungsi dengan warga lokal, hingga konflik terbuka dengan kekerasan yang melibatkan beberapa kelompok. Namun, terlihat bahwa konflik-konflik tersebut tidak berpengaruh secara langsung pada kondisi kesejahteraan masyarakat terutama warga/penduduk lokal, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Bagaimana pengaruh konflik pada kondisi kesejahteraan masyarakat lokal dapat dilihat dari beberapa hal, pertama skala konflik dan kedua biaya konflik. Pada umumnya konflik terbuka lebih banyak menimbulkan kerugian, tetapi dampaknya lebih banyak dirasakan pada kelompok yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, bagi konflik yang lebih tertutup/laten, dampak yang dirasakan lebih kecil lagi, apalagi jumlah orang yang terlibat juga sedikit dan tidak sampai menimbulkan kerugian di tingkat masyarakat secara lebih luas. Dari segi biaya, konflik terbuka lebih berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, konflik yang terjadi di desa-desa penelitian tidak sampai menimbulkan biaya yang besar karena tidak pernah terjadi konflik terbuka, dan tidak sampai menimbulkan kerugian besar. Biaya konflik lain yang bersifat nonmaterial adalah munculnya rasa tidak aman, tidak nyaman, kecurigaan, dan gangguan psikologis lainnya.

Selain kedua hal tersebut, sebenarnya pengaruh keberadaan eks pengungsi dan konflik bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah ketidakamanan di masyarakat karena sejak kedatangan pengungsi sering terjadi berbagai perselisihan dan kriminalitas, termasuk pertengkaran karena perusakan tanaman, pencurian hasil kebun dan ternak, keonaran, dan ancaman penyerangan. Kedua adalah perebutan sumber daya ekonomi. Di beberapa desa, warga lokal harus bersaing dengan warga eks pengungsi dalam bekerja, tidak jarang pendapatan mereka menjadi berkurang.

I. Studi tentang Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat

1.1 Latar Belakang dan Masalah Penelitian: Mobilitas Sosial, Dinamika Kemiskinan, dan Konflik

Konsep mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan sering digunakan dalam berbagai studi. Mobilitas sosial secara umum diartikan sebagai perubahan dan perpindahan individu maupun kelompok di antara berbagai strata atau lapisan sosial. Dinamika kemiskinan umumnya mengacu secara lebih spesifik pada perubahan posisi ekonomi seseorang atau kelompok terhadap garis kemiskinan yang menjadi batas penentu apakah orang tersebut berada di luar (*stay out*), keluar dari (*move out*), tetap berada di dalam (*trapped in*), jatuh ke dalam (*move into*), atau secara labil keluar-masuk kemiskinan (*churning around*). Dengan pengertian ini, jelas bahwa kedua konsep tersebut mengacu pada suatu fenomena yang sama, yaitu berubah-ubahnya posisi sosial-ekonomi. Perubahan ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor pada tingkat makro, meso, ataupun mikro, dan bisa terjadi pada kurun waktu yang panjang maupun pendek.

Jika kita melihat pada masalah kemiskinan—khususnya tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia—berubah-ubahnya posisi sosial-ekonomi individu maupun kelompok bisa diamati dengan jelas. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari 54,2 juta pada 1976, menjadi 22,5 juta pada 1996. Namun, krisis moneter yang memuncak sekitar 1997–1998 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi dengan pesat. Angka kemiskinan yang pada awal krisis moneter pada 1997 mencapai 15%, meningkat menjadi 33% pada akhir 1998. (Suryahadi, 2003: iii). Enam tahun setelah krisis, angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 17,4%, tetapi masih tetap lebih tinggi daripada periode sebelum krisis.

Akan tetapi, krisis moneter bukan satu-satunya faktor (makro) yang memengaruhi mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di atas, masih ada berbagai faktor pada tingkat mikro, meso, ataupun makro yang juga menyebabkan perubahan posisi sosial-ekonomi individu dan kelompok masyarakat. Salah satu faktor yang sangat penting di beberapa wilayah adalah terjadinya ketegangan sosial atau konflik, baik konflik berskala besar maupun kecil.

Sejumlah studi menarik telah dilakukan tentang berbagai kasus, tipe, pola, dan upaya penyelesaian konflik di berbagai wilayah di Indonesia (Barron, Smith, and Woolcock 2004; Barron, Kaiser, and Pradhan 2004; Varshney *et al.* 2004; Barron and Madden 2004; Tajima 2004; Clark 2004; Bertrand 2004; Colombijn 2002). Namun, hingga kini penelitian empiris yang mengkaji kaitan antara konflik, mobilitas sosial, dan dinamika kemiskinan belum banyak. Beberapa studi tentang konflik dan kemiskinan kronis menyebutkan bahwa kondisi yang tidak aman memperparah kemiskinan dan menghalangi upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, disebutkan juga bahwa kemiskinan yang berlarut-larut (kronis) dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kesedihan yang memudahkan tersulutnya kekerasan

di antara warga atau kelompok warga. Namun, ada pula yang melihat bahwa penyebab konflik yang sesungguhnya bukan kesedihan (*grievance*) melainkan keserakahan (*greed*) (Goodhand 2001; Versteegen 2001).

Dalam studi ini konflik diartikan secara luas sebagai konfrontasi antarindividu maupun kelompok karena tujuan dan kepentingan yang berbeda tentang hal-hal seperti penerapan nilai-nilai tertentu (termasuk agama dan budaya), batas kekuasaan yang bisa dimiliki seseorang/kelompok sesuai dengan kemampuan/kompetensinya, penguasaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya, khususnya yang tergolong langka. Konfrontasi tersebut bisa terwujud dalam berbagai bentuk misalnya ketegangan laten, ketidaksepakatan di jalur hukum, atau pertikaian terbuka (dengan atau pun tanpa bentrokan fisik).

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami konflik adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah ini, ketegangan sosial atau konflik bukanlah suatu kejadian yang bersifat sementara. Konflik di berbagai daerah di NTT telah berlangsung lama—bahkan sebelum krisis—dan telah berakar dalam sistem yang ada. Konflik-konflik ini memiliki konsekuensi multidimensional. Salah satunya adalah gangguan terhadap proses dan upaya mencapai dan memelihara kesejahteraan (pembangunan, pelayanan sosial, keamanan, dll.) Konflik dapat berakibat negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat termasuk menyebabkan orang terjatuh atau terjebak dalam kemiskinan.

Konflik yang terjadi di berbagai daerah di NTT memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kita melihat secara spesifik di wilayah Timor Barat, sebagian besar konflik atau ketegangan sosial yang terjadi berkaitan dengan masalah pengungsian (*displacement*). Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai tempat penampungan pengungsi dari eks wilayah Timor Leste. Gelombang pengungsi—sejak penguasaan wilayah Timor Leste oleh Republik Indonesia pada 1976 hingga referendum Timor Leste pada 1999—telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduk di Timor Barat. Penelitian menunjukkan munculnya masalah seperti:

- a) meningkatnya gangguan keamanan;
- b) sentimen dan kecemburuan tentang alokasi bantuan internasional yang terfokus pada pengungsi dan kurang memberi kompensasi pada masyarakat lokal yang telah membagi sumber daya mereka (yang secara populer disebut “orang miskin yang menolong orang susah”);
- c) perebutan berbagai sumber daya (alam) yang terbatas ketersediaannya antara pengungsi dan masyarakat lokal;
- d) persaingan kegiatan ekonomi khususnya di sektor informal;
- e) bertambahnya beban layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan akibat masuknya para pengungsi; dan
- f) perbedaan dan ketidakcocokan budaya yang juga memunculkan stereotipe negatif dan jarak sosial. (Sunarto *et al.* 2005).

Meskipun ketegangan sosial tersebut sering berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, ketegangan atau konflik ini tidak berakibat sama terhadap setiap orang atau kelompok. Ketegangan atau konflik yang terjadi juga secara berbeda memengaruhi mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan berbagai kelompok masyarakat. Ada yang sangat dirugikan, ada yang tidak terlalu dirugikan, tetapi ada pula yang bisa mengambil keuntungan dari situasi konflik. Ini menimbulkan sifat variatif dan spesifik dari setiap akibat konflik dan juga strategi serta kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut siapa yang bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesejahterannya (dapat keluar dan berada di luar kemiskinan), siapa yang tetap terperangkap, dan siapa yang jatuh dalam kemiskinan. Mengapa dan bagaimana perbedaan ini terjadi?

Studi ini adalah suatu upaya untuk memahami bagaimana konflik atau ketegangan sosial memengaruhi mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan berbagai kelompok masyarakat di suatu wilayah yang terkena konflik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, baik terhadap studi kemiskinan maupun studi konflik, dengan menunjukkan:

- a) pola-pola mobilitas sosial dan kecenderungan dinamika kemiskinan di antara berbagai kelompok masyarakat di wilayah konflik, dan
- b) keterkaitan (*nexus*) antara mobilitas sosial, dinamika kemiskinan, dan konflik.

1.2 Fokus, Pertanyaan Penelitian, dan Proposisi

Studi “Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat” adalah bagian dari suatu studi global yang melibatkan 19 negara.² Di Indonesia, pada 2005, penelitian yang sama telah dilakukan di 10 komunitas di Jawa Timur dan Maluku Utara. Dalam studi “Keluar dari Kemiskinan I” atau “Moving Out of Poverty I” (MOP I), daerah penelitian dipilih berdasarkan dua variabel utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan intensitas konflik. Kedua variabel itu dibedakan lebih lanjut menjadi “tinggi–sedang–rendah.” Namun, untuk variabel konflik tidak ada fokus pada “tipe” konflik tertentu. Di sepuluh komunitas tersebut konflik yang dikaji adalah konflik yang dianggap paling penting atau paling memengaruhi kehidupan komunitas dan kemudian diperoleh berbagai tipe konflik mulai dari bentrokan berdarah antarsuku dan agama, masalah pembajakan kapal, pembunuhan sadis dukun santet, hingga kasus pencurian. Tipe konflik seperti ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam membandingkan dan menganalisis dampak konflik terhadap kehidupan komunitas secara sistematis karena setiap tipe memiliki sebab, latar belakang, komposisi elemen, dinamika, dan proses yang berbeda.

Belajar dari pengalaman MOP I tersebut, dalam studi “Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat” atau “Moving Out of Poverty in West Timor” (MOP II), fokus kajian akan dititikberatkan pada konflik/ketegangan sosial yang terkait dengan masalah pengungsian (*displacement*) di Timor Barat. Selanjutnya, studi ini juga akan berfokus pada mobilitas sosial masyarakat penerima pengungsi (*host communities*) selama 1996–2006 dan bukan

²Indonesia, Afganistan, Banglades, Kamboja, Cina, Kolumbia, India, Malawi, Meksiko, Maroko, Mozambik, Nigeria, Filipina, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, dan Uganda

pada para pengungsi (*displaced persons*). Pilihan ini didasari oleh beberapa pemikiran, antara lain, sebagai berikut.

- a) Studi ini mengkaji pola-pola yang muncul dalam mobilitas sosial menurut perspektif laki-laki dan perempuan yang mengalami sendiri dinamika tersebut. Dengan kata lain, studi ini mencari pemahaman dari bawah (*bottom up perspectives*) mengenai faktor-faktor yang membebaskan potensi ekonomi masyarakat miskin dan yang mendukung proses dan upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan. Yang digali adalah pemahaman masyarakat sendiri mengenai mobilitas sosial-ekonomi mereka, kebebasan, kekuasaan, dan aspirasi, serta bagaimana hubungan antara hal-hal tersebut dengan pembentukan aset atau penciptaan dan pengumpulan kekayaan. Dengan demikian, menarik untuk melihat mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan masyarakat penerima pengungsi—dan bukan para pengungsinya—yang kehidupannya tidak mengalami perubahan (*disruption*) sebesar kehidupan para pengungsi.
- b) Masalah pengungsian di Timor Barat sudah memiliki sejarah yang relatif panjang, tetapi tidak selalu mendapat perhatian secara berkelanjutan. Perhatian nasional maupun internasional cenderung fluktuatif tergantung pada ada atau tidaknya kejadian/peristiwa genting. Namun, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masalah pengungsian (keberadaan pengungsi) terus berlanjut dalam berbagai skala dan bentuk. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik bagaimana ketegangan yang ditimbulkan oleh pengungsian memengaruhi naik-turunnya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c) Berlanjutnya masalah pengungsian di Timor Barat berkaitan erat dan tumpang-tindih dengan masalah luasnya kemiskinan di NTT secara umum. Akibatnya, kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan di NTT tidak mungkin mengabaikan masalah pengungsian dan keberadaan pengungsi dari Timor Leste.

Berdasarkan hal-hal di atas, pertanyaan penelitian untuk studi ini adalah:

- a) Mengapa dan bagaimana sekelompok orang dalam masyarakat dapat keluar dari kemiskinan sementara kelompok lain jatuh dan terjatuh dalam kemiskinan?
- b) Bagaimana berbagai konteks yang disebutkan di bawah ini memengaruhi upaya seseorang untuk meningkatkan kesejahteraannya (*upwardly mobile*), termasuk keluar dari kemiskinan:
 - (1) Konteks ekonomi seperti tingkat dan kualitas pertumbuhan;
 - (2) Konteks politik seperti kualitas tata pemerintahan lokal dan dinamika politik lokal;
 - (3) Konteks sosial-budaya seperti kesukuan, politik identitas (termasuk di dalamnya gender dan identitas sosial) dan jejaring (*networks*); dan
 - (4) Konteks sejarah seperti latar belakang sejarah wilayah dan komunitas yang bersangkutan.
- c) Faktor-faktor agensi (perorangan maupun kolektif) dan struktural manakah yang memengaruhi mobilitas sosial, khususnya upaya untuk keluar dari kemiskinan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas? Bagaimana pengaruh aspek gender terhadap dinamika tersebut?

- d) Bagaimana konflik berpengaruh pada mobilitas sosial, khususnya upaya keluar dari kemiskinan, baik pada tingkat rumah tangga maupun pada tingkat komunitas?

Studi ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis pengalaman mereka yang dikategorikan dalam empat kelompok transisi (*transition groups*), yaitu

- a) *mover*, yaitu mereka berhasil keluar dari kemiskinan dan yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- b) *always rich*, yaitu mereka yang mampu mempertahankan kekayaannya;
- c) *always poor*, yaitu mereka yang terjebak dalam kemiskinan kronis; dan
- d) *faller*, mereka yang jatuh ke dalam kemiskinan.

Khusus tentang tema konflik dalam studi ini (pertanyaan penelitian keempat) disusun beberapa proposisi, yaitu

- a) Konflik mengubah komposisi demografis, stratifikasi sosial-ekonomi, dan pola serta proses mobilitas sosial di komunitas.
- b) Konflik tidak selalu merugikan setiap anggota masyarakat (konflik tidak merugikan anggota komunitas dengan cara dan intensitas yang sama).
- c) Sekelompok orang bisa memanfaatkan situasi konflik dan mengakumulasi kekayaan, dan oleh sebab itu mereka bisa meningkatkan kesejahterannya atau keluar dari kemiskinan.
- d) Kelompok "yang diuntungkan" dan kelompok "yang dirugikan" akan berbeda dalam jenis konflik yang berbeda.

1.3 Metodologi Penelitian

Pengumpulan data dalam studi MOP II dilakukan dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, sejarah hidup (*life-story*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus groups discussion/FGD*) dengan informan kunci dan sejumlah anggota masyarakat, baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban tentang mengapa dan bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan dan menggali apakah faktor-faktor yang teridentifikasi tersebut bersifat multidimensional.

Jenis-jenis FGD yang dilaksanakan dalam studi ini terdiri atas:

- a) FGD sejarah desa dan komunitas (*village/community timeline*). FGD ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa, baik di tingkat desa maupun komunitas, yang membantu atau menghambat warga untuk keluar dari kemiskinan. Data yang diperoleh dari FGD ini digabungkan dengan data yang diperoleh dari wawancara profil komunitas (*community profile*). Informan FGD dan mereka yang diwawancarai tersebut terdiri atas pemimpin lokal dan tokoh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

- b) FGD tangga kesejahteraan (*Ladder of Life*). FGD ini terutama bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang membantu atau menghambat upaya keluar dari kemiskinan. Selain itu, dalam FGD ini diidentifikasi juga tentang apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kesejahteraan. Untuk mendapatkan data tersebut, peserta FGD diminta untuk mengidentifikasi stratifikasi sosial-ekonomi di desa/komunitasnya dengan menggambarkan bagaimana kondisi tangga kesejahteraan, baik pada 2006 maupun sepuluh tahun sebelumnya. Peserta juga mengidentifikasi ciri-ciri setiap anak tangga, alasan naik atau turunnya masyarakat dalam tangga kesejahteraan dan memperkirakan berapa proporsi warga yang berada di setiap anak tangga untuk saat ini dan sepuluh tahun yang lalu. Pada akhirnya, peserta diminta untuk mengidentifikasi posisi warga dalam satu komunitas (berkisar antara 100-150 orang) pada tangga kesejahteraan. Komunitas tersebut telah ditentukan sebelumnya. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk melakukan penetapan sampel survei rumah tangga dan penentuan informan untuk wawancara mendalam sejarah hidup. Dengan demikian, FGD tangga kesejahteraan adalah FGD kunci dalam studi ini.³
- c) FGD mata pencaharian, kebebasan, kekuasaan, kesenjangan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan lokal (*livelihood, freedom, power, inequality, democracy, and local governance*). FGD ini bertujuan menggali data tentang bagaimana faktor-faktor tertentu, yaitu peluang ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan, dan pelaksanaan demokrasi memengaruhi upaya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
- d) FGD sejarah konflik dan peta kelembagaan (*conflict timeline and institutional mapping*). FGD ini bertujuan untuk menggali data tentang kondisi dan cara menjaga keamanan secara umum di desa/komunitas. Selain itu, diidentifikasi juga konflik-konflik yang memengaruhi kehidupan warga. Dalam identifikasi ini secara spesifik digali informasi tentang unsur-unsur yang terlibat dalam konflik, pengaruh konflik terhadap kegiatan ekonomi serta pemerintahan lokal, dan cara menyelesaikan konflik tersebut.

Selain FGD, dilakukan juga wawancara mendalam sejarah hidup dan observasi. Untuk metode kuantitatifnya dilakukan survei rumah tangga terhadap responden yang mewakili empat kelompok transisi yang disebut di atas. Data-data juga diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, misalnya, dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dan lima komunitas (desa) di Timor Barat (lihat Tabel 1).

³Terkait dengan FGD Tangga Kesejahteraan, terdapat pula berbagai pengertian, istilah, dan pengukuran yang akan digunakan dalam analisis. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran 1.

Tabel 1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Kabupaten	Karakteristik	Jumlah Komunitas ^a
Belu	Jumlah pengungsi terbanyak dibanding dengan kabupaten lain di NTT.	2 komunitas (di Desa Lay dan Desa Beluta)
Kupang	Jumlah pengungsi lebih sedikit daripada Kabupaten Belu, tetapi lebih sering terjadi konflik terbuka dengan intensitas tinggi.	1 komunitas (di Desa Eki)
Timor Tengah Selatan	Jumlah pengungsi paling sedikit dibanding kabupaten Belu dan Kupang.	2 komunitas (di Desa Malo dan Desa Korinus)

^aNama-nama desa disamarkan.

Dalam setiap komunitas dilakukan berbagai kegiatan pengumpulan data (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data	Jenis Informan	Jumlah Informan
1. FGD sejarah desa (<i>village timeline</i>) (Total FGD:1)	Pemimpin formal dan informal di tingkat desa.	3–4 orang
2. FGD sejarah komunitas (<i>community timeline</i>) (Total FGD:1)	Berbagai anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang (tokoh agama, pengusaha, guru, bidan, dll.) di tingkat komunitas.	6 orang (campuran laki-laki dan perempuan)
3. Wawancara profil komunitas (<i>community profile/ community questionnaire</i>)	Tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan di komunitas tersebut. (masalah sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dll.)	2–3 orang
4. FGD tangga kesejahteraan (<i>ladder of life/lol</i>) (Total FGD:2)	FGD dengan 7–8 laki-laki FGD dengan 7–8 perempuan	14–6 orang
5. FGD mata pencaharian dan tata kelola pemerintahan (<i>livelihood, freedom, power, inequality, democracy, and local governance/lfpd</i>) (Total FGD: 2)	FGD dengan 7–8 laki-laki FGD dengan 7–8 perempuan	14–16 orang
6. FGD sejarah konflik dan peta kelembagaan (<i>conflict timeline and institutional mapping</i>) (Total FGD:2)	FGD dengan 7–8 laki-laki FGD dengan 7–8 perempuan	14–16 orang

Metode Pengumpulan Data	Jenis Informan	Jumlah Informan
7. Kuesioner dan survei rumah tangga (<i>households questionnaire</i>)	Rumah tangga yang diidentifikasi dalam FGD Tangga Kesejahteraan. Terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • 14 rumah tangga yang keluar dari kemiskinan (<i>mover</i>) (40%) • 10 rumah tangga yang tetap kaya (30%) (<i>always rich</i>) • 7 rumah tangga yang miskin kronis (20%) (<i>chronic poor</i>) • 4 rumah tangga jatuh miskin (10%) (<i>faller</i>) 	35 Rumah Tangga
8. Wawancara mendalam: sejarah hidup individu (<i>in-depth interview: individual life-stories</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang yang dipilih secara purposif dari 35 rumah tangga yang disurvei. • Mereka terdiri atas orang yang keluar dari kemiskinan, yang tetap kaya, yang selalu miskin, dan yang jatuh dalam kemiskinan (dengan komposisi yang sama seperti dalam survei rumah tangga) 	15 orang

Secara keseluruhan di 5 komunitas tersebut dilakukan 40 FGD, 5 wawancara komunitas, 175 survei rumah tangga, dan 75 wawancara sejarah hidup.

1.4 Analisis

Seperti yang telah diuraikan di atas, studi “Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat” mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data (FGD, wawancara mendalam, survei rumah tangga). Khusus dalam FGD, data dikumpulkan baik dari kelompok perempuan maupun laki-laki. Oleh sebab itu, analisis dalam sintesis komunitas ini pun akan bertumpu pada triangulasi berbagai jenis data tersebut. Secara umum, dalam tiap bab akan dibahas tema-tema yang saling terkait. Analisis dilakukan terhadap dua tingkatan, yaitu komunitas dan rumah tangga atau individu. Untuk data dari FGD akan dibedakan dan dianalisis berdasarkan perspektif kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Aspek gender yang relevan untuk memahami mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan akan dikaji dalam satu bab khusus.

1.5 Struktur Laporan

Laporan ini terbagi menjadi sepuluh bab. Bab I merupakan pengantar yang menjelaskan berbagai hal terkait dengan rancangan penelitian. Bab II membahas secara ringkas dan sistematis beberapa pemikiran/perspektif tentang hubungan antara dinamika kemiskinan dan konflik dari berbagai studi. Bab III merupakan gambaran lengkap wilayah Timor Barat yang menjadi konteks regional dari studi ini. Bab IV memberi gambaran lengkap tentang kelima desa yang menjadi lokasi penelitian. Bab V mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor struktural yang relevan terhadap upaya keluar dari kemiskinan. Faktor-

faktor struktural yang dikaji, antara lain, stratifikasi sosial serta pola-pola hubungan antara berbagai golongan/lapisan masyarakat, kesenjangan sosial, kualitas tata kelola pemerintahan (lokal), dan keberadaan program pembangunan dan infrastruktur. Bab VI membahas faktor-faktor agensi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan yang terdiri atas aset, modal manusia (*human capital*), kemampuan sosial, kemampuan psikologis, dan kemampuan politis. Bab VII mengkaji pengaruh aspek gender terhadap mobilitas sosial melalui analisis kepala rumah tangga. Perbedaan karakteristik antara rumah tangga yang dikepalai perempuan dan rumah tangga yang dikepalai laki-laki dapat menunjukkan perbedaan peluang dan hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan gender. Bab VIII memberi penjelasan tentang interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan. Bab IX mengkaji secara khusus bagaimana mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di masyarakat. Bab ini membandingkan potensi konflik antara desa-desa yang menerima eks-pengungsi dari Timor Leste. Bab X menyimpulkan temuan-temuan studi yang terpenting dan memberi beberapa rekomendasi umum tentang upaya peningkatan kesejahteraan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

II. Pendekatan Struktur-Agensi serta Hubungan antara Dinamika Kemiskinan dan Konflik: Sebuah Kerangka Analitis

2.1 Pendekatan Struktur-Agensi

Kerangka analitis studi “Keluar dari Kemiskinan” ini mengkaji hubungan atau interaksi antara dua bidang analisis, yaitu: (i) agensi berbagai aktor yang berbeda (studi ini berfokus pada agensi kelompok miskin) dan (ii) struktur peluang yang ada.

Konsep agensi (*agency*) dapat diartikan sebagai kombinasi dari keinginan dan kemampuan dari suatu aktor (individu, kelompok, lembaga) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Struktur (sosial) adalah hubungan antara berbagai unsur masyarakat yang sudah berlangsung lama dan memiliki pola-pola tertentu.

Dalam studi ini, agensi dan struktur dilihat sebagai dua hal yang ada dan tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berinteraksi. Selanjutnya setiap orang/kelompok memiliki agensi yang berbeda dan bergerak dalam struktur peluang yang berbeda pula. Yang penting untuk dikaji bukan apakah subjek bertindak secara otonom atau tidak dalam suatu struktur peluang, melainkan bagaimana subjek tertentu bertindak dalam (berinteraksi dengan) struktur peluang tertentu dan apa hasil interaksi tersebut? Studi “Keluar dari Kemiskinan” hendak melihat bagaimana interaksi antara struktur peluang dan agensi kelompok tertentu dalam masyarakat memengaruhi/menentukan hasil mobilitas sosial.

2.1.1 Agensi Kaum Miskin

Dibanding dengan kelompok yang tidak miskin, kaum miskin mempunyai kemampuan terbatas untuk bertindak lebih jauh demi kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kemampuan untuk bertindak di antara berbagai individu atau kelompok masyarakat ini bisa disebut sebagai kesenjangan agensi. Kesenjangan agensi bisa sangat menghalangi kelompok miskin untuk keluar dari kemiskinannya dan karena itu mengalami kemiskinan kronis.

Kaum miskin memerlukan seperangkat aset dan kemampuan untuk memengaruhi, bernegosiasi, mengontrol, dan untuk meminta pertanggungjawaban berbagai pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Aset dan kemampuan ini dapat bersifat perorangan maupun kolektif.

a) Aset dan Kemampuan Perorangan

Aset yang dimaksud adalah aset material, baik fisik maupun finansial. Aset demikian termasuk tanah, rumah, ternak, tabungan, dan perhiasan—yang memungkinkan

masyarakat menahan goncangan dan memperluas horison pilihan mereka. Aset fisik dan finansial kaum miskin yang jumlahnya sangat terbatas sering menghambat kemampuan mereka untuk bernegosiasi secara relatif seimbang. Keterbatasan ini bahkan dapat meningkatkan kerentanan mereka.

Kemampuan merupakan sesuatu yang melekat pada perorangan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan aset yang dimilikinya dengan cara berbeda untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada empat macam kemampuan yang relevan untuk dikaji, yaitu kemampuan perorangan, psikologis, sosial, dan politik.

- (1) Kemampuan perorangan (*human capabilities*) mencakup kondisi kesehatan yang baik, pendidikan, produktif, atau keahlian perbaikan-hidup yang lain.
- (2) Kemampuan psikologi (*psychological capabilities*) termasuk harga diri, rasa percaya diri, dan suatu kemampuan membayangkan serta menginginkan masa depan yang lebih baik.
- (3) Kemampuan sosial (*social capabilities*) meliputi keikutsertaan di kelompok tertentu, kepemimpinan, hubungan kepercayaan, identitas, nilai-nilai yang memberikan makna hidup, dan kapasitas untuk berorganisasi.
- (4) Kemampuan politik (*political capabilities*) termasuk kapasitas mewakili diri sendiri atau orang lain, akses informasi, membentuk asosiasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik komunitas atau negara.

b) Aset dan Kemampuan Kolektif

Dalam penanggulangan kemiskinan, peran organisasi kolektif bagi kaum miskin sering kurang dianggap penting. Keterbatasan kekuasaan dan hak bersuara kelompok miskin, juga di negara yang pelaksanaan demokrasinya telah maju, merupakan masalah yang sulit diatasi. Orang miskin sering tidak dapat menggunakan aset atau hak-hak individual mereka secara efektif. Akibatnya kelompok miskin cenderung mengalami marginalisasi.

Untuk mengatasi masalah marginalisasi dalam masyarakat, kaum miskin sebenarnya bisa mengandalkan kemampuan kolektif mereka untuk mengorganisasi dan memobilisasi diri sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi, kepentingan mereka terwakili, dan suara mereka didengarkan. Pelaksanaan hak bersuara dan keterwakilan, pengakuan terhadap identitas kolektif, dan adanya solidaritas membantu mengatasi masalah sosial dan psikologi yang mendalam yang sering sudah terinternalisasi pada kaum miskin.

Perlu dicatat bahwa ada hubungan timbal-balik antara aset dan kemampuan perorangan dengan kemampuan untuk bertindak secara kolektif. Kaum miskin yang sehat, berpendidikan, dan dilindungi/aman, dapat berpartisipasi secara efektif dalam tindakan kolektif. Pada saat yang sama tindakan kolektif dapat memperbaiki akses kaum miskin terhadap sekolah yang berkualitas atau klinik kesehatan. Meskipun demikian, sumber daya ekonomi dan manusia tidak selalu menjadi syarat yang mesti dipenuhi. Mereka yang tidak terampil dan miskin bisa menjadi agen yang aktif jika ada aspirasi yang tinggi dan dasar organisasi untuk tumbuhnya tindakan kolektif.

2.1.2 Struktur Peluang

Struktur peluang suatu masyarakat ditentukan oleh konteks kelembagaan, sosial, dan politik yang lebih luas. Struktur peluang meliputi juga *peraturan-peraturan* formal maupun informal (*seperti aturan-aturan adat dan norma-norma masyarakat*) dalam mana berbagai aktor mengejar kepentingannya. Semua ini adalah konteks yang memengaruhi kemampuan perorangan maupun organisasi untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, dan meminta pertanggungjawaban berbagai lembaga. Dua hal utama yang membentuk struktur peluang adalah iklim kelembagaan serta struktur sosial dan politik.

a) Iklim Kelembagaan

Ada dua jenis kelembagaan:

- (1) Kelembagaan formal, yaitu hukum, peraturan, rutinitas, dan proses pelaksanaan yang ditegakkan oleh negara, pasar, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional.
- (2) Kelembagaan informal termasuk norma-norma solidaritas sosial, superioritas, pengasingan sosial, ketidakberdayaan, dan korupsi yang dapat memperkuat atau menumbangkan peraturan-peraturan formal.

Mengingat aturan adat dan norma, peraturan formal, proses, dan tindakan negara begitu penting dalam penciptaan kondisi yang memengaruhi kaum miskin dan berbagai aktor lainnya dalam mengambil keputusan, maka analisis mengenai iklim kelembagaan sering difokuskan pada negara. Meskipun demikian, analisis yang sama dapat diterapkan pada lembaga bisnis swasta atau organisasi kemasyarakatan yang juga sangat diperlukan untuk memahami perpindahan keluar dari kemiskinan.

Faktor-faktor kunci yang dapat membantu atau menghambat perubahan kelembagaan meliputi akses terhadap informasi, peraturan yang menentukan partisipasi masyarakat, mekanisme pertanggungjawaban, dan lingkungan yang memungkinkan tindakan kolektif.

b) Struktur Sosial dan Politik

Ada berbagai karakter struktur sosial dan politik, misalnya: struktur sosial-politik yang terbuka atau tertutup, yang inklusif atau eksklusif, yang kooperatif atau yang berkonflik. Karakter tersebut juga menentukan struktur peluang yang ada. Dalam masyarakat di mana ada suatu kelompok yang menjadi sangat kuat dan berkuasa dibanding kelompok lain sehingga tercipta kesenjangan sosial yang besar, maka peluang dan akses terhadap berbagai fasilitas dan pelayanan sosial akan sangat dipengaruhi oleh kesenjangan tersebut. Untuk masyarakat yang mengalami konflik, peluang dan akses akan sangat dipengaruhi perubahan hubungan kekuasaan, termasuk perubahan wewenang terhadap sumber daya dari waktu ke waktu.

Analisis tentang struktur peluang mensyaratkan adanya eksplorasi tentang bagaimana iklim kelembagaan dan struktur sosial berinteraksi satu sama lain untuk mendukung atau menghambat agensi dari aktor-aktor yang lemah. Kaum miskin dan kelompok tidak beruntung sepertinya mempunyai pengaruh paling kecil ketika iklim kelembagaan

bersifat tertutup dan terdapat elite sosial-politik yang kuat dan bersatu. Dalam kasus seperti ini, kelembagaan formal dan informal bekerja sedemikian rupa sehingga mencegah tuntutan kaum miskin supaya didengar, dan hal ini diperkuat oleh elite yang bersatu dan sangat berkuasa yang mempunyai sarana kuat untuk secara efektif menjalankan kepentingannya.

2.2 Berbagai Perspektif tentang Hubungan Kausal antara Kemiskinan dan Konflik

Secara umum kemiskinan dan konflik merupakan tema dari dua bidang kajian yang terpisah, yang masing-masing telah dikaji secara luas dan mendalam. Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, hingga kini penelitian empiris untuk mengkaji dan memahami keterkaitan antara kedua tema tersebut belum banyak dilakukan. Upaya menjelaskan hubungan kemiskinan dan konflik cenderung dilakukan dengan mencari hubungan kausalitas di antara keduanya. Jadi, pertanyaan utamanya adalah: apa menyebabkan apa? Penjelasan hubungan kausal ini secara umum dapat dibedakan dalam dua perspektif, yaitu (i) perspektif yang mempertanyakan apakah kemiskinan menyebabkan konflik dan (ii) perspektif yang mempertanyakan apakah konflik menyebabkan kemiskinan (Goodhand 2001; Verstegen 2001; Nelson 1998).

Perspektif pertama melihat bahwa penderitaan yang berlarut-larut karena kemiskinan menjadikan orang lebih mudah melakukan tindakan kekerasan. Menurut perspektif ini, kemiskinan kronis merupakan salah satu penyebab ketegangan sosial dan konflik. Namun, perspektif ini mendapat sanggahan bahwa konflik tidak selalu bisa diredam dengan cara mengurangi kemiskinan. Di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak menjamin terwujudnya keamanan karena pembangunan justru menyebabkan terjadinya berbagai perubahan yang bisa menantang *status quo*, menyebabkan destabilisasi dan—pada gilirannya—justru bisa menstimulasi ketegangan sosial dan konflik.

Perspektif kedua melihat bahwa situasi yang tidak aman akibat ketegangan sosial atau kekerasan menimbulkan berbagai biaya yang harus ditanggung masyarakat. Biaya konflik ini merupakan beban ekonomi besar yang menyebabkan berkurang atau hilangnya aset dan kekayaan. Selain itu, dalam situasi yang tidak aman orang sulit untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya karena tidak bisa bekerja. Akibatnya, penghasilan menurun. Karena tidak aman, suplai barang dan jasa juga terhambat dan mengakibatkan harga-harga melambung tinggi. Menurut perspektif ini ketegangan sosial dan konflik bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Perdebatan tentang hubungan kausal antara kemiskinan dan konflik juga diperkaya oleh pandangan bahwa di antara keduanya terdapat saling pengaruh yang kompleks dan dinamis sehingga sulit untuk ditentukan arah hubungan kausalnya. Pada awalnya dapat terjadi bahwa tekanan ekonomi yang besar memudahkan tersulutnya kekerasan di antara kelompok masyarakat. Namun, berlarut-larutnya konflik justru membuat kemiskinan di masyarakat makin parah. Sekalipun demikian, tidak semua anggota masyarakat dirugikan oleh konflik yang terjadi. Tak jarang terdapat kelompok-kelompok yang justru diuntungkan. Kelompok-kelompok ini berkepentingan untuk mempertahankan situasi

konflik demi keuntungan mereka. Karena itu, untuk tujuan analitis, perlu dipisahkan antara faktor-faktor yang menjadi latar belakang konflik, faktor-faktor penyulut konflik (terbuka), dan faktor-faktor pelestari konflik.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengkaji hubungan antara kemiskinan dan konflik dari perspektif kausalitas tertentu, melainkan untuk mengkaji dan memahami bagaimana mobilitas sosial, dinamika kemiskinan, dan konflik saling memengaruhi dalam suatu konteks tertentu (misalnya dalam wilayah atau komunitas tertentu). Untuk itu, perlu diidentifikasi apa saja yang terjadi saat konflik menyebabkan kemiskinan dan saat kemiskinan menimbulkan konflik. Selanjutnya, perlu pula diidentifikasi apakah konflik terkait dengan hal lain selain kemiskinan.

2.2.1 Apa yang Terjadi Saat Konflik Menyebabkan Kemiskinan?

Bahwa konflik bisa menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan pertama-tama dapat dijelaskan dengan mengacu pada biaya-biaya yang ditimbulkannya dan yang harus ditanggung masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik menimbulkan berbagai biaya baik langsung maupun tidak langsung. Khusus untuk konflik dengan kekerasan, biaya langsung berupa korban manusia (tewas, cedera, cacat) dan kerugian material. Jika konflik berlangsung lama dengan jumlah korban meninggal yang besar, maka jumlah penduduk nonproduktif (lanjut usia, anak-anak, dan penyandang cacat) akan menjadi lebih tinggi dari penduduk produktif sehingga rasio ketergantungan pun naik. Hal ini bisa membuat kemiskinan kian berlarut-larut. Biaya konflik yang tidak langsung berupa berbagai bentuk kemunduran sosial-ekonomi pada tingkat makro. Wilayah-wilayah yang dilanda konflik mengalami hal-hal seperti turunnya pendapatan per kapita, investasi, produksi pangan, pendapatan dari pajak serta memburuknya iklim usaha akibat biaya transaksi yang tinggi, monopoli, dan pungutan liar. Di wilayah konflik sering kali kinerja pemerintah juga menurun sehingga tidak mampu menyediakan berbagai pelayanan dasar seperti fasilitas perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain (Goodhand 2001).

Penjelasan kedua mengacu pada perubahan kekuasaan dan hak untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumber daya dan jasa. Konflik sering mengubah figurasi⁴ sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, konflik mengakibatkan perubahan hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan. Saat kekuasaan berubah maka aturan, kebiasaan, dan persepsi tentang hak dan kewajiban juga berubah. Dengan demikian, konflik bisa menyebabkan kelompok tertentu (biasanya yang kalah atau terpinggirkan) kehilangan akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya dan jasa. Kelompok-kelompok seperti inilah yang mengalami pemiskinan karena konflik. Studi-studi yang menggunakan perspektif *entitlement* (hak

⁴Istilah figurasi di sini mengacu pada konsep *social figuration* yang digunakan oleh ahli sosiologi, Norbert Elias. Figurasi terutama dilihat sebagai suatu proses sosial yang terdiri atas jalinan hubungan antarindividu. Dengan demikian, figurasi bukanlah struktur yang berada di luar jalinan hubungan antarmanusia tersebut. Figurasi adalah jalinan hubungan antarmanusia itu sendiri. Dalam konsep figurasi ini, individu dipandang sebagai terbuka, saling tergantung, dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, figurasi selalu dalam keadaan yang dinamis (berubah-ubah) (Ritzer, 2004: 368).

atas suatu sumber daya)⁵ untuk menjelaskan proses pemiskinan akibat konflik dapat dimasukkan dalam kelompok penjelasan kedua ini. Perspektif *entitlement* menjelaskan bahwa pemiskinan itu dapat terjadi karena adanya perubahan pada berbagai bentuk *entitlement* yang dimiliki anggota masyarakat, antara lain,

- a) perubahan pada *direct entitlement*. Misalnya, penduduk yang terpaksa mengungsi dan kehilangan akses dan kontrol terhadap berbagai aset (tanah, rumah, dll.) di tempat asalnya;
- b) perubahan pada *market entitlement*. Misalnya, kegiatan pasar yang terganggu/terhenti dan makin tingginya biaya transaksi di pasar akibat ketidakamanan dan terhambatnya suplai barang; dan
- c) perubahan pada *public entitlement*. Misalnya, penurunan kemampuan dan komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan warganya atau penurunan intervensi eksternal (jumlah dana dan aktivitas berbagai lembaga swadaya masyarakat) untuk membantu masyarakat di wilayah yang terkena konflik karena alasan keamanan atau perubahan kebijakan dan prioritas lembaga (Verstegen 2001).

Mekanisme pemiskinan yang terjadi di wilayah yang dilanda konflik juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri konflik yang terjadi, terutama jangka waktu, intensitas, dan skala konflik tersebut. Mekanisme pemiskinan makin banyak muncul dalam wilayah dan masyarakat yang terkena konflik berjangka panjang, berintensitas tinggi, dan berskala luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak semua ketegangan sosial dan konflik memiliki kapasitas untuk menyebabkan penurunan kesejahteraan secara signifikan.

2.2.2 Apa yang Terjadi Saat Kemiskinan Menimbulkan Konflik?

Kondisi ekonomi yang buruk menjadi ladang subur bagi tumbuhnya konflik. Hal ini cenderung dijelaskan sebagai kondisi kemiskinan yang membuat orang sulit mewujudkan harapannya dan mengalami ketidakpuasan, frustrasi, serta penderitaan (*grievance*) yang berlarut-larut. Hal-hal tersebut bisa mendorong orang atau kelompok melakukan agresi. Namun, penderitaan akibat kemiskinan kronis tidak selalu memicu konflik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih jauh (i) apakah semua jenis kemiskinan memiliki kapasitas yang sama untuk menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat; dan (ii) bagaimana penderitaan akibat kemiskinan berinteraksi dengan berbagai faktor lain dalam suatu konteks tertentu sehingga menimbulkan konflik.

Ketidakpuasan dan frustrasi akan lebih terasa saat orang membandingkan suatu keadaan yang memburuk dengan kondisi sebelumnya yang lebih baik. Dengan demikian, bukan

⁵Argumentasi utama dalam perspektif *entitlement* menyebutkan bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, misalnya, melalui mekanisme pasar dan hubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, cara-cara untuk menjamin legitimasi akses dan kontrol tersebut juga beragam, misalnya melalui adat istiadat, kesepakatan bersama, dan norma yang berlaku. Jadi, tidak hanya melalui sistem hukum formal. Penguasaan tanah, misalnya, dapat dilegitimasi berdasarkan adat dan tidak hanya berdasarkan sertifikat yang sah sesuai hukum agraria nasional.

Setiap prosedur legitimasi yang berbeda menghasilkan hubungan *entitlement* yang berbeda. Dengan demikian, *entitlement* yang dimiliki oleh seseorang tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan legal di masyarakatnya dan juga tergantung pada posisi orang yang bersangkutan di masyarakat. Jadi, *entitlement* tidak hanya mengacu pada hak, tetapi juga pada kekuasaan.

kemiskinan *per se*, tetapi “keadaan yang menjadi lebih buruk” yang bisa memicu konflik. Dengan demikian, proses pemiskinan relatif (*relative impoverishment*) menjadi relevan untuk memahami kaitan antara kemiskinan dan konflik. Menarik untuk dicatat bahwa berbagai studi menunjukkan bahwa kelompok yang mengalami kemiskinan kronis (atau kelompok yang paling miskin) sering kali bukanlah kelompok yang terlibat dalam pemberontakan atau konflik karena mereka biasanya paling tidak terorganisasi dan pasif. Pemberontakan akibat ketidakpuasan dan kefrustrasian cenderung dilakukan oleh kelompok yang mudah keluar-masuk kemiskinan (*transiently poor*) atau kelompok yang tidak miskin, tetapi sangat rentan untuk terpuruk dalam kemiskinan.

Terkait dengan ketidakpuasan, frustrasi, dan kecemburuan sosial karena proses pemiskinan relatif (misalnya karena merasa berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada orang/kelompok lain atau karena kondisi yang sedang dialami lebih buruk daripada kondisi sebelumnya), ada argumen yang menekankan peran kesenjangan sebagai pemicu konflik. Namun, berbagai studi tidak bisa menunjukkan hubungan yang jelas antara kesenjangan dan potensi konflik di suatu wilayah. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa kesenjangan tidak signifikan dan tidak berperan dalam kemungkinan terjadinya perang saudara (Collier dan Hoeffler dalam Cramer 2001). Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, sekelompok kecil orang kaya yang menikmati kemewahan luar biasa hidup berdampingan dengan mayoritas masyarakat yang masih terlilit kemiskinan. Selain kriminalitas sehari-hari, tampaknya kesenjangan seperti yang terjadi di Jakarta—sekalipun besar—tidak mudah menyulut protes dan kekerasan dengan intensitas tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi yang sama juga terjadi, misalnya di Brasil, di mana kesenjangan sangat besar, kriminalitas tinggi, dan kekerasan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak menimbulkan protes sosial. Kedua keadaan tersebut tampaknya mengandung sifat toleransi terhadap kesenjangan. Namun, apakah toleransi ini berlaku untuk setiap jenis dan tingkat kesenjangan? Adakah kesenjangan yang cenderung tidak ditoleransi dan berpotensi konflik? Di Afrika Selatan misalnya, kesenjangan ekonomi dan politik tumpang-tindih dengan polarisasi antara warga kulit putih dan kulit hitam (dengan rasisme). Dalam konteks ini, protes dan konflik sosial timbul dengan kekerasan.

Antropolog Charles Tilly memperkenalkan konsep kesenjangan kategorial (*categorical inequality*) (Wright 1999), yaitu perbedaan tajam keadaan ekonomi, sosial, dan politis antarkelompok dalam masyarakat yang juga menyebabkan polarisasi misalnya berdasarkan ras/etnisitas (kulit putih versus kulit hitam/berwarna), kepemilikan tanah (tuan tanah versus buruh tani/kuli), dan sejarah migrasi (warga lokal versus pendatang). Kesenjangan seperti inilah yang memiliki potensi lebih besar menimbulkan konflik dan kekerasan karena didasari oleh ikatan dan identitas kelompok (kategori) yang lebih kuat daripada sekadar perbedaan antarindividu. Umumnya, kelompok yang memiliki kapasitas untuk dimobilisasi dalam konflik dan pemberontakan adalah kelompok yang memiliki kohesi dan identifikasi yang kuat di antara anggotanya.

Selain itu, lokalitas juga merupakan hal penting untuk memahami potensi konflik dalam kesenjangan. Di tingkat lokal dan mikro (tempat tertentu dan terbatas), kesenjangan bisa dilihat dan dirasakan secara lebih nyata dan muncul dalam berbagai bentuk hubungan diskriminatif antarkelompok sehari-hari. Oleh sebab itu, kesenjangan yang ada di tingkat

lokal lebih berpotensi konflik daripada kesenjangan yang teridentifikasi di tingkat nasional (Cramer 2001).

2.2.3 Apakah Konflik Terkait dengan Hal-Hal Lain Selain Kemiskinan?

Konflik tidak hanya terkait dengan ketidakpuasan/penderitaan dan kemiskinan. Studi menunjukkan bahwa sumber daya, kekayaan, dan kondisi berkelimpahan juga bisa menjadi penyebab konflik karena keinginan untuk menguasainya (Collier dalam Goodhand, 2001) Seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak setiap orang/kelompok dirugikan atau dimiskinkan oleh konflik. Di beberapa kasus, konflik memunculkan "pemenang" yang justru bisa memperkaya diri dalam situasi konflik tersebut (misalnya dengan melakukan praktik monopoli terhadap barang dan jasa tertentu). Kelompok pemenang ini berkepentingan untuk membiarkan dan bahkan membuat konflik jadi berkepanjangan. Dengan demikian, konflik dapat ditimbulkan dan dilestarikan oleh keinginan dan keserakahan (*greed*) untuk mendapat keuntungan ekonomi dan bukan terutama akibat penderitaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menggali lebih jauh perbedaan dampak konflik bagi berbagai unsur dalam masyarakat, serta interaksi antara dampak dan sikap atau peran yang diambil oleh individu/kelompok tertentu dalam konflik.

Sejak di awal bab ini, jenis konflik yang sering dijadikan acuan adalah konflik terbuka dengan kekerasan. Namun, dalam studi "Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat", konflik diartikan secara lebih luas yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti ketegangan laten, perselisihan hukum,, hingga bentrokan terbuka. Oleh karena itu, perlu juga dibahas tentang konflik laten. Jenis konflik ini lebih sulit untuk ketahui dampaknya karena masyarakat tidak selalu sepenuhnya sadar akan berbagai manifestasi konflik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada konflik laten, lebih terbuka peluang untuk menyangkal atau tidak mengindahkan. Dalam studi tentang ketegangan antara kelompok-kelompok mapan dan unsur baru (pendatang) di suatu komunitas, Elias dan Scotson (1994) menunjukkan bahwa kohesi antara anggota suatu kelompok dan stigmatisasi terhadap kelompok lain merupakan hal-hal yang memelihara ketegangan, tetapi tidak harus menyebabkan eskalasi hingga konflik terbuka.

Dalam bab-bab selanjutnya kaitan antara mobilitas sosial, dinamika kemiskinan, dan konflik akan dikaji secara spesifik dalam konteks wilayah Timor Barat dan masalah pengungsian dari wilayah eks Timor Leste. Potensi konflik di kelima komunitas akan dikaji secara terpisah dan kemudian akan dicari pola keterkaitan dan mekanisme sebab-akibat yang paling umum untuk sebagian besar komunitas.

III. Konteks Regional: Wilayah Timor Barat

3.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sampel

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan yang terdiri atas 566 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan mencapai 47,3 ribu km² dan wilayah laut seluas 200 ribu km². Dari gugusan pulau tersebut, tercatat 42 pulau yang berpenghuni, termasuk empat pulau besar, yaitu Flores, Sumba, Timor Barat, dan gugusan Kepulauan Alor. Akses dari dan menuju ibu kota provinsi, Kupang, cukup mudah ditempuh dengan tersedianya beberapa alternatif transportasi, baik melalui darat maupun laut. Kemudahan akses ke Kota Kupang ini sangat membantu akses ke kabupaten lainnya terutama di wilayah Timor Barat, walaupun sering pula ditemukan kesulitan untuk mengakses daerah-daerah tertentu di dalam kabupaten, terutama pada musim hujan.

Provinsi NTT terdiri atas 15 kabupaten dan 1 kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 kabupaten di wilayah Timor Barat terpilih menjadi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu. Di Kabupaten Kupang, Desa Eki⁶ terpilih sebagai desa penelitian dan RW 4, Dusun Lopes terpilih sebagai komunitas penelitian. Untuk kabupaten Timor Tengah Selatan terpilih Desa Malo dan Desa Korinus sebagai desa penelitian. Di Desa Malo, penelitian secara khusus dilakukan di komunitas Dusun Neves dan di Desa Korinus, penelitian dilakukan di Dusun Punu. Sementara itu, di Kabupaten Belu terpilih Desa Lay dengan komunitas penelitian di Dusun Amaral dan di Desa Beluta dengan komunitas penelitian di Dusun Soeares. Dasar pemilihan lokasi tersebut seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya adalah keterkaitan daerah tersebut dengan kehadiran pengungsi. Kabupaten Belu dipilih karena merupakan daerah yang paling banyak dipengaruhi oleh datangnya pengungsi, mengingat besarnya jumlah pengungsi yang berdiam di kabupaten tersebut. Kabupaten Kupang terpilih sebagai kabupaten yang juga cukup terpengaruh dengan kedatangan pengungsi dan mempunyai daya tarik sendiri karena berdekatan dengan Kota Kupang. Sebaliknya, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten yang paling sedikit terkena pengaruh pengungsian karena jumlah pengungsinya yang juga relatif lebih sedikit dibanding dengan kabupaten lainnya. Pemilihan desa dan komunitas penelitian di setiap kabupaten juga didasari oleh kriteria yang sama, yaitu banyaknya jumlah pengungsi dan pengaruhnya pada kehidupan penduduk lokal. Tabel 2 menunjukkan gambaran wilayah dan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara dan di kabupaten sampel.

⁶Nama-nama kecamatan, desa, dan dusun, serta nama orang adalah nama samaran.

Tabel 3. Gambaran Provinsi NTT dan Kabupaten Sampel

Deskripsi	NTT	Kab. Kupang	Kab. TTS	Kab. Belu
Luas area (km ²)	47,349.9	5,898.3	3,947.0	2,445.6
Penduduk (2004)	4,188,774	337,406	405,993	352,176
Kepadatan (per km ²)	88	57	103	144
Jumlah Kabupaten/Kota	16	-	-	-
Jumlah Kecamatan	203	28	21	17
Jumlah Desa & Kelurahan	2,569	186	212	166

Sumber: BPS NTT (2004/2005); BPS Kabupaten Kupang (2004).

Dibandingkan rata-rata iklim di Indonesia, iklim di Provinsi NTT termasuk sangat kering. Musim kemarau berlangsung lama, sekitar delapan sampai sembilan bulan dalam setahun dengan musim penghujan yang hanya berlangsung selama tiga sampai empat bulan. Kondisi alam di hampir sebagian besar wilayah NTT berbukit-bukit. Dengan kondisi iklim dan alam yang demikian, pertanian ternyata masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi hampir sebagian besar penduduknya. Kontribusi sektor pertanian pada perekonomian di NTT pada produk domestik regional bruto mencapai sekitar 42%. Komoditas pertanian yang diusahakan oleh masyarakat pada umumnya adalah tanaman pangan (jagung, padi, dan ubi kayu), serta tanaman perkebunan (kopi, jambu mete, kelapa, kemiri, kapuk, dan vanili). Hasil peternakan yang banyak disumbang oleh NTT adalah sapi dan babi. Kabupaten Kupang menjadi produsen terbesar untuk hasil peternakan ini, yaitu sebesar 25% dari total produksi NTT. Di luar sektor pertanian, perekonomian di NTT juga ditunjang sektor industri pengolahan walaupun hanya kurang dari 2% dan juga sektor perdagangan dan jasa walaupun dalam skala yang masih terbatas dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Kupang. Mata pencaharian penduduk di kabupaten sampel sebagian besar adalah petani, termasuk peternak dan perkebunan. Di Kabupaten TTS, selain terdapat potensi perikanan, hasil pertanian yang cukup signifikan antara lain adalah singkong, ubi, dan berbagai macam kacang, di antaranya kacang kedelai. Hasil pertanian yang utama di Kabupaten Belu termasuk kapuk, coklat, kopi, kacang mete, dan lainnya.

Sarana infrastruktur di provinsi NTT masih relatif terbatas. Kondisi jalan dan transportasi yang menghubungkan antarkota, antarkabupaten, terutama antardesa masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini yang umumnya menjadi faktor penghambat distribusi hasil pertanian. Di beberapa desa di kabupaten sampel, masih ditemukan para petani yang harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan sarana transportasi yang terbatas untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Selain jalan dan sarana transportasi, ketersediaan saluran irigasi, perpipaan maupun bak penampungan air di tingkat desa juga masih sangat terbatas. Akibatnya, para petani kerap kali harus menghadapi gagal panen terutama di musim kemarau yang berkepanjangan karena ketiadaan fasilitas pengairan ini.

Walaupun secara umum perekonomian NTT mengalami perbaikan selama 2001–2006, tetapi kondisinya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari rendahnya

GDRP per kapita. Pada 2003, GDRP per kapita di NTT hanya mencapai 2,2 juta rupiah, dan untuk kabupaten sampel berkisar antara 1,7 juta rupiah–1,9 rupiah. Penduduk NTT juga pada umumnya miskin. Menurut data BPS, pada 2004 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 16,67%, sedangkan jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 27,86% atau lebih dari satu setengah kali lipat dari angka kemiskinan nasional. Di antara kabupaten studi, kabupaten TTS memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi, yaitu 37,4% sementara Kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah, yaitu 10,7%.

Tabel 4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan Kabupaten Sampel, 2004

Kabupaten/Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	% Penduduk Miskin
Kab. Kupang	109,0	32,68
Kab. TTS	149,5	37,38
Kab. Belu	70,4	20,51
Provinsi NTT	1.152,1	27,86
Nasional		16,67

Kondisi kemiskinan di NTT juga ditunjukkan oleh rendahnya angka kualitas hidup manusia melalui indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM) sebagaimana terlihat dalam Tabel 5. Kedua indeks tersebut menunjukkan rendahnya kualitas hidup di NTT dibandingkan angka nasional. Pada 2002, angka IPM dan IKM NTT masing-masing sebesar 60,3 dan 28,9 jauh lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 65,8 dan 22,7. Tingkat harapan hidup, misalnya, secara nasional mencapai 66,2 tahun, lebih tinggi daripada usia harapan hidup di NTT yang hanya 63,8 tahun. Demikian juga dengan indikator angka anak di bawah lima tahun (balita) kurang gizi yang angkanya mencapai 38,8%, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 25,8%. Kondisi pembangunan manusia di tiga kabupaten sampel kurang lebih sama. Sejalan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, Kabupaten TTS juga menduduki posisi yang lebih rendah dibandingkan dua kabupaten lainnya untuk indeks kemiskinan manusia, terutama untuk presentase penduduk yang mempunyai akses ke air bersih (49,9) dan persentase balita kurang gizi (50,5).

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Nasional, Provinsi NTT, dan Kabupaten Sampel

	Indonesia	Provinsi NTT	Kab. Kupang	Kab. TTS	Kab. Belu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,8	60,3	56,9	57,7	58,3
Harapan hidup	66,2	63,8	64,2	65,7	63,7
Tingkat melek huruf	89,5	84,1	80,7	79,1	79,3
Rata-rata lama sekolah	7,1	6,0	5,4	5,3	5,8
Pengeluaran per kapita	578,8	563,1	531,6	536,1	552,9
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	22,7	28,9	27,5	29,5	27,3
Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia hingga 40 (%)	15,0	19,2	18,4	15,9	19,3
Tingkat buta huruf (dewasa)	10,5	15,9	19,3	20,9	20,7
Presentase tanpa akses ke air bersih	44,8	46,8	36,9	49,9	42,4
Presentase tanpa akses ke sarana kesehatan	23,1	32,8	30,8	19,3	18,0
Balita kurang gizi	25,8	38,8	41,8	50,5	46,3

Sumber: BPS, Bappenas, dan UNDP Indonesia Human Development Report 2004

3.2 Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat

Penduduk NTT terdiri atas berbagai macam kelompok etnis. Paling tidak terdapat 40 kelompok etnis baik besar maupun kecil yang tersebar di semua wilayah. Keberagaman kelompok etnis serta budaya menjadi simbol identitas sekaligus ciri khas karakter dan kehidupan penduduk NTT mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Beberapa kelompok etnis yang cukup besar dan dikenal dengan budayanya yang berbeda-beda adalah Alor, Rote, Flores, Sumba, Kemak, dan Tetun. Kedua suku terakhir merupakan suku yang dominan dan paling banyak menghuni wilayah Timor Barat.

Kehidupan penduduk NTT masa sebelum penjajahan sampai kini selalu diwarnai dengan keragaman hubungan antarkelompok etnis. Pada saat itu sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem kerajaan, dengan raja-raja kecil yang menguasai dan memerintah wilayah tertentu. Di Pulau Rote dan Ndao, sebagai contoh, terdapat 18 suku atau kerajaan kecil yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya (Adiyoga dan Herawati 2003). Kondisi demikian bisa terjadi karena umumnya suku-suku di NTT menganut sistem genealogis teritorial. Mereka percaya bahwa seluruh warga suku berasal dari satu keturunan yang memiliki budaya, bahasa, dan wilayah adat tertentu. Oleh karena itu, setiap kelompok etnis umumnya hidup dalam komunitas-komunitas yang cenderung bersifat eksklusif. Hal ini menyebabkan masyarakat NTT mengalami keterpisahan secara kultural dan tidak memiliki tradisi kebersamaan yang kokoh. Di wilayah Timor Barat, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang, mayoritas penduduknya

terdiri atas suku Dawan atau Atoni Pah Meto, sementara di Kabupaten Belu, mayoritas penduduknya adalah suku Tetun.

Sistem pemerintahan yang menonjol pada masa kerajaan ini adalah sistem patron-klien, terutama antara kelompok penguasa dengan rakyat biasa dan ditandai pula dengan kesetiaan yang tinggi pada kelompok penguasa tersebut. Norma dan aturan yang berlaku di masyarakat pada waktu itu pun masih sangat kuat mengacu pada hukum dan norma adat serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh para "raja" penguasa, termasuk para keluarganya. Raja mempunyai kekuatan yang sangat besar dan mutlak terhadap rakyatnya. Dalam kondisi ini seorang raja dengan kerajaan yang sangat kecil dapat mempunyai kekuasaan yang mutlak dan besar terhadap wilayah yang sangat luas. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa sistem pemerintahan NTT pada saat itu seperti layaknya sebuah negara kecil yang ada dalam negara besar.

Selain hubungan antarsuku atau kelompok etnis yang berbeda, kehidupan masyarakat NTT juga diwarnai oleh interaksi yang terjalin antara penduduk lokal dengan para pendatang dari berbagai negara seperti Portugis, Belanda, dan Cina yang berlangsung pada masa sebelum maupun pada saat penjajahan. Para pendatang tersebut pada umumnya adalah pedagang, tetapi selain berdagang mereka juga secara tidak langsung memperkenalkan sistem pemerintahan yang baru kepada masyarakat NTT, yaitu dengan makin diadopsinya sistem pemerintahan yang tidak lagi mengacu pada sistem kerajaan. Apalagi sejak terbentuknya NTT sebagai sebuah provinsi tersendiri pada 20 Desember 1958 (menurut UU No. 64), sistem pemerintahan yang ada makin menyesuaikan dengan sistem yang berlaku secara nasional, yaitu menurut UU No. 74 tentang Pemerintahan Desa. Sistem baru tersebut menuntut adanya persamaan struktur pemerintahan daerah yang secara langsung berarti mengurangi peran dari para tokoh adat. Namun, ternyata sampai saat ini sistem dan nilai adat masih sangat kuat berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan di beberapa tempat, di antaranya di dua kabupaten sampel penelitian ini, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu, masih ditemukan praktik-praktik feodalisme lokal, di mana para tokoh adat masih mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam masyarakat. Ritual adat yang masih berlangsung di masyarakat biasanya berkaitan dengan siklus hidup seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pelaksanaan ritual adat ini bukan hanya menuntut keterlibatan secara fisik seperti bantuan tenaga, tetapi juga secara materi. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan, di antaranya karena sumbangan adat tersebut biasanya cukup besar, bahkan sering kali dianggap sangat besar, terutama jika dikaitkan dengan kondisi penghidupan kebanyakan warga yang masih kekurangan.

3.3 Potensi Konflik

Keanekaragaman kelompok etnis dengan sistem nilai sendiri-sendiri, termasuk tingginya intensitas interaksi dengan pendatang sejak masa sebelum kolonialisme, telah menjadikan NTT sebagai provinsi yang cukup rawan terjadinya konflik dan ketegangan sosial. Jenis konflik bervariasi, mulai dari perebutan tanah antara kelompok masyarakat penduduk asli dan pendatang, perjudian, sampai pelanggaran hukum adat baik antar maupun intrakelompok etnis. Konflik terpanjang yang pernah terjadi di wilayah Timor Barat, yakni konflik di perbatasan Kabupaten Belu, adalah konflik antara pemerintah

Indonesia-yang didukung oleh kelompok prointegrasi-dan kelompok proindependen. Konflik yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun ini telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, ketegangan-ketegangan sosial masih terus berlanjut di beberapa tempat bahkan sampai saat studi dilakukan. Konflik tersebut berawal dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menganeksasi wilayah Timor Leste dan mengintegrasikannya ke dalam NKRI pada 1976, yang telah menimbulkan pertentangan di berbagai kelompok di masyarakat. Konflik dan ketegangan sosial tersebut berlangsung terus-menerus dan telah mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Salah satu upaya yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meredakan konflik pada saat itu adalah dengan melaksanakan referendum kemerdekaan pada 30 Agustus 1999, yang diprakarsai pemerintahan B.J Habibie. Melalui referendum tersebut, rakyat Timor Leste diberikan kesempatan untuk memilih bergabung kepada Indonesia atau menjadi negara sendiri yang independen. Hasilnya, sebanyak lebih dari 70% para pemilih, memutuskan untuk menjadi negara sendiri dan lepas dari Indonesia. Akibat dari keputusan tersebut, gelombang pengungsi yang merupakan para pendukung prointegrasi berdatangan dari Timor Leste, dan mengalir ke kabupaten-kabupaten di wilayah Timor Barat.

3.3.1 Pengungsi Eks Timor Leste

Masuknya gelombang pengungsi tersebut telah mengubah komposisi demografis di wilayah Timor Barat, terutama di Kabupaten Belu, dan juga kabupaten lainnya seperti Kupang dan beberapa daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Pada 2006, jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Kabupaten Belu. Belu menjadi tujuan utama para pengungsi, selain karena faktor jarak yang relatif dekat, penduduk lokal/asli di kabupaten tersebut mempunyai kesamaan budaya dengan para pengungsi. Mereka juga masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat satu sama lain. Hal ini ditambah lagi dengan peluang ekonomi yang cukup banyak di Kabupaten Belu dibandingkan kabupaten lainnya di Timor Barat. Dengan pertimbangan itu, para pengungsi berharap bahwa mereka dapat dengan lebih mudah diterima di Kabupaten Belu, sekaligus juga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan sambil menunggu proses penyelesaian perselisihan.

Selain Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang juga menjadi tujuan utama para pengungsi. Dengan posisinya yang dekat dengan ibu kota serta karakteristiknya yang semiurban, Kabupaten Kupang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengungsi-pendatang tersebut. Selain itu, kedatangan mereka ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang juga merupakan upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil pendataan ulang warga eks pengungsi Timor Leste pada Juni–September 2005 menunjukkan bahwa jumlah warga eks pengungsi terbanyak berlokasi di Kabupaten Belu, disusul oleh Kabupaten Kupang (Tabel 6). Di Kabupaten Belu, jumlah pengungsi terbanyak berdiam di Kecamatan Z, yaitu sebanyak 2.479 kepala keluarga (KK) atau 12.185 jiwa pada 2006. Untuk wilayah Timor Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki jumlah pengungsi yang paling sedikit, yaitu hanya 632 KK pada 2006.

Tabel 6. Jumlah Pengungsi di NTT, 2005

No	Kabupaten/Kota	KK	Jiwa		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Kupang	1.141	---	---	---
2	Rote Ndao	---	---	---	---
3	Kupang	2.553	---	---	11.360
4	Timor Tengah Selatan	632	1.429	1.383	2.812
5	Timor Tengah Utara	2.772	---	---	11.176
6	Belu	15.274	34.150	36.303	70.453
7	Alor	918	---	---	3.501
8	Lembata	61	116	92	208
9	Flores Timur	---	---	---	---
10	Sikka	386	---	---	1.755
11	Ende	---	---	---	---
12	Ngada	339	855	702	1.577
13	Manggarai	---	---	---	---
14	Manggarai Barat	138	---	---	521
15	Sumba Timur	154	233	180	413
16	Sumba Barat	156	338	322	660
Jumlah		24.524	37.121	38.982	104.436

Sumber: Bidang Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi NTT 2006. Data masih bersifat tentatif karena beberapa kabupaten belum melengkapi data sesuai format yang telah ditetapkan.

Keberadaan eks pengungsi ini menjadi masalah sendiri bagi pemerintah daerah. Pihak kabupaten mengakui bahwa kapasitas mereka terbatas dalam menangani masalah eks pengungsi ini, ditambah lagi sebagian besar bantuan dari lembaga asing telah berhenti pada 2000 dan program rehabilitasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Di antara permasalahan yang ada ialah masih banyaknya pengungsi yang tinggal di kamp-kamp pengungsian darurat dengan akses yang sangat terbatas pada sarana kebersihan, kesehatan, dan pendidikan. Eks pengungsi yang telah pindah bermukim di antara penduduk lokal maupun yang telah direlokasi ke permukiman yang telah disediakan pemerintah pun masih belum terlepas dari masalah, terutama berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di permukiman baru tersebut, sumber daya yang tersedia untuk diolah terbatas jumlahnya. Akibatnya di beberapa desa, terutama di Eki, Lay, dan Beluta, kerap kali terjadi perselisihan dan ketegangan sosial antara penduduk asli dengan warga eks pengungsi akibat perebutan sumber daya tersebut. Beberapa bentuk perselisihan yang sering muncul adalah perebutan lahan pertanian maupun sumber daya lainnya termasuk pekerjaan di sektor informal antara penduduk asli dengan kelompok eks pengungsi. Perebutan sumber daya ini di kemudian hari ternyata membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan hubungan kedua belah

pihak. Dalam bab-bab selanjutnya akan dikaji bagaimana interaksi antara dua kelompok ini terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk lokal.

IV. Konteks Lokal: Desa dan Komunitas

4.1 Kabupaten Kupang

4.1.1 Desa Eki

a) Kondisi Lokal

Pada 2006, Desa Eki merupakan satu dari sepuluh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan O. Sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar dengan luas wilayah 17,70 km² atau sebesar 8,07% dari luas wilayah Kecamatan O. Desa Eki terdiri atas 5 dusun,⁷ 19 RW, dan 46 RT. Terletak 25 km dari Kota Kupang, penduduk desa ini mencapai 1.303 KK atau 5.501 jiwa. Sebagai desa yang dilalui “jalur lintas Timor” dan berdampingan dengan ibu kota kecamatan, Desa Eki menjadi “wilayah terbuka” bagi masyarakat berbagai daerah. Tidak mengherankan bila masyarakat Eki terdiri atas berbagai suku/etnis yang jumlahnya masing-masing hampir berimbang, yaitu suku Timor, Rote, Flores, dan Sabu, bahkan sebagian dari suku Jawa dan Bugis. Mayoritas penduduknya beragama Protestan (60%) dan Katolik (30%). Di desa ini banyak ditemui organisasi yang bersifat kesukuan (etnis) dan keagamaan.

Mayoritas penduduk Desa Eki bekerja sebagai petani, baik petani pemilik maupun penggarap, juga terdapat banyak pegawai negeri, wiraswasta/pengusaha/pedagang, peternak (babi, sapi, ayam), nelayan, sopir bus atau angkutan, dan buruh. Sejak lama desa ini menjadi pusat pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang, dengan adanya balai benih induk pertanian, balai latihan penyuluh pertanian, dan balai informasi penyuluhan pertanian. Pada umumnya masyarakat memiliki pekerjaan lebih dari satu, seorang pegawai negeri pada umumnya juga bekerja sebagai petani.

Geliat ekonomi di Desa Eki pernah ditandai dengan keberadaan dua pabrik yang menyerap tenaga kerja penduduk lokal, yaitu pabrik penyamakan kulit sapi (1980–1982) dan pabrik rumput laut (1999–2002). Kedua pabrik ini akhirnya ditutup karena masyarakat setempat memprotes timbulnya limbah dan polusi bahan kimia dalam bentuk bau yang menyengat yang sampai ke rumah-rumah warga.

Di desa ini, yang menjadi komunitas yang diteliti adalah RW 4 yang terletak di Dusun Lopes. Jumlah penduduknya 600-an jiwa atau sebanyak 100 KK pada 2006. Sebagian besar beragama Protestan (48%) dan Katolik (48%), lainnya beragama Islam. Di RW 4 ini juga sudah tersedia berbagai infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik, air bersih (PAM), pasar, wartel, kapel (stasi), dan terminal yang letaknya berbatasan dengan RW 5. Upah rata-rata buruh kasar berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per hari, tidak dibedakan untuk buruh laki-laki dan perempuan. Besaran upah buruh ini lebih besar tiga sampai empat kali lipat daripada upah buruh pada sepuluh tahun lalu (1996), yaitu Rp5

⁷Yaitu dusun Kulit, Lopes, Santana, Simon, dan Lobato.

ribu per hari. Di RW 4 juga terdapat kamp pengungsi, berlokasi di terminal dan pasar. Di RW 4 ini, pada 2006 terdapat 2.000 lebih pengungsi eks Timor Leste, yang pada awal kedatangannya mencapai 17 ribuan pengungsi. Para pengungsi menempati areal terminal bemo (angkutan kota) dan pasar yang sebagian besar wilayahnya berada di wilayah RW 4 dan lainnya di RW 5. Interaksi antara kelompok pengungsi dan penduduk lokal ternyata di kemudian hari menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Desa Eki merupakan desa kedua termiskin di Kecamatan O dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 677 rumah tangga dari 1.050 yang ada atau sebesar 64,5% menurut data profil kemiskinan pada 2002. Tingginya persentase rumah tangga miskin di Desa Eki ini menarik untuk dipelajari lebih jauh, mengingat desa ini terletak di jalur perekonomian (jalan lintas Timor) dan bersebelahan dengan kelurahan yang menjadi ibu kota kecamatan.

b) Mobilitas Sosial: Perspektif dari Bawah

(1) Kecenderungan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kemiskinan menurut BPS berbeda dengan kondisi kemiskinan menurut masyarakat. Kelompok diskusi terfokus laki-laki (FGD), membedakan tingkat kesejahteraan masyarakat (desa dan komunitas) menjadi lima kelompok pada 2006, dan tiga kelompok pada 1996. Kelima kelompok tersebut adalah *susanae* (melarat), *pas-pas*, *pas*, *cukup*, dan *amuit* (kaya). Penambahan anak tangga disebabkan munculnya tingkatan baru, yaitu cukup yang merupakan gabungan dari tingkat/kelompok pas dan pas-pasan yang saat itu mengalami kenaikan kesejahteraan, dan kelompok *amuit* yang mengalami penurunan kesejahteraan. Kelompok diskusi perempuan mengidentifikasi tiga kelompok kesejahteraan, yaitu *amamuit* (miskin), sederhana, dan *amuit* (kaya). Perbedaan kelompok ini berdasarkan atas beberapa ciri-ciri seperti kondisi rumah, tingkat pendidikan (anak dan kepala keluarga), kesehatan, pekerjaan, penghasilan, (partisipasi) dalam kegiatan sosial, pola makan, dan aset.

Menurut para peserta diskusi, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, kondisi kesejahteraan masyarakat di tingkat komunitas dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini cenderung mengalami perbaikan, terlihat dari menurunnya proporsi penduduk miskin, dan bertambahnya proporsi penduduk sedang/sederhana, bahkan kelompok kaya.

Tabel 7a dan 7b menggambarkan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu sepuluh tahun (1996–2006).

Tabel 7a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Eki (FGD Perempuan)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin (<i>Amamuit</i>)	Sederhana	Kaya (<i>Amuit</i>)
1996	50%	23%	27%
2006	33%	29%	38%

Tabel 7b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Eki (FGD Laki-laki)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Melarat (<i>Susanae</i>)	<i>Pas-pas</i>	Pas	Cukup	Kaya (<i>Amuit</i>)
1996	6%	61%	33%	-	-
2006	1%	58%	25%	13%	3%

Di bawah ini diuraikan bagaimana perbaikan tersebut terjadi, kelompok mana yang mengalami perubahan, dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Selain itu, akan diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dalam dua tingkatan, yaitu di tingkat komunitas dan di tingkat rumah tangga/individu.

(2) Faktor di Tingkat Komunitas

Faktor atau peristiwa di tingkat komunitas terbagi dalam peristiwa atau faktor yang memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat secara positif (membantu meningkatkan kesejahteraan) dan secara negatif (menghambat atau menurunkan kesejahteraan). Faktor yang dinilai paling membantu kesejahteraan warga adalah pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan bendungan Tilong dan terminal, program bantuan, terutama dari LSM lokal maupun internasional, serta program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Pembuatan bendungan Tilong pada 1998 oleh pemerintah sangat membantu para petani meningkatkan pendapatan. Dengan adanya bendungan, para petani bisa menanam padi sampai dua kali dalam setahun, yang sebelumnya hanya sekali dalam setahun karena minimnya hujan. Selain menanam padi, para petani juga sudah bisa menanam sayur karena air sudah tersedia. Warga secara umum juga dimudahkan dengan adanya terminal karena memperlancar mobilitas mereka untuk keperluan sehari-hari. Berbagai bantuan yang diterima oleh masyarakat desa, di antaranya dalam bentuk pembuatan jalan tani (Program Pengembangan Kecamatan/PPK), penangkaran bibit (Gerhan/Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), makanan bergizi (World Food Programme dan Yayasan Marga Kasih), bantuan bidang kesehatan, dan pendidikan (bantuan operasional sekolah/BOS, bantuan dari LSM U), juga sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Bantuan tersebut memperlancar kegiatan mereka sehari-hari, baik dalam mencari nafkah (memanfaatkan jalan tani) maupun untuk kebutuhan anak sekolah dan perawatan kesehatan.

Peristiwa-peristiwa yang dinilai menghambat peningkatan Kesejahteraan warga adalah kedatangan pengungsi eks Timor Leste dan naiknya harga BBM pada 2004 dan 2005. Kehadiran pengungsi, menurut sebagian besar warga, dirasakan mengganggu karena membuat kompetisi mata pencaharian menjadi makin ketat. Para pengungsi menyediakan barang dan jasa yang sama, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Misalnya, seorang pengungsi bekerja sebagai buruh, maka pengungsi tersebut mau dibayar lebih murah daripada upah rata-rata penduduk lokal. Demikian juga, para pengungsi menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, sayur-sayuran, atau buah-buahan dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan penduduk lokal. Kondisi seperti ini jelas menurunkan pendapatan penduduk

lokal yang dalam jangka panjang akan menurunkan kesejahteraan mereka. Dampak lainnya, para eks pengungsi tersebut juga mengambil alih dan mengolah lahan milik penduduk lokal sehingga penduduk lokal tidak bisa bertanam, hal yang berakibat pada menurunnya pendapatan mereka. Bagi lingkungan, kehadiran eks pengungsi juga membawa dampak yang merusak. Mereka kerap membuang air besar sembarangan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap di mana-mana dan menebangi hutan untuk keperluan kayu bakar yang pada akhirnya menyebabkan banjir.

Kenaikan BBM pada 2004 dan 2005 berkorelasi erat dengan tingkat dan jumlah pendapatan yang mereka terima. Kenaikan ini, secara langsung berdampak pada harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk harga sarana produksi pertanian (saprodi), alat-alat operasional untuk pertanian, layanan kesehatan, dan harga bahan bakar itu sendiri. Sementara itu, bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam proses produksi; yaitu solar yang digunakan sebagai bahan bakar traktor untuk membajak sawah. Tidak bisa dihindari, kenaikan harga tersebut memperburuk kondisi penghidupan masyarakat. Pada saat yang bersamaan, sering terjadi beberapa peristiwa yang mengganggu kelancaran pekerjaan penduduk, seperti pencurian hewan ternak, kekeringan, dan hama penyakit.

(3) Faktor di Tingkat Rumah Tangga/Individu

Dalam diskusi juga disebutkan faktor-faktor di tingkat individu yang memengaruhi kesejahteraan seseorang/rumah tangga. Faktor yang dominan, baik yang berdampak positif maupun negatif, menyangkut sikap dan perilaku individu. Sikap atau perilaku yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan adalah kemauan bekerja keras, giat berusaha, dan menjaga hubungan baik antarsesama. Faktor ini berulang kali dilontarkan oleh peserta dalam diskusi yang berbeda-beda, "...dengan giat berusaha biar ada masalah, pasti keberhasilan itu ada" atau "... usaha apapun *kalo* tidak ada kemauan dari dalam diri sendiri pasti sia-sia dan tidak berhasil."

Di luar faktor perilaku tadi, faktor yang juga dianggap penting dan berpengaruh positif adalah faktor pendidikan termasuk keterampilan, baik yang diperoleh melalui kursus maupun pelatihan. "...keterampilan makin baik sehingga dapat buka bengkel", "...pendidikan yang menunjang..." Pentingnya faktor pendidikan, selain disampaikan dalam diskusi juga tercermin dari hasil survei rumah tangga yang menunjukkan bahwa sebanyak 33% dari kelompok *mover*, berpendidikan sekolah lanjutan atas, bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi/akademi, yaitu sebanyak 20%. Kebalikannya dengan kelompok yang tetap miskin (*chronic poor*), sebagian besar dari mereka hanya berpendidikan tamat SD (43%), dan hanya 29% yang tamat sekolah menengah atas.

Perilaku yang dinilai bisa menghambat usaha untuk lebih sejahtera atau justru membuat orang jatuh miskin antara lain adalah sikap malas, tidak ada kemauan berusaha, berfoya-foya, mabuk-mabukkan, dan kebiasaan berjudi. Merajalelanya kegiatan perjudian juga didorong oleh kebiasaan masyarakat untuk berkumpul pada setiap peristiwa kematian. Semua faktor tersebut bisa menyebabkan akumulasi aset dan peningkatan pendapatan menjadi terhambat atau bahkan habis. Contoh yang sering ditemui adalah (kepala) rumah tangga yang memiliki cara hidup yang boros, bermain judi atau "jajan" di tempat pelacuran, serta adanya warisan yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya; "kalau sudah

bermain judi berarti harta di rumah bisa habis” (FGD, perempuan, 45). Faktor penghambat lainnya adalah usia yang menyebabkan kondisi kesehatan yang makin lama makin menurun. Selain faktor tersebut, ketiadaan modal juga menjadi penghambat; “Sulit maju, karena kemauan ada, tetapi faktor pendukung seperti modal kurang” (FGD, laki-laki, 40).

c) Potensi Konflik

Seperti yang mengemuka dalam diskusi, baik dengan kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan, kondisi di Desa Eki secara umum dapat dikatakan tidak aman, sejalan dengan meningkatnya intensitas tindakan kriminal terutama sejak kedatangan pengungsi pada 1999. Tindakan kriminal tersebut meningkat mulai dari jumlah, variasi, dan intensitasnya, di antaranya seperti pencurian (hewan ternak, hasil kebun), perusakan tanaman, perkelahian, perjudian, mabuk-mabukkan, penyerangan, pembakaran rumah, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Sebagian besar tindak kriminalitas yang terjadi tersebut terkait dengan keberadaan eks pengungsi di Desa Eki. Jadi bisa disebutkan bahwa ketegangan sosial bahkan konflik yang terjadi pada dasarnya adalah antara penduduk lokal dengan eks pengungsi. Tidak jarang, ketegangan makin bertambah jika ada keributan antara dua pihak tersebut. Hal ini karena eks pengungsi yang berada di desa sebelah juga turut membantu eks pengungsi yang ada di Desa Eki.

(1) Sejarah Konflik

Pada awalnya kedatangan eks pengungsi tersebut diterima dengan baik oleh warga dan musyawarah pimpinan daerah (muspida) setempat, bahkan warga sempat membantu pengungsi memenuhi kebutuhan mereka, seperti tempat tinggal dan makan. Jumlah pengungsi yang datang jauh melebihi jumlah penduduk lokal, yaitu 17.000 pengungsi dibandingkan dengan 5.000 penduduk lokal. Namun lambat laun, hubungan yang baik tersebut menjadi terganggu akibat munculnya tindakan kriminalitas dan konflik. Beberapa peristiwa konflik sempat mencuat serta kasus pencurian yang terjadi di desa meningkat sejak 1999. Selain itu, muncul juga kasus penggunaan lahan warga lokal oleh pengungsi, salah satunya digunakan untuk makam pengungsi. Pada 2000, 2001, dan 2003 terjadi beberapa kali perkelahian dan keributan antara penduduk lokal dengan pengungsi karena beberapa alasan seperti pajak bemo dan keributan pada saat para pengungsi sedang menyelenggarakan pesta. Pada 2004, terjadi demonstrasi oleh penduduk lokal akibat pendudukan tanah terminal oleh pengungsi. Salah satu konflik terbesar antara penduduk lokal dan pengungsi terjadi pada 1999 dan sempat membuat warga lokal mengungsi ke desa tetangga. Konflik ini akhirnya diselesaikan secara adat dan melibatkan tokoh masyarakat bahkan pihak yang berwenang di tingkat kabupaten, yaitu Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Perdamaian sempat tercipta, tetapi ketegangan tetap menyelimuti penduduk lokal karena masih adanya pengungsi yang tinggal di sekitar mereka. Peserta diskusi menyampaikan bahwa ketegangan sosial tersebut masih berlangsung satu tahun lamanya setelah kejadian. Berbagai upaya penyelesaian maupun pencegahan tindak kriminalitas telah dilakukan seperti membangun pos keamanan, meningkatkan kewaspadaan, ronda, menjaga sikap saling menghormati, dan menghargai sesama. Namun, upaya-upaya tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena pencurian dan ketegangan sosial masih saja tetap berlangsung.

(2) Dampak Konflik bagi Mobilitas Masyarakat

Dampak kehadiran pengungsi yang berbuntut pada konflik dan ketegangan sosial yang timbul antara kelompok pengungsi dan penduduk lokal dirasakan cukup luas. Dampak yang bisa dirasakan cukup besar dalam kehidupan penduduk lokal sehari-hari adalah menyangkut keberlangsungan mata pencaharian mereka. Dampak lainnya juga dirasakan berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum secara sewenang-wenang dan faktor lingkungan. Tindakan pencurian yang meresahkan warga adalah pencurian hewan ternak berupa sapi atau babi. Umumnya pencurian ini dilakukan di malam hari, khususnya pada saat terjadi pemadaman listrik.

Selain peternak, jenis mata pencaharian penduduk lokal lain yang ikut terpengaruh dengan adanya pengungsi adalah buruh harian, pedagang sayur dan buah-buahan, dan pengusaha jasa angkutan umum. Penduduk lokal yang bekerja sebagai buruh harian atau buruh kasar mendapat saingan yang berat karena pengungsi yang juga mengerjakan pekerjaan ini bersedia menerima upah yang lebih rendah daripada upah rata-rata. Begitu pula yang terjadi pada penduduk lokal yang harus bersaing dengan pengungsi menjual dagangannya, seperti sayur, buah-buahan, dan kayu bakar. Harga yang ditawarkan pengungsi lebih rendah daripada harga yang ditawarkan penduduk lokal. "Dulu kami jual sayur 10 ikat Rp1.000 sekarang 20-30 ikat Rp1.000, jadi tambah murah" (FGD tangga kesejahteraan; perempuan, 32). Menyangkut pengolahan lahan kebun, "Ada persaingan antara penduduk lokal dan pengungsi karena semua lahan dikerjakan oleh pengungsi" (FGD, perempuan, 59). Pekerjaan jasa angkutan umum yang ikut terpengaruh adalah pekerjaan sebagai sopir bemo. Selain saingan dari pihak pengungsi bertambah banyak, pengungsi juga mengutip uang pajak bemo yang keluar dari dan masuk ke terminal.

Semua hal tersebut berpengaruh pada pendapatan penduduk lokal yang makin lama makin berkurang. Dalam kondisi ini maka dapat dipahami mengapa para peserta diskusi berulang kali menyebutkan bahwa hal yang diperlukan untuk membantu penduduk keluar dari kemiskinan atau mempertahankan kesejahteraannya adalah kerja keras dan kemauan yang kuat. Kedua sikap hidup ini sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dengan pengungsi yang makin ketat. Uraian mengenai konflik di atas juga makin memperjelas kecenderungan perubahan kondisi kesejahteraan warga komunitas RW 4, yaitu walaupun mengalami perbaikan dalam rentang sepuluh tahun tetapi bisa disimpulkan bahwa perbaikan yang terjadi masih dalam skala yang terbatas dan banyak menghadapi kendala. Terlihat bahwa hanya sebagian kecil dari anggota komunitas yang merasakan manfaat dengan keberadaan pengungsi, yaitu terutama para pemilik kios yang menjual kebutuhan sehari-hari dan masyarakat yang menyewakan alat hiburan berupa meja biliar. Namun, hal ini tidak selamanya menguntungkan karena pengungsi yang membeli di kios umumnya berutang dan mereka yang kalah dalam permainan biliar kerap membanting stik pemukul bola atau menolak membayar setelah bermain.

4.2 Kabupaten Timor Tengah Selatan

4.2.1 Desa Malo

a) Kondisi Lokal

Desa Malo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan A. Jarak dari Desa Malo ke ibu kota kabupaten TTS sekitar 8 km. Desa ini sudah lama terbentuk, dimulai dari sistem *temukung* (sistem desa tradisional di TTS) hingga pembentukan desa gaya baru pada 1970. Desa ini telah tiga kali mengalami pemekaran. Tahun 1982 adalah pemekaran yang pertama, dari Desa Malo menjadi dua desa, Malo dan Olbo. Saat itu Desa Malo terdiri atas tiga dusun, Mate, Neves, dan Taulo. Tahun 1989 terjadi pemekaran lagi, Dusun Mate mekar menjadi desa baru. Pemekaran terakhir terjadi pada awal 2006. Pada 2005 jumlah penduduk Desa Malo adalah 686 KK atau 2803 jiwa. Penelitian dilakukan tepatnya di Dusun Neves.⁸

Mayoritas penduduk Malo memiliki mata pencaharian utama sebagai petani lahan kering (jagung, ubi kayu, dan palawija). Selain itu, ada petani yang juga menanam beberapa tanaman musiman, seperti alpukat dan jeruk. Sebagian dari mereka ada yang mendapat penghasilan tambahan dari tanaman berumur panjang seperti kelapa.

Di Malo sudah terdapat fasilitas kesehatan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dan tenaga bidan desa (bides). Saat ini sebagian masyarakat merasakan mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya program kesehatan dari pemerintah, melalui kartu sehat. Dengan kartu tersebut masyarakat tidak dipungut bayaran jika memeriksakan kesehatannya ke puskesmas atau rawat inap di rumah sakit. Tingkat pendidikan masyarakat Malo masih rendah. Hingga studi ini dilaksanakan masih ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke SMP. Sebagian sudah dapat menyekolahkan anaknya hingga ke SMA, dan hanya beberapa keluarga saja yang mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Pendapatan masyarakat Malo umumnya hanya berasal dari pertanian, yang sebagian besar hasilnya untuk makan sehari-hari. Akibatnya, biaya pendidikan merupakan hal yang

⁸Dusun Neves dipilih sebagai komunitas penelitian karena dua alasan. Pertama, di Dusun Neves terdapat eks pengungsi. Kedua, masyarakat Dusun Neves yang paling banyak terkena dampak sejak kedatangan pengungsi. Di samping itu, Dusun Neves adalah dusun yang paling banyak penduduknya dan terluas wilayahnya. Menurut cerita tua-tua adat, pembentukan Desa Malo berawal dari Dusun Neves. Dulu pusat pemerintahan desa ada di Dusun Neves.

Penduduk Dusun Neves tersebar di beberapa lingkungan besar dan kecil. Beberapa lingkungan kecil membentuk RT. Karena wilayah Dusun Neves cukup luas, maka masih terdapat beberapa lingkungan kecil yang terpencil dan sulit dijangkau. Pada saat musim hujan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Namun, pada waktu musim panas dapat ditempuh dengan kendaraan walaupun tidak sampai di lingkungan tersebut.

Berdasarkan data penduduk 2005 Desa Malo, warga di Dusun Neves mencapai sekitar 285 KK (1066 jiwa) terdiri atas 527 lak-laki dan 539 perempuan. Sebagian besar etnis Timor dan beragama Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduknya adalah petani lahan kering. Pada 2002–2006 sebagian warganya menanam bawang merah dan menjadi komoditas unggulan Dusun Neves. Pemasaran bawang merah sampai ke Kupang. Sebagian memasarkan sendiri ke pasar terdekat di Kabupaten Soe, sebagian menjual ke tengkulak atau menjual langsung ke pembeli yang datang pada saat panen. Tidak heran jika pada saat panen ada beberapa anggota masyarakat berprofesi sebagai tengkulak. Pekerjaan lain warga Dusun Neves adalah tukang ojek, tukang kayu, dan PNS.

sulit dijangkau. Sebagian besar masyarakat Malo beragama Kristen Protestan. Pada 1996 hanya ada satu gereja di Desa Malo, tetapi pada 2006 mencapai sembilan gereja.

Secara adat, tanah di Desa Malo masih dikuasai tuan tanah. Terdapat dua keluarga besar tuan tanah, yaitu Keluarga Maris dan Keluarga Hans. Keluarga Maris dari turunan laki-laki (suami), sedangkan Hans adalah turunan dari perempuan (istri). Keluarga Maris sangat berpengaruh di pemerintahan desa, dari kepala desa, ketua RK (rukun keluarga), kepala dusun, bahkan RT. Sebagian besar jabatan itu dipegang oleh keluarga Maris.

Berdasarkan data sekretaris desa, pada 2006, eks pengungsi Timor Leste yang berada di Desa Malo berjumlah sekitar 50 KK. Mereka tinggal di perumahan yang dibangun oleh pemerintah khusus untuk pengungsi. Perumahan itu terletak di Dusun Neves dan membentuk RT baru.

b) Mobilitas Sosial: Perspektif dari Bawah

Dari hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dapat disimpulkan bahwa selama 1996–2006 kondisi kesejahteraan masyarakat Malo secara umum meningkat. Ada berbagai peristiwa yang memengaruhi naik turunnya kesejahteraan warga dusun, baik secara positif maupun secara negatif.

Di tingkat komunitas, faktor-faktor yang dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hampir semuanya terkait dengan program bantuan, baik dari pemerintah maupun dari LSM, misalnya kredit dari PPK untuk warga yang punya usaha produktif (1995), bantuan beras untuk masyarakat miskin/Raskin (1999), bantuan bibit pertanian dari Lembaga Y untuk warga yang tanahnya digunakan pengungsi (2003), dan bantuan langsung tunai/BLT (2005). Masyarakat merasa hanya bantuanlah yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena potensi sumber daya alam tidak bisa diharapkan. Hasil pertanian hanya untuk mencukupi kebutuhan makan. Untuk mengembangkan usaha pertanian yang menjadi mata pencaharian utama, diperlukan modal dan pendampingan dari luar. Dari beberapa peristiwa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di atas, terdapat dua peristiwa penting yang menyebabkan naiknya kesejahteraan masyarakat, yaitu Raskin dan BLT.

Terdapat dua alasan mengapa program Raskin adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, waktunya sangat tepat. Program Raskin datang bertepatan dengan gagal panen sehingga masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Kedua, masyarakat miskin di Dusun Neves jarang mengonsumsi beras. Bantuan Raskin memungkinkan mereka mengonsumsi beras. Dengan demikian, adanya Raskin sangat membantu masyarakat miskin. Sementara itu, BLT juga dinilai sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Dana tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup lainnya seperti membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atau membeli kebutuhan pokok.

Peristiwa-peristiwa yang dianggap bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat sebagian besar terkait dengan bencana alam, misalnya: bencana tanah longsor akibat hujan deras berkepanjangan (1995 dan 2004), bencana angin ribut yang menyebabkan rumah dan tanaman penduduk rusak (1998 dan 1999), bencana kebakaran kebun di musim kemarau

yang melanda sekitar 10 ha kebun dan merusakkan banyak tanaman berumur panjang seperti jati, mahoni, dan kelapa (2003). Namun, dua peristiwa yang dianggap paling menurunkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kedatangan pengungsi (1999) dan gagal panen (2005).

Tahun 1999, Dusun Neves menerima kedatangan 37 KK pengungsi dari Timor Leste. Pada 2006, jumlah itu bertambah menjadi 53 KK. Sebagian dari mereka berasal dari kamp pengungsi di Metan, Kupang (FGD, laki-laki, 47). Pemerintah membangun perumahan yang diperuntukkan pengungsi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pada 2006, sebagian perumahan tersebut dihuni oleh keluarga milisi. Mereka diterima secara adat dan diperlakukan sebagai saudara karena ada anggota keluarga Maris yang menikah dengan anggota keluarga pimpinan milisi. Hubungan kekerabatan ini yang menyebabkan keluarga Maris menawarkan sebagian tanahnya untuk dikelola para pengungsi. Awalnya kedatangan pengungsi diterima dengan baik karena masyarakat mengerti bahwa kondisi mereka waktu itu sangat memprihatinkan. Masyarakat membantu mereka dengan membawa hasil kebun yang dikumpulkan ke kepala dusun. Selanjutnya kepala dusun membagikan kepada pengungsi. Namun, beberapa waktu kemudian, banyak masalah yang timbul berkaitan dengan pengungsi. Masalah tersebut turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Peristiwa penting lainnya yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan adalah gagal panen. Masa tanam yang berkisar tiga–empat bulan dalam setahun digunakan untuk menanam jagung untuk persediaan makanan pokok selama satu tahun berikutnya. Jadi, jika terjadi gagal panen, maka tingkat kesejahteraan masyarakat kian merosot dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah kelaparan pada tahun berikutnya.

Di tingkat rumah tangga juga terdapat berbagai faktor yang bisa meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan. Dalam diskusi (FGD) disebutkan bahwa meningkatnya kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain (i) kerja keras, (ii) iman, (iii) kesadaran, (iv) pendidikan, (v) modal, dan (vi) program pemerintah.

Faktor-faktor yang dianggap menurunkan kesejahteraan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor. Pertama, kelompok faktor internal yang mengacu pada perilaku orang seperti (i) malas bekerja, (ii) egois, mementingkan diri sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, (iii) tidak ada kerja sama dalam keluarga. Kedua, faktor yang bersifat eksternal, antara lain (i) kurangnya akses terhadap informasi, (ii) bencana alam, dan (iii) kedatangan pengungsi. Masyarakat menganggap bahwa faktor-faktor eksternal yang lebih berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan rumah tangga.

Kurangnya akses terhadap informasi bisa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga karena jika petani akan menjual hasil panennya tetapi tidak mengetahui harga pasar atau harga dasar terlebih dahulu, maka harga jual akan ditentukan oleh pembeli. Ini akan merugikan petani. Jika informasi mengenai harga jual hasil pertanian termasuk ternak mudah diperoleh, maka kerugian dapat dihindari. Kurangnya informasi juga dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan usahanya, seperti disampaikan peserta diskusi bahwa kerugian yang diderita disebabkan “salah informasi yang mengakibatkan perhitungan bisnis meleset” (FGD, laki-laki, 30). Faktor penting lainnya

yang bisa menurunkan kesejahteraan rumah tangga adalah bencana. Menurut peserta diskusi, bencana yang terjadi bisa dalam berbagai bentuk, antara lain, hujan yang terus-menerus dan tanah longsor yang mengakibatkan gagal panen. Bencana juga terjadi dalam bentuk wabah penyakit yang menyerang manusia dan ternak.

Berbagai faktor yang bisa menurunkan atau menaikkan kesejahteraan di atas, baik di tingkat komunitas maupun rumah tangga, menunjukkan bahwa warga Dusun Neves–Desa Malo mengalami berbagai arah mobilitas sosial (*upward*, *downward*, dan *stagnation*). Oleh sebab itu, masyarakat dapat dibagi dalam beberapa kelompok transisi, yaitu mereka yang sudah sejahtera sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*always rich*), bisa meningkatkan kesejahteraan (*mover*), mereka yang kesejahteraannya justru turun (*faller*) dan mereka yang tetap miskin sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*chronic poor*). Dalam diskusi (FGD) tentang tingkatan kesejahteraan, masyarakat Dusun Neves mengidentifikasi tiga tingkat (tangga) kesejahteraan, yaitu

- (1) lapisan bawah (miskin/orang susah) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *poor* atau *faller*;
- (2) lapisan tengah (“sedikit baik” dan “cukup baik”) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *mover*;
- (3) lapisan atas (kaya atau “berpunya”) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok kaya atau selalu kaya (*rich or always rich*).

Proporsi ketiga tingkatan itu menurut FGD laki-laki maupun perempuan, pada 2006 dan sepuluh tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel 8a dan Tabel 8b.

Tabel 8a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Malo (FGD Perempuan)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin	Sedikit Baik	Cukup Baik	Kaya
1996	58%	36%	5%	1%
2006	47%	35%	17,5%	0,5%

Tabel 8b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Malo (FGD Laki-laki)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin	Cukup Baik	Baik	Kaya
1996	60%	30%	10%	-
2006	43%	52%	4%	1%

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut kedua kelompok diskusi, masyarakat Malo mengalami peningkatan kesejahteraan. Jumlah kelompok paling miskin berkurang selama sepuluh tahun terakhir. Makin banyak orang yang menjadi bagian dari kelompok tengah, yaitu “cukup baik” atau “baik”.

c) Potensi, Aktor, dan Dampak Konflik

(1) Potensi Konflik

Dalam diskusi (FGD) masyarakat mengidentifikasi berbagai kasus yang menimbulkan ketegangan sosial, rasa tidak aman, dan tidak nyaman di dusun mereka. Jenis-jenis situasi konflik yang pernah terjadi di Dusun Neves selama sepuluh tahun terakhir, antara lain, perkelahian pemuda Malo dengan pemuda dari desa lain, pencurian sapi, perampasan tanah oleh pengungsi, penipuan yang dilakukan oleh karyawan koperasi salah satu bank, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masyarakat menganggap bahwa kedatangan pengungsi merupakan hal yang paling mengganggu karena banyak konflik yang timbul berkaitan dengan pengungsi. Konflik-konflik tersebut terjadi baik pada tingkat individual maupun komunitas. Beberapa konflik tersebut, misalnya,

(a) Perampasan tanah yang mulai bermunculan sekitar dua–tiga tahun terakhir.

Tahun 1999 para pengungsi datang.... secara adat minta lahan garapan, tapi tidak untuk dimiliki, jadi kami kasih secara adat pula. Setelah kasih tanah garapan mereka anggap itu tanahnya sendiri sehingga saat minta kembali, dia minta ganti rugi. Ganti rugi termasuk tenaga yang keluar untuk membersihkan, menggarap tanah seharga 5 juta rupiah per 20 are. Akhirnya warga tidak berani protes dan pilih diam. (FGD, laki-laki, 38 tahun).

(b) Perusakan tanaman yang berlangsung selama 2000.

Tanaman jagung dan ubi milik warga seluas 5 are dirusak oleh pengungsi dengan jalan melepas ternak-ternaknya. Bila ditegur baik-baik, ada yang marah dan bilang bukan ternak mereka. Kalau sudah begitu, kami hanya diam saja. (FGD, laki-laki, 38 tahun).

(c) Pemukulan terhadap warga pengungsi.

Konflik terjadi karena seorang pengungsi yang tinggal di Kupang membeli jatah beras OPK warga Malo. Ini membuat warga Malo protes dan lapor ke RT, tetapi si pembeli beras justru memaki-maki bahkan mengancam kepala desa. Warga Malo membalas dengan mengeroyok si pembeli beras, dan persoalan ini ditangani polisi. Masyarakat harus membayar ganti rugi sebesar 6 juta rupiah. Sekalipun ini memberatkan, warga Malo membayar juga karena takut kepala desa akan masuk penjara selama tiga tahun.

(d) Ancaman serangan pengungsi dari Metan.

Konflik ini bermula dari perselisihan keluarga. Ada pengungsi yang tinggal di Dusun Neves menikah dengan perempuan dari desa tetangga di Olbo. Diduga akibat terlalu banyak menenggak minuman keras (*laru*), pengungsi tersebut tidak dapat mengontrol ucapannya. Dia melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan kakak istrinya. Ia menuduh iparnya berselingkuh. Kemudian iparnya memukulnya dengan sekop tepat di bagian kepala hingga tewas. Berita kematian ini menyebar sampai ke Metan. Dengan menggunakan lima hingga enam truk, keluarga korban bermaksud menyerang keluarga istri korban di Olbo. Jalan ke Olbo melewati Dusun Neves. Masyarakat Dusun Neves mendengar isu bahwa pengungsi

dari Metan akan menyerang secara membabi buta dan membakar juga rumah penduduk Dusun Neves yang berada di pinggir jalan menuju Olbo. Isu-isu tersebut menimbulkan ketegangan di masyarakat Dusun Neves yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

- (e) Perkelahian anak-anak pengungsi dengan anak-anak warga Dusun Neves di sekolah yang berlangsung seminggu.

Anak-anak warga Dusun Neves yang bersekolah dengan anak-anak pengungsi membuat orang tua resah. Pada waktu ada perkelahian, anak-anak pengungsi lapor kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya datang dengan membawa parang mendatangi orang tua yang anaknya terlibat perkelahian. Kalau ada perlawanan akan diselesaikan dengan cara seperti itu. Saya suruh anak-anak supaya lapor ke guru, jangan lapor kepada orang tua (FGD, laki-laki, 50).

(2) Aktor-aktor dalam Berbagai Konflik

Masyarakat yang terlibat dalam berbagai konflik dengan pengungsi seperti di atas adalah tuan tanah dan keluarganya, pengungsi, ketua suku baik dari masyarakat maupun pengungsi, anggota Organisasi Radio Amatir Indonesia (Orari), anak-anak, pemuda setempat, pemuda pengungsi, polisi, aparat Kodim, pemda provinsi, pemda Kabupaten TTS, Kecamatan C, kepala desa, RT, RW, kepala dusun, tetua adat, dan masyarakat.

Tuan tanah terlibat dalam konflik antara warga dan pengungsi karena salah satu anggota tuan tanah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga milisi. Pengungsi sudah sejak awal kedatangannya merupakan bagian dari konflik tersebut. Dalam forum diskusi, warga menyebut pengungsi sebagai sumber konflik. Selanjutnya ada sekelompok orang dari luar desa yang juga berperan sebagai pemicu konflik. Pada beberapa konflik, kelompok pemuda menjadi korban sedangkan pada beberapa konflik lainnya pemuda justru menjadi pelaku konflik. Seperti pada konflik pemukulan terhadap salah satu warga yang menghina kepala desa, pemuda sebagai pelaku pemukulan. Tapi pada konflik penyerangan yang dilakukan oleh pengungsi dari Metan, pemuda adalah korban. Mereka bersembunyi di hutan selama satu bulan sampai keadaan aman baru kembali ke rumah masing-masing. Secara umum, masyarakat adalah korban dari perselisihan di atas.

Aparat pemerintahan dan aparat keamanan terlibat sebagai penengah yang membantu penyelesaian konflik. Aparat pemerintahan desa mulai dari RT, RW, kepala dusun, dan kepala desa membantu menyelesaikan konflik. Begitu juga dengan aparat kecamatan hingga provinsi. Pada saat penyerangan yang dilakukan oleh pengungsi yang di Metan, Kupang, mereka bekerja sama untuk mengimbau pengungsi agar kembali ke Kupang. Aktor yang juga terlibat jika terjadi perselisihan atau konflik adalah guru. Guru berperan dalam menengahi kasus perkelahian anak-anak pengungsi dan anak-anak masyarakat di sekolah.

Lembaga dari dalam desa yang ikut membantu menyelesaikan konflik penyerangan adalah gereja. Gereja mengimbau jemaatnya agar tidak terpancing oleh isu-isu. Peran aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik-konflik pemukulan, penyerangan, dan perkelahian sangat penting. Seperti yang terjadi pada penyerangan, aparat memblokir jalan-jalan

masuk ke Desa Malo untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. Apalagi setelah terdengar isu bahwa desa akan dibakar.

Lembaga dari luar desa yang terlibat dalam penyelesaian konflik adalah Orari. Organisasi ini turut memantau selama penyerangan berlangsung dan memberikan informasinya kepada polisi. Peran Orari dalam menyelesaikan masalah tidak hanya pada peristiwa penyerangan saja, tetapi saat perkelahian antarpemuda juga ikut membantu menyelesaikan. Perannya sama memberikan informasi kepada polisi tentang keadaan di lapangan. Lembaga lainnya dari luar desa adalah LSM. Salah satunya Lembaga Y yang membantu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan, pertanian, dan ternak. Bantuan ini diberikan untuk daerah-daerah yang terdapat pengungsi. Lembaga internasional yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pengungsi adalah UNHCR.

(3) Dampak Konflik

Konflik-konflik tersebut di atas berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Saat konflik itu terjadi mereka merasa takut, cemas, dan tidak nyaman. Warga Malo yang tanahnya dikerjakan pengungsi merasa dirugikan tetapi takut untuk meminta tanahnya kembali. Selain itu, warga Malo juga was-was bahwa tanaman mereka akan dirusak ternak pengungsi yang dibiarkan berkeliaran bebas.

Pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Malo terhadap warga pengungsi dari Metan mengakibatkan mereka harus membayar ganti rugi. Mereka merasa tidak rela melihat kepala desa dihina, dimaki-maki, bahkan hampir dipukul. Penyelesaian masalah ini dicapai melalui kesepakatan damai di kantor polisi dengan membayar ganti rugi kepada korban pemukulan.

Pada saat ada ancaman penyerangan oleh pengungsi dari Metan, banyak masyarakat Dusun Neves lari dan bersembunyi di hutan. Upaya ini untuk menjaga keselamatan keluarga mereka. Mereka mendengar bahwa rumah mereka akan di bakar. Akibatnya banyak warga yang tidak berani ke ladang/kebun dan bersembunyi di hutan. Kegiatan ekonomi pun menjadi terganggu.

Kasus pemukulan/perkelahian antara anak-anak pengungsi dan penduduk lokal di sekolah juga menyebabkan orang tua murid merasa khawatir anak-anaknya akan menjadi korban saat berangkat atau berada di sekolah.

4.2.2 Desa Korinus

a) Kondisi Lokal

Desa Korinus adalah desa pertanian lahan kering yang berbukit-bukit dengan ngarai-ngarai curam sehingga tidak banyak lahan datar yang bisa dipakai untuk bertani. Selain itu, pola permukiman di Korinus juga menyebar sesuai dengan ketersediaan lahan datar. Pada 2005 penduduk Korinus berjumlah 435 KK atau 1.754 jiwa. Sebanyak 70% dari warga Korinus beragama Kristen Protestan dan 30% beragama Katolik. Sejumlah 50% dari mereka berasal dari suku Timor (Dawan) dan sebagian kecil berasal dari Flores dan Rote. Untuk komunikasi sehari-hari digunakan bahasa daerah Dawan. Mata pencaharian utama penduduk Korinus adalah bertani yang sering dikombinasikan dengan memelihara

hewan ternak (sapi, babi, ayam) atau kegiatan perkebunan (kemiri, asam, jeruk). Pada 2003, sebagian warga membudidayakan tanaman kopi. Sekitar 20% dari penduduk juga bekerja sebagai buruh tani musiman di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang.

Desa Korinus terletak 25 km dari ibu kota Kabupaten Soe. Dari Kota Mora ke Desa Fetas (desa yang terdekat dengan Korinus), kondisi jalannya bagus (bagian dari ruas jalan raya lintas Timor). Namun, dari Tetaf menuju Korinus kondisi jalannya sangat buruk. Secara administratif, Desa Nukae terdiri atas tiga dusun, salah satunya adalah Dusun A (Dusun Punu) di mana penelitian ini dilakukan. Dusun Punu merupakan dusun terbesar dan menjadi pusat pemerintahan Korinus. Dusun ini berlokasi paling dekat dengan jalan raya Lintas Timor (sekitar 5 km).

Di Desa Korinus terdapat tiga sekolah dasar negeri (SDN) yang terletak di masing-masing dusun. Selain itu, terdapat pula puskesmas pembantu (pustu) dan bidan desa. Air bersih telah tersedia sejak adanya pembangunan pipa air bersih pada 1999 (dibangun melalui PPK I) yang kemudian dilanjutkan dengan bak penampungan air dan perlindungan mata air oleh lembaga donor lain. Sebagian besar warga sudah memiliki WC.

b) Mobilitas Sosial: Perspektif dari Bawah

Selama sepuluh tahun terakhir (1996–2006), secara umum tingkat kesejahteraan komunitas di Dusun Punu khususnya, dan Desa Korinus umumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Berbagai faktor turut memengaruhi mobilitas kesejahteraan masyarakat di Desa Korinus umumnya, dan Dusun Punu khususnya.

Di tingkat komunitas, peningkatan kesejahteraan warga Desa Korinus merupakan akibat langsung dari adanya perekonomian yang meningkat (FGD, laki-laki, 31) dan pembangunan makin bertambah (FGD, laki-laki, 35). Dua faktor ini membuat warga Desa Korinus lebih mudah mendapatkan penghasilan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal penting yang membuat warga desa lebih mudah memperoleh penghasilan adalah: pertama, meningkatnya permintaan hasil pertanian. Selama sepuluh tahun terakhir produk/komoditi yang dihasilkan warga Desa Korinus mempunyai peluang pasar yang makin besar. Kedua, ketika permintaan pasar meningkat penduduk Desa Korinus mampu menangkap peluang pasar itu dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Mereka mampu mendiversifikasikan usaha taninya dengan berbagai tanaman yang mampu diserap pasar. Di sektor peternakan, usaha peternakan ayam kecil-kecilan juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup penting. Semua kegiatan ini telah membuat intensitas kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Oleh karena itu, meskipun mata pencaharian mereka masih berbasiskan pertanian, tetapi sepanjang tahun sumber pendapatannya tidak terputus.

Faktor lain yang membantu warga Korinus meningkatkan kesejahtraannya adalah banyaknya program dan bantuan yang dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Selama sepuluh tahun terakhir program dan bantuan yang mereka terima meliputi antara lain bantuan dari LSM Z berupa kredit pembelian sapi (1996), Raskin (1998), PPK I (1999), IFAD (2000), LSM W (2001), kredit dari Dinas Koperasi (2002), Lembaga Y (2003), PPK II (2005), BLT (2005), PPK II (2006). Sebagai ilustrasi, kegiatan penanaman sayuran secara

kelompok yang menjadi salah satu andalan sumber pendapatan warga desa merupakan program kegiatan yang diperkenalkan oleh LSM W/Lembaga Y pada 2000. Kegiatan ini bisa terlaksana karena tersedia air untuk pertanian. Ketersediaan air menjadi lebih baik karena adanya bak penampungan air yang dibangun melalui PPK pada 1999 dan kegiatan perlindungan mata air yang dilakukan oleh Lembaga Y pada 2002.

Selain faktor yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, tidak sedikit pula faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Korinus. Dalam diskusi disebutkan bahwa beberapa faktor berikut membuat kesejahteraan warga Desa Korinus sulit berkembang.

- (1) Faktor cuaca atau iklim yang buruk. Peserta FGD menyatakan "Di Dusun Punu ini gagal panen umumnya disebabkan oleh hujan tidak menentu" (FGD, laki-laki, 50).
- (2) Faktor serangan hama, baik hama yang menyerang tanaman sayuran, jagung, maupun tanaman jeruk. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir intensitas serangan ini relatif rendah, tetapi pengaruhnya cukup dirasakan oleh (sebagian) warga desa.
- (3) Kualitas SDM yang rendah, terutama dalam aspek pendidikan seperti diakui oleh seorang peserta FGD yang menyatakan: "Mungkin karena masalah pendidikan (rendah) yang membuat kami selalu gagal karena kami tidak tahu cara bagaimana berusaha tani yang baik" (FGD, laki-laki, 38).
- (4) Sumber daya alam yang kurang menguntungkan, terutama menyangkut kualitas lahan yang kurang subur. Faktor ini merupakan salah satu kendala utama untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi demikian membawa implikasi, antara lain, tingkat pendapatan rumah tangga di Desa Korinus tidak semata-mata tergantung pada luas lahan yang dimiliki. Faktor kualitas lahan, seperti kedalaman permukaan tanah dan kedekatan lokasinya terhadap sumber air, menjadi faktor yang lebih dominan sebagai penentu pendapatan daripada faktor luas kepemilikan lahan. Oleh sebab itu, banyak rumah tangga di Desa Korinus yang mempunyai lahan cukup luas, tetapi tingkat pendapatannya relatif rendah. Sebaliknya, tidak sedikit rumah tangga yang lahannya relatif sempit, tetapi mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik.
- (5) Kenaikan harga BBM. Sebagian peserta FGD menyatakan kenaikan harga-harga umum sebagai dampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) telah menyebabkan "kehidupan masyarakat (sengsara) seperti dulu lagi" (FGD, laki-laki, 38). Hal ini terjadi karena pada saat yang sama "harga hasil usaha kita (pertanian) juga tidak menentu, sementara harga barang (kebutuhan) di toko naik, akhirnya kami minus terus" (FGD, laki-laki, 50).
- (6) Kredit dari Dinas Koperasi TTS. Saat studi ini dilakukan, sebagian masyarakat Desa Korinus belum mampu mengembalikan kredit yang disalurkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten TTS. "Setengah mati kami mengembalikan kredit" (FGD, laki-laki, 37), merupakan contoh bagaimana dampak negatif kredit terhadap kesejahteraan mereka.

Pada tingkat rumah tangga, faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan adalah seperti (i) kerja keras (ii) diversifikasi usaha atau mata pencaharian, (iii) adanya tambahan modal, (iv) tambahan pengetahuan atau keterampilan, (v) adanya bantuan pemerintah atau LSM, dan (vi) mempunyai sikap berhemat.

Secara umum faktor-faktor itu tidak bersifat eksklusif terhadap kategori kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang tingkat kesejahteraannya rendah atau tinggi, semuanya memerlukan keberadaan faktor-faktor tersebut. Meskipun demikian, peserta FGD sepertinya melihat adanya beberapa penekanan terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Rumah tangga yang saat ini berada pada tangga yang paling bawah, memerlukan faktor kerja keras dan diversifikasi mata pencaharian untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Untuk rumah tangga yang kesejahteraannya sudah berada pada tingkat atas, peningkatan kesejahteraan ke tahap berikutnya memerlukan syarat atau faktor tambahan seperti anak sudah selesai sekolah atau anak sudah bekerja (sebagai TKI, dosen, atau tentara). Disebutkannya "anak sudah menyelesaikan sekolah" sebagai faktor yang meningkatkan kesejahteraan mengindikasikan bahwa biaya pendidikan adalah beban finansial yang memberatkan. Selanjutnya, rumah tangga yang memiliki anggota yang telah bekerja, terutama di luar desa mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini bisa diartikan bahwa peluang ekonomi di desa sangat terbatas. Untuk mencapai kemajuan ekonomi warga harus mencari peluang di luar desa.

Menurut responden, secara umum faktor yang menyebabkan suatu rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok faktor yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri. Faktor-faktor ini umumnya berkaitan dengan sikap dan kebiasaan hidup yang bersifat kontraproduktif, misalnya kecanduan minuman keras dan judi serta kesalahan manajemen keuangan rumah tangga. Kedua, kelompok faktor yang berkaitan dengan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh kelalaian manusia, misalnya kebakaran rumah (FGD, perempuan, 26 dan laki-laki, 43), banjir dan hujan terus-menerus (FGD, perempuan, 27).

Dalam diskusi disebutkan bahwa stagnasi atau kemandekan kesejahteraan yang dialami oleh suatu rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor seperti (i) tidak memiliki luas lahan yang cukup untuk berusaha, (ii) malas atau tidak mau berusaha di bidang lain, (iii) konsumtif/boros dan (iv) mabuk-mabukan, dan (v) salah dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Menarik untuk disimak bahwa di Korinus warga menyatakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi bukanlah upaya mudah dan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan ketersediaan modal. Dalam konteks lingkungan geografi, sosial, dan ekonomi Desa Korinus, keharusan untuk bekerja keras, seperti dalam mengolah lahan sudah menjadi tuntutan alam. Oleh sebab itu, bagi kebanyakan rumah tangga, kerja keras sudah dilakukan. Lain halnya dengan masalah tidak adanya modal kerja. Bagi sebagian besar warga ini menjadi kendala utama untuk dapat keluar dari kemiskinan. Dalam kasus kredit koperasi yang diterima oleh warga Korinus, tambahan modal dari kredit itu ternyata justru membuat mereka terjebak dalam utang dan makin terpuruk dalam kemiskinan.

Berbagai faktor yang bisa menurunkan atau menaikkan kesejahteraan baik di tingkat komunitas maupun rumah tangga tersebut di atas menunjukkan bahwa warga Dusun

Punu–Desa Korinus mengalami berbagai arah mobilitas sosial (*upward*, *downward*, dan *stagnation*). Oleh karena itu, masyarakat dapat dibagi dalam beberapa kelompok transisi, yaitu: mereka yang sudah sejahtera sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*always rich*), bisa meningkatkan kesejahteraan (*mover*), mereka yang justru turun kesejahteraannya (*faller*) dan mereka yang tetap miskin sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*chronic poor*). Dalam diskusi (FGD) tentang tingkatan kesejahteraan, masyarakat Dusun Punu mengidentifikasi tiga tingkat (tangga) kesejahteraan, yaitu

- (1) lapisan bawah (sangat miskin dan miskin) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *poor* atau *faller*;
- (2) lapisan tengah (“ada sedikit, tapi tidak banyak” dan cukup) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *mover*; dan
- (3) lapisan atas (kaya dan kaya sekali/sangat kaya) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *rich/ always rich*.

Proporsi ketiga tingkatan itu menurut FGD laki-laki maupun perempuan, pada 2006 dan sepuluh tahun sebelumnya ditampikan pada Tabel 9a dan Tabel 9b.

Tabel 9a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Korinus (FGD Perempuan)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Sangat Miskin	Ada Sedikit/ Miskin	Ada Sedikit, Tetapi Tidak Banyak	Cukup/ Sedang	Kaya	Sangat Kaya
1996	62%	35%	-	-	3%	-
2006	27%	48%	12%	7%	4%	1%

Tabel 9b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Korinus (FGD Laki-laki)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin Sekali	Tidak Terlalu Miskin	Miskin	Kaya	Kaya Sekali
1996	47%	-	41%	7%	-
2006	8%	34%	30%	23%	5%

Baik kelompok laki-laki maupun perempuan mengidentifikasi bahwa pada 2006 terdapat banyak tingkatan kesejahteraan dibandingkan dengan keadaan sepuluh tahun sebelumnya. Ini berarti dalam periode sepuluh tahun terakhir, masyarakat Dusun Punu–Desa Korinus menjadi lebih bertingkat-tingkat (lebih terstratifikasi). Kedua kelompok juga berpendapat bahwa sebagian besar warga (lebih dari 70%) masih berada dalam kemiskinan, sekalipun jumlah ini masih lebih rendah daripada sepuluh tahun yang lalu. Jadi ada peningkatan kesejahteraan sekalipun sangat terbatas. Menarik untuk dicatat bahwa kategori “orang miskin” makin bervariasi.

c) Potensi Konflik

Desa Korinus merupakan desa yang relatif bebas dari kejadian konflik yang disebabkan oleh pengungsi eks Timor Leste. Selama 1996–2006, Desa Korinus juga bebas dari berbagai jenis konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Dalam diskusi (FGD), warga mengidentifikasi beberapa peristiwa yang berpotensi konflik, antara lain (i) masalah sapi warga Korinus yang ditangkap oleh warga desa lain, (ii) kesalahpahaman seorang warga tentang proyek penanaman jambu mete, dan (iii) kasus kredit macet dari Dinas Koperasi. Dari ketiga konflik tersebut, yang dianggap paling meresahkan adalah masalah terjebaknya warga Korinus dalam kredit macet.

(1) Masalah Kredit Macet dari Dinas Koperasi

Pada 2002 masyarakat Desa Korinus menerima penyuluhan pembuatan pupuk Bokasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda TTS. Bahan utama pembuatan pupuk ini adalah kotoran sapi. Setelah mendapatkan penyuluhan, masyarakat membentuk kelompok (ada sepuluh kelompok) untuk membuat pupuk Bokasi. Berdasarkan hitungan ekonomis, pembuatan pupuk ini sangat menguntungkan petani. Dengan harga jual Rp1.000/kg, petani mendapatkan keuntungan antara Rp377–Rp565/kg.

Pada 20 Desember 2002, bertempat di lapangan Desa Korinus, Dispenda atas nama Pemerintah Kabupaten TTS mengadakan peresmian penggunaan pupuk ini. Tujuannya supaya dinas-dinas dalam lingkup pemerintah Kabupaten TTS mengetahui bahwa Desa Korinus sudah dapat memproduksi pupuk sendiri. Beberapa waktu kemudian, banyak dinas yang datang ke Korinus untuk membeli pupuk Bokasi. Jumlah pembelianya ada yang hanya puluhan kilogram, tetapi ada pula yang sampai berton-ton.

Dua bulan setelah peresmian pupuk Bokasi (atau Februari 2003), Dinas Koperasi TTS menyalurkan kredit modal usaha ke Desa Korinus sebesar 125 juta rupiah kepada Kelompok Tani Punu yang beranggotakan 25 orang (masing-masing orang mendapatkan kredit 5 juta rupiah). Pengembalian kredit ini mengalami kemacetan dan penyelesaiannya ditangani Kejaksaan Negeri TTS. Menurut persepsi peserta FGD kelompok laki-laki, sumber utama konflik adalah “yang diomongkan (oleh Dinas Koperasi) sama kenyataannya (di lapangan) berbeda” (FGD, laki-laki, 39). Meskipun dalam kasus ini yang terlibat langsung hanya 25 orang, tetapi peristiwa itu membawa dampak pada masyarakat lainnya yang tidak menerima kredit.

Kalau masalah koperasi memang secara langsung hanya melibatkan 25 orang, tapi hal itu membuat warga desa lainnya ikut ribut, bingung, dan takut. Masyarakat akhirnya bilang supaya 25 orang itu cepat menyelesaikan kasus koperasi itu biar kita warga desa bisa hidup tenang. (FGD, laki-laki, 40)

Untuk menyelesaikan kasus kredit macet, pihak kejaksaan negeri TTS telah dua kali memanggil 25 orang penerima kredit. Pertama, pada Juli 2005 dan yang kedua pada awal 2006. Bagaimana pihak kejaksaan terlibat dalam menangani kasus ini, terdapat dua versi cerita yang berbeda. Pertama, pengurus kelompok Tani Punu menduga Dinas Koperasi melaporkan nama 25 orang penunggak kredit kepada Bupati, lalu Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada kejaksaan negeri. Kedua, menurut versi Dinas Koperasi, yang

melaporkan kasus ini ke kejaksaan adalah pengurus kelompok Punu sendiri. Hal ini terjadi karena pengurus kelompok mengalami kesulitan menagih kepada anggotanya sehingga akhirnya mereka meminta kejaksaan untuk menyelesaikan tagihan tersebut.

Pada prinsipnya pihak kejaksaan meminta ke 25 orang itu untuk terus mengangsur pokok pinjaman dan bunga sampai lunas. Total pinjaman yang harus dikembalikan oleh masing-masing peminjam adalah sebesar Rp7.400.000, terdiri atas pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000 dan bunga sebesar Rp2.400.000. Kejaksaan tidak memberi batas waktu sampai kapan mereka harus melunasinya yang penting setiap bulan mengangsur minimal Rp100.000. "Pak Jaksa bilang kalau tidak mau usaha untuk bayar, akan diproses, dipenjarakan, setelah keluar penjara tetap harus membayar, tidak bisa lepas" (seorang anggota kelompok Punu).

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa lembaga atau organisasi yang terkait dengan kasus kredit macet dari Dinas Koperasi meliputi Dinas Koperasi, Lembaga Z, Kejaksaan, Kepala desa, kelompok Tani Punu (beranggotakan 25 orang), dan masyarakat atau kelompok pembuat pupuk Bokasi. Kelompok penerima kredit dianggap sebagai pelaku, korban, sekaligus unsur yang bisa menanggulangi masalah. Para pelaku lain yang terlibat konflik sejak awal adalah Dinas Koperasi dan Lembaga Z. Masyarakat Korinus dianggap sebagai korban karena mengalami keresahan. Kepala desa juga terlibat sejak awal, tetapi dianggap sebagai unsur yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian masalah, sedangkan kejaksaan juga merupakan unsur yang bisa menyelesaikan masalah.

(2) Dampak Konflik pada Masyarakat Korinus

Selain membawa kerugian ekonomi karena pupuk Bokasi yang diproduksi masyarakat tidak laku dijual, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Koperasi menjadi hilang seperti tecermin dari ungkapan "yang diucapkan tidak sama dengan kenyataan, jadi kami tidak bisa percaya lagi." Bagi masyarakat sendiri kasus ini memberikan pelajaran untuk berhati-hati dan memahami dengan sungguh-sungguh isi perjanjian kredit. "Kalau ada pinjaman lagi saya harus pikir lima, enam, tujuh kali lagi untuk memutuskan menerimanya" (seorang anggota kelompok Punu). Bagi pengurus kelompok, mereka juga mendapatkan pelajaran bahwa setiap perjanjian yang ditandatangani dengan pihak mana pun harus menyertakan salinannya. Tidak seperti saat studi dilakukan, mereka menandatangani perjanjian, tetapi tidak memegang surat perjanjian tersebut.

Menurut Dinas Koperasi, macetnya dana bergulir itu membuat warga Desa Korinus lainnya terhambat peluangnya mendapatkan pinjaman. Rencananya, setelah 25 orang itu melunasi kreditnya, maka dana yang terkumpul akan dipinjamkan lagi ke warga Desa Korinus lainnya karena dana ini memang diperuntukkan khusus untuk Desa Korinus.

4.3 Kabupaten Belu

4.3.1 Desa Lay

a) Kondisi lokal

Desa Lay di Kecamatan X. mengalami penambahan jumlah penduduk yang utamanya disebabkan oleh migrasi masuk (*in-migration*), yaitu dengan datangnya eks pengungsi Timor Leste pada 1999.

Desa Lay terbagi ke dalam 7 dusun, 10 RW, dan 25 RT. Sebagian besar penduduknya (90%), baik penduduk asli maupun pendatang (eks pengungsi), beragama Katolik, sementara sisanya adalah Protestan, Islam, dan Hindu. Terdapat lima suku besar yang hidup di desa ini, yaitu Tetun, Marai, Kemak, Rote/Sabu, dan Dawan. Dalam suku Tetun sendiri masih terdapat sub-sub suku lainnya yang berjumlah lebih dari 30 subsuku.

Beberapa lokasi desa, sejak 1999 dihuni oleh eks pengungsi yang juga biasa disebut dengan warga baru. Mereka berdiam di dua lokasi permukiman resmi (*resettlement*) dan dua lokasi permukiman spontan. Lokasi permukiman resmi terletak di Aluk (Dusun Amaral) yang menempati lahan seluas 15 ha dan di Klamar (Dusun Lere) seluas 5 ha. Kedua permukiman resmi ini dibangun oleh UNHCR pada akhir 2004, dan pada 2006 ditempati oleh 257 KK di Aluk dan 120 KK di Klamar. Sementara itu, lokasi permukiman spontan/swadaya yang dihuni oleh warga baru terletak di Gama (Dusun Amaral) dan di Nunes (Dusun Ruak). Di Gama, warga baru mendiami lahan seluas 8 ha dan terkonsentrasi di dua RT, yaitu RT 5 dan RT 6 dengan jumlah KK sebanyak 75 KK. Sementara itu, di Nunes, sebanyak 95 KK eks pengungsi yang merupakan pindahan dari kamp Tavares mendiami lahan seluas 12 ha yang hampir semuanya merupakan hasil negosiasi lahan mandiri antara eks pengungsi dan penduduk lokal, dengan harga beli pada waktu itu berkisar 7 juta rupiah per ha. Sebagian besar warga baru saat penelitian ini dilakukan bekerja sebagai petani, dan hanya empat orang yang bekerja sebagai pegawai negeri.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di desa mulai dari Paket A, TK, SD swasta dan negeri, hingga SMP, sementara SMA hanya tersedia di ibu kota kecamatan (Ratu). Adapun sarana kesehatan yang tersedia di desa adalah puskesmas. Saat ini penduduk Desa Lay mendapat tambahan sarana kesehatan, yaitu tersedianya dokter di markas Kodim 744. Walaupun pelayanan kesehatan di puskesmas desa dianggap cukup baik, tetapi obat-obatan yang diberikan tidak manjur sehingga masyarakat lebih senang berobat ke dokter di markas Kodim.

Saat ini dari tujuh dusun yang ada di desa, hanya empat dusun yang sudah bisa menikmati listrik, itu pun tidak secara merata. Penikmat listrik umumnya bertempat tinggal di dekat jalan raya dan juga di pusat desa seperti di Dusun Amaral. Penduduk di wilayah terpencil pada 2006 belum terlayani.

Sumber mata pencaharian utama penduduk desa dan dusun utamanya adalah bertani, yaitu pertanian padi sawah di lahan tadah hujan. Penggunaan lahan tadah hujan ini disebabkan karena belum ada saluran irigasi maupun *embung* sebagai tempat

penampungan air. Akibatnya, para petani sepenuhnya mengandalkan sumber air curah hujan yang turun selama dua–tiga bulan dalam setahun. Dengan kondisi ini, para petani hanya bisa menikmati panen sebanyak satu kali dalam setahun.

Selain bersawah, para petani biasanya juga menanam berbagai macam tanaman musiman sebagai sumber pendapatan sampingan, seperti jagung, mangga, ubi-ubian, dan pisang. Selain itu, juga menanam tanaman keras atau tanaman umur panjang seperti, jati, mete, dan lamtoro. Namun, tidak semua warga menanam tanaman umur panjang ini, hanya mereka yang memiliki lahan yang cukup luas yang bisa menanam tanaman jenis ini. Selain bertani, sumber mata pencaharian lain adalah beternak, umumnya adalah sapi dan babi, tetapi ada juga yang beternak kambing dan ayam. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan mata pencaharian baik pada penduduk desa maupun dusun, yaitu mulai banyaknya penduduk yang menanam sayur dengan memanfaatkan air yang bersumber dari kali di wilayah Gama. Pendapatan dari berjualan sayur ini sangat membantu warga masyarakat terutama bagi para petani untuk bertahan hidup di musim kemarau panjang atau pada musim paceklik.

Di samping bertani di lahan sendiri, pekerjaan sampingan yang juga biasa dilakukan sebagian warga adalah menjadi tukang kayu, tukang batu, atau buruh tani, terutama di musim tanam dan pada saat panen. Upah yang biasa diterima oleh buruh tani sebesar Rp10,000 per hari, baik laki-laki maupun perempuan. Upah buruh ini mengalami peningkatan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu (1996). Khusus bagi para perempuan, mereka mempunyai sumber pendapatan sampingan sendiri, yaitu dari menenun, walaupun jumlah pelakunya tidak banyak. Namun, kecenderungan yang terjadi adalah para penenun perempuan tersebut mulai kehilangan pasar hasil tenunan mereka sejak sudah tidak lagi dibina dan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Akibatnya, hasil tenunan tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sendiri termasuk untuk kebutuhan adat. Selain bertenun, pekerjaan yang juga banyak dilakukan oleh perempuan adalah menjadi buruh tani dan beternak ayam potong.

Selama sepuluh tahun terakhir juga bermunculan beberapa pekerjaan baru, yaitu menjadi tukang ojek (biasanya dilakukan oleh anak laki-laki muda), dan membuka kios/warung yang menjual barang kebutuhan sehari-hari maupun berjualan kue. Karena komunitas penelitian adalah pusat pemerintahan desa, maka ciri-ciri yang ada di desa sebagian besar juga ditemukan di tingkat dusun.

b) Mobilitas Sosial: Perspektif dari Bawah

(1) Kecenderungan Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat desa maupun dusun, dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kelompok miskin, sederhana, dan kaya. Pengelompokan kondisi kesejahteraan ini sedikit berbeda antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Menurut diskusi dengan kelompok laki-laki, kondisi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa terbagi ke dalam tiga tingkatan, baik untuk kondisi 2006 maupun sepuluh tahun sebelumnya. Istilah lokal untuk tangga-tangga tersebut adalah *Emu Mukit* (kelompok miskin), *Sederhana* (kelompok sedang), dan *Emu So'l* (kelompok kaya). Sementara itu, kelompok diskusi perempuan menyepakati adanya lima kelompok

kesejahteraan masyarakat di tingkat desa pada 1995, yaitu *Emamak Mukit* (paling miskin), *Susar* (miskin), *Moris Pas-pasan* (*sederhana*), *Ema So'l* (kaya), dan *Emamak So'l* (paling kaya). Untuk kondisi kesejahteraan di tingkat dusun, disepakati ada tiga kelompok kesejahteraan, baik pada 2006 maupun sepuluh tahun sebelumnya, yaitu *Ema Mukit* (miskin), *Moris Paspas* (sedang) dan *Ema So'l* (kaya). Indikator-indikator yang digunakan dalam mengelompokkan kesejahteraan masyarakat seperti yang terungkap dalam diskusi adalah kondisi rumah, tingkat pendidikan anak, pekerjaan, aset/kepemilikan, kondisi dan akses terhadap sarana kesehatan, penghasilan per bulan, dan indikator lainnya seperti jumlah anak, frekuensi makan, serta kedudukan dalam masyarakat (ketua suku, tokoh masyarakat, dan lain-lain).

Tabel 10a dan 10b menunjukkan proporsi ketiga tingkatan kesejahteraan masyarakat di dusun menurut FGD laki-laki maupun perempuan, 2006 dan sepuluh tahun sebelumnya.

Tabel 10a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Lay (FGD Perempuan)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin (<i>Ema Mukit</i>)	Sedang (<i>Moris Pas pas</i>)	Kaya (<i>Ema So'l</i>)
1996	54%	43%	3%
2006	32%	64%	4%

Tabel 10b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Lay (FGD Laki-laki)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Miskin (<i>Ema Mukit</i>)	Sederhana	Kaya (<i>Ema So'l</i>)
1996	63%	33%	4%
2006	59%	44%	3%

Menurut peserta diskusi, baik laki-laki maupun perempuan, kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut mengalami perbaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ditunjukkan dengan berkurangnya proporsi penduduk miskin, dan bertambahnya proporsi penduduk sederhana (sedang), sedangkan kelompok kaya (*ema so'i*) cenderung tetap. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial sebagian besar terjadi pada kelompok menengah dan miskin. Uraian berikut ini menjelaskan faktor-faktor maupun peristiwa yang terjadi di tingkat komunitas dan di tingkat rumah tangga atau individu yang berpengaruh pada mobilitas sosial tersebut.

(2) Faktor di Tingkat Komunitas

Faktor atau peristiwa di tingkat komunitas dapat dikelompokkan menjadi faktor positif (membantu peningkatan kesejahteraan) dan faktor negatif (menghalangi peningkatan kesejahteraan, bahkan bisa sampai membuat jatuh miskin). Faktor positif yang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat adalah adanya program bantuan yang masuk ke desa yang diberikan dinas pemerintah, LSM, ataupun lembaga donor. Salah satunya

adalah pemberian *hand tractor* melalui program PPK. Peserta diskusi sepakat bahwa keberadaan *hand tractor* sangat membantu mereka membajak sawah sehingga mereka bisa menanam tepat pada waktunya, sesuai dengan turunnya musim hujan. Program PPK juga memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan untuk menambah pendapatan keluarga melalui pembentukan kelompok ternak ayam potong. Kelompok ini dikelola oleh sepuluh orang anggotanya yang hasilnya dimanfaatkan secara bergantian. Bantuan lain yang juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ialah berupa pemberian maupun kredit sapi dari Dinas Peternakan kabupaten maupun dari organisasi pembangunan lainnya, seperti RCP (Rural Credit Program). Walaupun kredit dan bantuan sapi yang dikucurkan tersebut sudah berlangsung cukup lama, tetapi warga masih merasakan manfaatnya karena melalui program ini mereka jadi bisa memiliki sapi. Lagipula, penyaluran bantuan ini dirasakan cukup adil dan merata. Walaupun demikian, keberadaan bantuan ini tidak selamanya dianggap positif sebab beberapa jenis bantuan yang masuk ke desa tidak diberikan secara merata sehingga menimbulkan kecemburuan pada masyarakat, di antaranya adalah bantuan pembuatan WC dan Raskin.

Faktor pendukung lainnya yang juga bernilai positif cukup beragam. Semuanya berkaitan dengan perubahan yang terjadi di desa. Di antaranya adalah makin baiknya tingkat pendidikan anak, makin banyaknya penduduk desa yang menamatkan pendidikan menengah atas, serta adanya penyesuaian terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk upacara adat. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa anggota masyarakat yang merasa keberatan dan terbebani dengan biaya adat tersebut, bahkan tidak jarang bisa membuat sebuah keluarga sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Faktor negatif yang dirasa menghambat kesejahteraan masyarakat adalah masih berlakunya feodalisme lokal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peserta diskusi, feodalisme lokal telah memberikan keistimewaan pada kelompok suku tertentu untuk memegang kekuasaan (pemerintahan di desa). Keistimewaan tersebut misalnya mendapatkan prioritas menerima bantuan. Selain itu, pada beberapa kasus, anggota kelompok tersebut juga bisa "kebal" terhadap hukum. Akibatnya, sebagian besar anggota masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat "kebanyakan", merasa bahwa praktik-praktik seperti ini menyulitkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. "Sistem keluarga dan suku yang membuat berat, kalau di dalam keluarga dan suku belum dapat semua, maka kita tidak akan dapat, jadi harus merata, supaya yang benar-benar butuh dapat" (wawancara, laki-laki, 45).

Faktor yang juga dirasakan menghambat adalah kondisi alam, sedikitnya curah hujan atau musim kering yang berkepanjangan yang sering kali menyebabkan gagal panen, serta penebangan liar yang berakibat pada berkurangnya debit air. Kedatangan pengungsi juga disebut-sebut sebagai faktor yang menghambat, walaupun hanya dirasakan oleh sebagian warga masyarakat saja. Sejak kedatangan eks pengungsi pada 1999, telah beberapa kali terjadi peristiwa yang mengganggu penduduk lokal, "...hadirnya KK baru sampai sekarang masih menimbulkan masalah seperti pengambilalihan lahan oleh warga baru, perilaku yang kurang bersahabat, dan tidak menghargai adat istiadat seperti penebangan hutan adat Fatubesi..." (FGD; laki-laki, 59).

(3) Faktor di Tingkat Individu/Rumah Tangga

Di tingkat rumah tangga, faktor yang paling berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan adalah diversifikasi usaha/sumber mata pencaharian. Rumah tangga yang berhasil meningkatkan kesejahteraaannya umumnya adalah rumah tangga yang memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Selain bertani sebagai sumber mata pencaharian utama, individu/rumah tangga tersebut juga beternak untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Bagi masyarakat NTT pada umumnya, dan warga desa dan dusun khususnya, beternak juga mempunyai nilai tambah lainnya, yaitu sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat digunakan (dijual atau digadaikan) jika ada kebutuhan mendadak, seperti jika ada anggota keluarga yang sakit ataupun untuk kebutuhan adat yang masih sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa rumah tangga di komunitas penelitian bahkan tidak hanya bertani dan beternak, tetapi juga melakukan pekerjaan sampingan lainnya seperti bertanam sayur, bertukang (batu atau kayu), sampai menjadi tukang ojek dan membuka warung. Hasil diskusi kelompok maupun hasil wawancara individu menunjukkan bahwa kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk mendiversifikasikan sumber mata pencahariannya sangat dipengaruhi oleh kemauan untuk bekerja keras dan belajar. Kemauan bekerja keras dimaknai oleh para informan penelitian sebagai prasyarat utama untuk berhasil. Salah satu mekanisme yang diungkapkan oleh salah seorang informan adalah hasil usaha tani kemudian diinvestasikan untuk usaha ternak atau untuk membuka warung.

Faktor yang dirasakan menghambat peningkatan kesejahteraan pada beberapa rumah tangga dan malah membuat kondisi kesejahteraan makin menurun adalah praktik adat. Walaupun di tingkat komunitas dinyatakan bahwa kewajiban adat akhir-akhir ini sudah mengalami penyesuaian dengan kemampuan masing-masing warga, tetapi pada praktiknya masih memberatkan. Beberapa rumah tangga merasakan beban adat ini makin berat karena tidak terduga dan terjadi berturut-turut, baik kematian maupun perkawinan. Sistem kekerabatan yang masih sangat kuat dan juga budaya malu jika tidak turut menyumbang untuk kepentingan adat, menjadi salah satu sebab mengapa kadang kala ditemukan rumah tangga yang sampai berutang bertahun-tahun dan sulit mengalami peningkatan kesejahteraan.

Sejalan faktor pendukung tadi, yaitu kerja keras, perilaku malas dan berfoya-foya menjadi salah satu penghambat peningkatan kesejahteraan. Hal ini dikemukakan dalam kelompok diskusi perempuan. Akibat dari sikap malas ini ialah individu atau rumah tangga tersebut tidak memiliki sumber pendapatan sampingan, bahkan pada beberapa kasus, warisan yang diberikan oleh orang tua sampai habis. Sementara itu, menurut kelompok diskusi laki-laki, faktor yang dianggap menghambat kesejahteraan adalah faktor alam, terutama curah hujan yang sangat jarang dan tidak teratur, ketiadaan modal dan kurangnya pendidikan/keterampilan yang berkaitan dengan mata pencaharian.

c) Potensi Konflik

Konflik yang terjadi baik di tingkat desa maupun dusun lebih mengarah pada ketegangan sosial dan tindak kriminalitas daripada keributan yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai secara terbuka. Dari hasil diskusi dengan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki dapat disimpulkan dua macam ketegangan sosial atau konflik dalam

sepuluh tahun terakhir. Keduanya berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan warga Dusun Amaral secara umum dan kesejahteraan keluarga di dusun tersebut secara khusus, yaitu konflik yang berkaitan dengan masalah keamanan (pencurian hewan ternak) dan konflik kepemilikan tanah antara warga lama dan warga baru (eks pengungsi) dan antara sesama warga lama.

(1) Pencurian Hewan Ternak

Seperti yang mengemuka dalam diskusi kelompok dengan kelompok laki-laki, pencurian sapi sangat merugikan warga terutama yang kehilangan sapi dalam jumlah besar. Kasus pencurian sapi ini dialami beberapa warga, tetapi yang paling merasakan dampaknya, terutama bagi kesejahteraan, adalah mereka yang kehilangan sapi dalam jumlah besar dan terjadi secara berturut-turut. Warga yang dahulunya kaya karena memiliki ternak yang banyak (bisa sampai 50 ekor sapi), saat studi dilakukan harus mencari pekerjaan tambahan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena ternak sapinya banyak yang dicuri, seperti yang tampak dalam pernyataan salah seorang peserta diskusi ini: "Dulu kaya karena sapi yang banyak, setelah dicuri akhirnya sekarang bertani karena sapi sudah tidak ada" (FGD, laki-laki, 37).

Dalam beberapa kasus pencurian, warga desa dapat mengidentifikasi kelompok pencuri sapi tersebut, yaitu mereka berasal dari luar desa dan kadangkala berdiam di tempat-tempat yang sepi/jauh dari rumah penduduk di desa untuk mempermudah operasi pencurian. Namun, belum pernah ada pencuri sapi yang tertangkap, walaupun sudah melibatkan aparat kepolisian untuk mengejar pencuri tersebut. Hal ini terutama sangat mengganggu rasa keamanan warga karena sejak beberapa tahun terakhir kasus pencurian sapi ini sampai diikuti oleh kasus pembunuhan terhadap gembala sapi.

(2) Konflik Kepemilikan Tanah

Selain pencurian sapi, konflik yang juga berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat adalah konflik kepemilikan tanah. Konflik ini melibatkan warga baru maupun warga lama sehingga dampaknya pun dirasakan oleh kedua kelompok ini. Konflik kepemilikan lahan antara warga lama dengan warga baru (eks pengungsi) sangat meresahkan warga lama. Menurut para peserta FGD, konflik ini terjadi karena warga baru mengambil lahan warga lama untuk berladang dan membangun rumah tanpa izin pemilik tanah. Masih menurut penuturan para peserta diskusi dari kelompok perempuan, pada dasarnya warga eks pengungsi tidak begitu saja mengambil lahan warga lama. Mereka mengolah/berladang di lahan warga lokal karena lahan tersebut sudah diberikan kepada mereka oleh ketua adat dan kepala desa. Faktor yang meresahkan dan mengkhawatirkan warga ialah perilaku warga eks pengungsi ini yang cenderung agresif dan enggan mendengarkan saran/pendapat serta permintaan dari warga lokal. Warga eks pengungsi ini dikatakan sebagai warga yang keras kepala, cenderung kasar sehingga menimbulkan keengganan di pihak warga lokal untuk menegur mereka, khawatir akan terjadi pertikaian yang lebih besar lagi. Konflik ini sampai menimbulkan perkelahian. "Waktu itu sudah sempat ribut, jadi kita tidak tahu kapan tanah tersebut diberikan, katanya oleh ketua suku" (FGD, perempuan, 49). Peserta lain menyebutkan bahwa "Ada yang baku pukul antara pengungsi dan warga lokal" (FGD, perempuan, 40) dan "Ada yang sampai berkelahi waktu mereka (pengungsi) mau buat ladang atau rumah, kita usir

mereka tidak mau karena mereka bilang tokoh masyarakat yang sudah kasih" (FGD, perempuan, 40).

Pertikaian tersebut lama kelamaan mereda karena pada akhirnya warga baru eks pengungsi bersedia mengembalikan lahan kepada warga lokal, walaupun baru sebagian. Menurut peserta FGD, ada warga yang sudah mengambil kembali tanahnya, tetapi "(sebagian) lahan (masih) digarap oleh orang lain, namun sebagian sudah ada yang dikembalikan" (FGD, perempuan, 45).

Proses pengembalian tersebut terjadi karena ada negosiasi antara warga baru dengan warga lokal yang juga dibantu oleh para tetua adat dan kepala dusun. Setelah lahan tersebut dikembalikan, suasana di antara warga lokal dan warga baru eks pengungsi kembali membaik.

Di antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kelompok yang paling dirugikan dengan adanya konflik ini adalah para petani terutama warga lama karena sebagian lahan garapan mereka digunakan oleh warga baru (eks pengungsi) untuk tempat permukiman, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dari hasil pertanian. Untuk meniyasati hal tersebut, akhirnya banyak warga lama yang kemudian melakukan usaha lain, yaitu bertanam dan berjualan sayur. Seperti yang dikemukakan oleh kelompok diskusi perempuan, "...yang paling banyak dirugikan adalah warga lokal pemilik tanah karena tanahnya digarap oleh orang lain..." (FGD, perempuan, 42). Sebaliknya, ketika lahan warga lokal sudah dikembalikan, yang menderita kerugian justru warga baru, "Warga baru, setelah masalah lahan yang diambil oleh warga baru dikembalikan kepada pemilik lahan sehingga mereka tidak bisa lagi berkebun dan mendapat hasil" (FGD, perempuan, 40)

Jika konflik kepemilikan lahan antara warga lokal dengan warga baru sudah dipecahkan, tidak halnya dengan konflik kepemilikan lahan antara sesama warga lokal, terutama warga/rakyat biasa dengan ketua adat/raja kecil di Lay. Pengambilalihan lahan yang dilakukan oleh raja kecil tersebut sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada penyelesaian, baik pengembalian lahan ke pihak yang berhak ataupun pemberian ganti rugi yang sesuai. Ganti rugi yang dijanjikan oleh pihak Raja Lay atas tanah yang menjadi permukiman pengungsi (Aluk dan Gama) adalah sebesar 7 juta rupiah per hektare, tetapi para pemilik tanah tersebut belum pernah menerima uang ganti rugi sedikit pun. Lahan yang diserahkan kepada pengungsi awalnya adalah lahan produktif yang ditanami oleh tanaman keras seperti jati dan mente yang hasilnya sangat membantu pendapatan keluarga, terlebih lagi ketika terjadi gagal panen.

Menghadapi permasalahan tersebut, beberapa pihak yang cukup berpengaruh di desa, seperti ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat, mengadukan hal ini kepada Komisi Kebenaran dan Keadilan Keuskupan Atambua. Tindakan yang telah dilakukan komisi tersebut barulah sebatas pada imbauan untuk tidak lagi mengambil tanah masyarakat dan belum ada sanksi yang sifatnya memaksa.

4.3.2 Desa Beluta

a) Kondisi Lokal

Desa Beluta adalah desa pertanian yang memiliki daerah datar dan daerah perbukitan. Pada 2006, jumlah penduduknya 2.800 jiwa atau 449 keluarga. Sepuluh tahun sebelumnya terdapat sekitar 900 jiwa atau sekitar 150 keluarga. Sebanyak 96% penduduknya beragama Katolik. Mayoritas warga adalah suku Kemak, tetapi bahasa yang paling umum dipergunakan adalah bahasa Tetun. Mata pencaharian utama sebagian besar warga Beluta adalah bertani, terutama bertani dengan lahan nonirigasi. Sebagian dari mereka yang bermata pencaharian utama di sektor pertanian juga memiliki sejumlah ternak (terutama sapi dan kambing). Sekalipun hanya dalam jumlah yang lebih kecil, ada warga Beluta yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Kurang dari 10% warga bekerja sebagai pegawai negeri. Buruh kasar laki-laki maupun perempuan dewasa di Beluta rata-rata mendapat upah harian sekitar Rp10.000 hingga Rp12.500/ hari.

Kantor Desa Beluta hanya terletak sekitar 4 km dari pusat kabupaten (Kota Atambua). Pemerintahan Desa Beluta terdiri atas sembilan dusun, salah satunya adalah Dusun Soeares di mana penelitian dilakukan.⁹ Dusun Soeares adalah salah satu dusun yang kurang sejahtera di Desa Beluta.¹⁰ Berbagai dusun di Desa Beluta memiliki jalan yang menghubungkannya dengan jalan utama menuju Kota Atambua. Jalan utama ini adalah jalan aspal yang bisa dilalui kendaraan sepanjang tahun. Sekalipun jarang, setiap hari ada kendaraan umum (angkutan pedesaan) yang melayani trayek keluar masuk desa. Dari sembilan dusun di Beluta, dua di antaranya telah memiliki fasilitas listrik. Sebagian besar warga Desa Beluta telah dapat menggunakan air bersih dari sumur untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini sama dengan 1996.

Di Beluta terdapat puskesmas yang dilayani baik oleh tenaga dokter dan bidan. Selain itu, terdapat juga pustu. Sejak dibangunnya puskesmas pada 2005, pelayanan kesehatan yang tersedia di desa membaik karena masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan

⁹Kesembilan dusun tersebut adalah: Noronha, Tavares, Aru, Sabino, Batista, Soeares, Carom, Corte, dan Rego. Keadaan dusun-dusun di Desa Kabuna sangat berbeda. Dusun yang tergolong paling sejahtera dan padat penduduknya adalah Tavares, Noronha, dan Batista. Di kedua dusun ini sejak 1980-an telah ada fasilitas listrik. Khususnya di Dusun Tavares, fasilitas listrik yang ada memungkinkan dibangunnya bandar udara di dusun itu. Bandar udara Tavares yang mulai beroperasi pada 2000 memiliki panjang 900 meter dan lebar 23 meter. Bandara ini dapat didarati oleh pesawat jenis C-212 dan melayani jalur penerbangan domestik ke Kupang dengan frekuensi seminggu sekali.

¹⁰Dusun Soeares letaknya 7 km dari pusat pemerintahan kabupaten di Kota Atambua. Jalan menuju Dusun Soeares adalah jalan aspal yang secara umum baik kondisinya. Pada 2005, Dusun Soeares didiami oleh 38 keluarga warga lama dan 65 keluarga warga baru. Jalan utama adalah jalan aspal yang bisa dilalui kendaraan sepanjang tahun. Kendaraan umum (angkutan desa) bisa mencapai Dusun Soeares sekalipun hanya beberapa kali dalam sehari. Sekalipun sudah ada jalan aspal, listrik belum masuk di Dusun Soeares. Fasilitas umum terpenting yang ada di Soeares adalah gereja dan sebuah SD yang dibangun pada 1997.

Hampir seluruh rumah di Dusun Soeares berinding *bebak*. Hanya ada satu-dua rumah yang berinding tembok. Kondisi rumah-rumah di Soeares menjadi lebih baik setelah ada bantuan perbaikan rumah (khususnya untuk keluarga miskin) pada 2002. Sanitasi juga menjadi lebih baik setelah pada 2005 LSM V membantu membangun WC/kamar mandi dan sumur (satu WC untuk dua hingga tiga keluarga). Hampir seluruh warga Wesasuit bekerja sebagai petani (90–100%). Umumnya mereka mengerjakan tanah nonirigasi dengan tanaman tahunan (ladang) dan mengombinasikannya dengan pemeliharaan hewan ternak (sapi dan kambing). Hasil pertanian warga, antara lain, adalah jagung, kacang panjang, tomat, lombok, ubi kayu, ubi jalar, paria, dan terong.

dengan lebih mudah (lokasi lebih dekat). Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Beluta adalah empat sekolah dasar (SD) dan satu akademi perawat (dibangun pada 2002). Warga Beluta mengeluh bahwa desa mereka belum memiliki sekolah menengah sekalipun sudah ada empat SD sehingga setelah tamat SD murid-murid harus melanjutkan sekolah menengah di Kota Atambua.

b) Mobilitas Sosial: Perspektif dari Bawah

Dalam waktu sepuluh tahun (1996–2006), terjadi berbagai peristiwa yang memengaruhi naik-turunnya kesejahteraan warga dusun secara umum. Ada yang dianggap memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara negatif (menurunkan kesejahteraan) dan ada yang dianggap memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara positif (meningkatkan kesejahteraan).

Di tingkat komunitas, dua peristiwa yang dinilai paling merugikan bagi kesejahteraan masyarakat dusun adalah keberadaan pengungsi dari Timor Leste pada 1999 dan bencana banjir pada 2001. Kedatangan pengungsi dianggap merugikan terutama karena mereka menggunakan lahan pertanian warga lokal dalam jangka waktu tak terbatas dan tanpa kompensasi. Ini dianggap bisa mengurangi lahan yang bisa dikerjakan oleh warga lokal. Selain itu, pengungsi juga memotong kayu di hutan-hutan sekitar dusun secara besar-besaran untuk dijadikan kayu bakar. Warga lokal khawatir ini akan mengakibatkan mengeringnya sumber-sumber air desa di masa yang akan datang. Yang paling membuat mereka resah adalah kenyataan bahwa hingga enam tahun setelah peristiwa itu terjadi (1999–2005) belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Masyarakat mengakui bahwa selama ini tidak ada upaya kolektif untuk mencari penyelesaian, yang terjadi hanya tindakan-tindakan individual yang justru menyebabkan ketegangan bahkan konflik dengan para pengungsi. Bencana banjir yang terjadi pada 2001 merusakkan hasil pertanian serta pagar-pagar kayu di lahan-lahan penduduk. Ini juga dianggap sebagai peristiwa yang paling negatif pengaruhnya terhadap kesejahteraan warga. Banjir itu membuat persediaan pangan berkurang dan warga juga harus mengeluarkan biaya perbaikan pagar, "Saat itu kami kelaparan, dan sempat makan biji *maek*"¹¹ (FGD, perempuan, 35).

Dua peristiwa yang dinilai paling membantu meningkatkan kesejahteraan adalah proyek terasering serta proyek pembangunan WC dan sumur. Pembuatan terasering pada 2001 memberi keuntungan ganda pada warga: pertama, terasering dianggap memperbaiki hasil pertanian; kedua, warga juga mendapat imbalan beras 1 kg untuk pengerjaan setiap 1 meter teras. Dengan adanya WC dan sumur sejak 2005, warga bisa menjaga kebersihan lebih baik serta mudah mendapatkan air bersih.

Yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah bahwa seluruh peristiwa yang dianggap berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat terkait dengan program-program bantuan oleh LSM (baik lokal maupun internasional). Ini menunjukkan minimnya potensi dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (tanpa bantuan/intervensi eksternal). Faktor-faktor seperti lahan yang kurang subur dan sebagian berlokasi di lereng bukit (tidak datar), curah hujan rendah, sumber daya

¹¹Sejenis talas yang biasanya dijadikan makanan hewan. Jika dimakan menyebabkan gatal di lidah.

masyarakat yang terbatas (sebagian besar warga hanya berpendidikan SD) serta ketergantungan yang besar pada sektor pertanian menyebabkan sebagian besar warga Soeares berpenghasilan rendah dan tidak stabil. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menyediakan dana secara mandiri untuk melakukan investasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti pembuatan WC dan sumur. Komunitas seperti Soeares ini kemudian menjadi sangat membutuhkan bantuan dari luar. Kebutuhan ini mendapat respons dari berbagai LSM. Jadi, bukan hal yang luar biasa jika berbagai program bantuan dilaksanakan hampir setiap tahun. Bagi masyarakat, keberadaan LSM dan program-programnya adalah menguntungkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang cukup penting.

Di tingkat rumah tangga dan individu, faktor-faktor yang dianggap bisa menurunkan kesejahteraan adalah: (i) kewajiban adat, (ii) usia tua, dan (iii) menjadi janda (baik karena perceraian maupun kematian). Kewajiban adat adalah faktor yang paling sering dikeluhkan warga baik dalam diskusi (FGD) maupun wawancara. Kewajiban adat ini terkait baik dengan berbagai tahapan hidup (kelahiran, perkawinan, kematian) maupun dengan upaya untuk mengatur hubungan antarwarga termasuk denda atau hukuman jika terjadi pelanggaran. Secara umum, masyarakat Soeares yang mayoritas berasal dari suku Kemak, memahami kewajiban-kewajiban adat ini sebagai suatu dilema, di satu sisi mereka mengakui bahwa adat itu harus dipatuhi, tetapi di sisi yang lain untuk mematuhi adat itu mereka mendapat beban finansial yang sangat berat, "Adat itu bikin susah, kalau tidak ikut ... salah, kalau ikut setengah mati" (FGD, laki-laki, 43). Dua kewajiban adat yang paling sering dikeluhkan oleh warga adalah mahalannya biaya perkawinan bagi anak laki-laki (kewajiban membayar *belis*) dan biaya sumbangan kematian dalam keluarga. Kewajiban membayar belis adalah kewajiban pihak laki-laki (*bride receiver*) untuk memberi sejumlah (besar) uang, barang (lempengan emas/plat emas) dan ternak (biasanya sapi) kepada pihak perempuan (*bride giver*). Laki-laki yang tidak bisa membayar belisnya secara lunas kurang dihormati dan dianggap belum punya hak terhadap istrinya, bahkan " ... kalau laki-laki tidak bisa membayar belis, keluarga nona (pihak perempuan) bisa menyuruh suami meninggalkan istrinya, supaya istrinya bisa kawin lagi (dengan laki-laki yang mampu membayar belis)" (FGD, laki-laki, 52). Jika data dari FGD dibandingkan dengan data dari sejarah hidup individu maka dapat dilihat bahwa kewajiban adat juga sering disebut sebagai beban keuangan yang berat serta mempersulit orang/rumah tangga untuk menabung dan mengakumulasi kekayaan.

Selain kewajiban adat, dalam sejarah hidup individu juga muncul beberapa faktor lain yang bisa menurunkan kesejahteraan rumah tangga, antara lain (i) biaya kesehatan, (ii) kematian anggota keluarga, dan (iii) lahan pertanian dipinjam dan dikerjakan pengungsi tanpa kompensasi atau bagi hasil. Biaya kesehatan menjadi masalah besar pada saat harus membayar biaya rawat inap rumah sakit, sedangkan pengeluaran kesehatan di tingkat puskesmas termasuk pustu dan pondok bersalin desa (polindes) tidak pernah disebut sebagai beban yang berat. Kematian anggota keluarga bisa menjadi faktor yang menurunkan kesejahteraan jika yang meninggal adalah anggota keluarga yang merupakan pencari nafkah utama. Oleh karena itu, yang sering mengatakan kesejahteraannya turun karena kematian anggota keluarga adalah para perempuan yang kehilangan suami serta anak-anak yang menjadi yatim/piatu.

Sama dengan di tingkat komunitas, masalah lahan pertanian yang dipinjam dan dikerjakan oleh para eks pengungsi tanpa kompensasi atau bagi hasil juga dianggap sebagai faktor yang menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Selain tanpa kompensasi, warga lokal di Soeares juga mengeluhkan bahwa peminjaman lahan juga dilakukan tanpa batas waktu yang jelas, "Mereka bilang hanya pinjam lahan sampai mereka pulang kembali ke desa asalnya di Timor Leste, tapi kapan mereka pulang...? lima tahun? sepuluh tahun lagi? Kami tetap saja tidak bisa apa-apa" (FGD, perempuan, 29).

Faktor-faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, antara lain (i) adanya program bantuan dari pemerintah dan LSM, (ii) adanya sumber pendapatan tambahan, (iii) bagi hasil sapi dan (iv) musim yang teratur (tidak mengalami kekeringan atau banjir), (v) suami-istri sama-sama bekerja, (vi) menanam sayur yang mudah dijual di pasar, (vii) ada anggota keluarga yang bekerja di luar negeri, dan (viii) mau bekerja keras.

Jika temuan dari FGD itu dibandingkan dengan temuan sejarah hidup individu warga Soeares, tampak bahwa faktor program bantuan dari pemerintah dan LSM secara konsisten muncul sebagai faktor yang berpengaruh positif bagi kesejahteraan hidup warga. Seperti yang disebutkan oleh seorang warga yang termasuk miskin di Soeares:

Kehidupan saya bisa terbantu dan bisa meningkat itu kalau ada bantuan seperti dari pemerintah. Bantuan itu boleh berbentuk sapi, kambing, beras, dan bantuan uang. Itu saja sudah membantu hidup saya. Juga karena saya orang petani, maka bantuan juga bisa berbentuk alat-alat pertanian, bibit, dan obat pertanian. (Sejarah hidup, laki-laki, 64)

Selain itu, ketersediaan lahan pertanian juga sangat menentukan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Orang-orang yang tergolong paling miskin di Soeares sering kali adalah mereka yang tidak punya cukup lahan (hanya bisa menanam di pekarangan saja). Sekalipun mayoritas warga Soeares adalah petani, tetapi tingkat kesejahteraan hidup mereka tidak sama. Para petani yang menanam komoditas pertanian yang mudah dijual di pasar, seperti sayur-sayuran, umumnya lebih sejahtera daripada petani yang hanya menanam tanaman untuk konsumsi sendiri (misalnya jagung, dan ubi).

Selanjutnya, menurut sejarah hidup individu, rumah tangga yang memiliki anggota yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Seorang warga yang dikategorikan sebagai orang yang meningkat kesejahterannya menceritakan peningkatan aset rumah tangganya karena dua anaknya bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita).

Tahun 2006 ini saya beli TV berwarna, tape recorder, dan generator seharga Rp. 6.000.000. Itu uang dari anak saya yang kerja di Malaysia. Bulan Desember 2005 kemarin anak saya pulang dari Malaysia dan bawa uang. Dia ingin bangun rumah sini (sambil jari telunjuk tangan kanan menunjuk rumah) lebih bagus dan lebih besar. Namun, karena uang saat itu belum cukup untuk bangun rumah, daripada ditabung dan kalau ada adat pasti uang keluar, dia ingin uang itu buat Bapak dan Mamanya untuk beli barang-barang dan ditaruh di rumah saja. Akhirnya, bulan Januari 2006 setelah dia kembali lagi ke Malaysia, uang itu saya belikan barang-barang itu tadi. (Sejarah hidup, laki-laki, 55)

Dalam uraian sebelumnya, berbagai kewajiban adat yang membutuhkan biaya besar adalah faktor yang dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, ini yang dialami rumah tangga atau individu yang mengeluarkan biaya (misalnya dalam adat

perkawinan adalah keluarga pengantin laki-laki). Sebaliknya, dari sisi keluarga pengantin perempuan, kewajiban adat seperti pembayaran belis justru dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Seorang responden sejarah hidup menceritakan bahwa:

Tahun 1977 kakak saya menikah sehingga tanggung jawab dalam rumah semakin berkurang. Kebetulan menikah itu dengan orang Dawan (Timor) sehingga kakak laki-laki (ipar) sangat mengerti dengan kehidupan kami sehingga banyak hal yang kami rasa menjadi tempat berlindung selain Mama. Walaupun waktu itu saya bekerja di kebun tapi saya rasa lebih baik karena kakak (perempuan) sudah dibelis sehingga rasanya kami punya harga di mata keluarga Mama di Bautasik. (Sejarah hidup, laki-laki, 44)

Beberapa responden menyebutkan juga bahwa kesejahteraan hidup mereka (dalam arti harga diri dan kebanggaan) meningkat karena bisa memenuhi kewajiban adat. Dengan demikian, beban finansial kewajiban adat bisa terkompensasi dengan penghargaan yang diterima sebagai orang atau keluarga yang mampu memenuhi kewajibannya.

Berbagai faktor yang bisa menurunkan atau menaikkan kesejahteraan baik di tingkat komunitas maupun rumah tangga tersebut di atas menunjukkan bahwa warga Dusun Soares–Desa Beluta telah mengalami berbagai arah mobilitas sosial (*upward*, *downward*, dan *stagnation*). Oleh karena itu, masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok transisi, yaitu: mereka yang sudah sejahtera sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*always rich*), bisa meningkatkan kesejahteraan (*mover*), mereka yang justru turun kesejahteraannya (*faller*), dan mereka yang tetap miskin sedikitnya dalam lima tahun terakhir (*chronic poor*). Dalam diskusi (FGD) tentang tingkatan-tingkatan kesejahteraan, masyarakat Soares mengidentifikasi tiga tingkat (tangga) kesejahteraan, yaitu

- (1) susah sekali (*susar los*/lapisan terbawah) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *poor* atau *faller*;
- (2) susah atau sederhana (*susar*/lapisan tengah) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *mover*; dan
- (3) lumayan atau sudah baik (*maloin*/lapisan teratas) yang umumnya bisa diparalelkan dengan kelompok *rich/always rich*.

Proporsi ketiga tingkatan itu menurut FGD laki-laki maupun perempuan, pada 2006 dan sepuluh tahun sebelumnya disajikan dalam Tabel 11a dan Tabel 11b.

Tabel 11a. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Beluta (FGD Perempuan)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Terbawah (<i>Susar Los</i>)	Tengah (<i>Susar</i>)	Teratas (<i>Maloin</i>)
1996	44%	44%	12%
2006	38%	33%	29%

Tabel 11b. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dalam Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Beluta (FGD Laki-laki)

Tahun/Kelompok Kesejahteraan	Terbawah (<i>Susar Los</i>)	Tengah (<i>Susar</i>)	Teratas (<i>Maloin</i>)
1996	80%	20%	.
2006	46%	41%	13%

Kelompok perempuan mengidentifikasi jumlah tingkatan yang sama untuk saat itu (2006) dan sepuluh tahun sebelumnya (keduanya terdiri atas tiga tangga). Namun, kelompok laki-laki menyebutkan bahwa sepuluh tahun yang lalu di Soeares hanya terdapat dua tangga dan pada 2006 menjadi tiga tangga. Ini berarti dalam periode sepuluh tahun terakhir masyarakat dusun menjadi lebih bertingkat (lebih terstratifikasi). Munculnya lapisan sosial yang lebih sejahtera, yaitu tangga ketiga menunjukkan bahwa ada sebagian kecil warga yang mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun, peningkatan kesejahteraan juga harus dilihat dalam perubahan yang terjadi di lapisan-lapisan yang lain (misalnya di tangga satu dan dua). Baik dalam stratifikasi versi FGD perempuan maupun laki-laki, tampak bahwa jumlah warga yang berada di tangga termiskin berkurang dan makin banyak warga naik ke tangga yang lebih sejahtera. Jadi, sekalipun kedua kelompok FGD mengidentifikasi pola stratifikasi yang berbeda, keduanya mengidentifikasi perubahan (pergerakan) yang relatif sama, yaitu adanya peningkatan kesejahteraan sekalipun terbatas.

c) Potensi Konflik

Dalam diskusi (FGD) masyarakat mengidentifikasi berbagai kasus yang menimbulkan ketegangan sosial serta rasa tidak aman dan tidak nyaman di dusun mereka. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut terkait dengan keberadaan para eks pengungsi dari Timor Leste. Warga lokal umumnya sering disebut sebagai "warga lama" dan eks pengungsi sering disebut sebagai "warga baru". Oleh sebab itu, dapat disebutkan bahwa secara umum potensi konflik di Desa Beluta–Dusun Soeares terkait dengan ketegangan hubungan antara warga lama dan warga baru.

(1) Ketegangan Sosial antara Warga Baru dan Warga Lama: Kasus Penyerobotan Tanah

Pada 1999, Desa Beluta di Kecamatan Y menerima pengungsi sejumlah 13.000 jiwa. Pada 2000 jumlah ini menyusut menjadi 10.000 karena ada yang pindah ke Atambua, Besikama, dan Atapupu. Pada 2006, jumlah pengungsi sekitar 2.000 jiwa (285 KK). Mereka tetap tinggal

di Beluta karena memiliki sanak keluarga atau keluarga besar suku di desa tersebut. Dusun Soeares yang merupakan satu dari sembilan dusun di Desa Beluta juga tidak luput dari gelombang pengungsian tersebut. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, penduduk Soeares bertambah hampir dua kali lipat karena masuknya warga baru. Selain itu, secara drastis warga baru juga menjadi mayoritas di dusun itu karena ada 65 keluarga warga baru dan hanya 39 keluarga warga lama.

Saat pengungsi masuk ke Dusun Soeares pada 1999, warga lokal menampung pengungsi di rumah dan di lahan mereka. Kepala Dusun Soeares menjelaskan bahwa:

Pengungsi datang dengan oto (mobil) di Dusun Soeares pada sore hari. Warga kaget. Kami terpaksa menampung mereka di rumah atau di lahan karena kami basudara dengan mereka.¹² Di rumah saya dalam waktu dua tahun itu (1999– 2001) ada empat keluarga termasuk keluarga saya. Kami tidur di mana-mana karena tidak ada lagi tempat. Ada keluarga bapak tua yang membawa tiga anak perempuan. Salah satu dari anak perempuan itu sudah berkeluarga dan membawa keluarganya juga. Awalnya kami sediakan makan untuk mereka, tetapi kemudian bapak tua itu membeli makanan sendiri untuk keluarganya. Kami pakai dapur bergantian dan memasak sendiri-sendiri. Sulit untuk istirahat karena terlalu banyak orang tinggal bersama di rumah. (Wawancara profil komunitas, laki-laki, 45)

Masalah yang muncul berikutnya adalah banyak di antara pengungsi menggarap lahan warga lokal, baik seizin maupun tanpa seizin *tuan kebun* (pemilik lahan). Luas tanah warga lokal yang digarap tanpa kompensasi oleh para pengungsi tidak sama. Di Dusun Soeares, umumnya berkisar antara 1 hingga 5 ha. Warga lokal mengeluhkan bahwa tanah yang “diserobot” sering kali adalah tanah yang berkualitas baik (dekat dengan sumber air, tanah datar/landai atau tanah sawah). Oleh karena itu, penyerobotan tanah ini dianggap sebagai hal yang menurunkan kesejahteraan warga lokal.

Warga lokal menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap penyerobotan tanah. Umumnya reaksi yang muncul bersifat individual, tetapi juga ada reaksi yang bersifat kolektif. Ada beberapa warga lokal yang secara keras mengusir pengungsi dari lahannya jika mereka menggarap lahan itu tanpa izin. Namun, kebanyakan warga lokal membiarkan—sekalipun tidak merelakan—tanahnya digarap. Umumnya sikap “membiarkan” ini dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa pengungsi akan bersikap kasar dan agresif jika mereka tidak diizinkan menggarap lahan (jadi lebih baik tidak usah melarang). Selain itu, ada juga warga lokal yang menganggap bahwa para pengungsi memang tidak punya pilihan lain selain menyerobot tanah karena mereka adalah petani yang membutuhkan lahan untuk bertahan hidup. Bagi kelompok ini, yang menjadi masalah adalah pemakaian tanah milik orang lain tanpa kompensasi apa pun dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya, “Sampai kami bisa pulang kembali ke Timor Leste.” Menurut warga lokal, “Kalau mereka (pengungsi) mau pakai lahan harus membayar sewa, atau membelinya dari kami. Kalau pinjam, harus ditentukan juga kapan tanah akan dikembalikan” (FGD, laki-laki, 38).

Dalam wawancara dengan tokoh informal dari para pengungsi disebutkan bahwa:

¹²Istilah “bersaudara” (*basudara*) tidak selalu menunjukkan hubungan kekerabatan langsung melainkan mengacu pada orang yang berasal dari suku yang sama atau memiliki nenek moyang yang sama.

Bagaimana kami mau bayar sewa kalau hasil pertanian dari tanah di Wesasuit itu sedikit saja. Untuk makan kami saja kurang. Tanah di Soeares ini tidak subur, hasil sangat sedikit, jadi kami tidak bisa membagi hasil. Kalau kami harus mengembalikan tanah, bagaimana kami bisa hidup?" (Wawancara studi kasus, laki-laki, 52).

Salah satu dari sedikit reaksi yang bersifat kolektif adalah mengirimkan surat keluhan kepada Bupati Belu atas nama lima dusun di Beluta (Tavares, Noronha, Mau, Sabino, dan Soeares). Surat ini dikirim pada April 2005. Beberapa hal yang dikeluhkan dalam surat tersebut, yakni

- (a) warga Desa Beluta—yang banyak terdiri atas para petani kecil dengan penghasilan rendah—sejak lima tahun silam (1999–2006) telah berperan serta bersama pemerintah dalam menangani masalah pengungsi eks Timor Leste dengan merelakan/memberikan sebagian tanah/lahan garapan demi kelangsungan hidup para pengungsi tersebut;
- (b) peran serta warga tersebut berdampak negatif terhadap kesejahteraan karena menurunkan pendapatan (dari hasil pertanian);
- (c) oleh karena itu, warga berharap untuk mendapat bantuan berupa dana sebagai kompensasi lahan yang telah dipinjamkan; dan
- (d) dalam menangani masalah pengungsi eks Timor Leste, warga Beluta mengusulkan agar para pengungsi secepatnya dilokalisasi di suatu tempat yang permanen sehingga mereka dapat menata masa depannya tanpa membebani penduduk lokal.

Surat ini dilampiri dengan daftar nama warga kelima dusun di Beluta yang menampung pengungsi (atau yang tanahnya digarap oleh pengungsi) serta ditanda tangani oleh 14 tokoh masyarakat.

(2) Aktor-Aktor dalam Masalah Penyerobotan Tanah

Dalam diskusi (FGD) masyarakat mengidentifikasi lima unsur (aktor) yang terkait dalam masalah penyerobotan tanah, yaitu: warga lama, warga baru, Kepala Dusun Soeares, Kepala Desa Beluta, dan polisi. Tokoh-tokoh masyarakat (baik tokoh adat maupun tokoh keagamaan) dianggap tidak terlibat dalam masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalah penyerobotan tanah masih bergejolak di tingkat individu secara sporadis. Konflik atau pertikaian terbuka kadang terjadi, tetapi juga masih tetap dalam skala kecil yang sekalipun membuat polisi turun tangan, belum meluas ke tingkat komunitas.

Dari kelima unsur tersebut, masyarakat (warga lama) melihat diri mereka sendiri sebagai korban. Dalam pandangan mereka, warga baru adalah pelaku (yang memulai masalah atau melakukan penyerobotan tanah), Kepala Dusun Soeares sebagai korban (karena tanahnya juga diserobot) Kepala Desa dan Pemerintah Desa Beluta sebagai korban tidak langsung (karena menghadapi situasi sulit sehubungan dengan ketegangan di dalam masyarakat), dan polisi sebagai penengah dan peredam konflik. Selain itu, disebutkan juga bahwa jika suatu ketika masyarakat hendak lebih intensif mengupayakan penyelesaian masalah penyerobotan tanah, maka unsur yang paling dipercaya untuk menyelesaikan adalah tokoh adat karena "tokoh adat dapat menyelesaikan kasus sampai dengan tercapainya kesepakatan" (FGD, laki-laki, 41) dan oleh sebab itu, "tokoh adat seharusnya terlibat sejak awal" (FGD, laki-laki, 35).

(3) Berbagai Dampak Penyerobotan Tanah terhadap Mobilitas Sosial di Tingkat Dusun

Dalam hasil FGD, dalam narasi sejarah lisan, dan berbagai pembicaraan informal masyarakat Soares `kerap mengeluhkan berkurangnya tanah garapan–dan oleh sebab itu hasil kebun pun lebih sedikit–karena sebagian dari tanah tersebut digunakan oleh pengungsi. Selain itu, penduduk juga mengeluh bahwa mereka tidak bisa lagi mendapat hasil dari tanaman/pohon umur panjang (misalnya: pohon buah-buahan) yang ada di tanah tersebut sejak sebelum digunakan oleh pengungsi. Hal yang perlu dicatat dalam konteks ini adalah bahwa tanah garapan tidak selalu mencerminkan tanah yang dimiliki penduduk karena sebagian tanah adalah milik desa.

Dalam FGD laki-laki dan perempuan, peserta juga menyebutkan bahwa sejak pengungsi mengambil dan memotong pohon-pohon di hutan desa dalam jumlah besar untuk dijual sebagai kayu bakar, penduduk lokal tidak lagi bisa melanjutkan mata pencaharian itu. Penduduk setempat juga khawatir jika penggundulan hutan dilakukan oleh lebih banyak orang, baik pengungsi maupun penduduk lokal, penggundulan hutan akan makin parah. Dengan demikian, ketegangan yang terjadi juga perlu dipahami sebagai akibat dari perlakuan warga baru (menggunakan lahan tanpa izin, tanpa kompensasi dan dalam waktu yang tidak terbatas atau menebangi hutan desa/merusak lingkungan), dan bukan semata-mata karena kerugian secara ekonomi (penurunan hasil kebun, tidak bisa lagi menjual kayu bakar).

Dalam hubungan sosial sehari-hari, ketegangan akibat penyerobotan tanah membuat polarisasi yang makin tajam di antara warga lama/lokal dengan warga baru/eks-pengungsi. Hingga saat penelitian dilakukan, ketegangan itu masih dalam bentuk laten, sekalipun sesekali terjadi juga konflik terbuka yang melibatkan campur tangan polisi.

V. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Struktural

5.1 Pengantar

Mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan adalah fenomena kompleks yang perlu dianalisis dan dipahami secara komprehensif. Studi ini secara khusus mengkaji mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan melalui berbagai upaya untuk keluar dari kemiskinan, baik secara individual maupun kolektif. Bagaimana upaya-upaya tersebut dilakukan dan apa hasilnya ditentukan oleh banyak faktor. Dalam studi ini, faktor-faktor yang memengaruhi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dibedakan menjadi dua kategori: (i) faktor-faktor struktural, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan keberadaan berbagai golongan dan lembaga dalam masyarakat, pola hubungan di antara berbagai unsur tersebut serta norma-norma yang mengaturnya; dan (ii) faktor-faktor individual, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan kemampuan dan aset anggota masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kolektif, untuk bertindak sesuai dengan pilihan dan kepentingannya.

Bab ini secara khusus mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang berpengaruh dan relevan terhadap upaya keluar dari kemiskinan serta bagaimana pengaruh itu terjadi.

5.1.1 Mengapa Penting untuk Mengkaji Faktor-Faktor Struktural?

Faktor-faktor struktural sangat relevan dalam analisis tentang mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan karena setiap tindakan yang dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif selalu terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, sekalipun individu maupun suatu kelompok memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pilihan dan kepentingannya, kemampuan untuk bertindak dan hasil tindakan akan selalu dipengaruhi oleh hal-hal seperti:

- a) pola hubungan berbagai golongan/kelompok masyarakat (misalnya antara pemimpin/ tokoh/kelompok elite dan masyarakat kebanyakan);
- b) norma-norma yang mengatur (misalnya norma kesopanan dan kesusilaan, norma keadilan, relasi timbal-balik, dan lain lain); dan
- c) institusi-institusi sosial (misalnya sistem kekerabatan, lembaga adat yang menentukan berbagai hak dan kewajiban adat seperti pembayaran mas kawin atau macam-macam bentuk bantuan).

Hal-hal tersebut adalah contoh konkret bagaimana bagian-bagian dari struktur sosial menjadi konteks bagi tindakan yang dilakukan anggota masyarakat, termasuk tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Konteks ini bisa membatasi/menghambat atau sebaliknya justru mendukung/memfasilitasi upaya individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk keluar dari kemiskinan. Namun, perlu dicatat bahwa individu/kelompok tidak hanya secara pasif menerima pengaruh (dihambat atau didukung) oleh struktur sosial yang ada. Tindakan-tindakan mereka juga bisa

mengakibatkan perubahan pada struktur sosial tersebut. Jadi, ada saling pengaruh terus-menerus antara aktor atau agen (individu/kelompok) dengan struktur sosialnya (konteksnya). Faktor-faktor struktural yang dianalisis dalam bab ini, antara lain,

- a) stratifikasi sosial serta pola-pola hubungan antara berbagai golongan/lapisan masyarakat,
- b) kesenjangan sosial,
- c) kualitas tata kelola pemerintahan (lokal), dan
- d) keberadaan program pembangunan dan infrastruktur.

5.2 Stratifikasi Sosial dan Pola Hubungan di Antara Berbagai Golongan Masyarakat

Dalam suatu masyarakat selalu ada perbedaan di antara anggotanya berdasarkan berbagai hal seperti umur, jenis kelamin, kekayaan, pangkat/kekuasaan, asal-usul/keturunan, etnisitas, pengetahuan, mata pencaharian, dan lain-lain. Perbedaan ini sering kali menjadi benih terjadinya stratifikasi atau pelapisan sosial, yaitu pembedaan penduduk ke dalam golongan-golongan secara berjenjang (hierarkis). Dalam stratifikasi sosial, ada golongan atau lapisan (*stratum*) tertentu dalam masyarakat yang dianggap memiliki status lebih tinggi atau justru lebih rendah daripada golongan yang lain. Status tersebut ada yang diperoleh dengan sendirinya (*ascribed*) seperti usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, serta keanggotaan dalam kelompok (kasta), dan ada juga yang diperoleh berdasarkan pencapaian (*achieved*), di antaranya stratifikasi berdasarkan pendidikan (pembedaan hak dan kewajiban masyarakat atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil diraih), berdasarkan pekerjaan, dan berdasarkan kondisi ekonomi (pembedaan anggota masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi/aset).

Stratifikasi sosial bisa tertutup atau terbuka. Keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur dari mudah atau sering tidaknya anggota masyarakat naik ke lapisan yang lebih tinggi. Suatu sistem stratifikasi dinamakan tertutup sama sekali manakala setiap anggota masyarakat tetap berada dalam status yang sama dengan orang tuanya dan terbuka sama sekali manakala setiap anggota masyarakat bisa menempati status yang berbeda dengan orang tuanya.

Ahli sosiologi Wilbert Moore dan Kingley Davis yang memunculkan teori fungsional untuk stratifikasi mengemukakan bahwa stratifikasi dibutuhkan demi kelangsungan hidup suatu masyarakat dan oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki stratifikasi (Ritzer 1996). Stratifikasi itu sendiri timbul karena di dalam masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Kekayaan, kekuasaan, dan prestise tersebut terbatas sehingga sejumlah besar anggota masyarakat bersaing dan bahkan terlibat dalam konflik untuk memilikinya.

Anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, kekayaan, atau prestise berusaha memperolehnya, sedangkan anggota masyarakat yang memilikinya berusaha mempertahankan atau memperluasnya. Berkaitan dengan pembedaan berdasarkan kekuasaan dan sejalan dengan pemikiran Max Weber bahwa stratifikasi sosial bukan hanya ditentukan berdasarkan dimensi ekonomi saja. Dimensi kekuasaan (*power*) ini menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang lebih

daripada kelompok masyarakat lainnya, yang terwujud dalam perbedaan kemampuan untuk mengambil keputusan atau mewujudkan kepentingannya sendiri dan orang lain.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat disebutkan bahwa di kelima desa yang diteliti, terdapat beberapa variasi stratifikasi sosial. Namun, secara umum stratifikasi sosial itu didasari oleh, empat macam faktor, yaitu ekonomi, politik/kekuasaan, budaya dan sejarah migrasi. Berikut diuraikan variasi stratifikasi sosial serta indikator-indikatornya dengan menggunakan data yang diperoleh baik dari FGD (yaitu dengan identifikasi tangga-tangga kesejahteraan) maupun dari survei rumah tangga.

5.2.1 Stratifikasi Sosial Berdasarkan Faktor Ekonomi

Stratifikasi sosial berdasarkan faktor ekonomi adalah bentuk stratifikasi sosial yang paling umum dan dapat ditemukan di kelima desa yang diteliti. Indikator-indikator utama yang muncul di kelima desa untuk melihat stratifikasi ekonomi juga mirip, yaitu: kepemilikan aset, tingkat penghasilan, dan kapasitas anggota rumah tangga.

a) Kepemilikan Aset

Hal ini umumnya mengacu pada aset keluarga inti yang terdiri atas tanah/lahan pertanian, ternak, dan kondisi rumah. Di desa yang relatif lebih sejahtera seperti Desa Lay, aset juga termasuk alat-alat produksi seperti truk dan *hand tractor*. Di kelima desa penelitian, lahan pertanian adalah sumber daya yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Pentingnya lahan pertanian bagi kesejahteraan ekonomi juga muncul secara eksplisit dalam wawancara mendalam. Di Desa Korinus seorang warga mengatakan: "Dari waktu itu sampai sekarang tidak pikir untuk pindah *lai* (lagi). Mati hidup di sini karena kita pung (punya) tanah. Mau pindah *pi* (ke) mana lagi? Tetap di sini *sa* (saja)" (sejarah hidup, laki-laki, 48). Di Desa Beluta, hal yang sama juga terungkap: "Menurut saya, tempat di mana saya bersama keluarga, saya tinggal saat ini adalah tempat yang baik bagi saya karena di tempat ini sudah ada kebun yang memberi makan saya setiap tahunnya" (sejarah hidup, laki-laki, 48). Selain itu, warga juga melihat arti penting lahan pertanian sebagai alat produksi bagi generasi selanjutnya, yaitu anak-cucu mereka.

Karena iklim di Timor Barat sangat kering dengan kemarau panjang yang bisa berlangsung delapan–sembilan bulan per tahunnya, umumnya orang memiliki lahan pertanian nonirigasi. Data survei rumah tangga tentang distribusi kepemilikan lahan menunjukkan bahwa pada 1996 72% dari warga yang memiliki lahan nonirigasi lebih dari 1 ha adalah dari kelompok kaya (*rich*) serta kelompok yang meningkat kesejahteraannya (*mover*). Saat ini (2006), kelompok-kelompok yang sejahtera masih mendominasi kepemilikan tanah, tetapi persentasenya turun menjadi 67%.¹³ Dengan kata lain, kepemilikan tanah yang relatif luas (lebih dari 1 ha), didominasi oleh lapisan-lapisan atas dalam stratifikasi sosial desa.

Di kelima desa, umumnya warga memelihara sapi, babi, dan ayam. Sapi dan babi adalah ternak yang berharga karena harganya tinggi dan sangat dibutuhkan dalam memenuhi

¹³Berkurangnya kepemilikan lahan merupakan kecenderungan umum yang terjadi pada semua lapisan sosial.

bermacam kewajiban adat (seperti pembayaran *belis*, dan sumbangan kematian.). Saat penelitian ini dilakukan hanya 2% dari seluruh responden survei yang memiliki sapi lebih dari 20 ekor. Mereka adalah dari lapisan-lapisan sejahtera (*rich* dan *mover*) yang berlatar belakang keluarga bangsawan di Desa Lay dan Korinus. Lebih dari 60% warga tidak memiliki sapi sama sekali. Mereka yang mempunyai sapi umumnya hanya memiliki satu hingga lima ekor. Sama dengan kepemilikan tanah, kepemilikan sapi antara satu hingga lima ekor ini pun didominasi oleh lapisan-lapisan sejahtera (*rich* dan *mover*)

b) Tingkat Penghasilan

Hal ini umumnya mengacu pada tingkat penghasilan kepala keluarga. Menurut hasil FGD, golongan miskin di kelima desa memiliki penghasilan sekitar Rp50.000–Rp150.000/bulan, golongan menengah sekitar Rp150.000–Rp1.000.000/bulan dan golongan kaya lebih dari Rp1.000.000/bulan. Dari angka-angka tersebut, jelas terlihat bahwa tingkat penghasilan merupakan salah satu dasar yang penting dalam pelapisan sosial di desa. Secara lebih terperinci, pelapisan masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan di masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Penghasilan Berbagai Lapisan Masyarakat Desa pada 2005–2006 menurut FGD Tangga Kesejahteraan

Desa	Penghasilan/Bulan(rupiah)		
	Golongan Kaya	Golongan Menengah (sejahtera/berkecukupan)	Golongan Miskin
Eki	Lebih dari 1.000.000	150.000–1.000.000	Kurang dari 150.000
Malo	100.000–500.000 (atau lebih)	50.000–100.000	35.000–50.000
Korinus	500.000–1.000.000 (bagi petani) 1.000.000–3.000.000 (bagi pegawai)	150.000–500.000	50.000–150.000
Lay	Lebih dari 1.000.000	500.000–1.000.000	Kurang dari 500.000
Beluta	250.000–1.000.000 (atau lebih)	75.000–250.000	50.000–75.000

Hal yang menarik untuk dicatat di sini adalah bahwa selain besarnya penghasilan per bulan, hal lain yang membedakan antara berbagai golongan masyarakat adalah ada atau tidaknya diversifikasi sumber penghasilan dari luar sektor pertanian. Rumah tangga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik (berada di lapisan sejahtera dan kaya), sering kali adalah mereka yang juga mempunyai sumber pendapatan dari berdagang, kiriman gaji dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri, gaji sebagai PNS, atau upah sebagai tukang pijat. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (79%) tidak memiliki pendapatan dari luar usaha nonpertanian. Namun, di antara mereka yang memiliki pendapatan di luar sektor pertanian sebagian besar (lebih dari 70%) berasal dari lapisan-lapisan sejahtera (*rich* dan *mover*).

c) Kapasitas Anggota Rumah Tangga

Hal ini umumnya mengacu pada kapasitas kepala keluarga yang bisa terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan/keterampilan, dan kondisi kesehatan. Kapasitas anggota rumah tangga sering terkait dengan kemampuan untuk mendapatkan sumber pendapatan (tambahan) di luar sektor pertanian atau untuk membudidayakan komoditas yang mudah dijual di pasar, seperti sayuran. Dari berbagai wawancara tampak bahwa tidak semua petani mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menanam sayur dengan baik. Rumah tangga yang menanam sayur (misalnya kacang panjang) umumnya merupakan rumah tangga yang juga relatif sejahtera (jadi, berada di lapisan ekonomi yang lebih tinggi) dibandingkan dengan rumah tangga yang hanya menanam tanaman kebutuhan pokok seperti jagung, ketela pohon, dan ubi. Hal ini sama dengan kapasitas yang harus ada untuk bisa bekerja di luar negeri. Jika suatu rumah tangga tidak mempunyai anggota dengan pendidikan memadai, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga itu tidak akan memiliki akses untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai TKI.

5.2.2 Stratifikasi Ekonomi yang Diidentifikasi dalam Forum Diskusi

Berdasarkan berbagai indikator seperti yang telah diuraikan di atas, dalam forum diskusi baik di tingkat desa maupun di tingkat komunitas (dusun/ RW) dilakukan identifikasi tingkat kesejahteraan warga dalam bentuk pembuatan tangga-tangga kesejahteraan (*Ladder of Life*).¹⁴ Secara umum, tangga kesejahteraan yang dibuat peserta diskusi mencakup tiga golongan, yaitu: golongan miskin di tangga-tangga terbawah, golongan berkecukupan di tangga-tangga tengah, dan golongan kaya di tangga-tangga teratas. Di kelima desa terdapat variasi bagaimana peserta diskusi membedakan secara lebih terperinci ketiga golongan tersebut.¹⁵

Peserta diskusi diminta untuk mengidentifikasi (jumlah) tangga dalam rentang waktu sepuluh tahun, yaitu pada 1995/96 dan 2005/06. Makin banyak jumlah tangga berarti komunitas itu makin terstratifikasi. Jika jumlah tangga pada 2005/06 lebih banyak daripada 1995/96, maka dalam komunitas itu terjadi mobilitas sosial, baik mobilitas naik atau mobilitas turun. Dengan kata lain, di masyarakat seperti ini ada orang-orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya (keluar dari kemiskinan) atau justru menurun kesejahteraannya (jatuh dalam kemiskinan). Tabel 13 adalah ringkasan dari jumlah tangga kesejahteraan di kelima desa.

¹⁴Hasil identifikasi kelompok diskusi laki-laki bisa berbeda dengan kelompok perempuan. Namun, secara umum perbedaan itu tidak substansial. Hasil identifikasi tangga kesejahteraan yang dianggap paling sesuai dengan data/informasi lain yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan berbagai kalangan di komunitas, dipilih sebagai dasar untuk melakukan sampling empat kelompok transisi (*poor, faller, mover, rich*) bagi responden sejarah hidup.

¹⁵Di Desa Eki, misalnya, untuk 2005–2006, kelompok diskusi perempuan membedakan golongan miskin menjadi dua: *susanae* (tangga 1) dan *pas-pas* (tangga 2). Golongan berkecukupan juga dibedakan menjadi dua: *pas* (tangga 3) dan *cukup* (tangga 4). Golongan kaya hanya ada satu, yaitu *amuit* (tangga 5).

Tabel 13. Jumlah Anak Tangga Hasil Identifikasi dalam FGD

FGD	Jumlah Tangga Eki		Jumlah Tangga Malo		Jumlah Tangga Korinus		Jumlah Tangga Lay		Jumlah Tangga Beluta	
	1995	2005-2006	1995	2005-2006	1995	2005-2006	1995	2005-2006	1995	2005-2006
	Lk	3	3	2	3	3	5	3	3	2
Pr	4	5	4	4	3	6	3	3	3	3
Rata-rata ^a	3,5	4	3	3,5	3	5,5	3	3	2,5	3
Beda ^b	0,5		0,5		2,5		0		0,5	

^aRata-rata jumlah tangga yang diidentifikasi di kelompok laki laki (Lk) dan kelompok perempuan (Pr)

^bBeda/selisih rata-rata jumlah tangga selama sepuluh tahun terakhir [T1995 dikurangi T2005–2006]

Dari Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun dari desa mengalami pengurangan lapisan sosial. Di empat desa terdapat kelompok diskusi yang menyebut bahwa desa mereka menjadi lebih terstratifikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Satu desa (Lay) tidak berubah stratifikasi sosialnya. Ini berarti di sebagian besar desa penelitian terjadi mobilitas sosial. Desa yang paling banyak bertambah pelapisan sosialnya adalah Korinus. Selama sepuluh tahun terakhir, secara umum tingkat kesejahteraan warga Desa Nauke mengalami peningkatan secara signifikan. Sekalipun lokasinya cukup terpencil, Korinus merupakan “desa lab”. Oleh karena itu, banyak dilaksanakan program pembangunan berjangka panjang yang relatif bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal lain yang juga meningkatkan kesejahteraan Desa Korinus adalah budidaya sayuran. Budidaya ini dimungkinkan karena di Korinus telah dibangun bak penampungan air yang menjamin persediaan air untuk pertanian di musim kemarau.

Stratifikasi sosial berdasarkan faktor ekonomi umumnya adalah stratifikasi terbuka, artinya ada kemungkinan untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik dalam suatu peningkatan kesejahteraan/mobilitas ke atas (*upward mobility*) atau penurunan kesejahteraan/ mobilitas ke bawah (*downward mobility*). Di kelima desa, akumulasi kekayaan pada dasarnya bisa dilakukan oleh setiap warga. Sekalipun demikian, warga yang berasal dari lapisan atas (misalnya keluarga bangsawan di Lay atau Malo) mempunyai modal ekonomi dan sosial yang jauh lebih baik untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya daripada para petani kebanyakan di desa itu.

5.2.3 Stratifikasi Sosial Berdasarkan Faktor Politik (Kewenangan/Kekuasaan)

Stratifikasi berdasarkan faktor politik adalah bentuk stratifikasi sosial yang juga ada di kelima desa penelitian. Indikator utamanya adalah kedudukan atau jabatan tertentu dalam kepemimpinan lokal, seperti jabatan kepala desa, kepala dusun, ketua RT/ RW, tokoh adat, dan ketua kelompok doa. Di desa-desa di mana kebangsawanan lokal masih kuat seperti di Lay dan Malo, jabatan struktural tersebut biasanya dipangku oleh bangsawan lokal. Umumnya mereka juga dianggap memiliki hak-hak khusus/kekuasaan adat atas tanah di desa. Kelompok ini adalah elit desa yang berada dalam lapisan teratas, baik dari segi kekuasaan maupun ekonomi.

Sekalipun demikian, pemangku kekuasaan tidak selalu merupakan kelompok yang kuat secara ekonomis. Di desa-desa di mana kebangsawanan lokal tidak dominan seperti di Eki dan Beluta, jabatan dalam kepemimpinan lokal tidak selalu menjamin keuntungan material. Jabatan kepala dusun di Desa Beluta, misalnya, diduduki seorang warga petani yang tidak termasuk salah satu warga yang relatif kaya di desa, sedangkan wakilnya justru salah satu dari sedikit warga yang tergolong mampu. Kepala dusun itu menerima honor sebesar Rp150.000/tiga bulan. Di Desa Korinus di mana terdapat bangsawanan lokal, kepemimpinan desa diduduki oleh keluarga bangsawan, tetapi berbeda dengan di Lay, kekuasaan bangsawan lokal di Korinus kurang kuat. Mereka juga tidak secara kuat memanfaatkan hak-hak istimewanya untuk mengakumulasi kekayaan.

Tanpa unsur kebangsawanan lokal, stratifikasi sosial berdasarkan faktor politik adalah stratifikasi terbuka. Setiap warga yang mampu, berhak untuk dipilih untuk memangku jabatan. Namun, dengan adanya kebangsawanan lokal, stratifikasi sosial itu menjadi tertutup. Warga yang bukan keturunan bangsawan, tidak berhak memangku jabatan.

5.2.4 Stratifikasi Sosial Berdasarkan Faktor Budaya

Stratifikasi sosial berdasarkan faktor budaya merupakan bentuk stratifikasi sosial yang hanya ada di tiga desa, yaitu di Lay, Malo, dan Korinus. Di tiga desa ini masih berlaku struktur kekuasaan tradisional yang dipraktikkan dalam kebangsawanan lokal.

Secara umum inti dari struktur sosial tradisional di Pulau Timor adalah keluarga besar (*extended family*) yang dalam praktiknya adalah sekelompok orang yang dianggap memiliki nenek moyang yang sama melalui garis ayah (*patrilineal*). Satu atau lebih keluarga besar bisa memiliki sebuah rumah adat (*uma lulik/uma lisan*). Keluarga-keluarga besar itu juga terbagi dalam dua kategori, yaitu "bangsawan" (*royals*) dan "rakyat kebanyakan" (*commoners*). Mereka diatur dalam sistem yang hierarkis dan mendapat tugas yang berbeda-beda. Kekuasaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kekuasaan politis dan kekuasaan ritual. Kedua jenis kekuasaan itu diberikan kepada keluarga besar tertentu yang menjadi pemimpin.

Kebangsawanan lokal di Lay, Malo, dan Korinus juga mengikuti sistem ini. Di ketiga desa ini terdapat keluarga-keluarga besar (atau disebut juga "suku" atau "marga") yang merupakan kelompok bangsawan. Misalnya, di Lay, kelompok bangsawan berasal dari keluarga/suku Umametan dan di Malo dari keluarga Maris, sedangkan di Korinus adalah dari keluarga Abanat. Para pemimpin lokal (kepala desa, kepala dusun, ketua RW/RT) di ketiga desa tersebut umumnya berasal dari keluarga bangsawan. Dalam kehidupan sehari-hari, hak-hak istimewa keluarga bangsawan masih dipelihara sekalipun intensitasnya tidak sama di setiap desa.

Di Lay dan Malo, keluarga bangsawan masih memiliki hak yang kuat untuk mengatur distribusi dan pemanfaatan tanah adat di desa. Sekalipun secara umum masyarakat mengakui hak-hak ini, dalam praktiknya bisa terjadi pertentangan antara penguasa/bangsawan desa dengan masyarakat kebanyakan. Di Lay misalnya, warga desa memprotes keputusan kepala desa (*Ama Na'i*) yang mengalokasikan tanah adat untuk permukiman para pengungsi Timor Leste. Hal yang serupa juga terjadi di Malo, masuk dan menetapnya sejumlah pengungsi di desa ini terutama karena kepala desa

meminjamkan tanah yang dikuasainya kepada para pengungsi. Keputusan ini diambil karena ada anggota keluarga pengungsi yang menikah dengan anggota keluarga kepala desa. Warga lokal Malo sesungguhnya tidak menyukai keputusan kepala desanya, tetapi mereka menghormati kepala desa yang menjadi tuan tanah.

Di Lay dan Malo, kebangsawanan memiliki korelasi yang erat dengan kepemilikan aset. Selain aset, mereka juga memiliki keistimewaan lain seperti mendapatkan prioritas jika ada bantuan, bahkan kadang tidak terjangkau oleh hukum desa jika mereka melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, di kedua desa tersebut ketiga bentuk pelapisan sosial bisa tumpang-tindih: golongan bangsawan biasanya merupakan pemilik aset (jadi merupakan golongan kaya) dan memiliki kekuasaan/menduduki jabatan kepemimpinan lokal. Namun, di Korinus, pengakuan terhadap hak-hak khusus keluarga bangsawan umumnya terbatas pada kegiatan-kegiatan seremonial saja. Di desa terpencil ini, keluarga bangsawan tidak selalu memiliki aset yang banyak atau kaya.

Stratifikasi berdasarkan garis keturunan umumnya merupakan stratifikasi tertutup karena hak-hak istimewa diwariskan secara turun-temurun di antara anggota beberapa keluarga saja. Namun, hak-hak istimewa itu tidak selalu dominan dalam kehidupan desa sehari-hari. Makin erat korelasi antara stratifikasi berdasarkan garis keturunan dengan stratifikasi ekonomi dan politik, makin dominan hak-hak istimewa (dan oleh karenanya makin besar kekuasaan) golongan bangsawan serta makin besar jarak atau perbedaan mereka dengan golongan warga kebanyakan.

5.2.5 Stratifikasi Sosial Berdasarkan Sejarah Migrasi atau Status Kependudukan

Stratifikasi sosial berdasarkan sejarah migrasi atau status kependudukan adalah bentuk stratifikasi sosial yang secara spesifik terkait dengan gelombang pengungsian dari Timor Leste ke Timor Barat, khususnya yang terjadi pada 1999. Stratifikasi ini muncul dalam beragam intensitas di keempat desa yang menerima sejumlah pengungsi (Eki, Malo, Lay, dan Beluta).

Sejak datangnya pengungsi dari wilayah Timor Leste pada 1999, tampak bahwa di banyak komunitas di Timor Barat terjadi pengelompokan sosial yang didasarkan pada sejarah migrasi. Penduduk terbagi menjadi warga lama (penduduk lokal) dan warga baru (eks-pengungsi). Pengelompokan ini juga berkorelasi erat dengan perbedaan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya, terutama tanah. Warga lama adalah pemilik tanah dan warga baru tidak memiliki tanah, dan oleh karena itu harus meminjam atau membeli tanah pada warga lama. Selain kepemilikan tanah, secara umum warga lama (merasa) memiliki hak dan akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya lain di dusun, misalnya untuk memanfaatkan kayu dari hutan-hutan setempat.

Dalam berbagai diskusi serta dalam narasi sejarah hidup individu, warga lama sering mengeluh tentang pengaruh negatif keberadaan warga baru karena mereka meminjam tanah tanpa bagi hasil, melakukan penggundulan hutan, bersikap agresif dan tidak menghargai adat setempat. Warga lama merasa terusik kenyamanan hidup dan rasa amannya karena keberadaan "orang luar" (*outsider*) yang kini menjadi bagian dari dusun mereka. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh warga baru terungkap keluhan

bahwa warga baru sesungguhnya menyadari bahwa mereka meminjam tanah tanpa kompensasi dan melakukan pemotongan kayu di hutan setempat. Namun, sebagai orang yang tercerabut dari tempat tinggal, mata pencaharian, dan aset di wilayah asalnya di Timor Leste, mereka tidak punya apa-apa dan tidak punya banyak pilihan selain melakukan hal-hal tersebut untuk mendapat penghasilan. Mereka ingin menjadi bagian dari komunitas di tempat baru tetapi merasa mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, perbedaan antara warga lama dan warga baru mempunyai potensi konflik yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis perbedaan lain di antara warga desa. Perbedaan ini lebih kompleks karena bukan saja didasari oleh perbedaan akses terhadap dan kepemilikan sumber daya dan kondisi kesejahteraan, tetapi juga oleh pandangan tentang "orang dalam" (*insider*) dan "orang luar atau asing" (*outsider*) yang sering mengakibatkan hambatan dan distorsi komunikasi, serta terkait dengan pembentukan stereotipe, prasangka, atau kecurigaan.

Tabel 14. Ringkasan Berbagai Bentuk dan Karakteristik Stratifikasi Sosial di Kelima Desa

Desa	Bentuk dan Karakteristik Stratifikasi Sosial			
	Ekonomi	Politik	Budaya	Sejarah Migrasi/ Status Kependudukan
Eki	Terbuka	Terbuka	Tidak ada	Tertutup Sangat berpotensi konflik
Malo	Kurang terbuka bagi golongan warga nonbangsawan	Tertutup karena terkait dengan struktur kekuasaan tradisional (adat)	Tertutup karena terkait dengan kebangsawanan lokal	Tertutup Berpotensi konflik
Korinus	Terbuka	Tertutup karena terkait dengan struktur kekuasaan tradisional (adat)	Tertutup karena terkait dengan kebangsawanan lokal	Tidak ada
Lay	Kurang terbuka bagi golongan warga nonbangsawan	Tertutup karena terkait dengan struktur kekuasaan tradisional (adat)	Tertutup karena terkait dengan kebangsawanan lokal	Tertutup Tidak lagi berpotensi konflik
Beluta	Terbuka	Terbuka	Tidak ada	Tidak selalu tertutup karena banyak warga lama juga memiliki

Bentuk dan Karakteristik Stratifikasi Sosial				
Desa	Ekonomi	Politik	Budaya	Sejarah Migrasi/ Status Kependudukan
				<p>sejarah migrasi yang sama (pendatang dari Timor Leste pada 70-an).</p> <p>Oleh sebab itu, persepsi tentang siapa "orang luar" dan "orang dalam" juga bisa berubah.</p> <p>Berpotensi konflik</p>

Sekalipun demikian, pelapisan sosial antara warga lama dan warga baru bukanlah stratifikasi yang sama sekali tertutup. Beragam bentuk interaksi dan negosiasi yang dilakukan oleh kedua golongan itu dalam hidup sehari-hari tidak selalu terjadi secara negatif. Perkawinan antarkelompok, misalnya, bisa membuat perbedaan antara orang dalam dan orang luar menjadi kabur. Selain itu, di desa seperti Beluta, sekelompok warga lama juga memiliki sejarah migrasi yang mirip dengan para pengungsi yang datang 1999. Bedanya, sekelompok warga lama tersebut melakukan migrasi dari Timor Leste ke Timor Barat pada 1970-an. Tidak heran bahwa di desa ini ada warga lama dan warga baru yang memiliki rumah adat yang sama di wilayah Timor Leste dan oleh karena itu stigma "orang asing" tidak selalu bisa diberikan secara tegas kepada para warga baru.

5.2.6 Stratifikasi Sosial sebagai Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) atau yang Menghambat (Constraining Environment)

Kajian tentang stratifikasi sosial di lima desa di Timor Barat menunjukkan bahwa stratifikasi sosial yang ada di masing-masing desa bervariasi dalam bentuk maupun karakteristiknya. Namun, stratifikasi sosial selalu ada di setiap desa dan di setiap masyarakat. Kita dapat menemukan desa-desa dengan berbagai stratifikasi sosial yang terbuka dan lebih inklusif (di Eki dan Beluta) dan desa-desa dengan berbagai stratifikasi sosial yang cenderung tertutup dan lebih eksklusif (di Lay dan Malo) atau yang berada di antara dua kondisi tersebut (di Korinus). Secara teoretis, di desa yang memiliki stratifikasi sosial yang cenderung terbuka, orang punya kesempatan lebih besar untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi. Sebaliknya, di desa-desa yang stratifikasi sosialnya cenderung tertutup, kesempatan lebih kecil untuk pindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Di sini, golongan kaya juga merupakan kelompok pemimpin adat dan pemangku hak-hak adat. Warga kebanyakan sulit untuk mencapai posisi itu. Dengan kata lain, stratifikasi sosial (terbuka-inklusif atau tertutup-eksklusif) merupakan lingkungan yang bisa (berpotensi) positif atau negatif.

Namun, kedua jenis lingkungan tersebut punya pengaruh yang berbeda terhadap upaya warga untuk meningkatkan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa stratifikasi sosial terbuka-inklusif memiliki pengaruh yang terbatas sebagai lingkungan yang positif untuk memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan. Lingkungan positif ini bukan sebagai faktor penentu terjadinya mobilitas ke atas. Misalnya, di Beluta, minimnya

peluang ekonomi, iklim yang kering, dan tanah tandus tetap menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sekalipun warga punya kesempatan yang relatif sama untuk melakukan berbagai upaya akumulasi kekayaan, menjadi bagian dari struktur kekuasaan lokal, mengakses informasi, atau membentuk organisasi.

Di Beluta, stratifikasi sosial yang terbuka dan inklusif (*enabling environment*) merupakan keuntungan yang bersifat potensial, yang masih harus ditransformasikan menjadi keuntungan aktual melalui hal-hal lain seperti perbaikan sistem penampungan dan pembagian air agar petani tetap bisa menanam sayuran sepanjang tahun dan punya penghasilan yang lebih baik, pengadaan jaminan sosial terutama di bidang kesehatan, dan penciptaan peluang untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian dan pendapatan.

Stratifikasi sosial yang cenderung tertutup dan eksklusif, bisa dilihat sebagai lingkungan yang negatif dan menghambat terjadinya mobilitas ke atas (*constraining environment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa—agak berbeda dengan lingkungan yang positif—lingkungan negatif punya kecenderungan lebih besar untuk berubah dari hambatan potensial menjadi hambatan aktual (menjadi faktor penentu yang menghambat mobilitas sosial ke atas). Contohnya adalah keadaan di Lay. Stratifikasi budaya dan politis yang tertutup di desa ini adalah *constraining environment* yang dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang menentukan adanya distribusi kekuasaan atas tanah yang merugikan warga nonelit.

Jika kita bandingkan dengan peran *enabling environment* di Eki dan Beluta, yaitu stratifikasi sosial yang relatif terbuka dan lebih inklusif, dapat disebutkan bahwa lingkungan positif di kedua desa itu tetap berperan sebagai keuntungan potensial. Namun, banyak hal yang harus ada (atau diadakan) sebelum keuntungan potensial ini bisa menjadi keuntungan aktual. Di Lay, tumpang-tindih antara hak kebangsawanan dan jabatan struktural dalam kepemimpinan lokal sudah bisa membuat stratifikasi sosial tertutup dan eksklusif menjadi hambatan aktual bagi rakyat biasa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5.3 Kesenjangan

Secara umum, kesenjangan (*inequality*) terkait dengan perbedaan atau ketidakmerataan distribusi akses, aset, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat; atau di antara satuan geografis (daerah, negara). Kesenjangan dapat dikaji baik pada tingkat makro (kesenjangan antarnegara atau daerah dalam suatu negara) maupun pada tingkat mikro (kesenjangan antarkelompok dalam masyarakat).

Di tingkat makro, kesenjangan umumnya dikaji melalui berbagai penghitungan ekonometrik. Salah satu pengukuran kesenjangan yang sering digunakan adalah koefisien gini (*Gini coefficient*) yang mendasarkan penghitungannya pada distribusi, misalnya pendapatan. Studi-studi ekonomi itu juga sering mengkaji kaitan antara kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (baca Kuznets 1955; Aghion *et al.* 1999; Barro 1999; Ravallion 1997 dalam Suryahadi *et al.* 2005)

Kajian kesenjangan pada tingkat mikro—misalnya dalam studi-studi antropologi—dilakukan dengan analisis tematik misalnya analisis budaya, di mana kesenjangan dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diikuti secara luas yang memungkinkan berlangsungnya distribusi tidak merata di antara berbagai kelompok dalam masyarakat (misalnya kajian tentang pengaruh patriarkat terhadap kesenjangan berdasarkan gender) atau analisis kekuasaan, di mana kesenjangan dikaitkan dengan akses terhadap dan penggunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu (misalnya, kajian tentang peran dan pengaruh militer, pemilik modal besar, golongan bangsawan, dan tuan tanah.).

Selain itu, kesenjangan juga dianalisis dari aspek relasionalnya. Dalam studinya tentang *Durable Inequality*, Tilly (1999) mengartikan kesenjangan sebagai hubungan antarindividu atau kelompok yang menciptakan keuntungan lebih besar bagi satu pihak daripada pihak yang lain (misalnya, hubungan tuan tanah dengan buruh tani). Di sini, kesenjangan merupakan hasil kumulatif dari hubungan-hubungan sosial asimetris yang terbentuk melalui proses-proses jangka panjang. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut mekanisme-mekanisme yang menciptakan kesenjangan (*inequality-generating mechanisms*) yang antara lain terdiri atas eksploitasi (*exploitation*) dan penutupan peluang (*opportunity hoarding*). Oleh karena itu, berbeda dengan analisis ekonometrik yang memotret keadaan kesenjangan di suatu waktu dan wilayah tertentu, analisis relasional menjelaskan proses terjadinya kesenjangan dalam jangka waktu panjang.

Dalam bagian ini kesenjangan utamanya akan dikaji pada tingkat mikro (komunitas dan rumah tangga) dan oleh karena itu lebih mengacu pada berbagai pendekatan antropologis seperti tersebut di atas. Di tingkat komunitas kesenjangan akan dilihat pada pelaksanaan politik lokal dan pemanfaatan peluang ekonomi, sedangkan di tingkat rumah tangga kesenjangan akan dilihat pada jumlah warga di setiap tangga kesejahteraan dan perubahan jumlah tersebut dalam periode sepuluh tahun (1995/96–2005/06).

5.3.1 Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi secara spesifik mengacu pada tidak meratanya kemampuan ekonomi di antara warga atau kelompok warga dalam suatu masyarakat. Kesenjangan ini bisa dikaji melalui distribusi rumah tangga di setiap lapisan sosial dan perbedaan standar hidup/kondisi kesejahteraan warga setiap lapisan sosial, kemampuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi, dan akses terhadap sumber daya.

a) **Distribusi Rumah Tangga dalam Stratifikasi Sosial dan Perbedaan Standar Hidup**

Secara umum dapat disebutkan bahwa dalam waktu sepuluh tahun terakhir, distribusi rumah tangga di kelima desa menjadi lebih merata sekalipun perubahan yang terjadi hanya sedikit saja. Tabel berikut menunjukkan proporsi (dalam persentase) rumah tangga di tiga lapisan sosial yang umumnya ditemukan di kelima desa, yaitu I, lapisan terbawah (kelompok termiskin); II, lapisan tengah (kelompok yang meningkat kesejahteraannya, tetapi tidak selalu secara stabil keluar dari kemiskinan); dan III, lapisan teratas (kelompok yang secara stabil dikategorikan kaya dan kelompok yang terkaya).

Tabel 15. Ringkasan Jumlah Rumah Tangga Berbagai Lapisan Kesejahteraan di Masyarakat (%)^a

	EKI			MALO			KORINUS			LAY			BELUTA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1995/96	50	23	27	72	28	0	43	41	7	63	33	4	44	44	12
2005/06	33	29	38	21	78,5	0,5	8	64	28	59	38	3	38	33	29

^aProporsi menurut data FGD yang digunakan sebagai dasar sampling responden sejarah hidup: Eki: FGD laki-laki, Malo: FGD perempuan, Korinus: FGD laki-laki, Lay: FGD laki-laki, Beluta: FGD Perempuan.

Tabel 15 menunjukkan bahwa di semua desa jumlah lapisan terbawah menjadi lebih kecil. Pola lain yang umum (tetapi tidak persis sama/ada di setiap desa) adalah:

- (1) meningkatnya jumlah lapisan tengah dan teratas, yang menunjukkan bahwa di kelima desa terdapat warga yang bisa meningkatkan kesejahteraannya (naik ke lapisan lebih tinggi/mobilitas naik); dan
- (2) makin kecilnya perbedaan jumlah warga yang berada di lapisan terbawah dan lapisan teratas. Hal ini bisa menunjukkan makin berkurangnya kesenjangan ekonomi, tetapi ini masih perlu ditunjang dengan informasi tentang bagaimana perbedaan standar hidup di kedua lapisan itu. Jika standar hidup sangat berbeda, maka kesenjangan ekonomi antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya tetap masih besar. Perbedaan standar hidup yang paling mudah dilihat adalah kondisi rumah.

Di semua desa, golongan termiskin sering masih tinggal di rumah gubuk (lantai tanah, dinding *bebak*, dan atap alang-alang) dengan perabot rumah tangga yang sangat minim. Sementara itu, golongan terkaya sudah tinggal di rumah permanen dan memiliki berbagai perabot elektronik seperti TV, VCD, parabola, dan telepon genggam. Dalam forum diskusi disebutkan juga bahwa jika golongan termiskin jatuh sakit, sering kali mereka tidak punya uang untuk berobat atau bisa berobat ke puskesmas dengan bantuan keluarga, tetangga, atau mendapat asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (JPS Gakin/Askeskin). Sebaliknya, golongan terkaya bisa berobat ke dokter atau rumah sakit di kota-kota terdekat. Jika kita lihat dari besarnya pendapatan per bulan golongan terkaya dan golongan termiskin pada tahun 2005/06, maka penghasilan golongan terkaya besarnya rata-rata sepuluh kali lipat dari golongan termiskin. Dari hal-hal tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa perbedaan standar hidup kelompok termiskin dan kelompok terkaya cukup besar. Jadi, jurang ekonomi di antara mereka relatif masih lebar sekalipun makin banyak orang bisa meninggalkan lapisan termiskin dan naik di lapisan-lapisan tengah.

Pola menarik dapat dilihat di Korinus di mana lapisan tengah dan teratas mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu 41% menjadi 64% dan dari 7% menjadi 28%. Sebaliknya, di Lay hanya terjadi sedikit perubahan proporsi rumah tangga di berbagai lapisan sosial. Kedua pola tersebut tercermin lagi dalam indeks mobilitas.¹⁶ Pada Tabel 16 tampak bahwa mobilitas sosial terbesar terjadi di Desa Korinus dan yang terkecil di Desa Lay.

¹⁶Indeks mobilitas merupakan ukuran untuk melihat dinamika naik-turunnya kesejahteraan warga suatu komunitas secara keseluruhan. Indeks ini mengkaji baik mobilitas naik maupun mobilitas turun dengan nilai 0

Tabel 16. Indeks Mobilitas di Kelima Desa

Jenis Indeks	Desa				
	Eki	Malo	Korinus	Lay	Beluta
Indeks Mobilitas	0,3	0,7	0,9	0,2	0,7

b) Kemampuan Memanfaatkan Peluang Ekonomi

Kelima desa penelitian pada dasarnya adalah desa pertanian di mana warga umumnya memiliki lahan nonirigasi dan menanam tanaman untuk makanan pokok seperti jagung dan ubi kayu. Namun, dalam waktu sepuluh tahun terakhir (1996–2006), di kelima desa muncul beberapa peluang baru bagi warga untuk memperoleh pendapatan tambahan. Mata pencaharian baru yang muncul di semua desa adalah: menjadi tukang ojek, menanam sayur atau komoditas pertanian yang mudah dipasarkan seperti kacang panjang, kemiri, bawang merah, dan kacang tanah, serta membuka kios atau warung.

Selain itu, di masing-masing desa muncul mata pencaharian yang sesuai dengan lingkungan setempat dan stimulan yang tidak selalu ada di desa lain. Misalnya di Eki, sejumlah warga bisa beralih profesi atau mencari tambahan pendapatan sebagai sopir angkutan kota karena di Eki telah dibangun terminal. Di Korinus, warga mendapat tambahan pendapatan dari usaha paronisasi sapi serta terbantu dengan adanya proyek pembangunan bak penampungan air dan pipanisasi yang memungkinkan mereka menanam sayuran dan kemiri juga saat musim kering. Proyek-proyek tersebut hanya dilaksanakan di Korinus yang merupakan desa percobaan (desa lab). Selain stimulan yang bersifat lokal, peluang ekonomi di suatu desa juga bisa terkait dengan fenomena internasional seperti migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Di Beluta, sejumlah warga, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Hongkong. Menarik untuk dicatat bahwa dalam forum diskusi di kelima desa, warga menekankan ketersediaan modal sebagai stimulan yang sangat penting untuk menciptakan peluang ekonomi. Dengan adanya modal mereka bisa membeli sepeda motor dan bekerja sebagai tukang ojek, membeli meja biliar untuk disewakan, atau membuka kios.

Namun, sekalipun data menunjukkan beberapa peluang ekonomi telah tumbuh, perlu dicermati lebih lanjut apakah semua peluang ekonomi yang muncul itu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Survei rumah tangga menunjukkan hanya 21% responden memiliki pendapatan dari usaha nonpertanian, dan hanya 18% memiliki pendapatan dari uang kiriman anggota keluarga yang umumnya bekerja di sektor nonpertanian di luar kota atau luar negeri. Mereka yang mempunyai pendapatan dari nonpertanian dan kiriman uang, mayoritas (70–80%) adalah dari kelompok kaya (*rich*) dan kelompok yang meningkat taraf hidupnya (*mover*). Proyek paronisasi sapi dan perbaikan persediaan air untuk usaha pertanian sekalipun bisa diakses oleh kebanyakan warga desa, tetapi hanya terdapat di satu desa saja, yaitu di Malo. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa tidak semua warga bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.

jika sama sekali tidak ada warga yang mengalami perubahan kesejahteraan dan 1 jika seluruh warga mengalami perubahan kesejahteraan.

Pemanfaatan peluang ekonomi yang membutuhkan modal, misalnya berdagang kecil-kecilan, menjadi tukang ojek, atau menjadi tenaga kerja di luar negeri tampak memiliki kaitan dengan kelompok warga yang secara ekonomi lebih kuat. Mereka lebih mampu untuk menyediakan modal kerja, termasuk untuk menyediakan biaya persiapan menjadi TKI. Ketika kegiatan ekonomi nonpertanian itu sudah berjalan, pendapatan tambahan yang dihasilkannya makin memperkuat posisi ekonomi kelompok yang sejak awal memang sudah lebih sejahtera dari mayoritas warga desa lain.

Peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara lebih merata oleh seluruh warga desa umumnya adalah yang didasari oleh bantuan atau subsidi sehingga semua warga bisa mempunyai akses terhadap tambahan modal kerja dan ternak atau punya akses untuk memanfaatkan fasilitas umum yang penting bagi kegiatan pertanian dan peternakan (misalnya, bak penampungan air, pipa untuk menyalurkan air ke berbagai lokasi, dan perlindungan mata air).

c) Akses terhadap Sumber Daya

Sebagai desa pertanian, sumber daya terpenting di kelima desa adalah lahan pertanian. Sebanyak 87% dari responden tidak memiliki lahan irigasi dan di antara mereka yang memiliki sebagian besar berasal dari kelompok *rich* dan *mover*. Sebaliknya, 79% warga memiliki lahan nonirigasi yang kepemilikannya relatif lebih merata di seluruh kelompok kesejahteraan.

Akses terhadap sumber daya memiliki potensi konflik saat dikaitkan dengan keberadaan warga baru (eks pengungsi dari Timor Leste). Seperti disebutkan di atas, sebagian besar warga lama memiliki akses terhadap lahan pertanian meskipun khususnya lahan nonirigasi yang kurang subur. Namun, sebagian besar warga baru tidak punya akses terhadap lahan pertanian sekalipun mereka juga petani. Sebagian besar warga baru mengambil jalan pintas untuk memecahkan masalah dengan menggarap tanah pertanian warga lama tanpa izin pemiliknya. Hal ini menjadi sumber ketegangan bahkan konflik terbuka di antara kedua kelompok.

5.3.2 Kesenjangan Sosial-Budaya dan Kesenjangan Politik

Di tiga desa (Malo, Korinus, dan Lay) yang terdapat kebangsawanan lokal, kesenjangan sosial-budaya dan kesenjangan politik mencerminkan hubungan kekuasaan antargolongan, khususnya dikotomi bangsawan/rakyat kebanyakan. Seperti telah diuraikan sebelumnya dalam subbab tentang stratifikasi sosial, kesenjangan sosial-budaya dan politik muncul jika terdapat perbedaan yang sangat besar antara hak dan kekuasaan kelompok bangsawan dengan kelompok rakyat kebanyakan. Hak absolut dan turun-temurun yang dimiliki kelompok bangsawan untuk menjadi pemimpin dan menguasai serta menentukan distribusi tanah desa adalah salah satu yang mencerminkan kesenjangan sosial-budaya dan politik di desa seperti Lay. Salah satu contoh adalah ketika kepala desa (yang dianggap sebagai raja lokal) memutuskan untuk mengalokasikan tanah desa untuk penampungan pengungsi tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sini, masyarakat tidak mempunyai akses terhadap keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup mereka.

Sekalipun demikian, kekuatan politik dan ekonomi bangsawan lokal tidak sama di ketiga desa tersebut. Secara umum dapat disebutkan bahwa makin kuat pengaruh kelompok bangsawan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari di suatu desa, makin tertutup stratifikasi budaya dan politik di desa itu dan makin besar pulalah kesenjangan sosial-budaya dan politiknya.

5.3.3 Kesenjangan sebagai Hubungan-Hubungan Sosial Asimetris yang Berpotensi Konflik

Di depan telah disebutkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun, di lima desa yang diteliti terdapat sejumlah warga yang mampu meningkatkan kesejahteraannya dan naik ke lapisan sosial-ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, distribusi rumah tangga di berbagai strata sosial menjadi lebih merata dan jumlah rumah tangga yang berada di lapisan termiskin menjadi lebih kecil. Dari pembahasan tentang berbagai bentuk kesenjangan yang bisa diidentifikasi di kelima desa, tampak bahwa posisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik seseorang atau sekelompok orang bisa memengaruhi bahkan menentukan kemampuan mereka untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

Perbedaan yang besar dalam posisi-posisi tersebut menimbulkan hubungan yang asimetris di masyarakat. Sekalipun demikian, hubungan asimetris ini tidak selalu secara sistematis merugikan bagi kelompok tertentu dan oleh karenanya berpotensi konflik. Di Malo, Korinus, dan Lay, misalnya, orang menerima bahwa—berdasarkan adat dan kepercayaan—kelompok bangsawan memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang berbeda dengan warga kebanyakan. Namun, dalam kasus Desa Lay, hubungan asimetris antara keluarga bangsawan (Umametan) dan warga desa lain sering hanya menguntungkan keluarga Umametan dan merugikan kesejahteraan warga lain. Akibatnya, muncul ketidakpuasan bahkan perlawanan dari warga desa. Di sini, penerapan hak-hak istimewa dan kewenangan kelompok elite di desa dapat menghambat upaya kelompok lain (nonelite) untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan hidup mereka.

Menarik untuk dicatat bahwa sekalipun hampir semua bentuk kesenjangan menimbulkan hubungan yang asimetris di antara warga desa, tidak semua hubungan asimetris itu menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa hak-hak istimewa kelompok bangsawan yang diterapkan secara efektif dalam politik dan pemerintahan lokal bisa menguntungkan warga desa lainnya. Dengan kata lain, kesenjangan budaya dan politik adalah yang paling tampak pengaruhnya terhadap naik turunnya kesejahteraan warga. Bagaimana dengan pengaruh kesenjangan ekonomi yang juga terdapat di setiap desa? Data menunjukkan bahwa tidak semua warga desa bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang bisa memanfaatkan terutama adalah kelompok yang tergolong sejahtera karena mereka bisa menyediakan modal kerja. Sekalipun demikian, pemanfaatan peluang ekonomi oleh kelompok sejahtera itu tidak merugikan kelompok lain. Kegiatan ekonomi seperti membuka kios atau warung, menjadi tukang ojek, atau menjadi TKI tidak mengeksploitasi atau menutup peluang ekonomi kelompok lain, dan oleh karena itu tidak berpotensi menimbulkan konflik. Peluang ekonomi yang dianggap mempunyai pengaruh negatif terhadap kesejahteraan warga adalah bisnis menyewakan meja biliar. Sebagian

warga (khususnya perempuan) menganggap persewaan meja biliar menyebabkan orang miskin makin miskin karena menghamburkan uang untuk main biliar, sedangkan pemilik meja biliar justru makin kaya. Warga laki-laki umumnya memandang persewaan meja biliar dengan lebih positif. Ini tidak mengherankan karena merekalah yang sering menghabiskan waktu dan uangnya untuk permainan biliar.

5.4 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Lokal

Dalam studinya tentang kaitan antara demokrasi dan kemiskinan, Diamond (2004: 25) berupaya menunjukkan bahwa ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan juga melestarikan bahkan memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memberantas kemiskinan harus memperhatikan secara serius masalah pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Pembahasan di bagian ini, berangkat dari pemikiran bahwa pelaksanaan demokrasi yang baik memungkinkan anggota masyarakat menyuarakan dan melindungi kepentingannya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, demokrasi yang terlaksana dengan baik akan memberi peluang lebih besar untuk terjadinya mobilitas sosial ke atas.

Demokrasi sering dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan. Namun, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan pelaksanaan demokrasi yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang baik pula.¹⁷ Di sini, tata kelola pemerintahan yang baik dipahami sebagai kemampuan dan kemauan menggunakan berbagai sumber daya secara efektif untuk memberi pelayanan publik yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.¹⁸ Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga ditandai dengan sedikitnya korupsi dan adanya akses yang seimbang bagi berbagai anggota masyarakat.

Bagian ini mengkaji pengaruh pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan lokal terhadap mobilitas sosial di kelima desa penelitian, khususnya dengan melihat pada pemilihan dan pelaksanaan kepemimpinan lokal, partisipasi politik masyarakat, pelayanan pemerintah, serta tingkat penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

5.4.1 Pemilihan dan Pelaksanaan Kepemimpinan Lokal

Secara garis besar, pemilihan dan pelaksanaan kepemimpinan lokal di lima desa penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori: (i) yang dipengaruhi oleh feodalisme lokal, seperti di Lay, Malo, dan Korinus; dan (ii) yang tidak dipengaruhi oleh feodalisme lokal, seperti di Eki dan Beluta.

Perlu digarisbawahi bahwa di semua desa dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung. Namun, di desa-desa yang dipengaruhi feodalisme lokal, pemilihan langsung

¹⁷Menurut Diamond (2004:2-4), *good governance* memiliki beberapa aspek, yaitu (i) kapasitas negara untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, (ii) komitmen negara untuk memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya, (iii) keterbukaan dan akuntabilitas, (iv) hukum yang adil; (v) mekanisme partisipasi, dan (vi) tumbuhnya modal sosial.

¹⁸Fasilitas umum ini bisa berbentuk infrastruktur fisik (jalan, fasilitas listrik, dan jembatan) atau infrastruktur sosial-ekonomi (sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan rumah ibadah).

ini hanya merupakan formalitas karena para calon secara turun-temurun hanya boleh berasal dari kelompok (suku, keluarga, dan marga) bangsawan yang berkuasa dan ditetapkan oleh rumah adat. Proses pemilihan kepala desa di Korinus dan Lay merupakan contoh yang menarik. Seorang warga Desa Korinus menyebutkan:

Sejak nenek moyang, kami sudah hidup bersama-sama, berarti warga desa merupakan satu keturunan. Yang menjadi aparat desa harus diambil dari *amaf-amaf* (tuan-tuan tanah) Aries, Otan, Oman, Maris, dan Farlan. Yang menjadi raja adalah keturunan Abanat. (sejarah hidup, laki-laki, 54)

Kepala Desa Korinus sudah menjabat selama 27 tahun. Untuk pemilihan kepala desa 2011 nanti, masyarakat sudah mengetahui bahwa anak kedua dari kepala desa yang akan menjabat dan menggantikan ayahnya. Di Lay, warga desa boleh mengajukan calon kepala desa (*Ama Na'i*) yang mereka inginkan, tetapi calon itu harus berasal dari suku Umametan dan harus disetujui oleh rumah adat. Selanjutnya, rumah adat akan mengumumkan nama-nama calon itu kepada masyarakat. Pada saat yang telah ditentukan masyarakat akan memilih secara langsung. Selain kepala desa, posisi aparat-aparat desa lain seperti kepala dusun (*Ama Datok*), ketua RW (*Datok Leo*), dan ketua RT (*Kabu*) juga harus diduduki oleh orang yang berasal dari suku bangsawan.

Di Desa Eki dan Desa Beluta yang tidak dipengaruhi oleh feodalisme lokal, pemimpin lokal di kedua desa tidak berasal dari keluarga bangsawan atau tokoh dalam struktur kekuasaan tradisional/adat. Mereka tidak mewarisi dan memiliki hak-hak istimewa yang terkait dengan suku atau marga tertentu. Setelah masa jabatan mereka berakhir, akan dilakukan lagi proses pemilihan yang memungkinkan orang lain menduduki jabatan itu. Sebuah variasi menarik terdapat di Eki. Desa ini memiliki lima dusun, yang masing-masing didominasi oleh kelompok etnis yang berbeda. Bila kepala desanya terpilih dari satu dusun (yang didominasi oleh suku tertentu), maka dusun lain (yang didominasi suku lain) akan menjadi semacam oposan.

5.4.2 Proses Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Di semua desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang berjenjang. Secara umum, dapat disebutkan bahwa masyarakat hanya punya akses untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat yang paling rendah, yaitu RT. Selanjutnya mereka akan diwakili oleh para tokoh masyarakat yang ada di setiap tingkat (misalnya ketua RW, kepala dusun, kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda). Oleh karena itu, dalam forum diskusi sering disebutkan bahwa yang paling sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan adalah para tokoh masyarakat dan yang paling jarang terlibat adalah warga biasa.

Warga Eki, Malo, Korinus, dan Beluta, umumnya menyatakan bahwa sekarang masyarakat bisa berpartisipasi dengan lebih baik dalam politik lokal. Ini karena pemerintah lokal lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dan karena masyarakat juga makin kritis. "Sekarang masyarakat sudah pintar dan tidak takut. Kalau pemimpin salah ya ... kita bisa tegur. Seperti baru-baru ini di Desa Fetas (desa tetangga), sampai ada yang tunjuk kepala desa punya muka." (FGD, Laki-laki, 50)

Sekalipun demikian, membaiknya akses untuk berpartisipasi dalam politik lokal masih bias gender karena umumnya yang berpartisipasi adalah laki-laki dewasa. Partisipasi warga perempuan masih tetap terbatas, seperti terungkap:

Kalau ada sidang di desa, kita tunggu saja apakah diundang atau tidak. Kalau tidak diundang ya kita tidak ikut. Umumnya hanya bapak-bapak yang diundang untuk sidang, sedang kami, mama-mama ya ... jarang diundang, mungkin mereka (pemerintah desa) pikir bahwa suara kami sudah terwakili oleh bapak-bapak. Sedangkan kita (perempuan) hanya mau pikir anak dan rumah, jadi yang penting-penting itu urusan bapak-bapak saja. (FGD, perempuan, 53)

Desa yang relatif paling rendah partisipasi politik masyarakatnya adalah Lay. Dalam struktur masyarakat feodal, di mana "raja" lokal beserta keturunannya masih berkuasa terutama untuk bidang politik seperti di Lay, aspirasi yang bisa disampaikan oleh masyarakat menjadi terbatas. Masyarakat hanya bisa menyalurkan aspirasi dalam memilih kepala desa di antara calon yang telah ditentukan oleh kepala desa dan ketua adat yang sedang menjabat. Masyarakat tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon kepala desa berdasarkan penilaian dan pertimbangannya sendiri. Jika ada permasalahan di desa atau dusun pun, masyarakat sulit untuk mengharapkan aparat/elite desa untuk membantu menyelesaikan masalah, sebab tidak jarang masalah tersebut muncul akibat pertikaian antara warga dengan elite desa (suku Umametan) sendiri. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat biasanya menyampaikan keluhan mereka ke lembaga lain di luar desa. Dalam beberapa kasus, seperti kasus pengambilalihan lahan, warga yang dirugikan biasanya mengadukan kasusnya ke Komisi Kebenaran dan Keadilan yang ada di Keuskupan Atambua.

5.4.3 Pelayanan Publik dan Korupsi

Di semua desa, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah lokal tercermin pada berbagai fasilitas umum yang tersedia (seperti puskesmas, pustu, bidan desa, posyandu, gereja, dan tempat pertemuan). Umumnya tidak ada diskriminasi secara struktural terhadap kelompok atau anggota masyarakat tertentu untuk mengakses pelayanan publik tersebut. Frekuensi dan cara pemanfaatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan yang berbeda (misalnya fasilitas SD hanya relevan pemanfaatannya bagi rumah tangga yang memiliki anak usia 7–12 tahun). Karena banyak di antara fasilitas umum tersebut tidak bebas biaya, pemanfaatannya juga dipengaruhi oleh ketersediaan uang pada masing-masing rumah tangga.

Dalam forum diskusi, peserta berhati-hati dalam menjelaskan masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Umumnya mereka menyebutkan bahwa korupsi lebih banyak terjadi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi daripada desa. Di tingkat desa umumnya korupsi dikaitkan dengan pemotongan bantuan oleh aparat desa. Misalnya, di Beluta, warga mendengar bahwa seharusnya mereka menerima bantuan beras sebanyak 20 kg/keluarga, tetapi yang benar-benar diterima warga hanya 17 kg/keluarga. Di Lay masyarakat mengeluhkan tidak adanya transparansi dalam penyaluran bantuan. Bantuan yang masuk desa sering disalurkan kepada kerabat para elite desa yang masih anggota suku Umametan. Jika ada sisa bantuan, baru dibagikan kepada warga di luar suku Umametan. Selain kasus-kasus kecil seperti dua contoh di atas, tidak diperoleh informasi tentang kasus korupsi yang besar di kelima desa.

5.4.4 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Lokal dan Upaya Keluar dari Kemiskinan

Di atas telah disebutkan bahwa pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan anggota masyarakat menyuarakan dan melindungi kepentingannya, serta meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan berbagai sumber daya digunakan secara efektif untuk memberi pelayanan publik yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat memengaruhi upaya anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan untuk keluar dari kemiskinan.

Di atas telah diuraikan bahwa pelaksanaan politik dan pemerintahan lokal memiliki karakteristik yang berbeda-beda di lima desa. Di semua desa, partisipasi politik dilakukan secara berjenjang dan selektif. Umumnya laki-laki dewasa adalah para aktor utama di panggung politik desa. Di desa yang terdapat feodalisme lokal, seleksi dan jenjang tersebut bertambah karena para aktor utama dan pemegang kekuasaan adalah para laki-laki dewasa yang termasuk dalam keluarga bangsawan. Partisipasi politik yang berjenjang dan selektif ini berarti ada kelompok-kelompok warga yang hanya mempunyai peluang kecil untuk menyuarakan dan melindungi kepentingannya.¹⁹ Kelompok-kelompok ini umumnya (hampir) tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan-keputusan yang penting bagi kehidupannya. Salah satu ilustrasi yang menarik adalah keputusan keluarga bangsawan di Desa Malo dan Desa Lay untuk mengalokasikan tanah desa untuk permukiman pengungsi. Banyak warga yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan itu harus ikut menanggung akibatnya, antara lain kehilangan lahan pertanian.

Di desa yang pemimpin lokalnya dapat diganti dan dipilih secara berkala, warga masih bisa melindungi kepentingannya dengan cara memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya. Namun, di desa-desa di mana para pemimpin lokal memperoleh jabatan secara turun-temurun, posisi tawar warga dan kemampuan mereka untuk mengontrol tata kelola pemerintahan menjadi sangat lemah. Di desa-desa seperti ini, tata kelola pemerintahan bisa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.5 Keberadaan Program Pembangunan dan Infrastruktur

Bagian ini akan membahas bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan dan program pembangunan dan kondisi infrastruktur dan akses terhadap pasar memengaruhi naik-turunnya kesejahteraan warga desa.

Sejak diskusi dan wawancara pertama dilakukan, segera diperoleh informasi bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan telah dilaksanakan di kelima desa.

¹⁹Di semua desa tampak bahwa para perempuan memiliki partisipasi politik yang lebih kecil daripada laki-laki. Namun, di desa dengan feodalisme lokal yang dominan seperti di Lay, mayoritas warga memiliki peluang yang kecil untuk menyuarakan dan melindungi kepentingannya dibanding kelompok bangsawan (Umametan).

Kebijakan dan program pembangunan tersebut tidak hanya diprakarsai oleh pemerintah (nasional maupun daerah), tetapi sebagian juga oleh lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, di ke lima desa juga terdapat berbagai infrastruktur. Dalam studi ini empat komponen infrastruktur akan dibahas, yaitu

- a) infrastruktur fisik, seperti jalan, transportasi, air, dan listrik;
- b) infrastruktur sosial, seperti sekolah, klinik dan pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial yang formal (seperti asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin atau Askes Gakin);
- c) infrastruktur komunikasi, seperti telepon, internet, dan kantor pos;
- d) infrastruktur yang terkait dengan akses terhadap komunikasi, seperti televisi, surat kabar, berbagai bentuk pemberian informasi (misalnya papan pengumuman), dan radio.

Kajian terhadap faktor-faktor tersebut didasari oleh pemikiran bahwa naik-turunnya kesejahteraan masyarakat juga akan ditentukan atau paling tidak dipengaruhi oleh intervensi dari luar. Penerapan kebijakan dan program pembangunan, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas pasar adalah bentuk-bentuk intervensi yang umumnya berasal dari luar komunitas. Studi ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap efektifitas intervensi tersebut, melainkan lebih pada upaya untuk memahami bagaimana intervensi-intervensi yang telah ada membantu atau justru menghambat upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, hendak dipahami pula bagaimana pengaruh intervensi itu terhadap beberapa kelompok yang berbeda (*mover, chronic poor, faller, rich*).

5.5.1 Berbagai Program Pembangunan

Wilayah Timor Barat adalah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi dan berpotensi konflik akibat gelombang pengungsian dari Timor Timor. Tidak mengherankan, berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, memilih wilayah ini sebagai lokasi pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini juga terjadi di kelima desa yang diteliti. Sekalipun jenis program yang dilaksanakan bervariasi, di semua desa terdapat empat kategori program pembangunan, yaitu program di bidang ekonomi yang terutama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, di bidang peningkatan kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang sosial. Program-program yang dilaksanakan di semua desa, antara lain,

- a) Program Raskin (beras untuk keluarga miskin),
- b) Program pemberian kredit,
- c) Program Kartu Sehat/Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK Gakin)/Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askes Gakin),
- d) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
- e) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam berbagai bentuk seperti pembangunan jalan dan bantuan sapi.

Di empat desa di mana terdapat pengungsi juga dilaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk membantu pengungsi, misalnya, program pembangunan perumahan.

Di beberapa desa tampak ada beberapa program pembangunan yang cukup dominan karena terkait dengan kondisi spesifik desa. Di desa yang dekat kota seperti Eki terdapat lebih banyak program pemberian kredit karena di desa ini terdapat berbagai peluang ekonomi nonpertanian yang dapat dimanfaatkan jika tersedia modal. Di Desa Lay lebih banyak dilaksanakan program-program bantuan untuk pengungsi karena di desa ini terdapat beberapa lokasi penampungan pengungsi.

Dampak program-program pembangunan terhadap kehidupan masyarakat desa sangat beragam. Tabel 17 memberi gambaran ringkas tentang jenis-jenis program yang oleh masyarakat dianggap paling bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Dari Tabel 17, dapat disimpulkan bahwa banyak di antara program pembangunan yang dianggap paling bermanfaat adalah program yang secara langsung bisa memperbaiki kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Perbaikan ekonomi diupayakan antara lain dengan menjadikan warga lebih produktif (misalnya, panen dua kali setahun), memudahkan pemasaran hasil pertanian, menambah aset, atau meningkatkan nilai aset. Perbaikan kondisi kesehatan diupayakan melalui pengobatan gratis dan pengadaan fasilitas sanitasi.

Tabel 17. Program Pembangunan yang Dianggap Paling Bermanfaat

Desa	Program Pembangunan yang Dianggap Paling Bermanfaat	Alasan
Eki	1. Pembangunan bendungan 2. Pembuatan jalan 3. Penyediaan kredit/akses terhadap modal kerja	1. Bisa menanam padi 2 kali setahun 2. Transportasi menjadi lebih baik sehingga lebih mudah menjual hasil pertanian 3. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha nonpertanian atau untuk membiayai produksi pertanian
Malo	1. Program Askes Gakin 2. Program Bantuan Langsung Tunai	1. Bisa berobat ke puskesmas tanpa terbebani biaya yang mahal 2. Bisa menambah pendapatan keluarga
Korinus	1. Pembukaan/pembuatan jalan 2. Pembuatan terasering di kebun 3. PIPANISASI 4. Perlindungan mata air	1. Transportasi menjadi lebih baik sehingga lebih mudah menjual hasil pertanian 2. Hasil kebun lebih bagus 3+4. Bisa bertani sepanjang tahun karena pengairan lebih baik juga di musim kering
Lay	1. Bantuan sapi dan traktor	1. Distribusi bantuan lebih merata dan Masyarakat bisa belajar beternak sapi
Beluta	1. Bantuan perbaikan rumah 2. Pembuatan WC/ kamar mandi 3. Pembuatan sumur	1. Kondisi rumah lebih baik dan mudah pemeliharaannya 2. Masyarakat bisa belajar hidup lebih bersih karena tidak lagi membuang kotoran sembarangan 3. Lebih mudah mendapat air bersih

Secara umum masyarakat menganggap bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan memiliki tujuan yang baik. Namun, tidak semuanya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Program-program nasional yang relatif dikenal luas seperti pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah dan ibu hamil, posyandu, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hampir tidak pernah disebut sebagai program yang secara nyata bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti ini bertujuan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, padahal warga desa umumnya menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan secepatnya seperti masalah panen buruk, kurang pangan, pendapatan yang sangat minim, biaya adat tinggi, atau serangan penyakit. Oleh karena itu, program-program yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi dan kesehatan dalam jangka pendek, cenderung dianggap lebih bermanfaat.

Di beberapa desa terdapat program pembangunan yang justru menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Sering kali ketegangan itu timbul karena jumlah bantuan lebih sedikit daripada jumlah dibutuhkan warga. Salah satu program yang distribusinya berpotensi konflik adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada saat penelitian dilakukan,

pembagian BLT tahap II sedang berlangsung di Desa Lay dan Desa Beluta. Sempat terjadi protes dari warga (baru maupun lama) yang tidak mendapatkan bagian. Program pembangunan juga bisa menimbulkan konflik yang berlarut-larut di masyarakat. Contohnya di Korinus, konflik yang paling penting yang terjadi di desa ini selama sepuluh tahun terakhir terkait dengan penyaluran kredit dari Dinas Koperasi TTS untuk pembuatan pupuk Bokasi. Program ini awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi karena buruknya koordinasi antara masyarakat penerima kredit dan berbagai lembaga yang terkait akhirnya masyarakat justru terjatuh ke dalam macet yang berjumlah besar.

5.5.2 Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur yang ada di semua desa adalah sekolah dasar, jaringan listrik²⁰ dan angkutan umum (khususnya angkutan pedesaan dan ojek). Secara umum, yang paling banyak tersedia adalah infrastruktur sosial terutama berbagai jenis fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, yang dianggap paling bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan adalah tersedianya infrastruktur fisik khususnya jalan dan angkutan umum. Pembangunan jalan baik dalam bentuk membuka jalan baru, pengerasan maupun pengaspalan jalan, merupakan stimulan bagi berkembangnya angkutan umum. Kombinasi kedua infrastruktur tersebut memberi manfaat langsung bagi para warga di desa-desa pertanian seperti Malo, Korinus, Lay, dan Beluta karena jalan dan angkutan umum membuka akses yang lebih baik terhadap pasar. Para petani lebih mudah membawa hasil pertanian ke pasar-pasar terdekat dan pedagang juga makin sering datang ke desa untuk membeli hasil bumi langsung dari petani. Seperti dijelaskan oleh seorang petani dari Korinus,

Karena jalan sudah bagus, transportasi menjadi lebih baik. Dulu kalau mau menjual hasil kebun harus jalan ke Mikel (kota terdekat). Sekarang untuk menjual hasil kebun cukup timbang di depan rumah, pedagang yang datang ke desa, karena jalan sudah bagus (FGD, laki-laki, 50).

Ketersediaan air—baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk pertanian—juga dianggap faktor yang penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Eki dan Korinus, warga sangat diuntungkan dengan pembangunan sarana penyediaan air (pembuatan bendungan, pipanisasi, dan perlindungan mata air). Ketersediaan air, juga saat musim kemarau, memungkinkan untuk bertani sepanjang tahun dan menanam komoditas yang mudah dipasarkan (*cash crops*). Sebaliknya, di Desa Lay dan Desa Beluta terbatasnya air menjadi masalah yang menghambat warga untuk mengembangkan kegiatan pertanian mereka. Di atas telah dijelaskan bahwa jalan dan angkutan umum merupakan infrastruktur yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi dalam forum diskusi terungkap bahwa tersedianya jalan, angkutan umum dan akses terhadap pasar tidak selalu bisa membantu petani meningkatkan penghasilan karena jika panen buruk tidak ada yang bisa dipasarkan. Warga mengeluhkan kesulitan mendapat air untuk keperluan pertanian saat musim kering, seperti yang terungkap dalam FGD.

Masalahnya adalah air, kalau musim hujan begini kita hidup lebih baik, tapi kalau musim kering hidup kita kurang baik. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah atau LSM

²⁰Jaringan listrik tidak secara merata ada di semua dusun yang berada dalam wilayah desa itu.

membantu membuatkan sumur bor untuk sawah dan ladang supaya kami bisa bekerja juga saat musim kering. (FGD Beluta, laki-laki, 44)

Di Desa Lay, kurangnya sumber air bersih saat musim kering menimbulkan wabah diare pada 2005. Saat itu sumber air minum bagi warga desa terpaksa menjadi satu dengan sumber air untuk ternak.

5.5.3 Sarana Komunikasi dan Akses terhadap Informasi

Kecuali di Eki yang dekat dengan kota Kupang, di empat desa lain sarana komunikasi sangat minim. Di desa-desa itu tidak ada jaringan telepon kabel, sekalipun Malo, Korinus, dan Beluta sudah terjangkau jaringan telepon seluler. Namun, hanya sejumlah kecil warga yang menggunakan telepon seluler. Umumnya informasi tentang kegiatan di desa disebarkan melalui pertemuan warga, kegiatan gereja, atau warga saling memberi tahu "dari mulut-ke-mulut".

Lebih dari 70% warga di kelima desa tidak memiliki radio atau televisi. Sumber utama informasi untuk masalah desa/dusun adalah para tokoh masyarakat dan aparat desa/dusun. Survei rumah tangga menunjukkan bahwa dua sumber utama informasi tentang program ekonomi pemerintah adalah saudara, teman, atau tetangga (41%) dan tokoh masyarakat (31%). Dua sumber utama informasi yang berpengaruh terhadap mata pencaharian seperti perkembangan harga produk pertanian adalah saudara, tetangga, teman (46%), dan pedagang/pasar setempat (26%). "Orang pergi ke pasar baru tahu harga. Orang dari desa ke pasar untuk jual hasil pertanian, pulang kasih tahu kita (perkembangan) harga" (FGD Korinus, perempuan, 25).

Baik di forum diskusi maupun dalam penuturan sejarah hidup, minimnya sarana komunikasi dan terbatasnya akses terhadap media massa tidak muncul sebagai faktor yang mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan. Tampaknya masyarakat di kelima desa beranggapan bahwa sarana dan mekanisme komunikasi dan penyediaan informasi yang ada sudah memadai untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Sebanyak 61% responden survei rumah tangga menyebutkan bahwa mereka bisa dengan mudah mengakses informasi tentang berbagai program pemerintah daerah.

5.5.4 Program Pembangunan, Kondisi Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan

Program pembangunan, baik yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbagai tempat di NTT. Masalah kemiskinan yang berlarut-larut membuat wilayah ini menjadi tempat yang menarik untuk pelaksanaan program pembangunan. Di atas telah disebutkan bahwa sejak tahap awal penelitian, telah diperoleh data tentang berbagai program pembangunan di kelima desa. Tak jarang warga desa menyebutkan bahwa mereka membutuhkan program-program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Potensi desa untuk berkembang secara ekonomis sangat kecil akibat iklim yang kering, tanah yang tandus, dan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Program-program pembangunan adalah intervensi dari luar desa yang bisa memungkinkan warga untuk melakukan sesuatu yang sulit mereka lakukan secara mandiri, misalnya membangun fasilitas umum yang penting untuk kegiatan pertanian

(bak penampungan air, pipanisasi), untuk pemeliharaan kesehatan (pembangunan WC, sumur, perbaikan rumah, asuransi kesehatan), untuk mengembangkan diversifikasi mata pencaharian (paronisasi sapi dan bantuan kambing). Ini juga termasuk program pembangunan yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kondisi ekonomis warga karena lebih merupakan investasi bagi generasi berikutnya (posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak, dan Bantuan Operasional Sekolah).

Ketersediaan infrastruktur juga dapat dilihat sebagai hal yang membantu warga untuk meningkatkan potensi desa. Salah satu infrastruktur yang dianggap paling penting adalah jalan dan sarana transportasi yang memadai. Infrastruktur ini memungkinkan warga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, misalnya, untuk memasarkan hasil pertanian ke pasar atau untuk menarik tengkulak datang ke desa dan membeli langsung hasil pertanian dari petani.

Dapat disebutkan bahwa program pembangunan dan kondisi infrastruktur yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan, termasuk upaya keluar dari kemiskinan. Kedua hal tersebut bisa memperkaya dan memungkinkan pengembangan potensi desa.

VI. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Agensi

6.1 Pengantar

Bab ini membahas faktor-faktor agensi yang berperan dalam upaya keluar dari kemiskinan. Secara khusus, bab ini akan mengkaji berbagai bentuk agensi individu maupun tindakan kolektif yang muncul dari tiap komunitas, membandingkan pola antarkomunitas, dan melihat bagaimana faktor-faktor agensi berperan dalam mobilitas sosial, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan atau untuk keluar dari kemiskinan. Sumber data untuk bab ini, khususnya yang berkaitan dengan agensi di tingkat individu, sebagian besar diambil dari hasil wawancara sejarah hidup dengan total 80 orang informan di lima komunitas. Informan dalam setiap komunitas terbagi ke dalam empat kelompok transisi, yaitu kelompok *mover*, *always rich*, *chronic poor*, dan *faller*. Sementara itu, data hasil survei rumah tangga menunjukkan sejauhmana bentuk agensi tertentu muncul di antara populasi penelitian yang lebih luas.

6.1.1 Pengertian dan Komponen Agensi

Agensi sering dimaknai sebagai kapasitas untuk bertindak yang dimiliki oleh *agent* atau *actor* (baik sebagai individu maupun kelompok) dalam menentukan, mencapai, dan melindungi kepentingannya. Dengan demikian, agensi sangat berperan dalam interaksi di antara anggota masyarakat termasuk dalam menentukan posisi (sosial-ekonomi).

Secara lebih rinci, agensi individu dapat dilihat dari komponen-komponen berikut ini.

- a) Aset (*assets*), yang menunjuk pada kepemilikan seseorang yang biasanya berupa materi seperti tanah, rumah, ternak, tabungan, dan perhiasan.
- b) Modal manusia (*human capital*) yang di dalamnya terkandung komponen kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan tenaga kerja.
- c) Kemampuan sosial (*social capabilities*), kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan interaksi sosial yang dengan demikian memperbesar peluang seseorang untuk mengakses sumber daya tambahan melalui koneksi/jaringan sosial tersebut. Dalam kasus orang miskin, *social capabilities* diyakini mampu membantu orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena masyarakat miskin tidak mempunyai jaminan sosial (*social securities*) untuk melindungi mereka, khususnya jika terjadi krisis, maka hubungan sosial yang saling timbal balik membantu mereka mengatasi hal tersebut (Narayan *et al.* 2000).
- d) Kemampuan psikologis (*psychological capabilities*) kemampuan yang mencakup penilaian terhadap diri sendiri. Secara rinci, kemampuan ini terlihat dari bagaimana individu menilai diri mereka sendiri, apakah mereka memiliki rasa percaya diri yang cukup besar atau justru rendah diri dalam menghadapi hidup serta faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Komponen psikologis dalam agensi sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu tindakan seseorang selanjutnya, jika seseorang

merasa atau melihat dirinya mampu untuk melakukan sesuatu (memiliki rasa percaya diri), maka dia cenderung akan mampu melakukan tindakan tersebut. Penilaian dan tindakan merupakan hasil usaha sendiri dan juga ditentukan sendiri sehingga seseorang dapat melakukan perubahan pada diri mereka dan lingkungan mereka atas usaha mereka sendiri.

- e) Kemampuan politis (*political capabilities*), kemampuan individu untuk ikut serta dalam organisasi di masyarakat, baik dalam kegiatan sosial maupun politik lokal (tingkat desa). Lebih jelasnya, kemampuan politik ini akan terlihat dari keterlibatan seseorang untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan desa maupun terlibat dan menjabat posisi penting dalam sebuah organisasi atau partai politik.

6.1.2 Mengapa Penting untuk Mengkaji Faktor-Faktor Agensi?

Agensi kerap kali dibahas bersamaan dengan pembahasan tentang struktur terutama berkaitan dengan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat mencerminkan agensi yang dilaksanakan dalam konteks struktural tertentu. Oleh karena itu, keberlangsungan masyarakat, termasuk juga kesejahteraan masyarakat, dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi di tingkat struktur dan di tingkat agensi (individu). (Ritzer 2004:378–405)

Dalam studi ini kondisi di tingkat struktur dipahami melalui faktor-faktor seperti stratifikasi sosial serta pola-pola hubungan antara berbagai golongan/lapisan masyarakat, kesenjangan sosial, kualitas tata kelola pemerintahan lokal, dan keberadaan program pembangunan dan infrastruktur (lihat Bab V). Agensi didefinisikan sebagai kebebasan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bertindak sesuai dengan pilihan dan kepentingannya. Agensi individu ini didasari oleh hal-hal yang merupakan hasil pencapaian seperti pendidikan, keterampilan, kesehatan, maupun merupakan pemberian pihak lain baik berupa materi seperti warisan maupun status sosial-politik, termasuk di dalamnya adalah etnisitas atau identitas seseorang berdasarkan kesukuan. Perwujudan agensi dapat dilihat di tingkat individu, yaitu dalam bentuk aset dan kemampuan yang dimiliki oleh individu, serta di tingkat kelompok dalam bentuk aset dan kemampuan kolektif. Dalam studi ini agensi dikaitkan dengan mobilitas sosial-ekonomi seseorang dan dilihat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap upaya untuk keluar dari kemiskinan.

Agensi, baik individu maupun kelompok, juga dilihat sebagai salah satu dimensi penting dalam kesejahteraan seseorang sehingga apa yang terjadi pada agensi dan bagaimana agensi itu dimanifestasikan bisa memengaruhi kondisi kesejahteraan orang tersebut. Dalam hal ini agensi mengacu pada *authentic self-direction* dan *self-control*, yaitu kontrol terhadap lingkungan sendiri, memiliki otonomi, berpartisipasi, memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak sebagai subjek yang aktif dan independen. Semua komponen tersebut mengacu pada pengertian kesejahteraan yang multidimensional. Agensi di setiap kelompok berbeda-beda, oleh karena itu, bagian ini secara spesifik akan melihat bagaimana agensi dan kapasitas yang dimiliki oleh individu-individu dalam empat kelompok transisi untuk menemukan hal-hal apa yang bisa membuat seseorang mengalami peningkatan kesejahteraan sementara yang lainnya justru mengalami penurunan kondisi kesejahteraan.

6.2 Pola dan Karakteristik Agensi: Perbandingan di Lima Komunitas

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dinamika di tingkat agensi dapat berbeda-beda atau sama pada setiap individu, bahkan pada kumpulan individu (komunitas atau masyarakat). Dinamika tersebutlah yang salah satunya menyebabkan terjadinya berbagai macam bentuk mobilitas di masyarakat, ada kelompok yang berhasil keluar dari kemiskinan, sementara ada sekelompok lainnya yang justru jatuh miskin. Pembahasan mengenai dinamika dan peran dari agensi tersebut akan dilihat dari beberapa komponen yang telah disebutkan di atas. Komponen-komponen tersebut dianggap berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan seseorang.

6.2.1 Komponen-komponen Agensi Individual

a) Aset

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, di lima komunitas penelitian aset yang dianggap penting adalah tanah dan ternak. Salah satu cara umum untuk mendapatkan aset ini adalah melalui transfer kekayaan antargenerasi atau warisan. Warisan ini kebanyakan berupa tanah atau lahan garapan, tetapi ada juga yang berupa hewan peliharaan. Luas tanah warisan bervariasi, begitu pula penggunaannya. Ada yang digunakan untuk area persawahan maupun tanaman keras. Ada juga area yang masih kosong. Penggarapan lahan warisan tersebut tergantung kemampuan masing-masing keluarga.

Luas lahan yang diberikan biasanya tergantung pada lahan yang dimiliki oleh orang tua dan jumlah anak yang dimiliki. Secara teoretis, proses pewarisan tanah juga bisa menyebabkan menyusutnya luas tanah yang dimiliki oleh generasi berikutnya, terutama bagi keluarga yang memiliki jumlah anak (ahli waris) lebih banyak. Namun, survei rumah tangga di lima komunitas menunjukkan bahwa dibanding 1996, pada 2006 lebih banyak rumah tangga yang memiliki tanah. Pada 1996, 74% warga memiliki tanah dan 26% tidak memiliki tanah sama sekali, sedangkan saat survei dilakukan pada 2006, proporsi warga pemilik tanah adalah 79% dan warga yang tidak memiliki tanah 21%. Selain itu, rumah tangga yang memiliki lahan lebih luas juga bertambah. Pada 1996, hanya 49% rumah tangga yang memiliki lahan dengan luas total lebih dari 1 ha, sedangkan pada 2006 proporsi ini naik menjadi 55%. Mengingat mata pencaharian utama di lima komunitas adalah bertani, makin banyak warga memiliki lahan (yang lebih luas) berarti lebih besar peluang untuk meningkatkan pendapatan. Ini sesuai dengan uraian pada bab sebelumnya yang menunjukkan adanya perubahan positif dalam stratifikasi sosial-ekonomi di lima komunitas penelitian. Dalam waktu sepuluh tahun, jumlah warga yang berada di lapisan tengah dan atas menjadi lebih banyak, atau dengan kata lain makin banyak warga yang bisa meningkatkan kesejahteraannya dan meninggalkan lapisan terbawah (termiskin).

Jika kita melihat lebih detail perbedaan di antara lima desa, tampak bahwa di Desa Lay, pemberian warisan ini terjadi di semua kelompok transisi, bahkan di kelompok tetap miskin dan kelompok yang jatuh miskin. Bisa dikatakan bahwa setiap kelompok transisi

sebenarnya memiliki modal awal yang sama. Berbeda dengan di Desa Korinus, kelompok *faller* atau yang jatuh miskin di desa ini, walaupun mendapat warisan, jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah lahan maupun hewan ternak yang mereka miliki jumlahnya tidak memadai sehingga mereka masih harus bekerja pada orang lain. Akibatnya, hasil yang mereka peroleh pun tidak maksimal.

Secara umum jumlah aset yang dimiliki setiap kelompok transisi mengalami perubahan. Pada kelompok *mover* dan *always rich* jumlah aset cenderung bertambah. Pada kelompok *chronic poor* dan *faller*, jumlah aset yang dimiliki justru makin berkurang terutama aset yang berupa hewan ternak. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa umumnya jumlah ternak yang dimiliki warga pada 2006 lebih sedikit daripada sepuluh tahun sebelumnya. Selain itu, makin jarang orang memiliki ternak dalam jumlah besar (misalnya lebih dari 20 ekor sapi). Berkurangnya jumlah aset ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di Desa Beluta dan Desa Lay, banyaknya keperluan adat seperti untuk perkawinan dan upacara kematian menjadi penyebab berkurangnya jumlah hewan ternak yang dimiliki. Selain itu, ditemukan pula kasus pencurian sapi di kedua desa ini sehingga sangat mengganggu akumulasi aset masyarakat.

Perlu dicermati bahwa sekalipun nilai sapi dan babi sebagai aset tetap tinggi, makin banyak warga yang tidak memilikinya. Pada 1996, 59% dari rumah tangga tidak mempunyai sapi dan 34% tidak mempunyai babi, tetapi pada 2006 61% tidak mempunyai sapi dan 36% tidak mempunyai babi. Fenomena ini menarik jika dibandingkan dengan kepemilikan tanah yang justru bertambah. Dalam berbagai wawancara dan forum diskusi, warga sering mengeluhkan sulitnya mengakumulasi aset ternak karena harus digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban adat. Seorang warga Beluta yang termasuk kelompok *mover* memberi ilustrasi tentang kesulitan tersebut:

Tahun 2001 saya beli sapi untuk dipelihara. Harga sapi waktu itu Rp800.000, (uang ini) saya dapat dari jualan sayur. Tapi *ai...* karena adat, sapi itu dipotong. Orang tua Bapak Yosep yang masih om saya meninggal. Sapi yang baru saya beli dua bulan langsung ditarik (diambil dan dipotong) untuk adat. Kalau orang datang (keluarga yang mengalami musibah) minta sapi, ya harus beri sapi. Waktu itu saya mau beri uang untuk bantu Rp1.000.000 mereka tidak mau. Harus tarik itu sapi. Beda kalau kita tidak ada sapi, mereka kita kasih uang pasti mau terima. (Sejarah hidup, laki-laki, 60)

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa aset yang berupa ternak lebih sulit dipertahankan oleh pemilik karena aset itu mudah diklaim oleh pihak lain berdasar adat yang berlaku. Klaim seperti ini tidak bisa dilakukan terhadap aset yang berupa lahan, rumah, atau barang lain. Ditambah lagi, ternak juga memiliki risiko lebih besar untuk hilang dan dicuri. Oleh karena itu, untuk upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan, aset berupa tanah bisa lebih aman dan menguntungkan daripada ternak. Fenomena bertambahnya aset tanah dan berkurangnya aset ternak dapat menunjukkan suatu tindakan ekonomi—atau agensi—warga dalam menghadapi berbagai klaim komunal terhadap aset mereka.

b) Modal Manusia

Dalam bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa modal manusia berpengaruh pada kondisi kesejahteraan seseorang. Pengaruh tersebut dapat ditelusuri dari komponen-komponen modal manusia seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan tenaga kerja.

(1) Kesehatan

Hampir setiap anggota kelompok transisi di setiap komunitas menyatakan bahwa kesehatan adalah faktor yang mutlak dipenuhi dan harus terus dijaga sehingga tetap memungkinkan mereka untuk bekerja dengan baik. Pada umumnya, kondisi kesehatan masyarakat di komunitas penelitian ditunjang oleh kepemilikan kartu sehat. Di beberapa desa distribusi kartu ini tampak tidak tepat sasaran sebab ada anggota kelompok tidak miskin yang memiliki kartu, sedangkan kelompok miskin justru ada yang tidak memilikinya.

Masalah kesehatan bisa menjadi penyebab turunnya kondisi kesejahteraan seseorang, misalnya jika ada salah satu anggota keluarga yang jatuh sakit atau meninggal dunia, terutama jika terjadi pada pencari nafkah utama dalam keluarga. Sumber pendapatan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali untuk beberapa waktu. Tidak jarang, keluarga yang bersangkutan juga harus menjual aset untuk biaya pengobatan.

Masalah yang sering muncul bersamaan dengan memburuknya kondisi kesehatan adalah masalah penuaan (*ageing*). Hampir di semua desa ditemukan adanya keluarga yang jatuh miskin akibat faktor penuaan. Karena sudah tua, banyak kepala keluarga yang tidak sanggup lagi untuk bekerja, sementara anak-anak mereka sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri. Di samping kemampuan yang menurun, aset yang mereka miliki juga sudah habis dibagikan kepada anak-anak sehingga makin mempersulit kehidupan mereka. Survei rumah tangga menunjukkan bahwa penuaan merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan atau menyebabkan stagnasi kesejahteraan. Banyak kegiatan di sektor pertanian yang menuntut kerja fisik yang cukup berat, oleh karena itu, mereka yang kondisi kesehatannya memburuk—termasuk karena penuaan—akan sulit mengolah lahannya tanpa bantuan.

Dalam bab berikutnya akan diuraikan bahwa para perempuan kepala rumah tangga (PKRT) lebih sering mengeluhkan masalah penuaan sebagai faktor yang bisa menurunkan kesejahteraan daripada para laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga (LKRT). Ini terkait dengan usia PKRT yang rata-rata lebih tua daripada LKRT sehingga masalah lanjut usia lebih relevan bagi PKRT. Selanjutnya, karena usia PKRT yang lebih tua, kelompok ini juga menyebut biaya kesehatan yang besar dan tidak bisa bekerja sebagai salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi kesejahteraan.

(2) Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan sering kali diharapkan menjadi salah satu faktor penunjang dalam upaya memperbaiki kesejahteraan. Rata-rata tingkat pendidikan responden di kelima desa adalah tamat SD, yaitu sebesar 27% dan buta huruf atau tidak sekolah sebesar 23%.

Hanya 12% responden yang berhasil tamat SMA, sebagian besar berasal dari Desa Eki, yaitu dari kelompok *mover* dan *always rich*.

Kaitan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan tampak di Desa Lay dan Desa Malo. Sebagian besar warga yang tergolong kelompok yang paling sejahtera (*always rich*) di kedua desa tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan kelompok lainnya, yaitu mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkat menengah. Dampak dari faktor pendidikan ini di antaranya terlihat dari beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan yang semuanya membutuhkan keterampilan khusus dan pendidikan tertentu seperti menjadi guru, pendeta, dan aparat pemerintahan desa. Dampak pendidikan juga terlihat dari kemampuan mereka untuk mengakses fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan setingkat LSM untuk kepentingan usaha produktif mereka seperti yang terjadi di Desa Malo. Di Desa Lay, pendidikan tinggi yang dimiliki oleh kelompok ini telah membuka kesempatan mereka untuk mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi mata pencaharian mereka seperti pelatihan pakan ternak, dan kursus perkebunan.

Pada komunitas lainnya, pendidikan, terutama pendidikan formal, tidak terlalu berpengaruh pada kondisi kesejahteraan seseorang. Di Desa Beluta dan Desa Korinus, warga yang tamat SD ada yang termasuk dalam kelompok yang bisa meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya (*mover* dan *always rich*) dan ada pula yang termasuk dalam kelompok yang mengalami kemiskinan kronis (*chronic poor*). Di Desa Beluta, tingkat pendidikan kelompok *mover* bervariasi, mulai dari tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, bahkan sampai tamat SMP.

Berbeda dengan pengaruh pendidikan formal, keterampilan dan keahlian dalam berusaha ternyata cukup berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Kelompok *mover* dan *always rich* di Desa Lay pada umumnya memiliki sumber pengetahuan serta keterampilan yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya; seperti mengolah lahan atau mengurus ternak. Keterampilan ini mereka peroleh selain dari orang tua secara turun-temurun juga karena banyak mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat dalam pekerjaan. Dengan modal pengetahuan serta keterampilan bekerja, kelompok ini bisa mempertahankan kesejahteraan bahkan bisa keluar dari kemiskinan.

Kelompok *chronic poor* di Desa Eki mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik daripada kelompok *chronic poor* di komunitas lainnya. Rata-rata pendidikan formal yang ditempuh oleh kelompok ini adalah minimal SD serta memiliki keterampilan yang lebih banyak, yang diperoleh dari mengikuti pelatihan.

c) Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial seseorang terwujud dalam pola interaksi sosial sehari-hari, pihak-pihak yang saling berinteraksi, frekuensi, mekanisme, dan sarana interaksi. Pada setiap kelompok transisi di lima komunitas studi, interaksi yang terjalin masih dominan di antara sesama penduduk desa dan dengan orang-orang atau kelompok dengan latar belakang atau kondisi sosial-ekonomi yang relatif sama. Di setiap kelompok ini pula ditemukan bahwa hubungan sosial yang paling penting bagi mereka adalah dengan keluarga inti

(suami/istri dan anak-anak). Pasangan dalam rumah tangga biasanya menjadi teman utama dalam berbagi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Istri berperan sebagai teman bertukar pikiran, pengelola keuangan, dan kehidupan rumah tangga, dan kerap kali bersama anak-anak membantu mencari nafkah dalam keluarga. Hubungan sosial yang juga dianggap penting lainnya adalah dengan keluarga luas/saudara sesama suku (*extended family*) dan tetangga. Hubungan dengan pihak-pihak ini dirasakan bermanfaat dan sangat membantu terutama jika menghadapi saat-saat sulit, biasanya sebagai sumber bantuan, tempat meminjam uang, maupun untuk kebutuhan lainnya.

Di Desa Beluta, informan di setiap kelompok transisi menyatakan bahwa hubungan sosial yang dirasa sangat penting bagi mereka adalah hubungan dengan keluarga inti, yaitu dengan istri/suami dan anak-anak. Hanya sedikit informan yang menyebutkan adanya hubungan penting lain dengan orang/pihak di luar desa. Di Desa Lay dan di Desa Korinus, selain hubungan erat yang tercipta dengan keluarga inti dan keluarga luas, beberapa orang terutama yang berasal dari kelompok *always rich* sudah membuka hubungan sosial/memiliki jaringan sosial dengan pihak lain, baik dari dalam desa maupun luar desa yang memiliki kapasitas yang lebih besar daripada mereka. Pihak-pihak tersebut adalah aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten; dengan LSM-LSM, terutama yang beroperasi di Desa Korinus; dan dengan pegawai-pegawai Dinas Peternakan atau Pertanian yang kerap datang berkunjung ke desa untuk memberikan penyuluhan. Analisis lebih lanjut terhadap hubungan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan tersebut ternyata berdampak positif terutama bagi kelompok masyarakat di desa. Lewat interaksi yang terjalin, terjadi alih pengetahuan dan informasi seputar mata pencaharian. Selain itu, mereka juga memperoleh informasi mengenai akses terhadap program-program bantuan yang ada. Dengan beragamnya bantuan dan program pembangunan yang masuk di Desa Korinus, maka sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa hubungan sosial yang juga penting dalam kehidupan mereka adalah dengan sesama warga desa yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok sayur yang sama. Kelompok tani dan kelompok sayur merupakan hasil bentukan program pembangunan yang ada di desa yang berfungsi dengan baik, dan sangat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan anggotanya sehari-hari.

Studi ini juga memperlihatkan bahwa hubungan sosial yang tercipta di antara saudara/kerabat dan tetangga menjadi semacam jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Di tengah minimnya fasilitas kredit/pinjaman dengan persyaratan yang mudah—dan bunga yang terjangkau bagi masyarakat, keberadaan tetangga dan saudara dirasakan sangat membantu, terutama di masa-masa sulit dan ketika ada kebutuhan yang mendadak, seperti jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal, biaya sekolah anak, dan terutama untuk kebutuhan adat (*belis*) yang tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat NTT. Kondisi ini dirasakan oleh semua kelompok transisi, tanpa terkecuali.

d) Kemampuan Psikologis

Kemampuan psikologis menjadi salah satu faktor yang mendorong atau memengaruhi agensi. Kemampuan ini di antaranya dilihat dari rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang serta kemauan untuk bekerja keras.

Rasa percaya diri ini dianggap berpengaruh dan mampu menjadi pendorong atau motivasi terhadap upaya seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Rasa percaya diri yang cukup tinggi pada umumnya dimiliki oleh kelompok *mover* dan *always rich* di setiap komunitas. Bagi kelompok *mover*, rasa percaya diri mereka makin bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan dan status menjadi tidak miskin lagi. Namun, sebelum terjadi peningkatan pun, salah satu faktor pendorongnya adalah rasa percaya diri yang tinggi serta kemauan untuk bekerja keras. Di Desa Lay, begitu juga di Desa Korinus, rasa percaya diri ini menjadi semacam motivasi/pendorong untuk terus berusaha, apalagi ditambah dengan pencapaian-pencapaian yang telah mereka dapatkan.

Sebaliknya, kelompok *faller* dan *chronic poor* ternyata memiliki rasa kurang percaya diri terhadap kondisi mereka saat itu dan hal tersebut berpengaruh terhadap etos kerja mereka. Seperti yang terungkap dari kelompok *chronic poor* di Desa Lay, kepercayaan diri mereka makin lama makin berkurang karena kondisi yang tetap miskin dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab menurunnya rasa percaya diri adalah faktor penuaan. Kelompok *faller* di Desa Malo dan Lay menyatakan bahwa faktor usia menyebabkan mereka merasa tidak mampu lagi untuk bekerja seperti dulu, ditambah lagi tidak adanya bantuan yang biasa mereka terima dari anak-anak mereka. Dalam kondisi seperti itu, mereka merasa tidak percaya diri untuk terus bekerja.

Kondisi yang agak berbeda terdapat di Desa Eki. Di desa ini, ciri yang dominan ditemukan adalah semangat dan kerja keras di semua kelompok transisi. Hal tersebut tampaknya sudah menjadi etos kerja mereka, terutama dalam menghadapi persaingan usaha antara penduduk asli dengan kelompok pendatang (eks pengungsi Timor Leste maupun pendatang). Semangat dan etos kerja yang tinggi di semua kelompok transisi juga ditemukan di Desa Korinus. Di desa ini, hampir semua penduduknya memiliki rasa percaya diri yang cukup kuat. Rasa percaya diri ini bersifat timbal balik, selain muncul akibat keikutsertaan mereka pada berbagai kelompok di masyarakat, juga sebagai pendorong/motivasi mereka untuk maju. Seperti yang ditemukan pada salah satu anggota kelompok *chronic poor* di desa ini, walaupun masih tergolong miskin, tetapi penghasilannya sebetulnya perlahan-lahan mengalami peningkatan. Peningkatan inilah yang membuat dirinya makin percaya diri untuk terus bekerja.

Munculnya rasa percaya diri dan semangat kerja ini tidak selamanya disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun kepemilikan aset, seperti peningkatan pendapatan maupun penambahan aset. Di beberapa desa, terutama di Desa Beluta dan Desa Korinus, faktor ini muncul karena hal-hal yang bersifat nonmaterial. Di Desa Beluta, salah seorang informan mengatakan bahwa dirinya merasa sudah keluar dari kemiskinan antara lain karena anak-anaknya sudah berhasil (sudah menikah). Di Desa Korinus, salah seorang anggota kelompok *chronic poor* menyatakan bahwa rasa percaya dirinya makin bertambah karena dirinya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang SMA walaupun dalam kondisi miskin.

e) Kemampuan Politik

Keikutsertaan atau partisipasi pada beberapa organisasi sosial di masyarakat, atau menduduki jabatan tertentu dalam organisasi maupun pemerintahan desa menjadi ukuran kemampuan politik seseorang. Pada umumnya, kelompok *always rich* dan *chronic poor* di komunitas studi merupakan mereka yang sedang menjabat atau pernah menduduki jabatan penting di desa. Di Desa Lay, kemampuan politik kedua kelompok ini ditunjang oleh beberapa hal, pertama ialah anggota kedua kelompok ini sebagian besar berasal dari kelompok etnis yang sama, yaitu Suku Umametan yang memang memiliki keistimewaan untuk memerintah desa dan dusun secara turun-temurun. Kedua, karena posisi tersebut, maka mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada kedua kelompok lainnya, berupa sumber daya ekonomi, tingkat pendidikan, ataupun jaringan sosial yang memadai. Selain itu, kedua kelompok ini juga aktif mengikuti kegiatan atau organisasi sosial yang ada di masyarakat. Di Desa Beluta, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan politisi daerah (misalnya anggota DPRD) hanya dimiliki sejumlah kecil orang di kelompok *mover*. Hubungan dekat dengan politisi daerah ini membuat mereka bangga dan bisa mendapat keuntungan ekonomi (misalnya mendapat bantuan pribadi). Kemampuan politis untuk menduduki jabatan atau posisi kemasyarakatan (kepala dusun, hakim perdamaian desa, bendahara kelompok tani, tokoh masyarakat, dan anggota partai politik) umumnya dimiliki oleh mereka yang berada di kelompok *mover*.

Sama halnya dengan penjelasan mengenai kemampuan psikologis sebelumnya, untuk kemampuan politik pun, hanya kelompok *faller* dan *chronic poor* yang tidak pernah menduduki jabatan apa pun di desa. Kelompok ini biasanya hanya berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok doa, dan perkumpulan kematian. Pengecualian ditemukan di Desa Korinus, yaitu baik kelompok *mover*, *always rich*, dan *chronic poor* pernah menduduki jabatan yang penting di desa, baik dalam pemerintahan desa maupun dalam organisasi sosial yang ada. Hal ini, sekali lagi disebabkan oleh banyaknya program bantuan yang masuk ke desa lab ini yang menjadikan kapasitas masyarakat desanya, baik dalam bidang sosial maupun politik, cenderung lebih baik dan kuat daripada dengan desa lainnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa kepemimpinan di Desa Korinus tidak dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi seseorang dalam masyarakat.

Setelah memahami lebih detail berbagai komponen agensi di atas, perlu ditekankan bahwa umumnya komponen-komponen tersebut tidak berfungsi secara terpisah melainkan saling terkait. Satu komponen (misalnya kemampuan sosial dan politis yang baik) bisa menguatkan berfungsinya komponen yang lain (misalnya kemampuan psikologis/rasa percaya diri yang tinggi). Keberadaan berbagai komponen dan bagaimana mereka berinteraksi secara positif merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana agensi individual maupun kelompok bisa membantu meningkatkan kesejahteraan. Kasus yang diuraikan pada Kotak 1 menunjukkan bagaimana berbagai komponen saling menguatkan dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan individu.

Kotak 1

Ketika Kemampuan Sosial, Psikologis, dan Politis Menjadi Satu: Kasus Marcus dan Robertus di Desa Beluta

Dari penampilannya, Marcus dan Robertus tampak tak berbeda dengan warga Dusun Soeares lainnya saat mereka hadir dalam diskusi kelompok terarah (FGD). Namun, saat diskusi berlangsung terlihat bahwa kedua laki-laki ini bisa mengemukakan pendapatnya dengan lebih baik daripada peserta lain.

Marcus adalah laki-laki berusia 39 tahun yang pekerjaan utamanya adalah petani. Sepanjang hidupnya ia belum pernah pindah dari Dusun Soeares. Menurutnya, ia juga tidak punya keinginan untuk pindah karena lahannya ada di dusun itu. Marcus sudah membantu orang tuanya bertani sejak usia 16 tahun. Selain bertani, ia juga sempat berjualan sayur di pasar Atambua. Namun, sekarang Marcus tidak perlu menjual sendiri hasil kebunnya di pasar karena seorang tengkulak dari Atambua datang secara rutin untuk membeli sayurannya. Di samping bertani, Marcus aktif dalam kelompok agama dan menjadi ketuanya. Hal ini membuatnya bangga dan merasa dihargai.

Saya merasa lebih dihargai karena saat ini saya adalah salah satu ketua kelompok agama. Kalau saya ngomong, mereka mendengar dan mau lakukan. [...] Kalau kepercayaan diri, sekarang lebih percaya diri karena kita hidup dengan bekerja. Kita bisa berpikir dan bekerja, kita harus percaya diri. Menjadi bagian dari warga dusun, menurut saya penting. Sekarang kalau ada rapat desa atau kampung, saya selalu dipanggil ikut rapat. Contoh rapat buat rumah adat, saya dipanggil dan menandatangani berita acara rapat. Ini memengaruhi kesejahteraan saya, ini membantu saya. Ada bantuan-bantuan di desa, saya diajak rapat dan saya sering dapat bantuan. Dari dulu sampai sekarang perasaan (percaya diri) itu tetap penting,

Selain aktif sebagai tokoh masyarakat di dusunnya, Marcus juga menjadi anggota partai politik dan bisa membangun jaringan sosial di luar Dusun Soeares dan Desa Beluta. Jaringan sosial yang melewati batas desa ini jarang dimiliki oleh warga dusun yang lain dan ternyata dapat memberi keuntungan kepada Marcus.

Sekarang ini saya menjadi anggota Partai Demokrat. Memang beberapa hari yang lalu saya dipanggil dan diminta menjadi pengurus Partai Patriot Pancasila. Tapi saya tidak mau dan tetap menjadi anggota Demokrat. Sejak pemilu lalu saya sungguh-sungguh mengurus Partai Demokrat. Saya berhasil mendapatkan (mengumpulkan suara) untuk dua kursi ke Dewan (DPRD) Kabupaten Belu. Itu perjuangan saya dengan berkeliling cari dukungan untuk Demokrat. Waktu itu setelah Ibu Anatio, istri Kepala Dinas Kesehatan/Bapak dr. Valentinus Pereira menjadi anggota Dewan, saya diberikan motor. Mereka bilang: "Ansel, ini motor saya serahkan kepadamu." Tetapi saya menolak, Pak. Sampai sekarang mereka sering bantu saya. Kalau saya susah saya dibantu beras, kopi, gula, dan sirih pinang. Waktu mama saya meninggal pada 2004 setelah pemilu, mereka datang dan beri uang saya Rp1.000.000 dan uangnya dimasukkan dalam amplop. Saya tidak pernah minta bantuan, tapi mereka yang kasih. Mereka bilang pada saya, "kalau Ansel butuh apa-apa, datang ke rumah dan bilang saja jangan malu-malu." Tapi kita orang punya adat, jadi kita malu datang ke sana. Saya hanya bilang "Ibu Anatio,,kalau ibu beri pada kami, kami tidak bisa tolak."

Sama dengan Marcus, Robertus yang berusia 55 tahun juga memiliki mata pencaharian utama sebagai petani sayur dan tidak pernah pindah dari Dusun Soeares. Ia mulai bekerja membantu orang tuanya berkebun sejak usia 13 tahun. Saat ia berusia 15 tahun, Robertus mulai mencari kayu bakar untuk dijual. Pada 1975, Robertus mulai menanam sayur dan menjualnya di Pasar Atambua. Kini ia tidak perlu berjualan sendiri karena ada tengkulak dari Kefamanu dan So'e yang datang membeli sayurannya. Kesejahteraan ekonomi Robertus meningkat karena hasil penjualan sayurannya dan karena sejak beberapa tahun terakhir ini seorang anak perempuannya bekerja di Malaysia. Anak ini bisa mengirim uang kepada orang tuanya dalam jumlah yang relatif besar.

Robertus aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ia terpilih sebagai wakil Dusun Soeares untuk menjadi hakim perdamaian desa (HPD)

Kalau pengalaman yang paling penting itu waktu saya menjadi hakim perdamaian desa (HPD). HPD itu dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan menjadi HPD itu saya bisa mendidik dan membantu masyarakat. Bisa memberikan ajaran-ajaran yang baik dan menjelaskan agar yang jelek-jelek dibuang saja. HPD itu bekerja jika ada masalah di dusun yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat dusun. Jika permasalahan tidak selesai, akan dibawa dan diselesaikan oleh HPD. Biasanya masalah tentang perkelahian, masalah perempuan, dan harta dalam suku. Dalam setahun biasanya terdapat 5 hingga 6 masalah/kasus. Saya menjadi HPD sejak 1999 sampai sekarang. Menjadi HPD tidak ada batasan karena itu pilihan masyarakat berdasarkan kepercayaan. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, masyarakat bisa mengusulkan untuk diganti.

Selain menjadi HPD, Robertus juga bisa membangun jaringan sosial di luar desa. Ia menjadi pendukung seorang politisi lokal. Sama dengan Marcus, jaringan sosial yang melewati batas desa ini menurut Robertus selain menaikkan status sosial juga dapat memberikan keuntungan ekonomi.

Kalau hubungan dengan tetangga atau teman yang paling penting itu dengan Martinus Edo. Dia adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hubungan ini ada pengaruhnya pada peningkatan kesejahteraan saya. Waktu Pemilu 1999 lalu, dia meminta saya untuk mencarikan dukungan dari masyarakat. Saya yang mencarikan dukungan pada dia. Setiap ada kegiatan saya dikasih uang. Pada saat dia jadi anggota Dewan, dia juga sering ke sini dan bantu-bantu saya dengan kasih uang dan beras. Dia orangnya baik sama saya. Saya dulu pada Pemilu 2004 juga mencalonkan diri menjadi calon legislatif, tapi karena saya pendidikan kurang, saya tidak lolos. Tapi saya tetap diminta untuk menghimpun suara dan mencari dukungan masyarakat.

6.2.2 Komponen-Komponen Agensi Kolektif

Seperti yang telah disebut sebelumnya, agensi tidak hanya terdapat pada tingkat individual melainkan juga pada tingkat kolektif. Secara umum dapat disebutkan bahwa agensi pada tingkat individual perlu didukung oleh aset dan kemampuan yang lebih luas (kolektif) agar dapat memiliki pengaruh dan kekuatan dalam melindungi kepentingannya, misalnya pada saat melakukan negosiasi dan kontrol. Agensi kolektif itu terwujud dalam kemampuan kelompok untuk berorganisasi, merepresentasikan diri, serta untuk menyuarakan pendapat, kepentingan, dan identitasnya. Agensi kolektif ini khususnya penting bagi kelompok yang terpinggirkan seperti kelompok miskin karena tanpa agensi kolektif, kapasitas individual tidak bisa berfungsi secara optimal (Narayan *et al.* 2000).

Di kelima komunitas terdapat berbagai organisasi yang beranggotakan warga dan bertujuan untuk menggalang kemampuan bersama. Organisasi-organisasi tersebut ada yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat (misalnya organisasi keagamaan seperti kelompok doa dan organisasi berdasarkan etnisitas) dan ada yang pembentukannya didorong oleh program-program pembangunan (misalnya organisasi yang terkait dengan mata pencaharian, antara lain, kelompok petani sayur, kelompok petani peternak, dan kelompok pengguna air). Masyarakat juga menyebutkan pentingnya hubungan sosial dengan warga desa yang sama-sama menjadi anggota kelompok mata pencaharian. Di Desa Korinus misalnya, kelompok tani Punu melaksanakan kegiatan seperti kerja bergilir di mana para petani saling membantu, misalnya, untuk membersihkan lahan dan memetik hasil panen secara bergantian sehingga pekerjaan cepat selesai. Selain itu, melalui

kelompok tani Punu, warga petani juga bisa membeli bibit. Seorang petani di Korinus menjelaskan manfaat menjadi anggota kelompok tani:

Saya ikut kelompok tanam sayur, sejak tahun 2000. Satu kelompok saya beranggotakan sepuluh orang. Kebun yang kami kerjakan kebun Farlan, karena dekat dengan sumber air. Secara bergiliran dari kami menjual hasil panen sayur ke Pasar Mikel atau Ika, kemudian hasilnya itu kami bagi rata dengan sepuluh orang. Kami semua saling percaya, karena semua yang ada di sini itu adalah saudara. Kelompok tanam sayur ini sangat membantu karena saya jadi bisa ikut tanam sayur. Kebun saya sendiri tidak bisa ditanami sayur karena letaknya jauh dari sumber air. Dulu memang saya tidak tahu cara menanam sayur, tetapi setelah dibentuk kelompok, dan saya diajak jadi anggota, lalu diajari cara tanam sayur, saya jadi tambah pengetahuan. (Sejarah hidup, laki-laki, 38)

Di kelima komunitas, pada 2006, lebih banyak orang yang ikut organisasi (86%) daripada sepuluh tahun sebelumnya (72%).

Tabel 18. Partisipasi Masyarakat dalam Berbagai Tipe Organisasi menurut Kelompok Transisi–2006 (%)

Kelompok Transisi	Tipe Organisasi						
	Ekonomi	Kredit	Kesehatan	Politik	Agama	Etnis	Lainnya
<i>Poor</i>	43	3	0	0	51	3	0
<i>Mover</i>	40	8	0	0	50	0	2
<i>Faller</i>	35	6	0	0	59	0	0
<i>Rich</i>	27	0	5	2	61	5	0

Dari Tabel 18, tampak bahwa umumnya warga menjadi anggota organisasi keagamaan, organisasi ekonomi, dan kredit. Selain itu, data survei juga menunjukkan bahwa sepuluh tahun yang lalu (1996) sekitar 59% dari warga di kelima komunitas berpartisipasi dalam organisasi di bidang keagamaan dan 30% dalam organisasi ekonomi. Pada 2006, 54% mengikuti organisasi keagamaan dan 37% organisasi ekonomi. Jadi sekarang makin banyak warga yang berpartisipasi dalam organisasi ekonomi. Kelompok *poor* dan *mover* lebih banyak mengikuti organisasi ekonomi daripada kelompok transisi lain. Namun, apakah ini juga berarti organisasi ekonomi makin penting bagi kesejahteraan warga?

Dalam studinya tentang empat organisasi besar yang bertujuan meningkatkan potensi bisnis masyarakat miskin di India, Narayan *et al.* (2000) berargumentasi bahwa masyarakat miskin dapat ikut memanfaatkan pasar melalui agregasi (menyatukan potensi baik dalam bentuk penawaran maupun permintaan dalam jumlah besar). Inilah yang dilihat sebagai agensi kolektif. Namun, keempat organisasi yang dipelajari memang organisasi pada skala nasional dengan jumlah anggota hingga jutaan orang. Berbagai organisasi masyarakat yang terdapat di Timor Barat, khususnya yang beranggotakan masyarakat miskin, belum ada yang mencapai skala itu. Kelompok-kelompok tani dan keagamaan yang disebutkan di atas adalah kelompok-kelompok yang sangat kecil dengan aksi yang sangat lokal (di komunitas tertentu). Masyarakat menyebutkan bahwa mereka merasa terbantu oleh berbagai kegiatan kelompok-kelompok tani dan keagamaan itu—misalnya dalam

melakukan mata pencaharian—tetapi manfaatnya masih sangat terbatas. Kegiatan kelompok tani dan keagamaan di lima komunitas dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kepercayaan di antara para warga, tetapi belum bisa secara substansial meningkatkan kekuatan ekonomi mereka. Jadi agensi kolektif yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tani dan keagamaan belum bisa memfasilitasi apa yang disebut Narayan sebagai “liberalisasi dari bawah” (*liberalization from below*) dan mendorong penciptaan kekayaan bagi masyarakat miskin secara lebih luas (*creating wealth for the poor*).

6.3 Agensi Individual dan Upaya Keluar dari Kemiskinan

Jika membandingkan agensi individual dari keempat kelompok transisi, dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok *mover* dan *always rich* memiliki agensi yang lebih besar dan bervariasi daripada kelompok lainnya. Walaupun tidak berlaku di setiap komunitas, tetapi kedua kelompok ini memiliki faktor-faktor penunjang yang lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Jika dipilah lebih lanjut, maka bisa dilihat bahwa karakteristik agensi di Lay, Malo, dan Beluta, pada umumnya hampir sama, yaitu kelompok *mover* dan *always rich* di desa-desa ini memang memiliki agensi yang lebih besar.

Sementara itu, pengecualian ditemukan di Desa Korinus. Di desa ini, hampir setiap kelompok transisi memiliki karakteristik yang hampir sama—yaitu pendidikan formal tidak menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan seseorang. Hampir setiap orang mendapatkan warisan, bahkan untuk kelompok *faller* dan *chronic poor* pun mendapatkan warisan. Hampir semua informan di setiap kelompok transisi memiliki kartu sehat, mulai dari kelompok *chronic poor* sampai *always rich*, dengan sistem bagi rata karena desa ini merupakan desa percontohan. Apa yang juga menarik dari desa ini adalah walaupun sebagian masyarakat termasuk dalam kelompok *chronic poor*, tetapi kenyataannya, kondisi kelompok ini masih jauh lebih baik daripada kelompok yang sama di komunitas yang lain, setidaknya dari penuturan mereka tentang perubahan kondisi kesejahteraan/kehidupan mereka. Dalam kondisi setiap kelompok transisi memiliki agensi yang hampir sama dan juga mendapatkan kesempatan yang sama, maka yang menyebabkan seseorang bisa jatuh miskin adalah kondisi kesehatan dan tenaga yang makin berkurang.

Karakteristik agensi yang berbeda juga ditemukan di Desa Eki. Di desa ini, hampir seluruh *mover* adalah migran yang berasal dari luar Kabupaten Kupang, di antaranya berasal dari Jawa. Status *migran* yang disandang oleh kelompok ini terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu tingginya mobilitas horisontal-geografis yang mereka lakukan dalam upaya mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengalaman migrasi tersebut ternyata berdampak positif dalam kehidupan mereka, variasi pengetahuan, dan keterampilan berusaha yang mereka miliki pada umumnya jauh lebih banyak daripada kelompok lainnya. Dilihat dari tingkat pendidikan, walaupun ada *mover* yang tidak sekolah, tetapi sebagian besar dari mereka menamatkan pendidikan menengah, SMP/SMA, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Walaupun hubungan mereka yang paling dekat dan penting adalah tetap dengan keluarga inti, tetapi sudah punya hubungan sosial lain yang lebih luas dan cukup bermanfaat, misalnya saling bertukar informasi dengan petani dari desa tetangga. Keaktifan mereka juga lebih tinggi dalam organisasi sosial seperti simpan pinjam, kelompok tani, dan kelompok kesukuan.

VII. Memahami Aspek Gender dan Mobilitas Sosial Melalui Analisis Kepala Rumah Tangga

7.1 Aspek Gender, Analisis Kepala Rumah Tangga, dan Kemiskinan

7.1.1 Gender dan Kemiskinan

Konsep gender mengacu pada hal-hal yang lebih luas dan kompleks daripada sekadar perbedaan jenis kelamin (laki-laki–perempuan) serta kajian tentang perempuan. Konsep ini berusaha mengangkat berbagai perbedaan yang dikaitkan dengan bagaimana berperan dan berperilaku sebagai laki-laki dan perempuan baik di ranah publik maupun ranah domestik, dalam suatu konteks sosial, ekonomi, politik, dan kultural tertentu. Perbedaan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk (misalnya dalam norma, aturan, hukum, atribut feminitas dan maskulinitas, pola perilaku, hubungan kekuasaan, mekanisme penghargaan dan penghukuman, serta kebijakan pemerintah), dilakukan dengan berbagai cara (sangat ketat, lebih longgar), dan diterapkan oleh berbagai institusi sosial (keluarga inti, kekerabatan yang lebih luas, komunitas/masyarakat adat, pasar tenaga kerja, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan).

Perbedaan jenis kelamin ditentukan secara biologis, tapi perbedaan berdasarkan gender dilihat sebagai suatu konstruksi sosial. Ini berarti bahwa perbedaan gender tidak universal, tetapi bervariasi sesuai dengan konteks yang ada.

a) Mengapa Aspek Gender Penting dalam Analisis Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan?

Keterkaitan antara aspek gender dan kemiskinan adalah kompleks dan kontroversial. Sekalipun sudah banyak studi dan perdebatan tentang hal tersebut, masih banyak kesulitan untuk memahaminya. Kesulitan-kesulitan ini disebabkan oleh beragamnya bentuk ketidaksetaraan gender dan kemiskinan sesuai dengan konteks ekonomi, sosial, dan ideologis yang ada, serta kurangnya data yang memadai/sesuai untuk menganalisis perbedaan gender.

Aspek gender penting dalam analisis kemiskinan karena beberapa alasan berikut.

(1) Besar dan parahnya kemiskinan di antara perempuan

Berbagai literatur kemiskinan berargumen bahwa perempuan cenderung lebih terpuruk dalam kemiskinan daripada laki-laki. Dalam perdebatan ini muncul konsep feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) yang mengandung berbagai pemikiran, antara lain,

- (a) kemiskinan lebih sering dialami oleh perempuan daripada oleh laki-laki;

- (b) kemiskinan di antara perempuan lebih parah daripada kemiskinan di antara laki-laki; dan
 - (c) dari waktu ke waktu, jumlah perempuan yang terpuruk dalam kemiskinan meningkat dibanding laki-laki.
- (2) Ketidaksetaraan dalam akses dan penguasaan terhadap pendapatan, sumber daya, dan aset
 - (3) Ketidaksetaraan dalam akses terhadap berbagai fasilitas (publik) seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kredit
 - (4) Bias pada pembagian kerja dan bursa tenaga kerja
 - (a) Partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun perempuan bekerja, upah yang diterima kadang lebih rendah daripada upah yang diterima laki-laki, misalnya, pada buruh tani tenaga kerja perempuan cenderung mendapat upah lebih rendah daripada laki-laki karena jenis pekerjaan perempuan dianggap lebih ringan. Selain itu, jam kerja perempuan juga lebih pendek (akibatnya upah juga lebih sedikit) karena mereka harus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.
 - (b) Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam keluarga, sering menuntut waktu dan tenaga perempuan yang lebih besar karena perempuan umumnya lebih dibebani oleh tugas-tugas reproduktif/perawatan tanpa upah. Selain itu, perempuan biasanya harus mengombinasikan tugas-tugas perawatan dengan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.
 - (c) Sering kali tugas-tugas reproduktif perempuan (misalnya, pemeliharaan anak dan rumah) tidak diambil alih oleh laki-laki, sekalipun saat itu laki-laki sedang tidak bekerja.
 - (d) Akibat pembagian kerja seperti ini, perempuan sering memiliki jam dan beban kerja yang lebih tinggi sehingga mereka mengalami kemiskinan waktu (*time poverty*) dan kesempatan yang lebih terbatas untuk melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan upah.
 - (e) Perempuan cenderung bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak tetap, kondisi kerja yang buruk serta tanpa perlindungan sosial apa pun (karena pekerjaan-pekerjaan di sektor ini lebih mudah dikombinasikan dengan tugas-tugas reproduktif).
 - (f) Perempuan juga sering tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk memilih bekerja atau tidak. Mereka yang sudah bekerja pun sering berhenti jika suami melarang/meminta berhenti bekerja.

7.1.2 Beberapa Aspek Hubungan Gender di Timor Barat

Sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Timur—termasuk di Timor Barat—menganut sistem patriarkat di mana bapak memiliki kekuasaan yang terbesar dalam keluarga dan laki-laki memiliki status sosial yang lebih tinggi, peran yang lebih penting, serta kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pemberian warisan juga melalui garis keluarga bapak. Perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan gender dalam sistem patriarkat dapat menempatkan perempuan dalam

posisi yang dirugikan karena, antara lain, hak yang lebih sedikit terhadap sumber daya (misalnya tanah pertanian), kewajiban yang lebih besar dalam melakukan tugas-tugas produksi dan reproduksi, dan posisi yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat.

Dalam berbagai forum diskusi kelompok perempuan menyebutkan bahwa perempuan memiliki kebebasan lebih kecil daripada laki-laki karena pekerjaan perempuan lebih banyak. "Mama lebih berat kerjanya, Mama punya pekerjaan rumah, mengurus anak, bantu suami ambil air untuk kebun, dan jualan di pasar. Kalau bapak pulang kebun bisa istirahat" (FGD Beluta, perempuan, 44).

Selain itu, disebutkan juga bahwa perempuan harus minta izin pada suaminya jika hendak bepergian, sebaliknya suami tidak harus minta izin pada istrinya. Dalam Bab V telah disebutkan bahwa sekalipun akses untuk berpartisipasi dalam politik telah membaik di kelima desa yang diteliti, partisipasi tersebut masih berbias gender karena yang umumnya berpartisipasi adalah warga laki-laki dewasa, sedangkan partisipasi warga perempuan masih terbatas. Umumnya hanya laki-laki dewasa yang terlibat dalam pertemuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi masyarakat. Selanjutnya, para perempuan tinggal mengikuti keputusan yang diambil. "Pokoknya bapak-bapak yang umumnya ikut sidang di desa, kalau sudah diomong (dibicarakan) waktu sidang itu kami mama-mama ikut sudah, kalau pemerintah omong kami ikut juga" (FGD Beluta, perempuan, 44).

Dalam sebuah studi tentang peran laki-laki dalam pengambilan keputusan menyangkut kesehatan reproduksi perempuan (khususnya partisipasi dalam Program Keluarga Berencana), disimpulkan bahwa dalam tradisi perkawinan di Timor Barat, kewajiban pihak laki-laki untuk membayar *belis* atau mas kawin kepada keluarga perempuan, memiliki korelasi kuat dengan besarnya kekuasaan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Lebih jauh, *belis* yang oleh sebagian orang diartikan sebagai "suami membeli istrinya secara lunas/putus", juga dikaitkan dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Jika *belis* belum dibayar lunas, kekerasan bisa timbul karena suami merasa ditekan oleh keluarga istri untuk melunasinya. Selain itu, untuk melunasi utang *belis*, para suami juga terpaksa merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, para laki-laki yang meninggalkan keluarga itu tidak selalu mengirim uang dan bisa menabung, akibatnya keluarga yang ditinggalkan di desa jadi terlantar (Setyawan 2004; Octora 2006).

7.1.3 Analisis Kepala Rumah Tangga

Di atas telah diuraikan tentang berbagai pemikiran yang menggarisbawahi bahwa aspek gender perlu dimasukkan dalam analisis kemiskinan karena kemiskinan lebih sering menjerat perempuan daripada laki-laki dan umumnya kemiskinan yang dialami perempuan lebih parah daripada yang dialami laki-laki. Diskriminasi dalam hubungan gender membuat perempuan lebih sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluar dari kemiskinan.

Salah satu yang menjadi fokus kajian ini adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (selanjutnya disebut sebagai RTP). Temuan berbagai studi memberi jawaban

yang berbeda tentang apakah rumah tangga RTP lebih rentan terhadap kemiskinan daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (selanjutnya disebut RTL) (Dreze 1990; Dreze dan Srinivasan 1997; Hetler 1990; Oey-Gardiner dan Surbakti 1991; Fuwa 1999; Marianti 2002). Ini karena RTP merupakan kategori yang heterogen. Ada berbagai alasan mengapa perempuan menjadi kepala rumah tangga (misalnya karena kematian suami, perceraian, migrasi, tidak ada anggota keluarga laki-laki yang bisa menjadi kepala rumah tangga). Masing-masing alasan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam bab ini dilakukan analisis kepala rumah tangga yang bertujuan untuk menelusuri sejauh mana ciri-ciri rumah tangga RTP berbeda dengan rumah tangga RTL. Perbedaan ciri-ciri (termasuk tingkat kesejahteraan) antara RTP dan RTL diharapkan bisa menunjukkan perbedaan peluang/potensi yang dimiliki atau hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang terkait dengan perbedaan berdasarkan gender. Dengan demikian, tujuan bab ini lebih luas daripada hanya untuk mengkaji apakah RTP lebih banyak terperangkap dalam kemiskinan daripada RTL.

7.2 Profil Demografis Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) dan Laki-Laki Kepala Rumah Tangga (LKRT)

Di kelima desa penelitian, sekitar seperlima dari seluruh rumah tangga yang disurvei pada 2006 adalah RTP. Sebagian besar (57%) berada dalam kelompok miskin atau yang menurun kesejahteraannya, sedangkan pada RTL hanya 30%. Salah satu perbedaan mencolok antara RTP dan RTL adalah pada golongan yang menurun kesejahteraannya (*faller*). Jumlah RTP yang menurun kesejahteraannya tiga kali lipat dari jumlah RTL di kelompok yang sama. Tampaknya, di lima desa penelitian, tingkat kesejahteraan RTP secara umum lebih rendah daripada RTL. Tabel 19 menunjukkan proporsi RTP dan RTL di empat kelompok kesejahteraan.

Tabel 19. Kondisi Kesejahteraan Rumah Tangga Perempuan dan Rumah Tangga Laki-laki (2006)

Jenis rumah tangga	Kondisi/tingkat kesejahteraan (%)			
	Kaya (<i>rich</i>)	Meningkat kesejahteraannya (<i>mover</i>)	Miskin (<i>chronic poor</i>)	Menurun kesejahteraannya (<i>faller</i>)
RTP	17	27	30	27
RTL	27	43	21	9

Usia perempuan kepala rumah tangga (selanjutnya disebut sebagai PKRT), mayoritas lebih tua daripada usia laki-laki kepala rumah tangga (selanjutnya disebut LKRT). Sejumlah 27% dari PKRT berusia antara 50–60 tahun dan 33% di atas 60 tahun. Untuk LKRT, 24% berusia 50–60 tahun dan hanya 14% di atas 60 tahun. Ini berarti PKRT memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami masalah lanjut usia (penuaan) yang bisa menurunkan kondisi ekonomi (misalnya menurunnya kemampuan untuk bekerja dan

memburuknya kondisi kesehatan) daripada LKRT. Selain itu, tingginya usia PKRT menunjukkan kemungkinan yang lebih kecil untuk menikah lagi sebagai strategi meningkatkan kesehatannya.

Sebagian besar (70%) dari PKRT adalah janda mati, 10% adalah janda cerai dan 20% berstatus menikah. Sebaliknya, 94% dari LKRT berstatus menikah dan hanya 2% yang berstatus duda cerai atau duda mati. Ini berarti mayoritas perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dapat digolongkan sebagai PKRT *de jure* karena mereka menjadi kepala rumah tangga sesuai dengan status hukumnya sebagai janda (mati atau cerai). Para perempuan yang berstatus hukum menikah tetapi menjadi kepala rumah tangga digolongkan sebagai PKRT *de facto*, karena secara hukum suami mereka yang menjadi kepala rumah tangga, tetapi dalam praktik sehari-harinya para suami ini tidak ada (misalnya karena bermigrasi) sehingga istri yang berperan sebagai kepala rumah tangga (Hetler 1990).

Dari tingkat pendidikan juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki kepala rumah tangga. Sebanyak 50% dari PKRT buta huruf dan tidak pernah sekolah, sementara di antara LKRT hanya 16%. Sebanyak 36% PKRT mengenyam pendidikan dasar, sedangkan PKRT mencapai 51%. Hanya 10% dari PKRT mendapat pendidikan lanjutan (SMP, SMU, dan sekolah kejuruan), sedangkan LKRT mencapai 37%. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa secara umum PKRT di lima komunitas yang diteliti memiliki pendidikan yang lebih rendah daripada LKRT.

7.3 Kondisi Ekonomi

Umumnya PKRT (73%) maupun LKRT (81%) bekerja untuk usaha sendiri. Ini sesuai dengan kondisi desa di mana mayoritas warga mengerjakan lahan pertaniannya. Namun, proporsi PKRT yang bekerja dengan gaji bulanan lebih kecil daripada LKRT. Selain itu, PKRT yang tidak bekerja mencapai 20%, sedangkan LKRT hanya 1%. Lebih besarnya proporsi perempuan kepala rumah tangga yang tidak bekerja bisa terkait dengan usia mereka yang mayoritas lebih tua daripada laki-laki kepala rumah tangga. Sebagai lansia banyak di antara PKRT tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja. Jika tidak ada anggota keluarga yang menjadi pengganti sebagai pencari nafkah, maka rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lansia memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan keuangan.

Mayoritas PKRT (73%) dan LKRT (78%) bekerja di sektor pertanian. Hal ini bisa diperkirakan sebelumnya karena menjadi petani adalah mata pencaharian utama warga di semua desa yang diteliti. Menarik untuk dicatat bahwa proporsi PKRT yang memiliki pekerjaan utama di sektor perdagangan sedikit lebih besar daripada LKRT. Sebaliknya, proporsi PKRT yang bekerja sebagai pegawai negeri lebih kecil daripada LKRT.

Sumber-sumber pendapatan PKRT dan LKRT menunjukkan pola yang sangat mirip. Mayoritas dari kedua kategori memiliki sumber pendapatan dari menjual hasil panen dan ternak. Sebagian besar (lebih dari 75%) dari kedua kategori itu tidak memiliki sumber pendapatan dari usaha nonpertanian. Menarik untuk dicatat bahwa proporsi PKRT yang mendapat uang kiriman anggota rumah tangga yang bekerja lebih besar (27%) daripada

LKRT (17%). Hal ini bisa terkait dengan faktor-faktor seperti usia PKRT yang lebih tua dan tidak lagi bekerja sehingga harus ada anggota keluarga yang menggantikannya sebagai pencari nafkah. Selain itu, dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan terdapat lebih banyak anggota keluarga yang sudah berusia produktif (sudah bekerja).

Sama dengan sumber-sumber pendapatan, dari segi kepemilikan aset PKRT dan LKRT memiliki pola yang serupa. Mayoritas dari PKRT (90%) dan LKRT (86%) tidak memiliki lahan beririgasi. Sekitar separuh dari kedua tipe rumah tangga (53–54%) memiliki lahan antara 0,1–1 ha. Namun, proporsi PKRT yang mempunyai lahan di atas 1 ha lebih sedikit (10%) daripada LKRT yang memiliki aset yang sama (19%).

Kedua tipe rumah tangga menunjukkan pola yang agak berbeda dalam hal kepemilikan rumah dan sapi. Proporsi PKRT yang memiliki rumah lebih tinggi (97%) daripada LKRT (86%). Sebaliknya, proporsi PKRT yang tidak memiliki sapi jauh lebih besar (77%) daripada LKRT (58%). Jumlah sapi yang dimiliki baik PKRT maupun LKRT umumnya berkisar antara satu hingga lima ekor. Tidak ada PKRT yang memiliki sapi lebih dari 20 ekor, tetapi ada 2% LKRT yang memiliki sapi dalam jumlah tersebut.

7.4 Hubungan Sosial

7.4.1 Akses terhadap Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, warga desa memiliki beberapa pengeluaran tetap, yaitu pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk memenuhi berbagai kewajiban adat dan untuk modal kerja. Jika pendapatan tidak mencukupi untuk menutup biaya pengeluaran itu, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan mencari dan mendapatkan pinjaman. Sekalipun demikian, tidak semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman. Sebanyak 23% PKRT dan 35% LKRT mendapat pinjaman untuk menutup pengeluaran konsumsi sehari-hari. Ini berarti sebagian besar dari mereka tidak mempunyai akses untuk mendapat kredit guna memenuhi konsumsi sehari-hari. Secara umum, saudara/keluarga merupakan sumber pinjaman/kredit yang paling penting. PKRT (57%) lebih banyak meminjam kepada saudara untuk konsumsi sehari-hari daripada LKRT (31%). Selain itu, asosiasi atau kelompok simpan pinjam dan bank pemerintah merupakan sumber kredit bagi kedua tipe rumah tangga. Menarik untuk dicatat bahwa 13% dari LKRT menyebutkan bahwa mereka juga meminjam pada teman untuk menutup kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak ada PKRT yang melakukan hal itu.

Salah satu ciri utama masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Timor Barat adalah masih kuatnya pelaksanaan berbagai kegiatan adat yang mewajibkan masyarakat untuk membayar berbagai keperluan, misalnya pembayaran mas kawin atau *belis*, sumbangan perkawinan, sumbangan kematian, dan pembayaran denda. Berbagai kewajiban adat tersebut bisa sangat mahal. Untuk acara kematian, misalnya, keluarga yang berduka harus menjamu para tamu dan untuk itu harus memotong sapi atau babi yang bisa mencapai harga lebih dari Rp750.000. Untuk adat perkawinan, *belis* yang harus dibayar umumnya bernilai Rp5.000.000 sampai puluhan juta rupiah, tergantung kebiasaan etnis tertentu dan status sosial calon pengantin perempuan. Dalam berbagai forum diskusi dan wawancara, warga desa sering mengeluhkan beban finansial karena kewajiban adat. Untuk

memenuhinya, tak jarang mereka harus mencari pinjaman karena tidak ada dana dan aset yang mencukupi. Lebih dari separuh PKRT (50%) dan LKRT (54%) mencari pinjaman pada saudara untuk membiayai acara adat yang penting. Selain itu, mereka juga mencari pinjaman pada teman dan bank pemerintah. Sekalipun demikian, hanya sepertiga rumah tangga yang mendapat pinjaman untuk acara adat. Kedua tipe rumah tangga menunjukkan pola yang sama.

Sekitar 80% rumah tangga memiliki usaha di sektor pertanian. Untuk mendapat pinjaman modal kerja, PKRT dan LKRT menunjukkan pola yang berbeda. PKRT cenderung mencari kredit modal kerja pada bank pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sedangkan LKRT cenderung mencari kredit pada asosiasi/kelompok simpan pinjam, bank pemerintah, dan teman. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah PKRT secara umum memiliki akses lebih kecil daripada LKRT dalam mendapatkan kredit usaha pertanian. Hanya 8% dari PKRT mendapat kredit tersebut, sedangkan di antara LKRT proporsi penerima kredit mencapai 18%.

7.4.2 Akses terhadap Informasi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu mata pencaharian utama warga di lima desa yang diteliti adalah di sektor pertanian. Dalam menjalankan mata pencaharian ini, petani memerlukan berbagai informasi secara berkala seperti informasi tentang harga hasil pertanian, harga input (pupuk, bibit, pestisida, dll.), dan tempat pemasaran (termasuk hubungan dengan tengkulak). Baik PKRT maupun LKRT memiliki pola yang sama untuk mendapatkan informasi yang berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka. Sebanyak 40% PKRT dan 47% LKRT mencari informasi kepada saudara, teman, dan tetangga. Selain itu, 40% PKRT dan 23% LKRT mencari informasi ke pasar setempat. Hal yang menarik adalah adanya 13% LKRT yang mendapatkan informasi tentang sektor pertanian dari radio, sebaliknya tidak ada seorang PKRT pun yang melakukan hal ini. Proporsi PKRT yang menyatakan sulit mendapat informasi lebih banyak (30%) daripada LKRT (23%). Namun, secara umum sebagian besar rumah tangga (lebih dari 70%) menyatakan bahwa informasi tentang usaha pertanian sangat mudah atau mudah didapat.

7.4.3 Kepercayaan dan Partisipasi

Untuk menjadi bagian dari masyarakat, menjalankan hubungan sosial dan melaksanakan fungsi kemasyarakatannya, warga memerlukan tingkat kepercayaan tertentu baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Selain itu, penting untuk memiliki peluang berpartisipasi di berbagai kegiatan sosial dalam komunitasnya. Dari segi kepercayaan terhadap kemampuan untuk mengontrol keputusan pribadi tampak bahwa lebih banyak LKRT (61%) yang percaya bahwa mereka mampu mengontrol semua/hampir semua keputusan pribadinya, daripada PKRT (43%). Sejumlah 43% dari PKRT menyebutkan bahwa mereka hanya bisa mengontrol sebagian dari keputusan pribadi mereka, sedangkan di antara LKRT sebanyak 31%. Untuk kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya, baik PKRT maupun LKRT menunjukkan pola yang sama. Sejumlah 87% dari PKRT mengatakan bahwa mereka harus waspada agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sedangkan pada LKRT sebanyak 78%. Sekalipun demikian, sebagian besar dari rumah tangga percaya bahwa orang lain (saudara, teman, tetangga) akan membantu jika

mereka membutuhkan bantuan. Dalam praktiknya, lebih banyak PKRT (30%) yang tidak pernah berpartisipasi dalam acara gotong-royong di komunitas mereka daripada LKRT (8%).

Untuk partisipasi dalam politik lokal, PKRT dan LKRT menunjukkan pola yang berbeda. Sebanyak 57% PKRT pernah ikut dalam acara pertemuan warga, sebaliknya 75% LKRT ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dari pertemuan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) makin tampak bahwa politik lokal merupakan ranah publik yang didominasi oleh laki-laki. Hanya 7% PKRT yang pernah ikut pertemuan dengan BPD, sedangkan proporsi LKRT yang ikut pertemuan BPD mencapai 55%.

7.5 Analisis Kepala Rumah Tangga dan Mobilitas Sosial

Dalam bagian ini akan diidentifikasi dan dibandingkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas sosial (naik, turun, atau stagnan) dua tipe rumah tangga. Berbagai faktor ini dapat memberi gambaran masalah-masalah apakah yang dihadapi oleh kedua tipe rumah tangga, termasuk apakah masalah tersebut sama atau berbeda.

Tabel 20. Faktor Utama Penyebab Naiknya Kesejahteraan

NO	LKRT	%	PKRT	%
1	Pekerjaan sama, tetapi pendapatan meningkat	40	Pekerjaan sama, tetapi pendapatan meningkat	33
2	Bekerja keras	15	Usaha baru yang lebih baik	17
3	Anak selesai sekolah/dapat kerja	8	Bekerja keras	17
4	Diversifikasi pendapatan	8	Anak selesai sekolah/dapat kerja	8
5	Berbagai faktor lain	29	Berbagai faktor lain	25

Faktor-faktor utama yang dianggap bisa menaikkan kesejahteraan bagi PKRT maupun LKRT relatif sama. Semua faktor tersebut terkait dengan kerja, pendapatan, dan pengurangan beban finansial.

Tabel 21. Faktor Utama Penyebab Turunnya Kesejahteraan

NO	LKRT	%	PKRT	%
1	Perekonomian memburuk	21	Kematian pencari nafkah dalam keluarga	86
2	Kematian hewan ternak	16	Perceraian/ perpisahan	14
3	Menjadi tua	16		
4	Menikah (lagi)	11		
5	Berbagai faktor lain	36		

Namun, untuk faktor-faktor utama yang bisa menurunkan kesejahteraan. PKRT dan LKRT memiliki persepsi dan pengalaman yang berbeda. Bagi PKRT, jelas bahwa berakhirnya perkawinan baik karena kematian maupun perceraian merupakan faktor yang sangat penting yang menyebabkan turunnya kesejahteraan. Bagi LKRT, faktor-faktor negatif tersebut lebih bervariasi.

Tabel 22. Faktor Utama Penyebab Stagnasi Kesejahteraan

NO	LKRT	%	PKRT	%
1	Kerja tidak pasti/ tetap	29	Menjadi tua	36
2	Kurang pendidikan	9	Kerja tidak pasti/tetap	18
3	Kematian anggota keluarga	9	Kematian anggota keluarga	18
4	Banyak anggota keluarga yang belum/ tidak mandiri	7	Kurang pendidikan	9
5	Menjadi tua	7	Tidak bekerja	9
6	Lain-lain	39	Biaya kesehatan yang besar	9

Untuk faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi kesejahteraan rumah tangga, lebih banyak PKRT menyebut penuaan sebagai faktor terpenting dibanding dengan LKRT. Ini terkait dengan usia PKRT yang rata-rata lebih tua daripada LKRT sehingga masalah lanjut usia lebih relevan bagi PKRT. Terkait dengan usia PKRT yang lebih tua, kelompok ini juga menyebut biaya kesehatan yang besar dan tidak bekerja sebagai salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi kesejahteraan. Berbeda dengan PKRT, LKRT menyebut beban untuk memelihara anggota keluarga yang belum mandiri sebagai salah satu penyebab mandeknya kesejahteraan. Dengan usia yang lebih muda, lebih besar kemungkinan bagi kelompok LKRT untuk memiliki anggota keluarga (anak) yang masih usia sekolah atau belum menikah.

Dari kajian-kajian di atas dapat disebutkan bahwa dalam berbagai hal rumah tangga yang dikepalai perempuan dan yang dikepalai laki-laki memiliki persamaan. Beberapa perbedaan yang perlu dicatat adalah banyaknya lansia di antara PKRT. Ini membuat rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan yang tidak dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Hambatan ini tampak dalam identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas. Perbedaan lain yang mencolok antara PKRT dan LKRT adalah tingkat partisipasi dalam politik lokal. Secara umum perempuan memiliki peran yang lebih kecil dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Sekalipun demikian, tampaknya perbedaan ini kurang—atau bahkan tidak berpengaruh—dalam mobilitas sosial rumah tangga. Tidak ada PKRT maupun LKRT yang mengidentifikasi partisipasi dalam politik lokal sebagai salah satu faktor utama yang relevan bagi perubahan kesejahteraan mereka.

VIII. Interaksi Antarfaktor: Apa Saja Jalan Keluar dari Kemiskinan?

Mobilitas sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor struktural dan faktor agensi (baik secara individual maupun secara kolektif). Pola interaksi yang terjalin antara kedua faktor tersebut bisa membawa hasil yang berbeda-beda, yaitu ada sekelompok orang dalam satu waktu tertentu bisa keluar dari kemiskinan. Namun, ada pula yang justru jatuh miskin. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bab ini secara khusus melihat mobilitas sosial ekonomi pada empat kelompok transisi, yaitu bagaimana suatu kelompok pada kurun waktu tertentu bisa keluar dari kemiskinan (*mover*), sementara pada kurun waktu yang bersamaan, sekelompok orang bisa jatuh dalam kemiskinan (*faller*). Juga akan dilihat bagaimana upaya yang dilakukan sekelompok orang dalam mempertahankan kesejahteraannya (*always rich/never poor*), sementara di lain pihak, ada kelompok lain yang terjebak atau tidak mampu keluar dari kemiskinan (*chronic poor*).

Bagian ini akan membahas persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat untuk setiap kelompok transisi. Pembahasan tentang kelompok *mover* dan *faller* tergabung dalam satu bagian, sebab menarik untuk dilihat bagaimana dalam kurun waktu tertentu ada kelompok yang mengalami mobilitas naik (*upward mobility*) sementara kelompok lain justru mengalami mobilitas turun (*downward mobility*). Pembahasan mengenai kelompok *always rich* dan *chronic poor* juga akan digabung dalam satu bagian. Dalam setiap pembahasan akan dilihat bagaimana interaksi yang terjalin antara faktor struktural dan agensi untuk setiap komunitas.

8.1 Mobilitas Sosial-Ekonomi: Pengalaman Keluar dari Kemiskinan dan Penyebab Jatuh Miskin

8.1.1 Upaya Keluar dari Kemiskinan

Dalam studi ini kelompok yang berhasil keluar dari kemiskinan (melewati garis kemiskinan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam forum diskusi) disebut dengan kelompok *mover*. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab VI, beberapa perbedaan dan persamaan pada kelompok ini ditemukan antarkomunitas, baik menyangkut karakteristik kelompok, faktor-faktor yang mendorong keluar dari kemiskinan, dan waktu/titik balik seseorang (kelompok ini) mengalami perubahan pada kondisi kesejahteraannya.

Berbagai sumber data menunjukkan bahwa secara umum kelompok ini berhasil keluar dari kemiskinan karena meningkatnya pendapatan. Hasil survei rumah tangga memperlihatkan 39% responden menyatakan hal ini. Sementara itu, dari hasil sejarah hidup individu diperoleh informasi mengenai mekanisme yang dilakukan oleh kelompok untuk keluar dari kemiskinan. Peningkatan pendapatan ini pada sebagian kelompok terjadi pada jenis pekerjaan yang sama, tetapi pada kelompok lain peningkatan

pendapatan disebabkan oleh diversifikasi usaha yang mereka lakukan. Pola diversifikasi usaha ini bermacam-macam. Pada masyarakat di Kabupaten TTS (Malo dan Korinus) dan Kabupaten Belu (Lay dan Beluta), diversifikasi usaha dilakukan pada sektor usaha yang sama, yaitu pertanian. Selain bertani padi, masyarakat (*mover*) juga menanam sayur-sayuran dan beternak sapi, babi, atau kambing. Hasil pertanian (padi dan sayur-sayuran) biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sementara hasil ternak digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Sebagian besar masyarakat memperlakukan hewan ternak sebagai bentuk tabungan yang digunakan jika ada kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan, biaya sekolah anak, dan keperluan adat. Namun, ada pula kelompok di komunitas lain yang memutarakan ternak tersebut dengan menjualnya dan hasilnya diinvestasikan kembali dalam bentuk hewan ternak lainnya. Di Eki (Kabupaten Kupang), diversifikasi usaha terjadi di luar sektor pertanian. Kelompok *mover* di Eki, selain bertani (padi dan sayur-sayuran) juga membuka usaha lain seperti berdagang (membuka kios, berdagang makanan, berjualan beras) atau membuka jasa persewaan (penggilingan padi, *freezer* untuk tempat penyimpanan ikan, dan usaha biliar). Posisi Eki yang berada di pinggir Kota Kupang menjadikan desa ini berkarakteristik semiurban, yang ditandai dengan mulai banyaknya usaha-usaha jasa/pelayanan di samping usaha pokok pertanian.

Selain diversifikasi usaha, peningkatan pendapatan terjadi karena adanya pengenalan bibit tanaman baru, baik oleh lembaga pemerintah dari dinas terkait maupun dari lembaga pendanaan lain, seperti yang terjadi di Desa Malo dan Desa Korinus. Pengenalan bibit bawang merah di Malo dan bibit buah-buahan, seperti jeruk, alpukat, dan kemiri, kepada para petani di Desa Korinus telah membuat sumber pendapatan mereka bertambah banyak sekaligus hasilnya bertambah baik.

Diversifikasi usaha serta pengenalan bibit baru ini tidak akan berdampak positif jika tidak ditunjang dengan adanya pasar bagi produk pertanian tersebut. Di Korinus, para petani menikmati keberhasilan usaha karena ada kepastian pasar bagi komoditas mereka. Di Beluta, perbaikan jalan dan penambahan sarana transportasi telah mempermudah proses penjualan sayur. Hal ini juga ditunjang dengan tingginya permintaan dan harga penawaran bagi komoditas sayur mereka yang telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kondisi kesejahteraan keluarga.

Faktor penunjang lainnya adalah adanya program bantuan yang diprakarsai oleh berbagai pihak seperti pemerintah, LSM lokal, dan lembaga dana asing. Bantuan tersebut berbentuk material yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian seperti bantuan bibit tanaman/hewan, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembuatan penampungan/bak air, dan bantuan yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga seperti Raskin, Kartu Sehat, BLT, dan bantuan pembuatan WC. Sementara itu, bantuan nonmaterial ada dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan mata pencaharian. Seperti yang disampaikan oleh beberapa orang informan di komunitas yang berbeda-beda, kehadiran bantuan tersebut cukup bermanfaat bagi kehidupan mereka. Hasil diskusi di Korinus memperlihatkan bahwa kondisi kehidupan kelompok sangat miskin dan miskin di desa sangat terbantu sejak adanya beras bantuan Raskin, yang tadinya mereka hanya bisa makan nasi satu kali dalam sehari, dengan adanya beras bantuan tersebut frekuensi makan mereka pun meningkat menjadi dua kali sehari. Pembuatan bak penampungan air juga sangat membantu para petani mengatasi

kebutuhan air, terutama pada musim kering. Sementara itu, walaupun tidak berdampak pada ekonomi keluarga secara langsung, bantuan pembuatan WC telah membuat keluarga pemiliknya merasa lebih sejahtera. Bahkan dalam beberapa diskusi kepemilikan WC di rumah menjadi salah satu indikator kesejahteraan keluarga.

Jika dicermati lebih lanjut, faktor-faktor di atas, yaitu terbukanya peluang pasar sehingga memungkinkan dilakukannya diversifikasi usaha, pengenalan bibit baru, serta sejumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat adalah peluang-peluang ekonomi yang muncul di tingkat komunitas dan bersifat struktural. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok ini untuk keluar dari kemiskinan selain karena faktor struktural tersebut juga ditunjang oleh faktor lainnya. Di Korinus dan juga di desa lainnya, keberhasilan usaha juga ditunjang oleh faktor di tingkat individu dan keluarga. Salah satu hal yang terungkap dalam wawancara adalah tidak adanya hal-hal yang berpotensi menghambat akumulasi aset yang dilakukan. Selain itu, di kelima desa penelitian terungkap pula bahwa faktor kerja keras merupakan faktor pendorong utama seseorang bisa keluar dari kemiskinan. Kemauan bekerja keras ini membuat kelompok *mover* lebih cepat dalam menangkap peluang-peluang ekonomi yang tersedia di desa. Di Eki, semangat kerja keras juga ditunjang oleh faktor pendidikan dan keterampilan serta pengalaman usaha yang memadai sehingga pencapaian mereka melebihi kelompok lainnya di desa. Sementara itu, karakter kelompok *mover* di Lay, Beluta, dan Malo hampir sama, yaitu mereka mempunyai sumber penghasilan yang lebih daripada kelompok lainnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan sedikit demi sedikit. Di Lay dan Malo, peningkatan status sosial-ekonomi juga disebabkan karena meningkatnya status kepemilikan rumah, sudah bisa memiliki rumah sendiri, atau pindah ke rumah baru yang kondisinya lebih baik. Kombinasi kemampuan psikologis—yaitu kemauan bekerja keras, tidak putus asa, serta rasa percaya diri yang tinggi dalam melakoni hidup dan pekerjaan—dengan kemampuan lainnya seperti modal manusia telah membuat kelompok ini berhasil keluar dari kemiskinan.

Namun, kelompok *mover* di ketiga desa tersebut masih berada dalam kondisi yang cukup rentan, artinya bahwa kejadian-kejadian tertentu yang menimpa mereka dapat membuat mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kejadian atau peristiwa penyebab kerentanan pertama ialah faktor musim. Pada sebagian besar kasus, musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan hampir seluruh petani mengalami gagal panen. Sistem pertanian yang masih sepenuhnya mengandalkan pada musim hujan (sawah tadah hujan) serta sangat terbatasnya sarana irigasi dan pengairan buatan telah membuat para petani kesulitan dalam mencari sumber air alternatif untuk sawah mereka. Dalam kondisi ini, bahkan kelompok *mover* pun dapat dengan mudah jatuh kembali dalam kemiskinan. Akumulasi aset, kemampuan/keterampilan, semangat kerja keras, serta motivasi yang tinggi ternyata tidak cukup mampu membuat mereka bertahan di atas garis kemiskinan.

Faktor penyebab kerentanan kedua adalah berkurangnya aset terutama hewan ternak dalam jumlah yang cukup signifikan. Penyebab berkurangnya aset tersebut di antaranya adalah karena pencurian, penyakit, ataupun digunakan untuk keperluan adat. Sering kali para petani-peternak tidak berdaya menghadapi penyakit hewan sebab mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut dan cara mengobatinya. Salah satu peserta diskusi kelompok masyarakat di Desa Lay menyatakan bahwa ketidakmampuan

tersebut di antaranya karena kurangnya penyuluhan dari PPL (petugas penyuluh lapangan) setempat. Frekuensi kedatangan PPL ke desa sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau kebutuhan seluruh petani di desa. Berkurangnya hewan ternak juga disebabkan oleh adanya kewajiban adat yang cukup mengikat, seperti yang ditemukan di Desa Beluta dan Lay. Keperluan adat tersebut bermacam-macam, misalnya untuk sumbangan kematian, pembayaran belis perkawinan, dan sumbangan untuk pembuatan rumah adat. Hewan ternak menjadi andalan simpanan keluarga karena masih jarang yang menyimpan/menabung dalam bentuk uang. Jika terjadi sesuatu yang membutuhkan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang, maka pada umumnya masyarakat akan menjual hewan ternak mereka untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kondisi kesejahteraan kelompok *mover* kembali dipertaruhkan manakala kebutuhan adat tersebut terjadi ketika masyarakat tidak ada persiapan, bersamaan dengan datangnya kebutuhan lain yang datang secara berturut-turut.

8.1.2 Penyebab Jatuh Miskin

Di antara kelompok yang mengalami peningkatan kesejahteraan dalam kurun waktu 1996–2006, ada pula kelompok yang justru jatuh miskin. Berbanding terbalik dengan kelompok *mover*, faktor utama penyebab seseorang jatuh miskin adalah berkurangnya/menurunnya pendapatan. Di setiap komunitas, faktor yang paling banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah gagal panen karena musim panas yang berkepanjangan. Kegagalan panen ini sebenarnya dialami oleh semua orang (kelompok), tetapi pada kelompok *faller*, kegagalan panen bisa sampai menyebabkan jatuh miskin karena ada penyebab lainnya yang datang secara bersamaan. Di Lay, penyebab lainnya adalah kehilangan aset (hewan ternak) dalam jumlah yang cukup banyak karena pencurian. Selama beberapa tahun ini kasus pencurian memang makin marak terjadi di desa dan pelakunya belum pernah tertangkap.

Berkurangnya aset juga disebabkan oleh faktor-faktor di tingkat keluarga/rumah tangga walaupun masih berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di tingkat masyarakat seperti aturan adat. Di Beluta dan Lay, pengeluaran untuk adat yang kadangkala sangat besar dan terjadi berturut-turut, bisa menyebabkan aset (hewan ternak) keluarga menjadi berkurang. Pada saat ada kematian, keluarga yang bersangkutan maupun kerabat dekat biasanya akan menyediakan hewan ternak untuk kebutuhan upacara kematian tersebut. Pengeluaran ini sifatnya wajib dan mengikat secara sosial, jika tidak dipenuhi maka keluarga yang bersangkutan akan merasa malu dan juga akan menerima sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya.

Selain kebutuhan adat, faktor di tingkat individu yang umum ditemukan di setiap komunitas adalah faktor penuaan (*ageing*). Beberapa orang informan menyebutkan bahwa dirinya jatuh miskin karena sudah tua dan tidak sanggup lagi bekerja dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Kondisi ini diperparah karena aset yang mereka miliki makin habis. Di Desa Beluta, ada kasus seorang *faller* kehabisan lahan pertanian karena sudah dibagikan ke anak-anaknya. Di Desa Malo ditemukan kasus habisnya lahan pertanian karena dijual untuk biaya pemakaman anak.

Kematian atau sakitnya salah satu anggota keluarga, terutama pencari nafkah utama, juga menjadi penyebab seseorang jatuh miskin. Ketidakmampuan bekerja selama

berbulan-bulan karena sakit, menyebabkan tidak ada sumber pendapatan bagi keluarga. Akibatnya modal/aset yang sudah dikumpulkan sedikit demi sedikit terpaksa habis dipakai untuk berobat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Musibah ini juga menyebabkan keluarga yang bersangkutan merasa tidak sejahtera dan tidak bahagia karena salah satu anggota keluarga ada yang sakit. Pada umumnya kelompok ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap sarana kesehatan sehingga sering kali ditemukan responden/informan yang sakit selama berbulan-bulan akibat tidak adanya bantuan biaya kesehatan.

Di Desa Eki, dengan karakternya yang semiurban, penurunan kesejahteraan disebabkan karena terjadi pergantian jenis pekerjaan yang sebelumnya di sektor jasa beralih ke sektor pertanian. Status pekerjaan di sektor jasa dianggap lebih baik daripada di sektor pertanian. Di sektor pertanian pun hasilnya tidak memadai ditambah lagi dengan banyaknya pengeluaran untuk menanggung urusan keluarga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab seseorang jatuh miskin merupakan kombinasi dari berbagai macam faktor. Namun, tampak pula bahwa faktor individu, terutama kesehatan dan kekuatan bekerja, menjadi faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi kesejahteraan seseorang.

8.2 Jebakan Kemiskinan dan Upaya Mempertahankan Kesejahteraan

8.2.1 Upaya Mempertahankan Kesejahteraan

Kelompok *always rich/never poor* adalah kelompok yang berhasil mempertahankan kesejahteraannya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Di beberapa desa seperti Lay dan Eki, kelompok ini bahkan tetap sejahtera sudah lebih lama daripada sepuluh tahun terakhir. Sebagian anggota kelompok *always rich* di Lay, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab V, adalah kelompok elite desa dari kelompok etnis tertentu yang memegang kekuasaan di desa secara turun-temurun. Sebagai suku yang berkuasa, berbagai keistimewaan diperoleh anggota suku ini secara sosial, ekonomi, dan politik. Akses mereka kepada sumber-sumber kekuasaan, ekonomi, dan juga bantuan-bantuan yang masuk ke desa menjadi lebih besar daripada anggota suku lainnya. Status sosial-ekonomi mereka pun cenderung tetap dibandingkan kelompok lainnya. Di Desa Malo, kebanyakan anggota kelompok ini berasal dari kalangan *amaf* atau tuan tanah. Mereka pada umumnya mampu menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan tinggi sehingga sebagai hasilnya banyak pula anak mereka yang menjadi pegawai negeri, guru, atau melakukan pekerjaan lainnya di luar sektor pertanian.

Sementara itu, ada pula kelompok yang mencapai kemapanan status sosial-ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, seperti yang terjadi di Desa Eki. Di desa ini, kelompok *always rich* utamanya didominasi oleh kaum migran yang berdatangan dari berbagai tempat di NTT, bahkan ada pula yang dari Jawa dan Sulawesi. Intensitas migrasi keluar dan masuk (*in and out migration*) di Eki ini cukup tinggi. Kebanyakan dari mereka melakukan migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Akumulasi pengalaman, keterampilan, serta wawasan yang mereka peroleh selama melakukan migrasi telah

membuat mereka mampu mempertahankan kesejahteraan dibandingkan kelompok lainnya. Pengecualian ditemukan di Desa Beluta. Para peserta diskusi kelompok tidak mengidentifikasi adanya kelompok *always rich* ini dalam struktur masyarakat mereka.

Pada dasarnya kelompok *always rich* memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kelompok *mover*. Hasil wawancara sejarah hidup individu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mampu untuk keluar dari kemiskinan ternyata juga merupakan faktor yang membuat seseorang mampu untuk mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Seperti yang terjadi di Desa Korinus, beberapa hal yang bisa membuat seseorang tetap sejahtera adalah melakukan diversifikasi mata pencaharian, mulai dari berkebun, menanam sayur, beternak (kambing dan sapi), sampai jenis mata pencaharian lainnya. Apalagi sejak diperkenalkannya berbagai macam bibit tanaman baru, warga yang awalnya sudah sejahtera menjadi bertambah sejahtera karena tanamannya serta usaha peternakannya sudah membuahkan hasil. Keberhasilan diversifikasi ini selain karena adanya dukungan penyuluhan dan pelatihan juga karena ada kepastian permintaan pasar akan komoditas yang dihasilkan di Korinus. Sama halnya dengan kelompok *mover*, hasil pertanian dan perkebunan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak, sementara hasil dari peternakan digunakan untuk investasi, baik pembelian lebih banyak ternak maupun membuka usaha baru seperti kios.

Faktor pendorong keberhasilan ini di tingkat rumah tangga, selain kerja keras adalah motivasi yang tinggi untuk berhasil. Motivasi ini tidak muncul dengan sendirinya tetapi merupakan bagian dari upaya penumbuhan kesadaran dan motivasi yang selalu dilakukan oleh aparat pemerintah tingkat desa maupun tingkat kabupaten seperti yang dilakukan kepada masyarakat di Korinus. Jika dicermati lebih lanjut, maka terlihat bahwa faktor pendukung, baik di tingkat struktural maupun agensi/individu, sebenarnya sama antara kelompok *mover* dan *always rich*. Faktor yang menjadi pembeda adalah kelompok *always rich* memiliki modal awal yang lebih baik/banyak, berupa warisan tanah dan hewan ternak yang sangat memadai dari orang tua ataupun modal manusia berupa pendidikan dan keterampilan yang juga memadai untuk mempertahankan kesejahteraannya. Kelompok ini juga pada umumnya sudah memiliki usaha-usaha dan faktor penunjang lainnya lebih dahulu dari kelompok *mover*, seperti pekerjaan sampingan.

Faktor pembeda lainnya adalah masalah kerentanan. Jika kelompok *mover* masih sangat rentan terhadap guncangan yang terjadi baik di tingkat rumah tangga (sakit, kematian pencari nafkah dalam keluarga) maupun di tingkat komunitas (gagal panen, pencurian sapi, kebutuhan adat, kenaikan harga BBM), maka kelompok *always rich* sudah relatif lebih mampu menghadapi guncangan tersebut. Artinya, bahwa guncangan yang menimpa mereka tidak akan sampai membuat mereka jatuh miskin. Ilustrasi yang diperoleh dari wawancara sejarah hidup menunjukkan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak sampai mengganggu aset mereka sebab akumulasi aset tersebut sudah dilakukan sejak lama dan sudah mencapai jumlah yang cukup banyak. Selain itu, kelompok ini pada umumnya juga mempunyai sumber pendapatan sampingan lainnya yang bisa menjadi cadangan apabila terjadi gagal panen.

8.2.2 Terjebak dalam Kemiskinan

Studi ini mengidentifikasi kelompok *chronic poor* sebagai kelompok yang tidak mengalami peningkatan atau perbaikan kesejahteraan dan tidak mampu untuk keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu 1996–2006. Beberapa hal menjadi penyebab mengapa kelompok ini terjebak dalam kemiskinan dan sulit meningkatkan kesejahteraannya. Hampir di semua desa, gagal panen dan ketiadaan modal berupa hewan ternak, bibit, lahan pertanian, dan keterampilan menyebabkan pendapatan yang diperoleh kelompok ini sangat terbatas sehingga sulit membuat mereka keluar dari kemiskinan. Keterbatasan pendapatan ini di antaranya juga disebabkan menurunnya harga komoditas pertanian yang dihasilkan. Salah seorang informan sejarah hidup di Desa Eki menuturkan bahwa keterbatasan pendapatan terjadi karena kegagalan panen sebanyak dua kali. Akibatnya, ia menderita kerugian yang cukup besar sehingga kondisi kesejahteraannya sulit meningkat. Informan lainnya menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan kerap berganti-ganti, tetapi dengan status yang sama, yaitu sebagai pekerja atau buruh. Akibatnya, mereka tidak bisa memperoleh pendapatan yang maksimal.

Di Malo, Beluta, dan Lay, ditemukan adanya kesamaan pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjebak dalam kemiskinan. Di ketiga desa ini, selain gagal panen, faktor kewajiban adat yang mengikat juga disebutkan sebagai penyebab seseorang sulit keluar dari kemiskinan. Kewajiban adat tersebut pada satu titik tertentu menghambat akumulasi aset di tingkat rumah tangga, bahkan pada saat-saat tertentu frekuensi kewajiban adat yang cukup sering serta datangnya yang tidak menentu, bisa menyebabkan berkurangnya aset yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ini juga muncul dari tingkat individu dan rumah tangga. Di tingkat rumah tangga, sama halnya dengan yang dialami oleh kelompok *faller*, kematian pencari nafkah utama dalam keluarga menjadi salah satu penyebab keluarga tersebut tetap miskin. Apalagi ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Sementara itu, faktor penyebab di tingkat individu yang mengemuka adalah faktor penuaan. Anggota keluarga, terutama kepala keluarga atau pencari nafkah utama, tidak mampu untuk bekerja lagi karena sudah tua atau sakit. Selain faktor tersebut, hasil diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat di tingkat desa menunjukkan bahwa kesulitan untuk keluar dari kemiskinan disebabkan oleh faktor perilaku yang cenderung malas dan boros. Faktor inilah yang membatasi mereka untuk menangkap peluang-peluang ekonomi yang ada dan membuat mereka cenderung memanfaatkan warisan yang diperoleh dari orang tua.

Karakter kelompok *chronic poor* yang agak berbeda ditemukan di Desa Korinus. Jika dibandingkan dengan kelompok yang sama di desa lainnya, maka kelompok *chronic poor* di Desa Korinus berada dalam kondisi yang relatif lebih baik. Walaupun penghasilan yang diperoleh kelompok ini sedikit, lama-kelamaan bertambah seiring dengan diversifikasi mata pencaharian yang mereka lakukan. Sebagai desa percontohan, Korinus banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang diberikan secara merata kepada seluruh penduduk desa tanpa memandang status sosial-ekonomi mereka. Dalam kondisi ini, setiap kelompok mempunyai kesempatan yang sama terhadap bantuan tersebut sehingga perbaikan kesejahteraan juga terjadi secara

serempak pada setiap kelompok. Di dalam Desa Korinus sendiri, kelompok ini tetap lebih miskin daripada kelompok lainnya. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih bersifat individual, yaitu ketiadaan lahan garapan sehingga harus bekerja pada lahan orang lain yang menyebabkan hasilnya tidak maksimal serta adanya kejadian dalam rumah tangga yang menghambat perbaikan kondisi, seperti ada anggota keluarga yang sakit. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan kelompok *chronic poor* di Korinus membaik dalam sepuluh tahun, walaupun belum berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Di desa dengan norma adat yang masih kuat, belum terjadinya pernikahan secara adat juga memengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga. Selama pihak yang bersangkutan masih memiliki tanggungan kewajiban/utang *belis* adat, mereka belum bisa membangun rumah tembok sendiri, mereka masih tinggal di rumah alang-alang. Perubahan atau perbaikan pada kondisi rumah bisa menyebabkan seseorang merasa lebih sejahtera.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penyebab kemiskinan bermacam-macam dan merupakan hasil dari interaksi faktor di tingkat struktural dan di tingkat individual. Ketika akses bantuan serta peluang usaha terbuka bagi semua kelompok status sosial, seperti yang terjadi di Desa Korinus, hal-hal yang menyebabkan kelompok tersebut tetap miskin adalah kondisi pekerjaan dan kondisi di rumah tangga yang sangat bervariasi.

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan faktor struktural dan individual dengan kondisi di setiap kelompok transisi, seperti berikut ini.

a) Faktor Pendorong

- (1) Keberadaan berbagai macam bantuan di masyarakat sangat dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima. Pada kelompok *mover* bantuan ini menjadi salah satu faktor pendorong keluar dari kemiskinan, pada kelompok lainnya bantuan ini bersifat sebagai penyangga (*buffer*) untuk menjaga supaya kondisi kesejahteraan tidak bertambah buruk. Di Desa Korinus, hampir seluruh anggota masyarakat (dari setiap kelompok transisi) merasakan manfaat bantuan ini secara merata.
- (2) Terbukanya kesempatan atau peluang usaha kerja baru, baik di sektor pertanian maupun di sektor lainnya, membaiknya sarana infrastruktur di tingkat desa maupun tingkat rumah tangga, serta stabilnya permintaan dan harga komoditas pertanian yang dihasilkan para petani, telah membuat kesejahteraan kelompok *mover* dan *always rich* membaik. Keberhasilan kedua kelompok ini juga merupakan hasil dari semangat dan keinginan kerja keras yang didukung oleh pendidikan dan keterampilan berusaha yang memadai. Faktor kesehatan serta rasa percaya diri dalam berusaha juga berperan penting dalam keberhasilan kelompok ini.

2) Faktor Penghambat

Faktor kondisi alam NTT cenderung menyebabkan provinsi ini rentan terhadap musim kemarau yang berkepanjangan. Akibatnya, kerap terjadi gagal panen yang menimpa sebagian besar wilayah NTT. Dampak kegagalan panen ini dirasakan oleh hampir seluruh

anggota masyarakat, tetapi dengan tingkatan dampak yang berbeda-beda. Begitu pula dengan serangan hama penyakit pada tanaman maupun hewan ternak. Di antara keempat kelompok transisi, hanya kelompok *always rich* yang paling sedikit menerima dampak gagal panen dan kematian hewan ternak karena mereka mempunyai sumber penghasilan lainnya yang dapat diandalkan di saat-saat krisis. Bagi kelompok *mover*, gagal panen merupakan faktor penyebab kerentanan yang dapat membuat mereka jatuh kembali dalam kemiskinan, seperti yang terjadi pada kelompok *faller*. Bagi kelompok *chronic poor*, gagal panen sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan sebab pada umumnya mereka tidak memiliki sumber penghasilan alternatif lainnya.

Dalam kondisi struktur yang sama yang dapat dirasakan dampaknya pada semua kelompok transisi, maka yang menentukan perbedaan kondisi kesejahteraan di setiap kelompok transisi adalah daya tahan mereka menghadapi kerentanan. Faktor kerentanan yang dialami oleh semua kelompok adalah gagal panen dan berkurangnya modal/aset produktif seperti tanah dan ternak (karena mati, dicuri, atau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti adat, uang sekolah anak, serta biaya berobat ketika sakit). Namun, setiap kelompok punya daya tahan yang berbeda terhadap faktor-faktor tersebut. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa program perlindungan sosial masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh kelompok *mover*.

IX. Dinamika Kemiskinan dan Konflik: Bagaimana Keduanya Saling Terkait?

9.1 Memahami Potensi Konflik Lokal: Keberadaan Eks Pengungsi Timor Leste dan Kesejahteraan Komunitas Penerima

Bab pertama telah menyebutkan bahwa dalam studi ini konflik diartikan secara luas sebagai konfrontasi antarindividu maupun kelompok karena tujuan dan kepentingan yang berbeda tentang hal-hal seperti: penerapan nilai-nilai tertentu (termasuk agama dan budaya), batasan kekuasaan dan kompetensi, penguasaan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya (yang langka). Konfrontasi tersebut bisa terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya ketegangan laten, ketidaksepakatan di jalur hukum, atau pertikaian terbuka (dengan atau tanpa bentrokan fisik). Bab ini mengkaji ketegangan sosial dan konflik yang terjadi di lima desa yang diteliti dan akibatnya bagi dinamika kesejahteraan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Dalam Bab IV yang memberi deskripsi lengkap tentang lima desa tersebut, juga dijelaskan tentang potensi konflik di setiap desa. Di empat desa, yaitu Eki, Malo, Lay, dan Beluta, di mana terdapat eks pengungsi dari Timor Leste, ketegangan sosial dan konflik yang dianggap paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang terkait dengan keberadaan pengungsi. Korinus adalah satu-satunya desa di mana tidak terdapat pengungsi. Oleh karena itu, masalah antara warga lokal dengan pengungsi (warga baru) tidak relevan. Namun, di Korinus terjadi konflik lain, misalnya konflik antara warga desa dan Dinas Koperasi setempat tentang kredit macet untuk pembuatan pupuk bokasi. Sebagaimana juga telah diuraikan, Bab I, secara umum dan Bab IX secara khusus akan berfokus pada konflik yang muncul akibat masuk dan menetapnya sejumlah besar eks pengungsi Timor Leste di berbagai lokasi di Timor Barat, termasuk di empat desa yang diteliti. Fokus ini penting untuk ditetapkan agar bisa dilakukan perbandingan secara sistematis di antara berbagai konteks lokal.

Bab II memberi kerangka konseptual untuk mencari kaitan antara dinamika kemiskinan dan konflik. Dalam bab ini diuraikan bahwa upaya untuk menjelaskan kaitan tersebut cenderung dilakukan dengan mencari hubungan kausalitas antara kemiskinan dan konflik (apa menyebabkan apa?). Oleh karena itu, perlu untuk diidentifikasi apa yang terjadi saat konflik menyebabkan kemiskinan dan apa yang terjadi saat kemiskinan menimbulkan konflik. Selanjutnya, juga ditegaskan bahwa hubungan kausalitas antara kemiskinan dan konflik merupakan hal yang kompleks dan dinamis sehingga tidak mudah untuk menentukan arah hubungan kausalnya. Bab IX ini tidak bermaksud memahami hubungan kemiskinan dan konflik secara apriori dari perspektif kausalitas tertentu, tetapi hendak mengkaji bagaimana interaksi antara warga lokal dan eks pengungsi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dibentuk oleh kondisi lokal yang ada (lingkungan

fisik, sosial-demografis, politik, ekonomi, dan budaya). Untuk itu, dilakukan perbandingan antara berbagai kondisi di empat desa yang sama-sama mengalami masalah keberadaan pengungsi.

9.2 Kriminalitas dan Upaya Menjaga Keamanan Umum di Komunitas

9.2.1 Jenis-jenis Kriminalitas di Desa

Di setiap masyarakat selalu terdapat hal-hal-baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat-yang bisa menyebabkan perselisihan dan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga dalam berbagai bentuk, baik secara berkala dan melembaga maupun secara insidental. Upaya-upaya menjaga keamanan dan keselamatan umum mencerminkan (potensi) masalah yang ada serta kemampuan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangnya. Dalam bagian ini akan diuraikan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum di lima desa, termasuk cara-cara tradisional sesuai adat setempat.

Di lima desa terjadi kriminalitas yang berbeda, meskipun bisa ada kesamaan di dua atau tiga desa. Sekalipun demikian, masalah konsumsi alkohol yang berlebihan (mabuk) terjadi di semua desa. Konsumsi alkohol yang berlebihan dilakukan terutama saat berlangsung acara-acara khusus seperti pesta perkawinan, dan acara kematian.

Jenis-jenis tindak kriminal lain yang terjadi, antara lain,

- a) pencurian ternak (di Eki, Malo, Lay, dan Beluta);
- b) perkelahian antarkelompok pemuda (di Malo dan Beluta);
- c) perjudian (di Eki, Malo, Lay, dan Beluta);
- d) pelanggaran susila, perselingkuhan, dan hamil di luar nikah (di Eki, Malo, Lay, dan Beluta); dan
- e) pelacuran (di Eki).

9.2.2 Penjagaan Keamanan dan Aset

Secara tradisional keselamatan dan keamanan desa umumnya dijaga bersama oleh warga. Di Desa Beluta misalnya, terdapat praktik yang disebut *Dalo Dale*. Pada saat desa-desa masih saling menyerang atau terlibat peperangan, warga memiliki cara untuk memberi peringatan bahaya dan mempertahankan diri. Jika terompet dari tanduk kerbau ditiup, maka warga akan bersiap untuk mempertahankan diri dari serangan. Para perempuan dan anak-anak akan tinggal di dalam desa, sedangkan para laki-laki akan berkumpul dan berjaga-jaga di perbatasan desa. Sebelumnya, para lelaki menyiapkan senjata dan yang menjadi pemimpin kelompok akan masuk ke rumah adat untuk mengambil barang bertuah/keramat milik suku atau kampung yang disebut *kakaluk* agar mendapat kekuatan dan perlindungan. Saat ini, praktik seperti *Dalo Dale* sudah tidak dilakukan lagi karena desa-desa umumnya sudah tidak perlu mempertahankan diri dari serangan pihak luar. Saat ini, penjagaan desa dilakukan

dengan mengadakan siskamling (sistem keamanan lingkungan) baik di tingkat desa maupun dusun (komunitas), ronda malam serta penjagaan oleh hansip, terutama dalam periode khusus seperti masa pemilihan umum.

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di desa adalah pencurian ternak. Selain itu, terjadi juga pencurian dan perusakan hasil kebun dan hutan desa. Sekalipun demikian, umumnya jika terjadi pencurian, warga desa tidak melaporkannya ke polisi karena mereka tahu bahwa polisi akan minta berbagai biaya. Pada beberapa kasus, warga mengejar pencuri ternak hingga ke batas desa tetapi umumnya pengejaran seperti ini tidak membawa hasil. Agar kepemilikan ternak mudah dikenali dan pengusutan mudah dilakukan jika terjadi pencurian atau perusakan kebun oleh ternak, dilakukan pemberian tanda-tanda kepemilikan pada ternak, misalnya melalui model potongan telinga atau cap yang berbeda. Di Desa Beluta, model potongan telinga (*lobu ligan*) dilakukan untuk kambing, babi, dan sapi dan cap (*smarak*) untuk kuda dan kerbau. Setiap keluarga atau suku mempunyai model dan cara khusus untuk memotong/menandai telinga ternak mereka.

Untuk menjaga hasil kebun (seperti jagung, labu, dan Ubi) dan agar kebun tidak dimasuki dan dirusak oleh ternak, pemilik kebun melakukan penjagaan dan membuat pagar. Umumnya warga melakukan penjagaan sendiri-sendiri siang dan malam, tetapi penjagaan juga bisa dilakukan bersama-sama. Pemagaran dilakukan baik dengan pagar kayu maupun pagar tanaman.

Di Malo, dibuat aturan, kebun harus dipagar setinggi 1,5 meter. Kalau ternak masuk pada malam hari maka yang salah adalah pemilik ternak, sedangkan kalau ternak masuk siang hari, maka yang salah adalah pemilik kebun (FGD Malo, laki-laki, 32).

Secara tradisional, penjagaan sumber daya desa (misalnya, kayu dan hasil hutan, serta mata air.) dan penentuan denda jika terjadi pelanggaran dilakukan oleh seorang tokoh penjaga. Di Lay dan Beluta, tokoh ini disebut *makleat*. Sebagai penjaga hutan, *makleat* menentukan pohon-pohon mana yang boleh ditebang (dan mana yang belum boleh ditebang) jika ada warga yang membutuhkan kayu. Pohon-pohon yang belum boleh ditebang ditandai dan larangan ini harus dipatuhi penduduk desa. Pelanggaran terhadap larangan menebang pohon bisa dihukum denda sapi atau babi. Namun, dari sekitar 2001 hingga studi dilakukan, *makleat* sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjaga dan mengatur pemanfaatan sumber daya desa. Di Beluta, otoritas *makleat*—termasuk denda yang dijatuhkan—tidak diakui oleh unsur baru dalam desa, yaitu para eks pengungsi.

Pada tahun 1999, sebelum para pengungsi dari Timor Leste datang, *makleat* masih dihormati dan berfungsi. Tapi mereka (para pengungsi) tidak mau tahu aturan *makleat*. Mereka potong kayu seenaknya, juga memotong pohon-pohon yang sebenarnya tidak boleh dipotong. *Makleat* tidak bisa apa-apa. Denda juga tidak dipatuhi. (FGD Beluta, laki-laki, 35)

Di Lay, *makleat* tidak mampu lagi menjalankan tugasnya karena wilayah tugasnya menjadi terlalu luas/besar, sementara tidak ada tenaga yang membantunya dan ia sendiri tidak mendapat imbalan material dari pekerjaan tersebut. “Dulu ada *makleat*, tapi sekarang tidak ada karena tidak bayar dia *pung* (punya) gaji. *Makleat* terbentuk tapi hasil kebun tetap hilang” (FGD Lay, laki-laki, 39).

Apa yang menarik untuk dicatat adalah bahwa penurunan otoritas *makleat* ini tetap berlangsung dan tidak ada tindakan untuk memperbaiki situasi sekalipun warga lama banyak mengeluhkan. Di sini tampak bahwa efektivitas aturan adat sangat tergantung pada kesepakatan dan komitmen warga yang diatur oleh aturan tersebut. Tanpa adanya komitmen untuk menegakkannya, maka aturan adat tersebut akan kehilangan kekuatan untuk mengatur.

Kotak 2 **Berbagai Jenis Denda dan Hukum Adat**

Contoh dari Desa Lay

1. Hutan larangan. Denda ini diterapkan jika ada warga yang menebang pohon di hutan larangan atau hutan adat. Besarnya denda tergantung banyaknya pohon yang ditebang. Jika jumlahnya banyak, maka dikenakan denda berupa sapi, tetapi jika jumlah pohon yang ditebang hanya sedikit, maka dendanya berupa babi. Setelah denda diterapkan maka akan diadakan upacara adat. Salah satu acaranya adalah memakan sapi/babi hasil denda tersebut bersama-sama. Setelah upacara selesai, kemudian dilakukan penanaman ulang.
2. Perusakan mata air. Jika ada yang merusak mata air maka akan dikenakan denda berupa babi atau sapi
3. Hukum badu. Hukum ini merupakan larangan untuk mencuri hasil kebun maupun ternak orang lain. Jika ada warga desa yang ketahuan mencuri atau menebang salah satu bagian pohon di hutan adat, maka para tetua adat akan menggantungkan potongan kaki sapi dan kaki babi di pohon yang telah ditebang tersebut sebagai tanda/peringatan bagi orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama.
4. Pencurian. Warga yang melihat orang mencuri (hasil kebun atau ternak) dan bisa memberikan bukti maka ia mendapat uang Rp100.000 dari orang yang mencuri tersebut. Jika masalah tersebut dibawa ke dukun atau ke kepala desa, maka orang yang mencuri atau memotong kayu akan dikenakan denda berupa sapi atau babi lagi.

Sumber: wawancara dengan Raja Desa Lay

Contoh dari Desa Beluta

2. Denda Pelanggaran Susila

- a) Jika pelanggaran terjadi pada seorang gadis, maka laki-laki pelakunya akan ditegur. Denda yang dikenakan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya.
 - (1) Jika telah terjadi hubungan seksual, laki-laki harus membayar denda dan jika perempuan tersebut hamil, maka laki-laki pelaku harus mengawininya dengan membayar *belis* yang bisa mencapai jutaan rupiah dan uang air susu (untuk ibu si perempuan). Dalam FGD disebutkan bahwa saat terjadi pelanggaran susila pada 2003/2004, laki-laki pelaku dihukum denda sebesar Rp2.500.000, dua ekor sapi, dua botol sopi, dan dua karung beras (FGD, perempuan, 40).
 - (2) Jika terjadi kehamilan tetapi pelaku-laki-laki tidak mau menikahi perempuan yang hamil, maka laki-laki tersebut harus membayar jaminan buat anak yang akan lahir. Jaminan ini juga bisa mencapai beberapa juta rupiah.

- (3) Jika terjadi kontak seksual tetapi tidak terjadi kehamilan, maka pelaku laki-laki akan didenda minimal satu ekor sapi seharga Rp1.000.000 dan satu plat emas seharga Rp.250.000.
- b) Jika pelanggaran terjadi dengan perempuan yang telah bersuami, maka denda harus dibayar baik oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan.
 - (1) Pihak laki-laki harus membayar denda sebesar *belis* yang dibayarkan oleh suami si perempuan saat mereka menikah dulu, misalnya, sebesar empat ekor sapi dan empat buah plat perak.
 - (2) Pihak perempuan harus membayar uang tutup muka untuk pihak suami dan keluarganya sebesar empat ekor babi dan empat buah selimut.

Denda-denda tersebut diberikan kepada rumah suku suami dan dihitung sebagai harta suku (FGD Konflik).

2. Denda Kekerasan dalam Rumah Tangga

Masyarakat juga memiliki aturan adat untuk memecahkan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pemukulan suami terhadap istri akan dikenai sanksi/denda jika istri tidak terima dan mengadukan kekerasan itu kepada orang tuanya (misalnya dengan cara pulang ke rumah orang tuanya). Umumnya denda berupa satu ekor sapi dan satu buah plat emas (Rp250.000) yang diberikan pada keluarga istri. Pemukulan tidak dikenai sanksi jika istri menerimanya dan tidak meninggalkan rumah. Menurut peserta FGD, dalam praktiknya, sanksi ini tidak membuat kekerasan rumah tangga berkurang, tetapi justru membuat istri ragu-ragu atau tidak berani mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain (keluarganya) karena jika ia mengadu maka aset rumah tangganya sendiri akan berkurang (akibat denda yang harus dibayar suaminya).

Sumber: FGD

9.2.3 Perselisihan dan Denda Adat

Jika terjadi perselisihan antarwarga desa (misalnya perkelahian pemuda, pelanggaran susila, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa tanah), umumnya masyarakat akan melaporkan perselisihan tersebut ke pemimpin lokal termasuk tokoh-tokoh adat. Tingkat terendah adalah RT, jika tidak bisa diselesaikan di tingkat RT maka masalah akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dusun atau desa. Umumnya para pihak yang terlibat perselisihan—khususnya yang dianggap bersalah—akan dijatuhi denda. Besarnya denda bermacam-macam sesuai dengan besarnya masalah yang timbul. Di Desa Lay, warga harus membayar biaya penyelesaian perselisihan di setiap tingkat. Makin tinggi tingkatnya akan makin besar biayanya. Di tingkat desa, misalnya, biaya penyelesaian perselisihan mencapai Rp250.000. Oleh karena itu, warga berupaya mencari penyelesaian di tingkat yang paling rendah, yaitu RT.

Namun, masalah keamanan umum di desa menjadi lebih kompleks setelah masuknya para pengungsi dari Timor Leste. Warga lokal mengeluhkan peningkatan frekuensi pencurian dan perkelahian, penggunaan tanah oleh para pengungsi tanpa izin pemilik tanah, dan penebangan pohon di hutan desa secara liar. Setelah 1999 masalah-masalah tersebut menjadi sumber utama ketidakamanan penduduk lokal. Bagian-bagian berikut akan

berfokus pada ketegangan sosial dan konflik antara penduduk lokal dan para eks-pengungsi Timor Leste.

9.3 Interaksi dan Konflik Antara Eks-Pengungsi dan Warga Lokal

9.3.1 Kedatangan dan Keberadaan Pengungsi

Pengungsi datang ke wilayah Timor Barat termasuk ke desa-desa Eki, Malo, Lay, dan Beluta pada 1999 setelah dilaksanakannya jajak pendapat yang menyebabkan terpisahnya Provinsi Timor Timur dari Negara Republik Indonesia. Pada awalnya, jumlah pengungsi yang masuk ke Eki adalah sekitar 17.000 jiwa dan ditempatkan di terminal dan kios-kios di pasar setempat. Di Malo, pengungsi datang menggunakan truk, mobil, dan motor. Mereka terdiri atas anggota milisi, pegawai, dan masyarakat biasa. Sebuah sekolah dasar di desa digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Desa Beluta menerima sekitar 13.000 pengungsi. Sebagian ditampung di stadion Tavares dekat Desa Beluta dan sebagian lain tinggal di halaman atau rumah-rumah penduduk.

Gelombang pengungsi ini telah mengakibatkan perubahan demografis di berbagai desa dan dusun (komunitas) yang menerima. Salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk. Pendatang yang tiba-tiba muncul dan menetap di suatu desa/dusun/komunitas dalam jumlah besar ini juga ikut menggunakan berbagai sumber daya, misalnya lahan pertanian, hutan, sumber air, berbagai fasilitas umum, dan peluang ekonomi yang semula hanya dimanfaatkan oleh warga lokal.

Perubahan sosial-demografis ini mengakibatkan berbagai masalah. Umumnya, penduduk lokal merasa keberatan bahwa (sebagian) lahan pertanian mereka telah lebih dari 5 tahun "dipinjam" (digarap) oleh pengungsi tanpa menerima uang sewa atau kompensasi lain. Selain itu, mereka juga mengeluhkan turunnya kualitas tempat hidup mereka. Di Eki dan Beluta, warga lokal resah karena hutan-hutan yang makin gundul akibat penebangan pohon secara besar-besaran oleh pengungsi untuk dijual sebagai kayu bakar. Di Eki warga lokal juga jengkel karena tempat-tempat umum seperti jalanan, terminal, dan pasar yang menjadi makin kotor dan rusak. Ketegangan ini masih ditambah lagi dengan perselisihan sehari-hari tentang ternak yang masuk kebun dan merusak hasilnya, serta meningkatnya kasus pencurian dan perkelahian.

Kotak 3

Ketika Kepala Desa Mengeluhkan Gelombang Pengungsian

Pengungsi itu mengambil tanah warga kami. Dahulu kami kasihan dengan pengungsi, namun mereka seenaknya sendiri. Mereka ambil tanah, jadi warga kami tidak bisa mengerjakan tanahnya. Padahal warga kami juga butuh tanah untuk hidupnya. Setelah mengambil tanah warga, tanah itu tidak dipagar sehingga kalau ada ternak yang masuk ke lahannya, akan dipotong. Pernah ada kejadian, sapi warga desa sini masuk ke dalam lahan jagung yang ditanami pengungsi. Sapi hanya injak itu benih jagung yang belum tumbuh besar, hanya kira-kira dua benih jagung yang diinjak. Itu sapi langsung diambil sama pengungsi. Saya datangi pengungsi bersama warga yang punya sapi, tapi mereka (pengungsi) keras kepala tidak mau mengembalikan sapi. Mereka ambil dan potong.

Selain itu, pengungsi merusakkan peralatan air tenaga surya. Pencurian peralatan air tenaga surya itu kami sesalkan. Kami baru pakai air itu kurang lebih lima bulan, setelah itu peralatannya diambil sama mereka (pengungsi). Proyek itu dulu bantuan dari pemda. Kami mengusulkan proyek air itu. Oleh pemda diberikan bantuan, 32 lempeng/modul untuk penyimpan panas matahari, 1 bak besar penampung air sekitar 2500–3000 liter, dan 100 pipa paralon. Dahulu proyek air itu mampu menyediakan air untuk 25 kepala keluarga di sini, dan rencananya akan kami salurkan ke semua warga. Namun, begitu pengungsi datang, proyek air itu dirusak dan diambil peralatannya. Setelah itu, warga kami kesulitan air untuk minum, mengairi lahannya, dan menanam sayur di sekitar rumahnya. Sekarang warga kami harus ambil air dari sumber. Ada juga yang harus minta air ke warga yang sudah punya sumur. Warga kami dari 74 KK di dusun ini, kurang lebih sudah 25 KK yang punya sumur pribadi. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai negeri.

(Wawancara profil komunitas, laki-laki, 50, Kepala Desa Beluta, 28 Maret 2006)

9.3.2 Penanganan Masalah Pengungsi

Sejak terjadinya gelombang pengungsian dari wilayah eks Timor Timur pada 1999 tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah pengungsi. Penanganan itu dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan daerah, LSM nasional maupun masyarakat internasional. Pada awal 2002, Pemerintah Indonesia memberikan tiga pilihan terhadap para pengungsi Timor Leste, yaitu

- a) repatriasi/pemulangan (sukarela) kembali ke Timor Leste;
- b) transmigrasi ke tempat permukiman di luar wilayah NTT; dan
- c) relokasi ke tempat permukiman di dalam wilayah NTT.

Para pengungsi diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari tiga kemungkinan itu sampai tanggal 31 Desember 2002. Mereka tidak diperbolehkan untuk memilih tinggal di barak-barak pengungsi. Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah tidak adanya barak-barak pengungsian pada 2003. Upaya pemukiman kembali ini dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, yaitu

- a) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda);
- b) Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil);²¹

²¹Tahun 2006 menjadi Departemen Pekerjaan Umum

- c) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans);
- d) Departemen Sosial (Depsos) dan Dinas Sosial (Dinsos); dan
- e) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejak Juni 2001 hingga Februari 2005, lebih dari 18.000 KK pengungsi telah dipulangkan ke Timor Leste. Selain itu, sejak 1999 hingga 2003 pemerintah Indonesia telah membangun 17.272 unit permukiman di wilayah Provinsi NTT dan telah menempatkan 9.178 KK pengungsi ke lokasi permukiman tersebut.

Tabel 23. Repatriasi Eks Pengungsi yang Berada di Timor Barat

Periode	Jumlah Pengungsi dari Wilayah Timor Barat yang Direpatriasi ke Timor Leste KK (Jiwa)
6 Juni 2001 s/d 31 Desember 2002	18.052 KK (53.939 Jiwa)
17 Desember 2003 s/d 28 Februari 2005	234 KK (862 Jiwa)

Sumber: Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 24. Relokasi Eks Pengungsi di Provinsi NTT

Periode	Jumlah Unit yang Dibangun	Jumlah Pengungsi yang Direlokasi	Pelaksana Relokasi
1999–2002	14.532	7.067 KK (29.250 Jiwa)	1. Bappeda 2. Kimpraswil 3. Depnakertrans 4. Dinsos
2003	2.740	2.111 KK (11.041 Jiwa)	1. Kimpraswil 2. TNI 3. Depnakertrans

Sumber: Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Beberapa hambatan utama dalam penanganan pengungsi adalah kurangnya sosialisasi tentang program-program repatriasi dan relokasi kepada para pengungsi. Sosialisasi ini penting karena umumnya pengungsi masih sulit untuk memutuskan pilihannya. Sering kali mereka cemas akan keselamatan mereka jika dipulangkan kembali ke Timor Leste (sekalipun mereka sesungguhnya ingin kembali). Jika tetap tinggal di Indonesia, maka banyak yang cenderung memilih untuk tidak keluar dari wilayah Timor Barat, karena wilayah ini sudah mereka kenal lebih baik. Selain itu, pengungsi juga hanya mendapat informasi yang terbatas tentang kondisi di permukiman baru. Permukiman yang dibangun oleh berbagai lembaga pemerintah tanpa melibatkan pengungsi (apa yang mereka inginkan/harapkan) membuat pengungsi enggan menempati permukiman barunya. Banyak pemukiman tersebut hanya merupakan tempat tinggal dan tidak menyediakan lahan pertanian bagi pengungsi, padahal mereka umumnya petani yang sangat membutuhkan lahan pertanian untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu,

permukiman tersebut juga tidak selalu dilengkapi oleh fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan sarana pendidikan.

9.3.3 Contoh-Contoh Kasus: Penyulut Konflik dan Unsur yang Terlibat

a) Pengeroyokan Kepala Dusun oleh Pengungsi di Eki

Masalah berawal dari hilangnya sandal bermerek milik warga lokal. Beberapa hari kemudian sandal tersebut terlihat dipakai oleh salah seorang pengungsi. Seorang penduduk lokal yang mengetahuinya meminta kembali sandal tersebut, tetapi mereka kemudian terlibat perkelahian. Keributan menjadi lebih besar karena baik warga lokal maupun pengungsi yang terlibat perkelahian menjadi tambah banyak. Kepala dusun yang bermaksud mendamaikan bahkan menjadi sasaran amarah pengungsi. Kepala dusun diserang dan dipukuli. Warga lokal yang hendak membantu kepala dusun juga diserang dan dilempari batu. Kepala dusun tersebut dibawa ke kamp pengungsi oleh para penyerangnya. Setelah kepala desa dan polisi datang ke lokasi perkelahian, kepala dusun dibawa ke Kota Kupang untuk dimintai keterangan dan divisum.

Upaya untuk meredam dan menyelesaikan konflik dilakukan oleh bupati, aparat desa, tokoh agama, dan tokoh adat. Untuk menciptakan perdamaian dibentuk panitia yang dipimpin oleh ketua adat warga lokal dan ketua adat pengungsi. Mereka melakukan upacara adat dengan penanaman sebuah tiang kayu (Tiang Perdamaian) dan pematangan seekor ayam jantan. Dua minggu kemudian dilakukan lagi upacara perdamaian. Dalam upacara itu, kepala dusun memberi uang sebesar 1 juta rupiah kepada komunitas pengungsi sebagai tanda keperdulianya terhadap kesulitan hidup para pengungsi. Utusan pengungsi hendak membalasnya dengan memberi kain. Namun, pemberian kain ini ditolak dengan alasan masalah sudah selesai.

Sekalipun demikian, konflik antara warga lokal dan pengungsi belum selesai secara tuntas. Masih terjadi lagi ketegangan dan ancaman penyerangan oleh pengungsi terhadap warga lokal. Ini menyebabkan beberapa keluarga warga lokal mengungsi selama seminggu karena ketakutan. Selain itu, perkelahian juga terjadi antara sesama pengungsi saat mereka direlokasi di tempat penampungan lain.

b) Peran Tuan Tanah dalam Sengketa Penggunaan Lahan Pertanian oleh Pengungsi di Desa Malo

Luas tanah yang digarap pengungsi di Dusun Neves, Desa Malo, seluruhnya mencapai 5 ha. Lahan itu dimiliki oleh sepuluh KK warga lokal. Pengungsi tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut, sekalipun para pemilik tanah berniat menggarap sendiri atau menjualnya. Situasi ini menjadi awal beberapa kasus sengketa tanah di Desa Malo. Salah satu kasus tersebut terkait dengan perebutan hak atas tanah di antara anggota keluarga Maris yang merupakan keluarga bangsawan dan tuan tanah di Desa Malo.

Pada 2003, seorang pengungsi yang bernama Charles Alexander mendapat izin menggarap sebidang tanah milik keluarga Maris dari Andi Maris. Tahun 2005, beberapa keponakan Andi Maris—yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut daripada Andi Maris—meminta kembali tanah yang digarap oleh Alexander. Namun, Alexander merasa bahwa dia tetap berhak menggarap lahan tersebut. Menurut Alexander, ia akan

menyerahkan kembali tanah yang digarap kepada keluarga Maris kalau ia kembali ke Timor Leste. Selain itu, tanah itu bisa dikembalikan, tetapi pemilik tanah harus membayar ganti rugi sebesar Rp50.000/are/tahun. Biaya tersebut untuk ganti rugi tenaga selama menggarap, biaya makan, dan hasil panen dari tanaman yang sedang ditanam.

Menurut anggota keluarga Maris yang menuntut pengembalian tanah, pengungsi (Alexander) membuat alasan sedemikian rupa agar tanah sulit kembali ke pemiliknya. Namun, menurut pengungsi, tuan tanah Andi Maris) meminta mereka untuk tetap menggarap dan melindungi tanah tersebut agar tidak dijual oleh anggota keluarga tuan tanah lainnya (keponakan Andi Maris). Tampak bahwa di dalam keluarga tuan tanah sendiri terjadi perselisihan dan perebutan kekuasaan. Andi Maris yang memberi lahan garapan kepada pengungsi tidak selalu didukung oleh keluarganya. Dengan memberi izin pengungsi untuk menggarap tanah tertentu, tuan tanah yang bersangkutan berharap agar tanah tersebut tidak bisa dijual atau digarap oleh orang lain dalam keluarganya. Di sini, kebutuhan pengungsi akan lahan pertanian menjadi tersangkut dalam politik perebutan hak atas tanah di antara anggota keluarga bangsawan/tuan tanah desa.

Upaya menyelesaikan sengketa ini telah melibatkan lembaga dari luar desa seperti kecamatan. Namun, pihak kecamatan menilai bahwa sengketa tanah itu adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga Maris sendiri. Oleh karena itu, hingga studi dilakukan masih belum jelas siapa sebenarnya yang lebih berhak atas tanah sengketa itu dan masalah belum bisa diselesaikan.

c) Pengalihan Lahan Pertanian Menjadi Area Permukiman Pengungsi di Lay dan Beluta

Salah satu upaya untuk menangani masalah pengungsian adalah dengan melakukan relokasi, yaitu pemindahan pengungsi dari barak-barak penampungan sementara ke lokasi permukiman tetap. Pengadaan permukiman untuk pengungsi ada yang ditangani oleh pemerintah dan ada pula yang ditangani organisasi internasional. Akhir-akhir ini mulai tumbuh inisiatif para pengungsi untuk mendapatkan lokasi permukiman dengan cara membeli tanah secara mandiri. Umumnya inisiatif ini dibantu oleh LSM. Proses relokasi pengungsi juga terjadi di Desa Lay dan Desa Beluta. Di Lay relokasi ditangani oleh pemerintah (dengan tentara sebagai pelaksana lapangannya), sedangkan di Beluta para pengungsi menegosiasi dan membeli lahan permukiman secara mandiri didampingi oleh LSM X.

Di Lay pengalihan lahan pertanian penduduk lokal untuk dijadikan lokasi permukiman pengungsi menyebabkan konflik dalam masyarakat. Sebagai desa yang masih menganut feodalisme, kekuasaan kepala desa yang juga diakui sebagai Bapak Raja (*Na'i*) Lay masih sangat besar, termasuk kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah desa. Kepala desa melakukan negosiasi dengan pemerintah dan tentara untuk menyediakan tanah bagi permukiman pengungsi tanpa minta pendapat dan persetujuan warga yang menggarap tanah itu. Kepala desa menjanjikan ganti rugi sebesar 7 juta rupiah per hektare kepada warga yang tanahnya dijadikan lokasi permukiman pengungsi (Aluk dan Gama), tetapi hingga kini penggarap/pemilik tanah belum menerima ganti rugi tersebut. Lahan yang diserahkan kepada pengungsi padahal adalah lahan produktif yang ditanami tanaman keras seperti jati dan mente yang hasilnya sangat membantu pendapatan keluarga,

terutama jika terjadi gagal panen. Dalam forum diskusi warga mengemukakan bahwa masalah pengalihan tanah yang sewenang-wenang ini menjadi lebih buruk karena warga resah akibat perilaku para pengungsi yang cenderung agresif dan tidak mau mendengarkan pendapat warga lokal. Akibatnya, mereka enggan menegur para eks pengungsi yang merupakan warga baru di desa mereka karena khawatir terjadi pertikaian.

Lain halnya yang terjadi di Desa Beluta. Sekelompok pengungsi yang berjumlah 24 KK dan dipimpin oleh Juan, seorang mantan kepala desa dari Timor Leste, berupaya membeli tanah untuk dijadikan permukiman. Awalnya kelompok pengungsi ini ditampung di stadion Tavares, tetapi menurut Juan ia merasa prihatin dengan kondisi penampungan yang tidak layak huni karena terlalu sempit, ribut, dan berada di dekat jalan besar dengan kendaraan yang lalu lalang sehingga anak-anak tidak bisa bermain dengan aman. Juan kemudian menghubungi Jim, seorang eks pengungsi yang berhasil membeli tanah untuk tempat tinggal di Dusun Soeares–Desa Beluta. Jim kemudian memperkenalkan Juan dengan Samuel, Kepala Dusun Soeares yang berniat menjual tanahnya. Tanah Samuel seluas 10.337,25 m² dibeli secara resmi oleh Juan dengan harga 6 juta rupiah yang pembayarannya dilakukan dalam tiga tahap. Proses jual-beli disahkan dan disaksikan antara lain oleh Kepala Desa Beluta dan staf dari LSM X. Selanjutnya, LSM X membantu 24 KK pengungsi untuk membagi tanah dan membangun rumah. Menurut Juan, warganya sangat bersyukur bisa mengumpulkan uang dan membeli tanah sendiri, tetapi mereka masih menghadapi masalah tidak adanya lahan pertanian. Untuk menyambung hidup, mereka hanya bisa memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah serta mencari pekerjaan di luar sektor pertanian dengan menjadi tukang bangunan. Kelompok Juan sempat berfikir untuk meminjam lahan pertanian pada warga lokal, tetapi mereka masih belum berani mengemukakannya karena, hubungan antara warga baru dan warga lama masih terbatas.

Dalam diskusi, warga lokal mengatakan bahwa umumnya pengungsi yang sudah menetap di desa (membeli tanah dan membangun rumah sendiri) bersikap lebih menghormati aturan desa daripada pengungsi yang masih tinggal di penampungan Tavares dan setiap hari datang ke desa untuk menebang kayu di hutan. Pengungsi di penampungan Tavares tidak punya rasa memiliki sumber daya desa dan tidak merasa terikat dengan aturan desa. Warga lokal tetap merasa kurang nyaman dengan kedatangan unsur baru yang menetap di desa mereka, apalagi jumlah warga baru (eks pengungsi) di suatu komunitas bisa lebih banyak daripada jumlah warga lama (lokal). Di Beluta, warga lokal tidak bisa memprotes pembelian lahan pertanian oleh pengungsi untuk dijadikan permukiman karena tanah yang diperjualbelikan adalah tanah pribadi. Sepanjang tidak terjadi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya, ketegangan hanya akan bersifat laten. Namun, potensi konflik tetap ada karena cepat atau lambat para eks pengungsi akan mencari lahan pertanian. Ini berarti akan terjadi redistribusi tanah pertanian yang ada, baik melalui cara yang legal maupun ilegal.

9.4 Akibat Konflik terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dan Komunitas

9.4.1 Membandingkan Berbagai Wilayah yang Terkena Konflik

Pemilihan tiga kabupaten sebagai lokasi penelitian, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Belu, didasarkan pada pemikiran tentang potensi konflik yang terkait dengan jumlah eks pengungsi Timor Leste di masing-masing wilayah. Secara teoretis, makin besar jumlah pengungsi di suatu daerah, makin besar potensi konfliknya. Jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Belu, menyusul Kabupaten Kupang, dan jumlah terkecil di Kabupaten TTS. Di tiga kabupaten tersebut dipilih lima desa untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, dilakukan juga penelitian singkat di Desa Metan, Kupang sebagai penelitian uji coba.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik tidak selalu berkorelasi dengan jumlah pengungsi. Konflik dengan intensitas tinggi (penggunaan kekerasan, korban material, dan nonmaterial yang lebih besar) justru terjadi di Kabupaten Kupang dengan salah satu contoh konflik yang paling parah di Desa Metan. Pada 2000, di desa ini terjadi bentrokan antara warga lokal dan pengungsi yang menyebabkan terjadinya pembakaran rumah warga lokal oleh pengungsi dan hampir seluruh warga lokal terpaksa meninggalkan desa mereka selama beberapa minggu untuk menyelamatkan diri. Sebelum konflik terbuka ini terjadi, ketegangan antara warga lokal dan pengungsi muncul dalam kehidupan sehari-hari yang, antara lain, terkait dengan persaingan dalam melakukan mata pencaharian, terjadinya perusakan dan pengotoran lingkungan hidup, meningkatnya kriminalitas, sikap saling curiga, dan stigmatisasi.

Konflik-konflik yang terjadi di Eki, Malo, Lay, dan Beluta tidak sedemikian intensif seperti konflik di Metan. Dalam analisis mengenai perdamaian dan pembangunan di NTT, Sunarto *et al.* (2005: 34) menyebutkan bahwa hubungan antara pengungsi dan warga lokal berbeda dari tempat ke tempat. Ada daerah-daerah di mana hubungan antara kedua kelompok berjalan relatif lebih baik daripada di tempat-tempat lain, misalnya, dalam mengatur pemanfaatan sumber daya desa, terutama lahan pertanian. Selain itu, dari berbagai wawancara dengan LSM yang bergerak dalam bidang penanganan pengungsi (misalnya LSM X, dan LSM V) diperoleh informasi bahwa jarak sosial-budaya antara warga lokal dan pendatang juga menentukan sejauh mana interaksi mereka berpotensi menimbulkan konflik. Sekalipun di Kabupaten Belu terdapat paling banyak pengungsi, konflik yang berintensitas tinggi justru terjadi di Kupang.

Di Belu yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, banyak orang masih memiliki kaitan (etnis, bahasa, dan kekerabatan) dengan orang dari Timor Leste. Di Desa Beluta, misalnya, sebagian warga lokal masih mengakui hubungan dengan rumah adat di Timor Leste dan oleh karena itu, konflik dengan eks pengungsi bisa lebih mudah diredam dengan menekankan ikatan '*basudara*' (bersaudara) di antara mereka. Selain itu, mayoritas warga Belu dan para eks pengungsi sama-sama memeluk agama Katolik. Lain halnya dengan di Kupang. Daerah urban ini memiliki diversitas kesukuan yang lebih besar. Banyak di antara suku-suku ini tidak memiliki kaitan apa pun dengan komunitas pengungsi. Selain itu, di Kupang jauh lebih banyak orang yang memeluk agama Kristen

Protestan sehingga perbedaan agama dengan para pengungsi juga bisa menjadi salah satu sumber ketegangan.

Data menunjukkan bahwa ketegangan sosial dan konflik terbuka antara warga lokal dan eks pengungsi merupakan masalah yang meresahkan bagi masyarakat di Eki, Malo, Lay, dan Beluta, sekalipun ketegangan dan konflik yang terjadi tidak seintensif di Desa Metan. Dalam forum diskusi dan wawancara, diperoleh data yang menunjukkan bagaimana ketegangan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, juga jelas bahwa ketegangan sosial yang terjadi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap dinamika kesejahteraan, baik pada tingkat rumah tangga maupun komunitas. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut, karakteristik konflik yang ada di keempat desa dan bagaimana karakteristik ini memengaruhi dinamika kesejahteraan masyarakat.

9.4.2 Karakteristik dan Biaya Konflik

Karakteristik pertama yang penting untuk dikaji adalah skala konflik. Jika kita juga memperhitungkan konflik yang terjadi di Desa Metan dalam analisis, maka dapat disebutkan bahwa konflik Metan terjadi dalam skala yang paling besar dibanding dengan konflik-konflik di Eki, Malo, Lay, dan Beluta. Dalam konflik Metan, konflik terbuka (bentrokan) yang terjadi secara langsung melanda seluruh masyarakat desa termasuk para aparat desa, sekalipun kerugian yang diderita tidak sama. Sebagian besar warga desa terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang terjadi (intimidasi, penganiayaan, dan pembakaran rumah). Di Eki juga terjadi konflik terbuka dengan kekerasan (perkelahian kelompok dan pengeroyokan kepala dusun), tetapi tidak semua warga desa secara langsung terkena konflik karena tidak seluruh warga ikut dalam perkelahian. Di Malo, sengketa tanah terjadi antara warga lokal tertentu (keluarga Maris) dengan eks pengungsi. Sementara itu, di Lay dan Beluta sebagian besar konflik masih dalam bentuk konflik tertutup/laten. Konflik terbuka yang terjadi antara warga lokal dan eks pengungsi di kedua desa tersebut hanya melibatkan sejumlah kecil orang.

Jika kita kembali pada perspektif bahwa biaya-biaya konflik membuat masyarakat turun kesejahteraannya, maka biaya-biaya konflik itu harus cukup besar sehingga ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Biaya konflik yang besar itu bisa terjadi melalui dua cara, yaitu tingkat perusakan yang tinggi (penggunaan kekerasan dalam skala besar) dan/atau berlangsung dalam periode yang lama (berlarut-larut). Dua hal tersebut tidak terdapat pada karakteristik konflik di keempat desa. Dengan kata lain, hingga kini konflik-konflik yang terjadi di Eki, Malo, Lay, dan Beluta belum menimbulkan biaya material yang besar karena konflik terbuka terjadi pada skala yang relatif kecil (sporadis dan individual) dengan tingkat perusakan yang relatif rendah.

Bagaimana dengan keluhan warga tentang lahan pertanian mereka yang digunakan oleh eks pengungsi selama lebih dari 5 tahun tanpa kompensasi apa pun? Hubungan pinjam-pakai ini memang tidak memberi keuntungan ekonomi bagi warga lokal pemilik tanah. Di daerah-daerah seperti Oecussi, di mana warga lokal dan eks pengungsi sepakat untuk memanfaatkan tanah dengan cara bagi hasil, hubungan antara dua kelompok bisa terjalin lebih baik (Sunarto *et al.* 2005). Sekalipun demikian, untuk menentukan sejauh mana praktik pinjam pakai tanah secara gratis oleh eks pengungsi di Eki, Malo, Lay, dan Beluta memang menurunkan kesejahteraan warga lokal, perlu diketahui sejauh mana

tanah yang dikerjakan pengungsi tersebut dimanfaatkan pemiliknya. Dari wawancara mendalam diperoleh data bahwa petani tidak selalu bisa menggarap seluruh tanah yang dimilikinya karena kurang tenaga pekerja. Jadi, ada tanah-tanah yang sejak semula memang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya yang kemudian digarap oleh eks pengungsi. Dengan demikian, yang "hilang" atau "diserobot" oleh pengungsi adalah nilai ekonomi tanah sebagai aset serta *opportunity cost* tanah tersebut jika dilakukan bagi hasil atau disewakan, dan bukan (selalu) nilai ekonomi hasil pertanian tanah itu.

Namun, biaya konflik juga bisa berupa biaya nonmaterial, misalnya, rasa tidak aman dan tidak nyaman, kecurigaan, depresi, trauma, dan berbagai gangguan psikologis lain. Hal tersebut bisa menurunkan kesejahteraan, baik pada tingkat individu maupun komunitas, tetapi sulit untuk dihitung berapa besar kerugian yang dialami. Dalam berbagai wawancara dan forum diskusi, warga lokal menekankan rasa tidak nyaman dan tidak aman yang muncul setelah terjadinya gelombang pengungsian pada 1999. Di Eki dan Beluta, misalnya, kelompok diskusi sepakat bahwa eks pengungsi seharusnya dimigrasikan ke luar wilayah Timor Barat. Pemikiran yang tidak kompromistis semacam ini tidak selalu menyulut konflik terbuka, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya hal-hal yang mengganggu kehidupan dan oleh karena itu hal tersebut harus disingkirkan sejauh mungkin. Hilang atau terganggunya rasa nyaman dan aman adalah biaya nonmaterial konflik yang membuat kesejahteraan hidup menjadi menurun.

Dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang masyarakat desa (warga lokal khususnya) yang masih harus bergulat dengan masalah kemiskinan dan berbagai hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hambatan-hambatan tersebut banyak yang terkait dengan hal-hal lain seperti iklim yang kering, tanah yang tidak subur, sedikitnya peluang ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan tidak memadainya jaminan sosial. Oleh karena itu, keberadaan pengungsi dan konflik-konflik yang timbul akibat interaksi antara warga lokal dan komunitas pengungsi tidak bisa dengan mudah dilihat sebagai faktor utama yang menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai komunitas penerima pengungsi (*host community*), tidak bisa dielakkan bahwa warga lokal membayar biaya material maupun nonmaterial. Paling tidak mereka harus membagi sumber daya, kesempatan kerja, dan fasilitas umum dengan para pendatang. Namun, melihat karakteristik konflik yang umumnya terjadi, hubungan kausal antara konflik dengan pengungsi dan turunnya kesejahteraan warga lokal belum bisa ditegaskan.

9.4.3 Mekanisme Gangguan terhadap Kesejahteraan

Turunnya kesejahteraan masyarakat akibat ketegangan dan konflik bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah melalui ketidakamanan yang terjadi di masyarakat. Menurut warga lokal di Eki, Malo, Lay, dan Beluta, rasa tidak nyaman dan tidak aman makin terasa setelah terjadi gelombang pengungsian pada 1999. Ketidakamanan ini disebabkan oleh lebih seringnya terjadi berbagai perselisihan dan kriminalitas seperti pertengkaran karena perusakan tanaman, pencurian hasil kebun dan ternak, keonaran, perkelahian, dan ancaman penyerangan.

Pernyataan warga lokal tentang peningkatan kriminalitas di desa mereka setelah 1999 sulit untuk diperiksa silang karena tidak ada data statistik tentang itu. Dalam wawancara

dan forum diskusi warga menceritakan berbagai kasus, tetapi tidak jelas apakah frekuensi tindak kriminal meningkat setelah 1999 dan apakah peningkatan itu secara signifikan terkait dengan keberadaan pengungsi. Sekalipun demikian, jelas bahwa warga lokal merasa kehidupannya terganggu. Kasus-kasus perkelahian di Eki merupakan ilustrasi yang jelas bagaimana kehidupan warga lokal terganggu akibat interaksi yang buruk dengan komunitas pengungsi.

Mekanisme kedua yang bisa mengganggu kesejahteraan warga lokal adalah perebutan sumber daya dan peluang ekonomi. Di seluruh desa yang menerima pengungsi, terdapat beberapa mata pencaharian yang menjadi sulit atau bahkan tidak bisa lagi dilakukan karena meningkatnya persaingan untuk memperoleh bahan baku dan kian jenuhnya pasar. Di Eki, persaingan terutama terjadi antara warga lokal dan pengungsi yang bekerja sebagai pedagang dan buruh tani. Di Beluta, warga lokal tidak bisa lagi berjualan kayu bakar karena sebagian besar pengungsi juga mencari dan menjual kayu bakar, sedangkan ketersediaan kayu kering sangat terbatas. Di Malo, petani mengeluhkan harga bawang yang rusak karena pengungsi berani menjual bawang mereka Rp3000/kaleng, sedangkan petani lokal umumnya menjual Rp4000–5000/kaleng. Seorang warga Eki memberi ilustrasi yang jelas tentang perebutan sumber daya dan peluang ekonomi antara warga lokal dan pengungsi,

... Kita (warga lokal) garap sawah, mereka (pengungsi) juga garap sawah. Kita tanam dan jual sayur mereka juga melakukan yang sama. Warga sini jual kayu, mereka juga jual kayu. Akibatnya, terjadi persaingan dalam usaha sehingga harga-harga turun. Apalagi dalam usaha sayur, rata-rata mereka menjual sayur dengan harga yang lebih rendah sehingga sayur yang dijual warga sini tidak laku ... (FGD, laki-laki, 45)

X. Kesimpulan dan Rekomendasi

10.1 Kesimpulan

10.1.1 Pengaruh Faktor-Faktor Struktural terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Beberapa jenis stratifikasi sosial di lima desa terbentuk berdasarkan faktor ekonomi, faktor politik/hubungan kekuasaan, faktor budaya, dan sejarah migrasi. Stratifikasi ekonomi terdapat di semua desa dan secara umum bersifat terbuka dan inklusif. Pada pokoknya, anggota masyarakat bisa mengalami perubahan kondisi ekonomi, baik secara positif (mobilitas ke atas) maupun dengan cara negatif (mobilitas ke bawah). Pelapisan ekonomi ini sering didasari oleh kepemilikan aset, tingkat penghasilan dan kapasitas/kemampuan anggota rumah tangga. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, hampir semua desa menjadi lebih berlapis (*more stratified*). Umumnya lapisan sosial yang bertambah adalah pada golongan menengah dan atas. Dengan demikian kedua golongan itu menjadi lebih heterogen.

Stratifikasi berdasarkan hubungan kekuasaan umumnya terkait erat dengan stratifikasi berdasarkan faktor budaya, khususnya di desa-desa di mana terdapat kelompok bangsawan. Kelompok elite ini mendapat hak-hak istimewa secara turun-temurun untuk menduduki kepemimpinan lokal. Oleh karena itu, di beberapa desa stratifikasi politik dan budaya bersifat tertutup dan eksklusif. Setelah terjadinya gelombang pengungsian dari Timor Leste pada 1999, di berbagai desa yang menerima pengungsi juga terjadi pelapisan sosial berdasarkan sejarah migrasi. Perbedaan dan interaksi antara warga lama (warga lokal) dengan warga baru (eks-pengungsi) berpotensi konflik, terutama karena menimbulkan persaingan dan perebutan dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang ekonomi.

Berbagai bentuk stratifikasi sosial memengaruhi mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan karena dapat menjadi lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) atau menjadi lingkungan yang menghambat (*constraining environment*) bagi upaya peningkatan kesejahteraan. Sekalipun demikian, banyak hal yang menjadi bagian dari *enabling environment* (misalnya, pelaksanaan kepemimpinan lokal yang lebih demokratis, tidak adanya diskriminasi dalam memanfaatkan fasilitas umum, dan peluang ekonomi) masih membutuhkan dukungan dan intervensi dari luar dalam bentuk berbagai program pembangunan dan subsidi supaya bisa menguntungkan warga secara konkrit. Sebaliknya, banyak hal-hal yang menjadi bagian dari *constraining environment* (misalnya kekuasaan elite desa yang terlalu besar, lemahnya posisi tawar warga biasa, dan hubungan sosial yang diskriminatif) mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk secara langsung memengaruhi upaya meningkatkan kesejahteraan.

Distribusi rumah tangga dalam stratifikasi sosial-ekonomi di lima desa menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun makin banyak warga yang berada di lapisan-lapisan tengah dan atas. Ini berarti di lima desa terdapat peningkatan kesejahteraan. Selain itu, proporsi warga yang berada di lapisan terbawah (termiskin) dan teratas

(terkaya) berkurang. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi terdapat warga yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari lapisan termiskin, dan di sisi yang lain sebagian orang di kelompok terkaya mengalami penurunan ke lapisan tengah, atau lapisan kaya menjadi makin terdiferensiasi sehingga kelompok terkaya makin kecil jumlahnya. Namun, secara umum, kesenjangan ekonomi menjadi lebih kecil.

Salah satu pengaruh kesenjangan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tampak pada kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Peluang ekonomi yang membutuhkan modal, misalnya berdagang kecil-kecilan, menjadi tukang ojek, atau menjadi tenaga kerja di luar negeri umumnya bisa memberi keuntungan bagi kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Mereka lebih mampu menyediakan modal kerja secara mandiri, termasuk untuk menyediakan biaya persiapan menjadi TKI. Ketika kegiatan ekonomi itu sudah berjalan, pendapatan yang dihasilkannya makin memperkuat posisi ekonomi warga yang sejak awal memang sudah lebih sejahtera daripada mayoritas warga desa yang lain. Peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara lebih merata oleh seluruh warga desa umumnya yang didasari oleh bantuan atau subsidi sehingga semua warga bisa mempunyai akses terhadap tambahan modal kerja dan ternak atau mempunyai akses untuk memanfaatkan fasilitas umum yang penting bagi kegiatan pertanian dan peternakan (misalnya bantuan ternak, pembangunan bak penampungan, dan pipa air).

Kesenjangan sosial-budaya dan politik yang didasarkan pada praktik feodalisme lokal menciptakan hubungan asimetris di antara warga desa, tetapi tidak selalu berpotensi konflik. Umumnya kedudukan istimewa kelompok bangsawan diterima dan dipatuhi oleh rakyat biasa sebagai bagian dari adat. Namun, jika penerapan hak-hak istimewa itu hanya bertujuan memperkaya kelompok tertentu dan bahkan merugikan kelompok lain, maka hubungan asimetris ini memiliki potensi konflik. Di desa-desa di mana kelompok bangsawan juga secara efektif menjabat dalam kepemimpinan formal, warga lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat upaya mereka untuk menjadi lebih sejahtera.

Pelaksanaan politik dan pemerintahan lokal memiliki karakteristik yang berbeda-beda di lima desa. Di semua desa, partisipasi politik dilakukan secara berjenjang dan selektif. Umumnya laki-laki dewasa adalah para aktor utama di panggung politik desa. Di desa yang terdapat feodalisme lokal, seleksi dan jenjang tersebut bertambah karena para aktor utama dan pemegang kekuasaan adalah para laki-laki dewasa yang termasuk dalam keluarga bangsawan. Dengan partisipasi politik yang berjenjang dan selektif ini berarti ada kelompok-kelompok warga yang hanya mempunyai peluang kecil untuk menyuarakan dan melindungi kepentingannya. Kelompok-kelompok ini umumnya (hampir) tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan-keputusan yang penting bagi kehidupan mereka.

Di desa yang pemimpin lokalnya dapat diganti dan dipilih secara berkala, warga masih bisa melindungi kepentingannya dengan cara memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya. Namun, di desa-desa di mana para pemimpin lokal memperoleh jabatan secara turun-temurun, maka posisi tawar warga dan kemampuan mereka untuk mengontrol tata kelola pemerintahan menjadi lemah. Di desa-desa seperti ini, tata kelola pemerintahan bisa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan, baik yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbagai tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah kemiskinan yang berlarut-larut membuat wilayah ini menjadi tempat yang menarik untuk pelaksanaan program pembangunan. Warga desa pun sering secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka membutuhkan program-program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya karena potensi desa untuk berkembang secara ekonomi sangat kecil akibat iklim yang kering, tanah yang tandus, dan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Program-program pembangunan adalah intervensi dari luar desa yang bisa memungkinkan warga untuk melakukan sesuatu yang sulit mereka lakukan secara mandiri, misalnya, membangun fasilitas umum yang penting untuk kegiatan pertanian (bak penampungan air dan pipanisasi), untuk pemeliharaan kesehatan (pembangunan WC, sumur, perbaikan rumah, dan asuransi kesehatan), dan untuk mengembangkan diversifikasi mata pencaharian (paronisasi sapi dan bantuan kambing). Program-program ini juga termasuk program pembangunan yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kondisi ekonomi warga karena lebih merupakan investasi bagi generasi berikutnya (posyandu, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak, dan BOS).

Ketersediaan infrastruktur juga dapat dilihat sebagai hal yang membantu meningkatkan potensi desa. Salah satu infrastruktur yang dianggap paling penting adalah jalan dan sarana transportasi yang memadai. Infrastruktur ini memungkinkan warga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, misalnya, untuk memasarkan hasil pertanian ke pasar atau untuk menarik tengkulak datang ke desa dan membeli langsung hasil pertanian dari petani. Dapat disebutkan bahwa program pembangunan dan kondisi infrastruktur yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan, termasuk upaya keluar dari kemiskinan, karena kedua hal tersebut bisa memperkaya dan memungkinkan pengembangan potensi desa.

10.1.2 Pengaruh Faktor-Faktor Agensi terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Agensi merupakan kapasitas bertindak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai dan melindungi kepentingannya. Secara lebih detail, agensi terdiri atas beberapa komponen antara lain kepemilikan dan akses terhadap aset material, kemampuan individu (kondisi kesehatan, tingkat pendidikan), kemampuan sosial dan politis, serta psikologis (khususnya terkait dengan rasa percaya diri). Dalam praktiknya, komponen-komponen tersebut tidak berfungsi secara terpisah melainkan saling terkait. Berbagai kasus sejarah hidup menunjukkan bahwa satu komponen (misalnya kemampuan untuk membangun jaringan sosial yang kaya dan menduduki jabatan penting di desa) bisa menguatkan berfungsinya komponen yang lain (misalnya, meningkatkan rasa percaya diri dan semangat kerja). Keberadaan berbagai komponen dan bagaimana mereka berinteraksi secara positif merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana agensi individual maupun kelompok bisa membantu meningkatkan kesejahteraan.

Umumnya, kelompok *mover* dan *always rich* memiliki komponen agensi yang lebih beragam daripada kelompok lainnya. Kelompok ini memiliki aset lebih besar, memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan oleh sebab itu juga sering dipandang mampu untuk menjadi pemimpin lokal/tokoh masyarakat atau terlibat dalam berbagai organisasi sosial. Kedudukan terhormat ini pada gilirannya menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan demikian, karena memiliki kemampuan yang lebih banyak, kelompok *mover* dan *always rich* juga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

Program pembangunan dan bantuan juga bisa meningkatkan berbagai kemampuan warga desa. Karena program pembangunan dan subsidi pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, pengembangan kemampuan warga yang distimulasi oleh program pembangunan juga cenderung bersifat nondiskriminatif. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok yang biasanya berada dalam posisi marginal (kelompok yang paling miskin) juga berpeluang untuk ikut mengembangkan kemampuannya. Contohnya, sebagai desa lab, di Korinus terdapat banyak program peningkatan kesejahteraan dan hampir setiap orang memiliki akses ke berbagai program tersebut dan oleh karena itu bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi lebih sejahtera. Di desa ini, kondisi kesejahteraan kelompok *chronic poor* relatif lebih baik daripada di desa-desa lain.

10.1.3 Pengaruh Aspek Gender terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Sebagian besar masyarakat di Timor Barat menganut sistem patriarkat di mana ayah memiliki kekuasaan yang terbesar dalam keluarga dan laki-laki memiliki status sosial yang lebih tinggi, peran yang lebih penting serta kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Studi ini menggunakan analisis kepala rumah tangga untuk menelusuri sejauh mana ciri-ciri RTP) berbeda dengan RTL. Perbedaan ciri-ciri (termasuk tingkat kesejahteraan) antara RTP dan RTL menunjukkan perbedaan peluang/potensi yang dimiliki atau hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang terkait dengan perbedaan berdasarkan gender.

Secara umum, di bidang ekonomi (mata pencaharian dan sumber-sumber pendapatan) baik PKRT maupun LKRT menunjukkan pola yang sama. Selain itu, kedua jenis kepala rumah tangga juga memiliki akses yang relatif sama untuk mendapatkan kredit dan informasi. Beberapa perbedaan utama, antara lain

- a) jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang termasuk dalam kelompok miskin atau menurun kesejahteraannya lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki;
- b) mayoritas PKRT berusia lebih tua daripada LKRT oleh karena itu PKRT memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami masalah lanjut usia (*ageing*) yang bisa menurunkan kondisi ekonomi (karena kondisi kesehatan memburuk dan tidak mampu lagi untuk bekerja);
- c) tingginya usia PKRT menunjukkan kemungkinan yang lebih kecil untuk menikah lagi sebagai strategi meningkatkan kesejahteraannya; dan
- d) secara umum, perempuan memiliki peran yang lebih kecil dalam proses pengambilan keputusan tingkat komunitas.

Hal-hal tersebut membuat rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan yang tidak dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Hambatan ini tampak dalam identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas. PKRT dan LKRT memiliki persepsi dan pengalaman yang berbeda tentang faktor-faktor utama yang bisa menurunkan kesejahteraan. Bagi PKRT, berakhirnya perkawinan karena kematian ataupun perceraian merupakan faktor yang sangat penting yang menyebabkan turunnya kesejahteraan, sedangkan bagi LKRT, faktor negatif tersebut lebih bervariasi. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi kesejahteraan rumah tangga, lebih banyak PKRT menyebut penuaan sebagai faktor terpenting dibanding dengan LKRT. Faktor-faktor utama yang dianggap bisa menaikkan kesejahteraan bagi PKRT maupun LKRT adalah relatif sama. Semua faktor tersebut terkait dengan kerja, pendapatan, dan pengurangan beban finansial.

10.1.4 Pengaruh Konflik terhadap Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik tidak selalu berkorelasi dengan jumlah pengungsi. Konflik dengan intensitas tinggi (penggunaan kekerasan, korban konflik material dan nonmaterial yang lebih besar) justru terjadi di Kabupaten Kupang. Konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten TTS dan Belu tidak sedemikian intensif. Di Belu yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, banyak orang masih memiliki kaitan (etnis, bahasa, dan kekerabatan) dengan orang dari Timor Leste. Oleh karena itu, konflik dengan eks pengungsi bisa lebih mudah diredam dengan menekankan adanya ikatan '*basudara*' (bersaudara) di antara mereka. Selain itu, mayoritas warga Belu dan para eks pengungsi sama-sama memeluk agama Katolik. Lain halnya dengan di Kupang. Daerah urban ini memiliki diversifitas kesukuan yang lebih besar. Banyak di antara suku-suku ini tidak memiliki kaitan apapun dengan komunitas pengungsi. Selain itu, di Kupang jauh lebih banyak orang yang memeluk agama Kristen Protestan sehingga perbedaan agama dengan para pengungsi juga bisa menjadi salah satu sumber ketegangan.

Data menunjukkan bahwa ketegangan sosial dan konflik terbuka antara warga lokal dan eks pengungsi merupakan masalah yang meresahkan bagi masyarakat di semua komunitas. Ketegangan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, juga jelas bahwa ketegangan sosial yang terjadi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap dinamika kesejahteraan, baik pada tingkat rumah tangga maupun komunitas. Sejauh mana konflik berdampak pada dinamika kesejahteraan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu skala dan biaya konflik. Secara umum, di kelima desa tidak terjadi konflik dengan skala yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada desa yang dinamika kesejahteraannya dipengaruhi secara intensif dan menyeluruh oleh konflik yang terjadi. Di Eki terjadi konflik terbuka dengan kekerasan (perkelahian kelompok dan pengeroyokan kepala dusun), tetapi tidak semua warga desa secara langsung terkena konflik karena tidak seluruh warga ikut dalam perkelahian. Di Malo, sengketa tanah terjadi antara warga lokal tertentu (keluarga Maris) dengan eks pengungsi, sementara di Lay dan Beluta sebagian besar konflik masih dalam bentuk konflik tertutup/laten. Konflik terbuka yang terjadi antara warga lokal dan eks pengungsi di kedua desa tersebut hanya melibatkan sejumlah kecil orang.

Biaya konflik yang besar bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu tingkat perusakan yang tinggi (penggunaan kekerasan dalam skala besar) dan/atau berlangsung dalam periode yang lama (berlarut-larut). Dua hal tersebut tidak terdapat pada karakteristik konflik di desa-desa penelitian. Hingga kini, konflik-konflik yang terjadi belum menimbulkan biaya material yang besar karena konflik terbuka terjadi pada skala yang relatif kecil (sporadis dan individual) dengan tingkat perusakan yang relatif rendah.

Banyak warga mengeluh tentang lahan mereka yang digunakan oleh para eks pengungsi tanpa kompensasi dan dalam jangka waktu lama. Hubungan pinjam-pakai lahan pertanian secara cuma-cuma ini memang tidak memberi keuntungan ekonomi bagi warga lokal pemilik tanah, tetapi tidak selalu merupakan hal yang bisa menyebabkan turunnya kesejahteraan warga lokal. Di antara tanah-tanah yang digarap oleh eks pengungsi, ada yang sejak semula memang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk kasus seperti ini, yang "hilang" atau "diserobot" oleh pengungsi adalah nilai ekonomi tanah sebagai aset serta *opportunity cost* tanah tersebut jika dilakukan bagi hasil atau disewakan, dan bukan (selalu) nilai ekonomi hasil pertanian tanah itu. Sekalipun demikian, biaya konflik juga bisa berupa biaya nonmaterial, misalnya, rasa tidak aman dan tidak nyaman, kecurigaan, depresi, trauma, dan berbagai gangguan psikologis lain. Hal-hal tersebut merupakan biaya nonmaterial yang bisa menurunkan kesejahteraan, baik pada tingkat individu maupun komunitas, tetapi sulit untuk dihitung berapa besar kerugian yang dialami.

Turunnya kesejahteraan masyarakat akibat ketegangan dan konflik bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui ketidakamanan di masyarakat. Menurut warga lokal rasa tidak nyaman dan tidak aman makin terasa setelah terjadi gelombang pengungsian pada 1999. Ketidakamanan ini disebabkan oleh lebih seringnya terjadi berbagai perselisihan dan kriminalitas seperti pertengkaran karena perusakan tanaman, pencurian hasil kebun dan ternak, keonaran, perkelahian, dan ancaman penyerangan. Pernyataan warga lokal tentang peningkatan kriminalitas di desa mereka setelah 1999 sulit untuk diperiksa silang karena tidak ada data statistik tentang itu. Dalam wawancara dan forum diskusi, warga menceritakan berbagai kasus, tetapi tidak jelas apakah frekuensi tindak kriminal meningkat setelah 1999 dan apakah peningkatan itu secara signifikan terkait dengan keberadaan pengungsi. Sekalipun demikian, jelas bahwa warga lokal merasa kehidupannya terganggu.

Mekanisme kedua yang bisa mengganggu kesejahteraan warga lokal adalah perebutan sumber daya dan peluang ekonomi. Di seluruh desa yang menerima pengungsi, terdapat beberapa mata pencaharian yang menjadi sulit atau bahkan tidak bisa lagi dilakukan karena meningkatnya persaingan untuk memperoleh bahan baku dan kian jenuhnya pasar. Di Eki persaingan terutama terjadi antara warga lokal dan pengungsi yang bekerja sebagai pedagang dan buruh tani. Di Beluta warga lokal tidak bisa lagi berjualan kayu bakar karena sebagian besar pengungsi juga mencari dan menjual kayu bakar, sedangkan ketersediaan kayu kering sangat terbatas. Di Malo petani mengeluhkan harga bawang yang rusak karena pengungsi berani menjual bawang mereka lebih murah.

10.1.5 Berbagai Jalan Keluar dari Kemiskinan

Dalam studi ini, kelompok yang berhasil keluar dari kemiskinan (melewati garis kemiskinan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam forum diskusi) disebut kelompok *mover*. Berbagai sumber data menunjukkan bahwa secara umum keberhasilan kelompok ini untuk keluar dari kemiskinan ditunjang oleh berbagai hal berikut.

- a) Adanya peluang/kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan. Strategi yang sering kali berhasil meningkatkan pendapatan adalah dengan adanya lebih dari satu pencari nafkah dalam sebuah rumah tangga (*multiple breadwinners*) dan diversifikasi usaha. Pola diversifikasi usaha ini bermacam-macam, yaitu
 - (1) diversifikasi usaha yang dilakukan pada sektor usaha yang sama, yaitu pertanian. Selain bertani padi, masyarakat (kelompok *mover*) juga menanam sayur-sayuran dan beternak sapi, babi, atau kambing. Hasil pertanian (padi dan sayur-sayuran) biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sementara hasil ternak digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, termasuk sebagai tabungan atau investasi; dan
 - (2) diversifikasi usaha yang terjadi di luar sektor pertanian seperti membuka usaha dagang (membuka kios, berdagang makanan, berjualan beras) atau membuka jasa persewaan (penggilingan padi, *freezer* untuk tempat penyimpanan ikan, dan bisnis persewaan tempat bilyar), dan menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Selain diversifikasi usaha, peningkatan pendapatan terjadi karena adanya pengenalan bibit tanaman baru, baik oleh lembaga pemerintah dari dinas terkait maupun dari lembaga pendanaan lain. Pengenalan bibit bawang merah di Malo dan bibit buah-buahan seperti jeruk, alpukat, kemiri kepada para petani di Desa Korinus telah membuat sumber pendapatan mereka bertambah banyak sekaligus hasilnya bertambah baik. Diversifikasi usaha serta pengenalan bibit baru ini berdampak positif jika ditunjang oleh pasar dan harga yang stabil bagi produk pertanian tersebut, perbaikan jalan, dan sarana transportasi untuk mempermudah proses penjualan sayur.

- b) Adanya program bantuan yang diprakarsai oleh berbagai pihak seperti pemerintah, LSM lokal, dan lembaga pendana asing. Bantuan tersebut ada yang berbentuk:
 - (1) subsidi yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian, seperti bantuan bibit tanaman, atau ternak;
 - (2) bantuan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup, seperti bantuan Raskin, Kartu Sehat, BLT, dan bantuan pembuatan WC. Walaupun tidak berdampak pada ekonomi keluarga secara langsung, bantuan pembuatan WC membuat warga lebih mudah memelihara kesehatan dan kebersihan. Dalam beberapa diskusi, kepemilikan WC di rumah ini menjadi salah satu indikator kesejahteraan keluarga;
 - (3) pembangunan infrastruktur seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembuatan penampungan/bak air, dan pipanisasi yang sangat membantu para petani mengatasi kebutuhan air, terutama pada musim kering; dan
 - (4) bantuan nonmaterial seperti penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan mata pencaharian.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok ini untuk keluar dari kemiskinan selain dikarenakan faktor struktural tersebut juga ditunjang oleh faktor lainnya. Keberhasilan upaya meningkatkan kesejahteraan juga ditunjang oleh faktor kemampuan di tingkat individu dan rumah tangga seperti kemauan untuk bekerja keras, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, hemat, dan mempunyai kepercayaan diri dan kemauan untuk belajar hal-hal baru yang berguna.

Namun, kesejahteraan kelompok *mover* sering kali masih berada dalam kondisi yang cukup rentan, artinya bahwa kejadian-kejadian tertentu yang menimpa mereka dapat membuat mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kejadian atau peristiwa penyebab kerentanan itu adalah sebagai berikut.

- a) Faktor alam. Tanah yang tandus dan musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hampir seluruh petani mengalami gagal panen. Sistem pertanian yang masih sepenuhnya mengandalkan pada musim hujan (sawah tadah hujan), serta sangat terbatasnya sarana irigasi dan pengairan buatan telah membuat para petani kesulitan dalam mencari sumber air alternatif untuk sawah mereka. Selain itu, saat musim hujan pun risiko gagal panen tetap ada karena di beberapa desa kadang terjadi banjir yang merusak tanaman. Dalam kondisi ini bahkan kelompok *mover* pun dapat dengan mudah jatuh kembali dalam kemiskinan. Akumulasi aset, kemampuan/keterampilan, semangat kerja keras, serta motivasi yang tinggi ternyata tidak cukup mampu membuat mereka bertahan di atas garis kemiskinan.
- b) Berkurangnya aset, terutama hewan ternak dalam jumlah yang cukup signifikan. Penyebab berkurangnya aset tersebut di antaranya adalah karena pencurian, terserang penyakit, maupun digunakan untuk keperluan adat. Sering kali para petani-peternak tidak berdaya menghadapi penyakit hewan karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut dan cara mengobatinya. Warga mengeluh bahwa ketidakmampuan tersebut di antaranya disebabkan karena kurangnya penyuluhan dari PPL setempat. Frekuensi kedatangan PPL ke desa sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau kebutuhan seluruh petani di desa. Berkurangnya hewan ternak juga disebabkan oleh adanya kewajiban adat. Keperluan adat tersebut bermacam-macam, misalnya untuk sumbangan kematian, pembayaran belis perkawinan, maupun sumbangan untuk pembuatan rumah adat. Hewan ternak menjadi andalan simpanan keluarga karena masih jarang yang menyimpan atau menabung dalam bentuk uang. Jika terjadi sesuatu yang membutuhkan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang, maka umumnya masyarakat akan menjual hewan ternak mereka untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kondisi kesejahteraan kelompok *mover* kembali dipertaruhkan manakala kebutuhan akan adat tersebut terjadi sewaktu-waktu ketika masyarakat tidak punya persiapan, bersamaan dengan datangnya kebutuhan lain, maupun datang secara berturut-turut.

10.2 Rekomendasi

10.2.1 Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Perlu Diawali dan Didasari oleh Inventarisasi Potensi Masyarakat yang Menjadi Kelompok Sasaran

Setiap upaya untuk membantu dan memfasilitasi warga meningkatkan kesejahteraannya perlu didasari oleh pemikiran bahwa berbagai hambatan, sumber daya, dan peluang yang ada di suatu tempat dan di dalam suatu masyarakat merupakan hal-hal spesifik dan dinamis. Oleh karena itu, program, kegiatan, bantuan, atau subsidi harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi masyarakat yang spesifik dan yang selalu mengalami perubahan, baik di tingkat komunitas maupun rumah tangga. Untuk itu, dalam tahap awal, setiap perencanaan program perlu secara serius memberi perhatian serta menyediakan waktu dan biaya yang memadai untuk mendapat informasi tentang potensi masyarakat di mana program akan dilaksanakan.

Inventarisasi yang baik tentang potensi masyarakat dapat memberi pedoman tentang arah dan cara pelaksanaan program. Hal-hal yang penting dan relevan dalam masyarakat, seperti penerapan hak dan kewajiban adat serta hubungan antarkelompok/lapisan masyarakat—yang bersifat positif maupun negatif—perlu diketahui karena ini akan menjadi konteks yang memengaruhi pelaksanaan program dan hasilnya. Studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban adat—terutama saat orang harus membayar dengan ternaknya—merupakan hal yang dilematis bagi banyak warga. Jika dipenuhi akan menimbulkan tekanan ekonomi dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan tekanan sosial. Ini adalah contoh tentang hal penting dan relevan di masyarakat yang bisa menghambat upaya peningkatan kesejahteraan jika upaya itu dilakukan dalam bentuk akumulasi aset ternak. Inventarisasi potensi masyarakat bisa mengidentifikasi hal-hal ini sejak dini sehingga dapat dicari alternatif untuk mengembangkan aset yang tidak secara otomatis bisa diklaim/digunakan untuk memenuhi kewajiban adat.

Dalam inventarisasi potensi masyarakat tersebut, penggunaan perspektif dari bawah (*bottom-up perspectives*) perlu digunakan, tetapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya perspektif yang harus ada. Pemahaman yang komprehensif terhadap potensi masyarakat juga memerlukan perspektif dari berbagai pihak lain—termasuk *top-down perspectives*—yang terlibat dalam pembangunan. Selain itu, dalam penggunaan perspektif dari bawah juga harus dilakukan secara kritis mengingat heterogenitas posisi dan kepentingan anggota/kelompok masyarakat yang bisa saling berbenturan.

10.2.2 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perlu Berfokus pada Penguatan dan Pengembangan Potensi Masyarakat

Potensi suatu masyarakat adalah refleksi tentang hal-hal yang sudah ada, mulai ada, dan belum ada di dalam masyarakat itu, yang bisa menjadi basis bagi perkembangan masyarakat selanjutnya. Intervensi dari luar (misalnya program peningkatan kesejahteraan) yang kompatibel dengan potensi masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan berkelanjutan (*sustainable*) karena intervensi seperti ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sasaran.

Studi ini menunjukkan bahwa warga terutama merasa terbantu oleh program pembangunan yang memungkinkan mereka melakukan atau mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan dan sulit untuk mereka adakan secara mandiri. Ini terutama mengacu pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (sumur, WC, bak penampungan air, dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma) yang mempermudah warga untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan ekonomi mereka. Pengadaan infrastruktur dan fasilitas umum tersebut telah mengisi hal-hal yang belum ada dalam potensi masyarakat dan oleh karena itu, dapat dilihat sebagai pengembangan potensi masyarakat.

Pengembangan dan penguatan potensi masyarakat ini juga bisa dilakukan pada tingkat individu dan rumah tangga, misalnya, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Di beberapa desa yang diteliti terdapat program peningkatan kesejahteraan yang berbentuk bantuan ternak kambing. Menurut warga, banyak ternak bantuan sakit dan mati karena mereka tidak tahu cara memelihara secara benar dan oleh karenanya mereka mengharap mendapat penyuluhan tentang hal itu. Sekalipun sebagian besar warga desa sudah memiliki pengalaman memelihara ternak, terutama sapi dan babi, mereka masih perlu menambah pengetahuan tentang pemeliharaan kambing secara benar.

10.2.3 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perlu Memberi Perhatian Khusus pada Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Mata Pencaharian Utama Masyarakat

Orientasi pada hambatan dalam melaksanakan mata pencaharian utama warga adalah hal yang penting karena berdampak pada sebagian besar anggota masyarakat. Di lima desa yang teliti, mata pencaharian utama mayoritas warga adalah di sektor pertanian di mana kondisi alam seperti tanah yang tandus dan kemarau panjang menjadi hambatan terbesar. Oleh karena itu, perbaikan ketersediaan air untuk keperluan pertanian (khususnya di musim kemarau) merupakan hal yang bisa mengembangkan kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan. Di beberapa desa, program pembangunan bendungan, bak penampung air, perluasan jaringan perpipaan, dan perlindungan mata air sangat bermanfaat bagi mayoritas warga karena mereka dapat meningkatkan hasil pertaniannya.

10.2.4 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perlu Membuka Peluang bagi Masyarakat untuk Melakukan Diversifikasi Usaha

Diversifikasi usaha dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan peluang yang ada di suatu desa. Di desa-desa yang terutama tergantung pada sektor pertanian, diversifikasi usaha dapat dilakukan dengan mengombinasikan kegiatan pertanian dengan kegiatan perternakan. Namun, diversifikasi usaha juga sebaiknya diupayakan di luar sektor pertanian agar resiko kehilangan/penurunan penghasilan tidak tertumpuk di satu bidang saja. Di desa-desa penelitian, diversifikasi usaha nonpertanian umumnya dilakukan dalam usaha perdagangan (membuka warung/kios) dan jasa (menjadi tukang bangunan, tukang ojek, tukang pijat, membuka persewaan tempat main biliar, dan menjadi tenaga kerja di luar negeri). Semua usaha tersebut membutuhkan modal kerja dan beberapa di antaranya juga membutuhkan keterampilan/pengetahuan khusus. Studi menunjukkan bahwa warga yang berhasil melakukan diversifikasi usaha sering kali juga

mampu mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui penyediaan modal dan penambahan pengetahuan/keterampilan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi di luar bidang pertanian.

Daftar Acuan

- Anwar, Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol (eds.) (2005) *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific. Histories, Political Economies and Policies*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan UNDP (2004) *Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
- Barron, P, Rachael Diprose, David Madden, Claire Q. Smith, dan Michael Woolcock (2004) 'Do Participatory Development Projects Help Villagers Manage Local Conflicts? A Mixed Methods Approach to Assessing the Kecamatan Development Project, Indonesia'. *CPR Working Paper No. 9*.
- Barron, P, dan D. Madden (2004) 'Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia.' *Conflict and Community Development Research and Analytical Program. Indonesia Social Development Paper No. 2*.
- Barron, P, C. Smith dan M. Woolcock (2004) 'Understanding Local Level Conflict in Developing Countries. Theory, Evidence and Implications from Indonesia.' *Social Development Papers. Conflict Prevention & Reconstruction*. Paper No. 19.
- Bertrand, Jacques (2004) *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colletta, Nat J. dan Michelle L. Cullen (2000) 'The Nexus between Violent conflict, Social Capital and Social Cohesion: Case Study from Cambodia and Rwanda.' *Social Capital Initiative Working Paper No. 23*.
- Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (Eds.) (2002) *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Leiden: KITLV Press [Verhandelingen 194].
- Cramer, Christopher (2001) 'Economic Inequalities and Civil Conflict.' *Centre for Development Policy & Research (CDPR) Discussion Paper 1501*.
- Diamond, Larry (2004) 'Moving Up Out of Poverty: What Does Democracy Have to Do With It?' *CDDRL Working Papers No. 4*.
- Dreze, Jean (1990) 'Widows in Rural India.' *London School of Economics No. 26, August*.
- Dreze, Jean dan P.V. Srinivasan (1997) 'Widowhood and Poverty in Rural India: Some Interferences from Household Survey Data.' *Journal of Development Economics*, 54, hlm. 217-234.
- Elias, Norbert dan John L. Scotson (1994) *The Established and the Outsiders*. London: Sage Publication.

- Fuwa, Nobuhiko (1999) *The Poverty and Heterogeneity among Female Headed Households Revisited: The Case of Panama*. Chiba University.
- Goodhand, Jonathan (2001) 'Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty.' *CPRC Working Paper No. 6*.
- Hetler, Carol B. (1990) 'Survival Strategies, Migration and Household Headship'. In Leela Due and Rajni Palriwara, *Structures and Strategies. Women, Works and Family*. New Delhi: Sage Publication.
- Marianti, Ruly (2002) 'Surviving Spouses. Support for Widows in Malang, East Java.' Ph.D Thesis Amsterdam University.
- Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, dan Sarah Koch-Schult (2000) *Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us?* Oxford: Oxford University Press for the World Bank.
- Nelson, Joan N. (1998) *Poverty, Inequality and Conflict in Developing Countries*. New York: Project on World Security Rockefeller Brothers Fund..
- Octora, Samuel (2006) 'Mungkinkah Belis Disederhanakan?' *Kompas* 21 Juli.
- Oey-Gardiner, Mayling dan Soedarti Surbakti (1991) *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2004) *Modern Sociological Theory*. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill .
- Setyawan, Bayu (2004) *Barriers to Male Participation in Family Planning in West Timor*. [online] <<http://www.unescap.org/>>.
- Sunarto, Kamanto, Melina Nathan, dan Suprayoga Hadi (2005) *Overcoming Violent Conflict: Volume 2, Peace and Development Analysis in Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: CPRU, Lab Sosio dan Bappenas.
- Samuel, Clark (ed.) (2004) 'More Than Just Ownership. Ten Land and Natural Resource Conflict Case Studies from East Java and Flores.' Conflict and Community Development Research and Analytical Program. *Indonesia Social Development Paper No. 4*. Jakarta: The World Bank.
- Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma, Rima Prama Artha, dan Sumarto Sudarno (2005) 'Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia.' SMERU Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Suryahadi, Asep, Sudarno Sumarto, dan Lant Pritchett (2003) 'The Evolution of Poverty During the Crisis in Indonesia.' Revised Version. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Tajima, Yuhki (2004) 'Mobilizing for Violence: The Escalation and Limitation of Identity Conflicts. The Case of Lampung, Indonesia.' Conflict and Community

Development Research and Analytical Program. *Indonesia Social Development Paper No. 3*. Jakarta: The World Bank.

Varshney, A. R. Panggabean dan M.Z. Tadjoeeddin (2004) 'Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003).' *UNSFIR Working Paper – 04/03*.

Verstegen, Suzanne (2001) 'Poverty and Conflict. An Entitlement Perspective.' Briefing Paper. *Collective Prevention Network (CPN)*.

Wright, Erik Olin (1999) 'Metatheoretical Foundations of Charles Tilly's, Durable Inequality.' Makalah dipresentasikan pada panel Charles Tilly's Durable Inequality dalam the Social Science History Conference, Chicago Illinois, November 20-23.

Lampiran

Lampiran 1

Tangga Kesejahteraan

A. Pengertian

Tangga kesejahteraan adalah gambaran berbagai tingkat kesejahteraan yang ada di dalam suatu komunitas, mulai dari lapisan terbawah (termiskin) hingga lapisan teratas (terkaya atau paling sejahtera). Tangga kesejahteraan di suatu komunitas akan berbeda dengan komunitas yang lain. Tangga ini diidentifikasi oleh peserta kelompok diskusi terfokus (FGD), jadi merupakan pendapat bersama peserta diskusi tentang berbagai tingkat kesejahteraan di masyarakat mereka.

Dalam studi ini, tangga kesejahteraan dibuat dalam FGD Tangga Kesejahteraan (*FGD Ladder of Life*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

1. berbagai faktor yang membantu atau sebaliknya menghalangi upaya untuk keluar dari kemiskinan sebagaimana dialami warga komunitas/desa;
2. berbagai faktor yang membantu atau sebaliknya menghalangi upaya keluar dari kemiskinan sebagaimana dialami rumah tangga, beserta alasan-alasan pergerakan di antara tangga kehidupan (anak tangga kesejahteraan) yang ada;
3. urutan dan interaksi antarfaktor sebagaimana dialami rumah tangga sehingga memungkinkan pergerakan di antara tangga kehidupan (anak tangga kesejahteraan/*Ladder of Life*) yang ada; dan
4. perubahan status yang terjadi pada rumah tangga tertentu.

Dalam FGD ini, informan dibagi dalam dua kelompok, yaitu: satu kelompok laki laki berjumlah enam–delapan orang (usia 30–60 tahun) dan satu kelompok perempuan berjumlah enam–delapan orang (usia 30–60 tahun). Selain itu, dipilih peserta FGD/informan:

1. antara lain dari kalangan tokoh masyarakat untuk kegiatan 3 dan 4 yang memiliki pengetahuan tentang kehidupan dan mengenal sebagian besar masyarakat di komunitas terpilih;
2. tidak hanya dari kelompok miskin; tetapi sebaiknya dapat mewakili stratifikasi sosial yang berbeda;
3. dengan pertimbangan bila terlalu muda maka yang bersangkutan tidak memiliki cukup pengalaman (karena ditanyakan pengalaman sepuluh tahun yang lalu) dan jika terlalu tua, maka tidak akan aktif dalam diskusi dan mungkin sudah lupa dengan kejadian yang ada; dan
4. bergantung pada besarnya komunitas. Peserta FGD hanya dapat memberikan informasi tentang kehidupan maksimum 150 orang warga dalam komunitas tersebut. Jika komunitas besar, maka FGD dilakukan pada komunitas yang lebih kecil, misalnya, tingkat RT.

Langkah-langkah kegiatan:

- Langkah 1 Memahami mobilitas masyarakat desa
- Langkah 2 Membangun tangga kesejahteraan (anak tangga kesejahteraan) di tingkat desa

- Langkah 3 Menentukan tangga kesejahteraan di tingkat komunitas (dusun/ kampung/ RW)
- Langkah 4 Memilah rumah tangga menurut tangga kehidupan (anak tangga kesejahteraan) di tingkat komunitas
- Langkah 5 Menggali lebih dalam mobilitas sosial di setiap anak tangga di tingkat komunitas

Dalam penelitian ini komunitas mengacu pada kelompok/unit yang terdiri dan 100–150 KK. Oleh karena itu, komunitas bisa berupa RT, RW, kampung, atau dusun.

B. Tangga Kesejahteraan (2006) yang Digunakan sebagai Dasar Sampling di Setiap Komunitas

Desa Eki

(FGD kelompok laki-laki)

Tangga 5

Amuit

- Rumah tembok, atap seng, lantai semen
- Pendidikan KK: SD–sarjana; anak: SD–sarjana
- Berobat ke pustu, puskesmas, RS, atau dokter
- Petani, pengusaha, PNS
- Penghasilan minimal Rp1.000.000
- Berpartisipasi, biasanya ditokohkan dan dihormati, ikut pemilu, bukan pengurus parpol
- Perabot rumah tangga lengkap, ada mobil, ada motor, kursi sofa, motor ojek 2 atau lebih, HP, sapi 3-50 ekor

Tangga 4

Cukup

- Rumah tembok, atap seng, luas 6m x 9m atau 8m x 9 m, bangun rumah bertahap
- Pendidikan KK: SD–SMA; anak: minimal SMA
- Berobat ke puskesmas, beberapa ke dokter
- Pekerjaan: petani, PNS, pengusaha kecil
- Penghasilan: Rp750.000–Rp1.000.000/bulan
- Ikut pemilu, ada yang jadi pengurus parpol
- Makan 3 x sehari; nasi, pisang, ubi-ubian, lauk ikan, dan sayur
- Ada mobil untuk angkutan umum, motor pribadi, telepon, parabola, TV 20–21 inci, HP

Tangga 3

Pas

- Dinding bebak, atap seng, lantai semen
- Pendidikan KK: SD–SMA; anak: SD–SMA
- Beli obat di kios, berobat ke pustu, RSU, atau dokter
- Pekerjaan: petani, PNS rendahan/honorar, wiraswasta
- Penghasilan: Rp500.000 per bulan
- Ikut pemilu dan parpol, bukan pengurus

- Makan 2x sehari; nasi, pisang, ubi-ubian, ada lauk

Tangga 2

Pas-pas

- Dinding bebek, atap daun, lantai tanah, luas dari 4m x 6m sampai 5m x 7m
- Pendidikan KK: Tidak sekolah sampai SD, anak: SD-SMA
- Beli obat di kios, berobat ke pustu, ada yang ke dokter (sakit berat)
- Pekerjaan: petani, buruh tani, buruh bangunan
- Penghasilan: rata-rata Rp150.000/bulan
- Ikut pemilu
- Makan 2x sehari; nasi, pisang, dan ubi-ubian
- Ada ternak kecil (babi), TV 14–17 inch
- Makan 2x sehari; nasi, pisang, ubi-ubian, ada lauk

Tangga 1

Melarat

- Tidak ada rumah, yang ada hanya gubuk kecil
- Pendidikan KK: rata-rata tidak sekolah, ada yang tamat SD; anak bisa sekolah.
- Kalau sakit pasrah tinggal tunggu mati saja, atau berobat ke bidan atau dukun kampung dan minum obat kampung
- Pekerjaan: kerja hari ini untuk makan hari ini; kerja musiman.
- Penghasilan Rp150.000 per musim, kadang Rp10.000/bulan
- Ikut gotong royong, tapi tidak ikut arisan
- Ikut pemilu
- Makannya sederhana
- Pakaian jelek

Desa Malo

(FGD kelompok perempuan)

Tangga 4

Kaya (Atoin A' Muít)

- Memiliki rumah permanen dan lantai keramik
- Di dalam rumah memiliki kursi sofa
- Memiliki tempat tidur dari kayu berukir dan besi dan *spring bed*
- Ada kamar mandi di dalam rumah yang menggunakan kloset
- Mempunyai parabola, TV, *handphone*
- Jumlah anggota keluarga 5–8 orang
- Makan, minum bergizi setiap hari
- Pakaian mewah. Kalau membeli pakaian dengan harga Rp300,000 lebih. Tempat belanja di toko, baik di Mora²² maupun di Kupang
- Kalau sakit mereka berobat langsung ke dokter praktik dan *opname*

²²Pasar di kota kabupaten

- Pendidikan orang tua: SMA sampai sarjana; anak: sampai sarjana
- Memiliki tabungan rata-rata Rp5000.000 lebih
- Pendapatan rata-rata Rp1000.000–Rp5000.000/bulan
- Pekerjaan sebagai PNS: guru dan pegawai. Umumnya adalah pendatang
- Lahan mereka rata-rata 1 ha.
- Di bidang kerohanian /keagamaan (untuk komunitas Kristen Protestan) menjadi majelis, penatua, dan diakon/pelayan
- Di bidang pemerintahan ada yang hanya menjadi masyarakat biasa

Tangga 3

Cukup Ada (*Atoin Sukan Mui*)

- Rumah tembok tetapi belum plester. Ada rumah setengah tembok, lantai tanah atau lantai kasar
- Di dalam rumah memiliki kursi dan meja plastik dan meja kayu
- Memiliki tempat tidur dari kayu dan berukir, besi dan *spring bed*. Memakai juga kasur kapok
- Alat dapur seperti periuk 2–5 buah, piring, sendok, termos, dandang, dan *tacu* (kuali besar)
- Ada kamar mandi yang menggunakan kloset di dalam rumah maupun ada di luar rumah dan sudah berdinding tembok
- Memiliki TV, parabola, *handphone*
- Memiliki sepeda motor 1 buah sebagian beli *cash* sebagian lainnya kredit
- Jumlah anggota keluarga 3–5 orang
- Memiliki ternak: babi, ayam, kambing, dan anjing dengan jumlah 1–2 ekor
- Makan, minum lebih cukup lagi dan sehari 3 kali (pagi, siang, malam). Bahan makanan umumnya adalah nasi sesekali baru jagung. Lauknya sering ikan, ayam dan tempe, tahu.
- Pergi ke pasar 4–5 kali selama sebulan
- Pakaian bagus. Beli di toko, di pasar pada orang Bugis dan Orang Jawa. Harga beli sekitar Rp100,000–Rp200,000. Dalam setahun 2–3 kali membeli pakaian
- Kalau sakit mereka berobat ke puskesmas, rumah sakit, dan ada juga ke dokter praktik. Menggunakan kartu Askes juga
- Pendidikan orang tua: SMA dan PT; anak sekolah sampai PT
- Memiliki tabungan di bank rata-rata Rp1.000.000–Rp2.000.000
- Pendapatan rata-rata Rp500,000–Rp1,500.000 /bulan
- Pekerjaan sebagai pegawai, guru, bidan, dan juga banyak yang pendatang
- Lahan mereka luasnya rata-rata 2–5 ha.
- Di bidang kerohanian/keagamaan (untuk komunitas Kristen Protestan) menjadi majelis, penatua
- Di bidang pemerintahan dapat menjabat RT dan istri-istri menjadi anggota PKK

Tangga 2

Orang yang Sedikit Ada (*Atoin Suk Amuit*)

- Memiliki rumah beratap alang-alang atau seng tapi berdinding bebak (sejenis kayu lontar), lantai tanah atau lantai kasar
- Di dalam rumah memiliki kursi plastik, kursi, dan meja dari kayu
- Memiliki tempat tidur dari kayu dan memakai kasur kapok
- Perlengkapan dapur seperti periuk, piring, sendok, termos, kual
- Ada kamar mandi berdinding bebak atau bambu dengan WC cemplung (jongkok)
- Jumlah anggota keluarga 4–5 orang
- Memiliki ternak: babi, ayam, kambing, dan anjing dengan jumlah 1–2 ekor
- Makan, minum cukup dan sehari 3 kali (pagi, siang, malam). Bahan makanan adalah jagung *bose* (jenis masakan dari jagung), nasi, sayur, dan sekali-sekali lauk, tempe, tahu
- Pergi ke pasar 1–2 kali selama sebulan
- Pakaian sederhana dengan jumlah sampai 5 potong. Kalau membeli pakaian dapat mencapai harga Rp50,000–Rp100,000. Tempat belanja di Pasar Mora bagian RB (*rombengan*)
- Kalau sakit mereka berobat ke puskesmas. Dulu menggunakan kartu JPS dan sekarang kartu Askes. Bagi yang belum punya kartu Askes membeli karcis
- Pendidikan: orang tua SD, SMP dan sempat SMA tapi tidak tamat; anak sampai SMA saja
- Pendapatan rata-rata Rp100,000/bulan
- Pekerjaan sebagai PNS, Guru, dan umumnya adalah pendatang
- Lahan mereka rata-rata 0,5–1 ha.
- Di bidang kerohanian/keagamaan (untuk komunitas Kristen Protestan) menjadi jemaat biasa
- Di bidang pemerintahan hanya menjadi masyarakat biasa dan juga menjabat RT

Tangga 1

Miskin (*Atoin A'nuka*)

- Memiliki rumah bulat; semua kegiatan terfokus di dalamnya
- Di dalam rumah tidak mempunyai kursi dan meja. Hanya ada papan duduk
- Hanya memiliki tempat tidur terbuat dari bambu dan beralaskan tikar
- Peralatan makan hanya 1 atau 2 piring saja
- Ada kamar mandi berdinding bambu atau berdinding batu dengan WC yang langsung ke lubang pembuangan
- Jumlah anggota keluarga 5–6 orang
- Memiliki ternak hanya ayam 1–2 ekor saja
- Makan, minum *pas-pasan*, sehari 2 x makan. Umumnya makan jagung. Sekali-sekali baru nasi
- Pakaian hanya 1–2 potong saja dan membelinya hanya di tempat jual *rombengan*/RB (pakaian bekas)
- Kalau sakit mereka berobat ke puskesmas menggunakan kartu JPS, kemudian sekarang kartu Askes bantuan dari pemerintah
- Baik orang tua tidak sekolah sama sekali. Anak-anak hanya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD sudah keluar
- Tidak memiliki tabungan

- Pendapatan rata-rata Rp50,000/bulan
- Pekerjaan hanya sebagai petani. Kalau musim hujan bisa jual hasil kebun seperti sayur, teapi kalau bukan musim hujan tidak ada sesuatu yang dapat dijual
- Lahan mereka hanya kintal (pekarangan) rumah
- Kebun hanya 2–5 are. Ada yang milik sendiri dan ada yang menggarap milik orang lain
- Di bidang kerohanian/keagamaan (untuk komunitas Kristen Protestan) hanya menjadi jemaat biasa
- Di bidang pemerintahan hanya menjadi masyarakat biasa

Desa Korinus

(FGD kelompok perempuan)

Tangga 6

Sangat Kaya

- Rumah atap seng/genteng
- Tembok penuh, lantai keramik
- WC permanen/sehat (keramik)
- Isi rumah: TV, Sofa, VCD, motor, parabola, lemari hias, tempat tidur ukir jati, spons atau *spring bed*, telepon selular/HP, setrika listrik, kamar 6–8
- Penerangan: listrik dan pelita
- Makan 3 kali (nasi, jagung, sayur, telur, daging, ikan, susu)
- Pendidikan kepala keluarga: SD, SMP, SMA; pendidikan anak: SMA, PT, tetapi ada yang tidak tamat
- Tanah 2–10 ha
- Sapi (5–10 ekor), babi (1–5 ekor) tetapi ada yang tidak punya, ayam (5–10 ekor) tetapi ada yang tidak punya
- Barang mas (kalung, anting, cincin, gelang)
- Pekerjaan: petani (tuan tanah), pegawai, guru
- Penghasilan: Rp500.000–Rp1.000.000/bulan (petani), Rp1.000.000–Rp3.000.000/bulan (pegawai)
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Berobat ke rumah sakit, dokter, polindes, puskesmas, atau dukun
- Beli pakaian 1 bulan, 1 pasang

Tangga 5

Kaya

- Rumah atap seng, tembok penuh/ setengah tembok, lantai semen
- WC kloset buatan sendiri, dinding bebak, setengah tembok, atap seng
- Penerangan: listrik, lampu gas, pelita, generator
- Makan 2–3 kali sehari (jagung, nasi, sayur, ubi, pisang, ikan, dan telur)
- Pendidikan kepala keluarga: SD, SMP, SMA (ada yang tidak tamat); pendidikan anak: SD–PT (ada yang tidak tamat)
- Tanah sekitar 1 ha

- Sapi (1–2 ekor), babi (5–10 ekor), ayam (5–10 ekor), anjing (2–4 ekor)
- Barang mas (anting, cincin, kalung, dan gelang)
- Isi rumah: meja, kursi, tempat tidur, sofa, lemari, motor, setrika listrik/arang, TV, tape, radio, pemutar VCD
- Pekerjaan: petani, pegawai, ojek, tukang, guru
- Penghasilan: Rp500.000–Rp1juta/bulan
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Beli pakaian 2–3 bulan, 1 pasang
- Berobat ke dokter, puskesmas, atau dukun

Tangga 4

Cukup/Sedang

- Rumah atap seng, alang-alang, dinding setengah tembok
- WC kloset buatan sendiri, dinding tembok, bebak
- Listrik, lampu gas, generator, pelita
- Makan 3 X atau 2X (jagung, nasi, ubi, pisang, sayur, ikan, daging ayam, dan telur)
- Pendidikan kepala keluarga: SD, SMP, SMA, ada yang tidak tamat, ada yang tidak sekolah; pendidikan anak, SD, SMP, SMA, PT (ada yang tidak tamat)
- Tanah sekitar 1 ha
- Sapi (1–2 ekor), babi (3–5 ekor, orang lain pelihara), ayam (5–15 ekor), kambing (1–2 ekor), anjing (1–4 ekor), kucing (1–2 ekor)
- Barang mas (anting, cincin, kalung, dan gelang tangan)
- Isi rumah: meja, kursi, tempat tidur, lemari, TV, radio, tape, setrika arang atau listrik
- Pekerjaan: petani, tukang, ojek, kepala urusan (kaur) di pemerintahan desa, pegawai, guru
- Penghasilan: Rp150.000–Rp200.000 rupiah/bulan
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Berobat ke polindes, puskesmas, dokter, atau dukun
- Beli pakaian 2–3 bulan, 1 pasang

Tangga 3

Ada Sedikit Tapi Tidak Banyak

- Atap rumah seng, alang-alang, dinding rumah bebak atau bambu
- WC dinding bebak, lantai kasar
- Listrik, lampu gas, atau pelita
- Makan 2 atau, 3 kali sehari (jagung, ubi, pisang, nasi, sayur, ikan, telur, dan daging ayam)
- Pendidikan kepala keluarga: SD, SMP, SMA (ada yang tidak tamat), ada yang tidak sekolah; pendidikan anak: SD, SMP, SMA, PT (ada yang tidak tamat)
- Tanah sekitar 75–100 are
- Sapi (1–2 ekor), babi (1–5 ekor), ayam (2–3 ekor), kambing (1–2 ekor), anjing (1–2 ekor), kucing (1–2 ekor).
- Barang mas (anting, cincin, kalung)
- Isi rumah: meja, kursi, TV, tape, radio, lemari, tempat tidur, setrika arang
- Pekerjaan: petani, kepala dusun, anggota BPD, guru

- Penghasilan: Rp100.000–Rp140.000 rupiah/bulan
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Beli pakaian 2–3 bulan, 1 pasang
- Berobat ke polindes, puskesmas, dokter, dukun

Tangga 2

Ada Sedikit

- Rumah 2 buah, 1 rumah bambu segi empat, 1 rumah bulat, atap alang-alang
- WC lantai semen, dinding bambu
- Lampu pelita, lampu gas, listrik (tarik dari rumah lain)
- Makan 2 kali sehari (nasi, jagung, ubi)
- Pendidikan kepala keluarga: SD, SMP (ada yang tidak tamat); pendidikan anak: SD, SMP, SMA (ada yang tidak tamat), ada yang tidak sekolah
- Tanah sekitar 25–75 are
- Sapi 1–2 ekor, babi 1–5 ekor, ayam 2–5 ekor, anjing 1–5 ekor
- Barang mas (anting, cincin, dan kalung)
- Isi rumah: meja kursi (plastik) 1 set, radio, tape, setrika arang, tempat tidur, lemari
- Pekerjaan: petani, guru, ojek, tukang
- Pendapatan: Rp50.000–Rp75.000/bulan, Rp100.000–Rp150.000/bulan
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Beli pakaian 2–3 bulan, 1 pasang
- Berobat ke polindes, puskesmas Malo atau Mikel, atau dukun

Tangga 1

Sangat Miskin

- Rumah bulat (UMEK BUBU),
- Ada WC (cemplung), dinding pakai batu atau daun
- Makan 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali sehari
- Makanan pokok jagung, ubi, nasi sesekali
- Pendidikan orang tua: sekolah rakyat
- Pendidikan anak, ada yang tidak sekolah, ada yang tamat dan tidak tamat SD
- Tanah sekitar 7–25 are (kintal rumah)
- Babi 1 ekor, ada yang tidak punya; ayam 1–2 ekor
- Tidak ada aset lain
- Pekerjaan: buruh tani, kuli ternak, petani penggarap
- Penghasilan sekitar Rp20.000–Rp25.000/bulan
- Ikut kegiatan sosial
- Ikut kegiatan politik
- Pakai lampu pelita
- Beli pakaian 1 tahun, 1 pasang
- Kalau sakit berobat ke polindes (bides), puskesmas, atau dukun

Desa Lay
(FGD laki-laki)

Tangga 3

Kaya

- Rumah tembok/seng (permanen)
- Punya kendaraan bermotor, truk, *hand tractor*
- Lahan > 2 ha
- Pendidikan anak: sarjana
- Sapi >5 ekor
- Pekerjaan: pegawai swasta/PNS
- Perawatan kesehatan: ke dokter
- Penghasilan > Rp1.000.000/bulan
- Ada sofa, kulkas, lemari, listrik,TV, *tape deck*, dan salon

Tangga 2

Sederhana

- Rumah setengah tembok, setengah bebak, seng
- Punya motor
- Lahan ± 2 ha
- Pendidikan anak ada yang sarjana
- Babi 2 ekor, ayam 6 ekor, kambing 2 ekor, sapi 1• 2 ekor
- Pekerjaan: petani
- Perawatan kesehatan: kadang-kadang ke dokter
- Penghasilan Rp500.000–Rp1.000.000/bln
- Isi rumah: ada sofa, kulkas, lemari, listrik, TV, *tape deck*, dan salon

Tangga 1

Miskin

- Rumah alang-alang
- Lahan < 2 ha
- Pendidikan anak: sampai SMA
- Babi 1 ekor, kambing 1 ekor, ayam 4 ekor
- Pekerjaan: petani
- Perawatan kesehatan: ke bidan desa, menggunakan kartu JPS
- Penghasilan < Rp500.000/bln

Desa Beluta
(FGD Kelompok Perempuan)

Tangga 3

Maloin

[Lumayan]

- Hanya 5 % dari penduduk desa berada di tangga ini

- Biasanya bisa cukup makan, kalau makan jagung sudah dicampur beras
- Rumah sudah setengah tembok
- Bisa punya anak lebih dari dua
- Pendapatan minimal Rp250.000, bisa sampai Rp1.000.000 per bulan
- Memiliki lahan untuk dikerjakan, biasanya tanam sayur
- Memiliki pekerjaan lain selain petani (pedagang, pegawai negeri seperti guru SD)
- Anak dan orang tua bisa sekolah minimal sampai SD
- Bisa punya jabatan: ketua RW, kepala dusun, ketua lingkungan, ketua kelompok masyarakat/ pokmas/ doa
- Bisa memberi sumbangan kematian lebih dari Rp10.000

Tangga 2

Susar

[Susah]

- 12% dari penduduk berada di tangga ini
- Bisa makan. Makanan pokoknya jagung
- Rumah bebak atap seng
- Punya anak dua
- Pendapatan antara Rp75.000 hingga Rp250.000/bulan
- Punya lahan untuk dikerjakan
- Anak-anak dan orang tua sekolah sampai SD (sekalipun mungkin tidak tamat)
- Bisa punya jabatan: tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua RT, kepala dusun
- Bisa memberi sumbangan kematian Rp10.000

Tangga 1

Susar Los

[Susah Sekali]

- Sebanyak 80% penduduk berada di tangga ini
- Sering kekurangan makanan
- Rumah bebak, atap daun
- Pendapatan hanya Rp50.000/bulan
- Tidak punya lahan yang cukup untuk dikerjakan
- Anak-anak bisa sekolah sampai SD, tetapi orang tua tidak sekolah
- Tidak punya jabatan apa-apa
- Tidak bisa menyumbang uang jika ada kematian, hanya menyumbang tenaga

Lampiran 2 Matriks Mobilitas

A. Pengertian

Matriks mobilitas menunjukkan posisi kesejahteraan suatu rumah tangga menurut tangga kesejahteraan, baik pada 2006 maupun sepuluh tahun sebelumnya. Berdasarkan matriks mobilitas inilah dilakukan penghitungan indeks-indeks kesejahteraan (lihat Lampiran 3).

B. Matriks Mobilitas yang Digunakan sebagai Dasar Sampling di Kelima Komunitas

Eki

(FGD kelompok laki-laki)

Sekarang \ 10 thn lalu	I Melarat	II Pas-pas	II Pas	IV Cukup	V Kaya	Jumlah
I Miskin	1	3				4
II Pas-pas		35	7			42
III Cukup		2	10	9	2	23
IV Kaya						
Jumlah	1	40	17	9	2	69

Korinus

(FGD kelompok laki-laki)

Sekarang \ 10 thn lalu	I Miskin Sekali	II Tidak Terlalu Miskin	III Miskin	IV Kaya	V Kaya Sekali	Jumlah
I Miskin Sekali	7	27	9	0	0	43
II Miskin	0	4	18	16	3	41
III Kaya	0	0	0	5	2	7
Jumlah	7	31	27	21	5	91

Malo

(FGD kelompok perempuan)

Sekarang 10 thn lalu	Sekarang				Jumlah
	Miskin	Sedikit Ada	Cukup Ada	Kaya	
Orang Susah	43	103	1		147
Orang yang Sedikit ada		7	44		51
Cukup Ada			4	1	5
Kaya					
Total	43	110	49	1	203

Lay

(FGD kelompok laki-laki)

Sekarang 10 th lalu	Sekarang			Jumlah
	I Miskin	II Sederhana	III Kaya	
I Miskin	58	14	0	72
II Sederhana	9	29	0	38
III Kaya	0	1	4	5
Jumlah	67	44	4	115

Beluta

(FGD kelompok perempuan)

Sekarang 10 thn lalu	Sekarang			Jumlah
	I <i>Susar Los</i> (Miskin sekali)	II <i>Susar</i> (Miskin)	III <i>Maloin</i> (Lumayan)	
I Susar Los (Miskin sekali)	9	7	1	17
II Susar(Miskin)	4	3	10	17
III Maloin (Lumayan)	2	3		5
Jumlah	15	13	11	39

Lampiran 3

Pengertian Indeks-Indeks Kesejahteraan

Berikut adalah pengertian berbagai indeks kesejahteraan yang digunakan sebagai proyeksi laju pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas dalam sepuluh tahun terakhir (1996–2006).

1. Indeks Kesejahteraan

Indeks ini mengukur peningkatan kesejahteraan dalam suatu komunitas, dan dapat menerangkan proporsi rumah tangga yang telah mengalami kenaikan kesejahteraan dalam kurun waktu yang menjadi acuan pengamatan. Menurut FGD kelompok laki-laki, indeks kesejahteraan di tingkat komunitas (dusun) mencapai 0.88. Ini berarti sebanyak 88% rumah tangga di komunitas tersebut telah mengalami kenaikan kesejahteraan. Sementara itu, menurut FGD kelompok perempuan, indeks kesejahteraan hanya sebesar 0.57, yang berarti jumlah rumah tangga di komunitas Punu yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan hanya 57%.

2. Indeks Kesejahteraan Neto

Indeks kesejahteraan neto menunjukkan perbandingan antara proporsi jumlah rumah tangga yang mengalami kenaikan kesejahteraan dengan proporsi jumlah rumah tangga yang mengalami penurunan kesejahteraan. Jika tidak ada rumah tangga yang mengalami penurunan kesejahteraan, maka indeks kesejahteraan neto nilainya sama dengan indeks kesejahteraan. Pada kasus di Desa Korinus, Dusun Punu, FGD kelompok laki-laki berpendapat tidak ada rumah tangga yang mengalami penurunan kesejahteraan, oleh karena itu nilai indeks kesejahteraan neto sama dengan nilai indeks kesejahteraan (0.88). Sebaliknya, FGD kelompok perempuan melihat adanya rumah tangga yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan kesejahteraan, meskipun hanya satu rumah tangga. Oleh karenanya, nilai indeks kesejahteraan netonya lebih rendah dari nilai indeks kesejahteraan (0.56 dibanding 0.57).

3. Indeks Mobilitas

Indeks mobilitas merupakan ukuran untuk melihat dinamika pergerakan mobilitas rumah tangga secara keseluruhan, baik mobilitas naik maupun turun. Pada tabel di atas terlihat indeks mobilitas yang dihasilkan oleh FGD kelompok laki-laki nilainya sama dengan dua nilai indeks sebelumnya (0.88), sedangkan FGD kelompok perempuan menghasilkan indeks mobilitas sebesar 0.58.

4. Indeks Keluar dari Kemiskinan/MOP

Indeks keluar dari kemiskinan merupakan indeks untuk mengukur proporsi rumah tangga yang telah berhasil keluar dari kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir. Menurut FGD kelompok laki-laki dan perempuan, nilai indeks MOP Dusun Punu masing-masing sebesar 0.23 dan 0.03. Angka indeks ini jauh di bawah nilai ketiga indeks sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan meskipun selama sepuluh tahun terakhir kesejahteraan sebagian besar rumah tangga di Dusun Punu mengalami peningkatan,

tetapi jumlah rumah tangga yang benar-benar telah mampu keluar dari kemiskinan hanya berjumlah 23% (versi FGD laki-laki) atau 3% (menurut versi FGD perempuan).

5. Indeks Kesejahteraan Terbagi

Indeks kesejahteraan terbagi adalah indeks untuk membandingkan proporsi perubahan kenaikan kesejahteraan rumah tangga miskin terhadap proporsi perubahan kenaikan kesejahteraan rumah tangga yang tidak miskin. Indeks ini menunjukkan perbedaan pergerakan atau mobilitas secara relatif antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik FGD laki-laki maupun perempuan menghasilkan nilai indeks yang negatif, yakni masing-masing sebesar -0.13 . Ini berarti proporsi atau persentase rumah tangga miskin yang mengalami peningkatan kesejahteraan lebih kecil dibandingkan dengan persentase rumah tangga tidak miskin (kaya) yang mengalami peningkatan kesejahteraan.

Tabel A1. Indeks Kesejahteraan Lima Komunitas

No	Indeks	Eki (Lk) ^a	Lay (Lk)	Beluta (Pr) ^b	Malo (Pr)	Korinus (Pr)
1	Indeks kesejahteraan (<i>prosperity index</i>)	0,3	0,1	0,5	0,7	0,6
2	Indeks kesejahteraan neto (<i>net prosperity index</i>)	0,3	0,03	0,2	0,7	0,6
3	Indeks mobilitas (<i>mobility index</i>)	0,3	0,2	0,7	0,7	0,6
4	Indeks keluar dari kemiskinan (<i>moving out of poverty index</i>)	0,2	0,2	0,3	0,005	0,1
5	Indeks kesejahteraan terbagi (<i>shared poverty index</i>)	-0,3	0,2	0,5	0,7	-0,05

^aLaki-laki

^bPerempuan



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

 +62 21 3193 6336

 +62 21 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute